

DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN

Kasus Kelompok Lansia Di Yogyakarta dan Bali

DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN

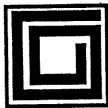
Kasus Kelompok Lansia Di Yogyakarta dan Bali

Oleh :
Suprihadi
Dede Wardiat
Nyayu Fatimah
Rochmawati
Sukri Abdurrahman

Editor:
Suprihadi



LIPI



PT Gading Inti Prima

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan (Kasus Kelompok Rentan Lansia)/Suprihadi, Dede Wardiat, Nyayu Fatimah, Rochmawati, Sukri/Suprihadi (ed.) – Jakarta: 2014.

vi hlm. + 272 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-277-5

1. Lansia

367. 2

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

KATA PENGANTAR

Buku bunga rampai ini disusun atas dorongan adanya usaha untuk melakukan pengembangan dalam penelitian tentang “Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan” dengan mengambil kasus mengenai kelompok Lansia di dua lokasi penelitian di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tabanan, Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan P2KK-LIPI pada tahun anggaran 2014.

Tema dalam buku ini cukup strategis mengingat bahwa pemahaman kewarganegaraan yang berlangsung dewasa ini sedang menghadapi banyak tantangan dengan mencuatnya berbagai peristiwa dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal itu tidak perlu terjadi bila warga masyarakat dapat memahami bagaimana hidup sebagai satu warga dalam negara yang bersifat pluralitas. Pengetahuan mendalam tentang dinamika kewarganegaraan dalam konstelasinya dengan kehidupan keluarga terutama kehidupan kelompok lanjut usia (lansia) yang berkembang dengan cepat karena meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah untuk dapat membuat formulasi kebijakan sosial, pengembangan wilayah dan komunitas perkotaan secara bertahap menghasilkan kualitas kehidupan sosial yang kohesif secara berkelanjutan.

Selama penelitian berlangsung banyak pihak telah memberikan bantuan yang kooperatif sifatnya, sehingga dengan keterbatasan waktu penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Untuk semua itu, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, diantaranya bapak-bapak/ibu-ibu serta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Panti-panti Werdha dan masyarakat di dua lokasi penelitian berlangsung yaitu di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tabanan, Provinsi Bali.

Secara akademis kegiatan ini telah dibahas dalam sebuah seminar baik seminar Rancangan penelitian tanggal 25-27 Februari 2014 maupun seminar akhir hasil penelitian pada tanggal 28-30 Oktober 2014 yang diselenggarakan oleh P2KK-LIPI. Banyak masukan yang konstruktif baik dari para peserta seminar dan terutama dari pembahas Drs. Achmadi Jayaputra, M.Sc. Demikian juga dengan hasil *reviewer* oleh Prof. Dr. Henny Warsilah, DEA, pada akhirnya menjadi bahan masukan bagi perbaikan buku ini. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih. Segala saran dan kritik yang ada tersebut dapat kami gunakan untuk menyempurnakan tulisan ini.

Jakarta, Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd,

Dr. EndangTurmudi, MA

PENGANTAR PENERBIT

Masyarakat perkotaan dinilai sebagai satu basis kekuatan dalam upaya memberikan berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia. Bahkan kehidupan di perkotaan telah menjadi idola bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di perdesaan. Berbagai fasilitas yang ada di kota menjadi daya tarik yang cukup beralasan bila tingkat urbanisasi ke perkotaan sejak tahun 1970-an sampai sekarang meningkat. Hal ini terjadi karena kota dipandang sebagai agen modernisasi dan perubahan, sehingga minat tinggal di daerah perkotaan pun meningkat. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan semakin komplek dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda, dan berbagai lapisan masyarakat antara lain kelompok elit/atas, kelompok menengah dan kelompok bawah. Akibat itu semua daerah perkotaan sudah semakin berkembang dan daerah perkotaan menjadi sarat dengan pergulatan kelompok masyarakat pendatang.

Selanjutnya bagaimana kehadiran kelompok lanjut usia (lansia) yang hidup di tengah-tengah perkotaan, tentu saja menjadi masalah dan perlu mendapatkan solusi dalam kehidupan keluarganya. Dalam usahanya untuk mencukupi kehidupan sosial ekonomi terutama bagi kelompok lansia, perlu mendapat perhatian masyarakat luas khususnya keluarga dan juga peran negara. Secara fisik lanjut usia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, walaupun masih sebatas pangan dan sandang dengan standar minimal. Pada aspek psikologis para lansia umumnya mengaku merasa lebih nyaman dengan hidupnya, tumbuh rasa percaya diri, harga dirinya meningkat karena merasa dibutuhkan keluarga, dan mempunyai posisi tawar sehubungan dengan adanya jaminan sosial. Sementara pada aspek sosial, hubungan dengan anggota keluarga semakin harmonis, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar meningkat walaupun cenderung satu arah. Selanjutnya demi keadilan sosial, peran negara wajib mengadakan akselerasi penjangkauan program hingga kuota

mencapai seluruh lanjut usia yang memenuhi kriteria di Indonesia, mengoptimalkan fungsi pendampingan, dan mensinergikan program tersebut dengan program terkait untuk mengentaskan keluarga lansia yang juga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Buku yang berjudul “Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan: Kasus Kelompok Lansia di Kota Yogyakarta dan Bali” ini dapat mengisi kekurangan referensi tentang aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lanjut usia di Indonesia dalam khasanah ilmiah. Berbagai analisis yang disajikan dalam buku tersebut memiliki aspek strategis yang berkaitan dengan pembangunan sosial, bagaimana mensinergikan hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan lansia baik melalui pembinaan di panti-panti Werdha atau secara mandiri masing-masing keluarga menangani masalah yang dihadapi lansia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan dan penanganan lansia namun tampaknya belum sampai menyentuh secara merata bagi kehidupan lansia khususnya lansia terlantar yang ada di wilayah perkotaan. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam tataran analisis yang disajikan, harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bersamaan dengan terbitnya buku ini, kami dari pihak penerbit mengucapkan terimakasih kepada peneliti P2KK-LIPI: Supriyadi, Dede Wardiat, Nyayu Fatimah, Rochmawati dan Sukri Abdurrachman, yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami berharap kehadiran buku ini bermanfaat adanya.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2014

Penerbit,

PT. Gading Inti Prima

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENGANTAR PENERBIT	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

Oleh: Suprihadi

1. Kelompok Lansia dan Permasalahannya di Perkotaan.....	1
2. Konsep Kewarganegaraan dan Kelompok Lanjut Usia.....	6
3. Sistematika Penulisan	18
Daftar Pustaka	20

BAB II

ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK LANSIA

DI KOTAYOGYAKARTA.....	25
------------------------	----

Oleh: Sukri Abdurrachman

1. Pengantar.....	25
2. Profil Lokasi Penelitian.....	29
3. Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial	34
4. Yogyakarta Kota Lansia.....	40
5. Lansia dalam Dimensi Sosial Kultur dan Agama	44
6. Permasalahan Pendidikan Penduduk Lansia	48
7. Permasalahan Kesehatan Lansia	52
8. Problematik Lansia di Rumah Tangga dan di Panti Wredha	67
9. Realita Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Kebangsaan di Panti Wredha.....	98
10. Penutup	111
Daftar Pustaka	118

BAB III
ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN DINAMIKA
KEWARGANEGARAAN KELOMPOK LANSIA
DI KOTAYOGYAKARTA 123
Oleh: Suprihadi

1. Pengantar.....	123
2. Profil Sosial Ekonomi Kota Yogyakarta.....	125
3. Profil dan Jaringan Sosial Kelompok Lansia.....	129
4. Pemahaman dan Realita Kewarganegaraan.....	140
5. Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan.....	146
6. Penutup.....	151
Daftar Pustaka.....	153

BAB IV
LANSIA DALAM SISTEM SOSIAL
MASYARAKAT BALI 155
Oleh: Dede Wardiat

1. Pengantar.....	155
2. Kosmologi Masyarakat Bali.....	156
3. Sistem Sosial Masyarakat Bali.....	160
4. Negara dalam Sistem Nilai Masyarakat Bali.....	176
5. Penutup.....	193
Daftar Pustaka.....	195

BAB V
PERANAN LANSIA DALAM KELUARGA
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BALI:
STUDI KASUS TABANAN 197
Oleh: Rochmawati

1. Pengantar.....	197
2. Dinamika Daerah Penelitian.....	198
3. Kondisi Lansia Di Bali.....	202
4. Keluarga Merupakan Unit Terkecil Dalam Masyarakat.....	212
5. Hak dan Kewajiban Lansia Sebagai Warga Negara.....	220

6. Penutup	223
Daftar Pustaka	225

BAB VI

PERAN DAN POTENSI LANSIA SEBAGAI WARGA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.....227

Oleh: Nyayu Fatimah

1. Pengantar.....	227
2. Lansia Bali Dalam Perspektif Demografi	231
3. Sosialisasi Makna Pelayanan Terhadap Orang Tua	236
4. Potensi dan Peran Lansia dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	245
5. Peran Adat Terhadap Eksistensi Lansia dalam Masyarakat Bali	251
6. Pemahaman Atas Kehidupan Sebagai Warga Negara Menurut Perspektif Lansia	257
7. Penutup	260
Daftar Pustaka	262

BAB VII

P E N U T U P265

BAB I

PENDAHULUAN

Oleh: Suprihadi

“Membangun bangsa harus dimulai dengan membangun konsep kewarganegaraan yang sejati dan berkualitas. Penelitian yang mendalam tentang gagasan, pemikiran, dan konsep kewarganegaraan yang berkualitas saat ini sangat diperlukan.”

(M. Said Nisar, Komisioner untuk Hak Kewarganegaraan Komnas HAM, 2006: 9).

1. Kelompok Lansia dan Permasalahannya di Perkotaan

Selama dekade Orde Baru, masyarakat perkotaan dinilai sebagai satu basis kekuatan dalam upaya memberikan berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia. Perkotaan menjadi idola bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di perdesaan, berbagai fasilitas yang ada di kota telah menjadi daya tarik sehingga cukup beralasan bila tingkat urbanisasi ke perkotaan sejak tahun 1970-an meningkat. Hal ini terjadi karena kota dipandang sebagai agen modernisasi dan perubahan, sehingga minat tinggal di perkotaan pun meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tujuan utama migrasi adalah wilayah perkotaan (Firman, 1994:8-9). Pada tahun 1970-an perbandingan wilayah yang dituju antara wilayah rural dan urban masih seimbang, tetapi pada dekade tahun 1980-an terjadi perubahan yaitu orientasi ke perkotaan telah mencapai 60%. Daerah perkotaan menjadi sarat dengan pergulatan kelompok masyarakat pendatang (Fatimah (ed.), 2013:1).

Sebagai satu kesatuan masyarakat perkotaan, bangun sosial yang terbentuk bersifat kosmopolitan. Terdapat berbagai struktur sosial dengan bermacam-macam gaya hidup. Di kota tidak semata-mata hanya ruang fisik, tetapi didalamnya juga terdapat dorongan membentuk suatu kepribadian sosial dan mengadakan perubahan,

dengan demikian kota dianggap sebagai sarana untuk perubahan sosial (Weber dalam Nas, 1984:3). Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang melingkupinya, seperti adanya dimensi ruang dan waktu yang berbeda dengan kondisi awal yang dipahaminya. Di kota, nilai-nilai umum yang terbentuk dan menjadi acuan bagi semua warga perkotaan (Fatimah (ed), 2011).

Kota-kota di Indonesia sebagaimana kecenderungan umum di kota-kota dunia termasuk kategori perkotaan dengan heterogenitas penduduk baik dari segi etnis, kelas sosial, status, jenis okupasi dan latar belakang pendidikan. Keragaman itu dapat dilihat sebagai peluang untuk saling belajar dari kultur masing-masing komunitas dan mengadopsinya untuk perbaikan peluang hidup komunitas yang bersangkutan (*ibid*, hlm. 1). Namun demikian, dari aspek pembangunan ekonomi, kebijakan ekonomi di perkotaan menimbulkan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tajam antara warga komunitas di perkotaan. Di tengah ketidak-adilan yang dirasakan oleh warga kota, pemerintah kota setempat tidak banyak berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Kemakmuran dan gemerlap kota-kota hasil dari pembangunan itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kelompok sosial (*ibid*).

Dalam kaitannya dengan perkembangan pembangunan di daerah perkotaan, pembangunan dalam berbagai sektor akan membawa implikasi luas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Salah satu keberhasilan program pembangunan antara lain, program keluarga berencana yakni dapat dilihat dalam menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan kesehatan masyarakat disertai dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk yang berdampak pada peningkatan indeks harapan hidup.

Di samping itu, keberhasilan pembangunan di berbagai sektor telah membawa dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk terutama penduduk lanjut usia (lansia). Data

BPS menunjukkan bahwa penduduk lansia pada tahun 2000 berjumlah 14.439.967 jiwa (7,18%) dan tahun 2010 meningkat menjadi 23.992.553 jiwa (9,77%). Diprediksikan pada tahun 2020 mencapai 28.822.379 jiwa (11,34%). Sementara data lansia terlantar di Indonesia pada tahun 2008 berjumlah 1.644.002 jiwa. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 2.994.330 jiwa dan pada tahun 2010 sebanyak 2.851.606 jiwa. Terdapat lima provinsi paling banyak penduduk lansia adalah: (1) Daerah Istimewa Yogyakarta (12,48%); (2) Jawa Timur (9,36%); (3) Jawa Tengah (9,26%); (4) Bali (8,77%); dan (5) Jawa Barat (7,09%). Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia yang semula 60 tahun menjadi 77 tahun. Peningkatan jumlah lansia berimplikasi terhadap gaya hidup dalam masyarakat, seperti perubahan sistem nilai masyarakat. Pada beberapa kasus, keberadaan lansia sering dianggap beban dalam keluarga, sehingga mereka kurang mendapat perhatian keluarga, masyarakat dan pemerintah, bahkan tidak jarang yang diterlantarkan. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan antisipasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia di Indonesia di masa mendatang.

Melihat pertumbuhan jumlah lansia sebagaimana dideskripsikan di atas, kelompok lansia sebagai salah satu kelompok sosial dalam masyarakat memiliki nilai signifikan untuk memperoleh perlindungan negara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945. Sebagai salah satu bagian kelompok sosial yang ada, kelompok sosial lansia memiliki persoalan sendiri, baik internal maupun eksternal. Masalah Penurunan kondisi fisik dan psikhis, menurunnya penghasilan akibat pensiun, kesepian akibat ditinggal oleh pasangan atau teman seusia, dan lain-lain.

Dalam perspektif politik tubuh yang lahir dari pencitraan media menempatkan kaum lansia menjadi kelompok minoritas yang termarginalkan (Berita Antara, Juli 2010). Dikotomi yang terbangun dengan menempatkan lansia sebagai sesuatu yang jahat (nenek sihir), rapuh, buruk rupa dan menjadi beban masyarakat yang harus disembunyikan atau disingkirkan (*ibid*). Kondisi ini merupakan kontra

dari citra akan kemudaan, produktivitas dan vitalitas sebagai cermin dari kemajuan. Sementara itu, secara langsung maupun tidak, diskriminasi terhadap lansia terus berlangsung, distorsi kebijakan negara (pemerintah) tentang pembatasan usia kerja produktif, pembatasan dalam jaminan asuransi kesehatan secara nyata menunjukkan hal itu. Dengan demikian, secara sosiologis lansia menjadi kelompok minoritas yang termarginalkan. Tindakan yang bersifat isolatif bukan jalan keluar untuk menciptakan kenyamanan hidup bagi mereka.

Secara kultural, pertama kali adalah keluarga yang merupakan unit paling kecil tepat untuk memberikan pelayanan terhadap keluarga orang tuanya yang lanjut usia. Untuk itu peran keluarga perlu dimaksimalkan. Namun di sisi lain, pemerintah harus berperan serta memberikan perlindungan terhadap warganya yang lanjut usia.

Di Indonesia, peraturan Perundang-undang terkait dengan program penanganan lansia tercantum dalam UUD 1945, Pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian, Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usiadan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut usia.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian kesehatan menunjukkan kepeduliannya kepada para lansia melalui program "peduli lansia". Seperti program di Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi penduduk lansia antara lain layanan "*home care*", yaitu pelayanan lansia berbasis keluarga yaitu yang melayani adalah keluarga mereka sendiri. Sedang Kementerian sosial membantu memberikan pendampingan psikologi sosial, perawatan dan ekonomi. Pelayanan lain adalah "*day care*" berupa layanan lansia yang dilakukan oleh institusi panti atau yayasan. Bagi lansia yang tidak dapat beraktifitas mendapat pelayanan berupa program asistensi sosial lansia terlantar sebesar Rp.200.000; per bulan.

Di tengah himpitan struktural dan kultural yang ada sebagaimana dideskripsikan di atas penting untuk diketahui, bagaimana kelompok lansia dapat merealisasikan kewarganegaraannya? Pertanyaan ini akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Dalam konteks demikian itulah, penelitian mengenai dinamika kewarganegaraan kelompok sosial khususnya pada kelompok rentan lansia di perkotaan menjadi sangat penting dan bermanfaat. *Academic enterprise* mengenai isu tersebut dapat menghasilkan pengetahuan mendalam mengenai dinamika isu penting tersebut. Dan, secara praktis bagaimana kelompok lansia dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan sosial sehingga pengembangan wilayah dan komunitas perkotaan secara bertahap menghasilkan kualitas kehidupan sosial yang kohesif secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dideskripsikan di atas, pokok permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian tidak semata-mata menyangkut hak dan kewajiban kelompok lansia semata, tetapi juga menyangkut peran negara dalam melindungi segenap warganya. Di samping itu, juga aspek kultural dari masyarakat yang melingkupi akan dilihat sebagai *support system* di dalam mewujudkan kenyamanan hidup kelompok lansia sebagai warga negara. Secara rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana peta kelompok lansia di tengah konfigurasi kelompok sosial yang ada di perkotaan?
- (2) Bagaimana dinamika kelompok lansia sebagai kelompok minoritas di perkotaan dalam merealisasikan kewarganegaraannya?
- (3) Bagaimana pengaruh kondisi sosial budaya, demografi, politik dan ekonomi yang merupakan faktor kontekstual terhadap kelompok lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya?
- (4) Bagaimana peran negara dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok lansia di perkotaan?

Sementara tujuan dan sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Diperolehnya pengetahuan tentang peta sosial dinamika kelompok lansia di perkotaan.
- (2) Diperolehnya pengetahuan yang mendalam mengenai dinamika kelompok lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya.
- (3) Untuk mengetahui saling pengaruh kondisi sosial budaya, demografi, politik dan ekonomi yang merupakan faktor kontekstual terhadap kelompok rentan lansia yang berkaitandengan tahapan hidupnya dalam merealisasikan kewarganegaraannya.
- (4) Untuk mengetahui peran negara dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan kelompoklansia di perkotaan.

Sasaran akhir kegiatan yang ingin dicapai adalah tersusunnya buku tentang Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Lansia di Perkotaan.

2. Konsep Kewarganegaraan dan Kelompok Lanjut Lansia

Kewarganegaraan yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini, berasal dari kata *civitas* yang digunakan pada masa Roman *civitatus*. Dalam terminologi Perancis, dikenal juga *citoyen* (dari *cite*), kemudian *citeaine* (abad 12) dan *comcitien* (abad 13 M) yang berarti sekumpulan warganegara yang mendapatkan hak-hak terbatas dalam konteks kota (*city*) bukan *town*, karena yang terakhir lebih berarti sekumpulan rumah di perkotaan. Di Inggris, konsep *citizen* juga terkait dengan *city* yang pada abad 16 M disamakan dengan *denizen*. Begitu dekatnya konsep *citizen* dengan pertumbuhan kota sehingga dikatakan bahwa *citizen* merupakan *freeman of a city* (Rousse, Downing, dalam Zaenuddin, (ed). 2010:5).

Konsep kewarganegaraan merupakan resultan dari pergumulan antara absolutisme monarki dengan gerakan masyarakat sipil yang menginginkan kebebasan, persetujuan dan kontrak sosial dalam kehidupan sosial politik. Dalam konsep kewarganegaraan seperti

diproposisikan oleh Marshall (1965),¹ terdapat tiga dimensi hak yang terkandung di dalamnya yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Hak sipil berkaitan dengan isu-isu dasar, seperti kebebasan berbicara dan hak untuk memperoleh akses, dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Hak politik tidak hanya menyangkut hak-hak dalam pemilu, tetapi juga akses yang lebih besar pada lembaga-lembaga politik untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan akses pada sistem pengamanan sosial (*social security system*), di mana tiap warga berhak memperoleh tingkat kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam kondisi menganggur, sakit atau tertimpa kemalangan. Dalam teori Marshall harus ditambahkan hak budaya, yaitu hak yang menyangkut identitas kultural, agama, bahasa dan adat-istiadat. Agama absen dalam analisa Marshall karena pada saat itu dalam masyarakat Inggris relatif homogen dari segi agama (Kymlica dan Norman, 2000).

Salah satu kelompok sosial di perkotaan, adalah kelompok rentan lansia yang dalam hal ini perlu mendapat perhatian dalam realisasi kewarganegaraannya. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia dijelaskan bahwa kelompok rentan merupakan tanggung jawab pemerintah di samping masyarakat. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan dari negara lebih berkenan dengan kekhususannya. Pada pasal tersebut, yang dimaksud kelompok masyarakat yang rentan adalah: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat (Husein, Iskandar, 2003: 8). Sedangkan menurut Human Rights Reference (Willem Van

¹Marshall adalah sosiolog yang memproposisikan bahwa masyarakat kapitalis sebagai '*hyphenated society*' yaitu adanya ketegangan yang tidak terelakkan antara ekonomi kapitalis, negara kesejahteraan dan persyaratan negara modern.

Genugten, 1994:73) disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)* c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*; Pengertian rentan adalah (1) Mudah terkena penyakit dan (2) Peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini, pada lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

Pada sisi lain, lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengajukan tiga aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek biologis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, dan semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini, lebih disebabkan oleh terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem organ. Secara ekonomi, penduduk lansia lebih cenderung dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber daya. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, dan sering dipersepsikan sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Bernice Neugarten dan James C. Chalhoun mengatakan, masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya (Soemarno, 2011:15) . Tetapi bagi orang lain, periode ini adalah permulaan kemunduran. Usia tua dipandang masa kemunduran, dan masa kelemahan manusiawi. Pandangan ini, tidak memperhitungkan bahwa kelompok lansia bukanlah kelompok yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang berusia lanjut yang mampu melihat arti penting usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai masa hidup yang memberi mereka kesempatan-kesempatan untuk tumbuh kembang dan bertekad berbakti. Ada juga lansia yang memandang usia tua dengan sikap-sikap yang berkisar antara kepasrahan yang pasif, dan pemberontakan, penolakan

dan keputusan. Pada akhirnya lansia menjadi kunci dalam diri mereka sendiri, sehingga semakin cepat proses kemerosotan jasmani dan mental mereka sendiri. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui berbagai program penanganan.

Berkaitan dengan kesejahteraan bagi lanjut usia, peran negara sangat dibutuhkan untuk melindunginya. Menurut Spicker (1995); Midgley, Tracy dan Levermore (2000); Thomas (2005), bahwa konsep dan definisi kesejahteraan negara (*welfare state*) sedikitnya mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

- (1) Sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materiel dan non materiel. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupan.
- (2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk: yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service*).
- (3) Sebagai tunjangan sosial. Khususnya di Amerika Serikat (AS) diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan.
- (4) Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penghidupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1, Pasal 1, menyebutkan: Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Pasal-pasal berikutnya menentukan antara lain penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tiap warga negara. Dalam pemenuhan kebutuhan tiap warga negara, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar para lanjut usia, pelakunya adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Pemerintah melakukan pelayanan lanjut usia melalui tiga macam yaitu: (1) Pelayanan berbasis keluarga dengan memotivasi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia; (2) Pelayanan berbasis masyarakat melalui peran serta organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat untuk memberi berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan lanjut usia; (3) Pelayanan berbasis lembaga atau panti sosial, khususnya bagi lanjut usia yang tidak potensial (Inten Soeweno; 1998:232). Termasuk juga upaya pelayanan sosial terhadap lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya. Batasan lansia yang akan diberikan pelayanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab 1, Pasal 1, butir 2,3 dan 4;

- (1) Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) ke atas.
- (2) Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (3) Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Keterkaitan hak dan kewajiban sebagai kelompok lansia adalah bahwa lansia sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 1998, diatur

tentang hak dan kewajiban lanjut usia. Pasal 5 ayat (2) tentang hak lansia adalah sebagai berikut:

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual,
- (2) Pelayanan kesehatan
- (3) Pelayanan kesempatan kerja,
- (4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan,
- (5) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum,
- (6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum,
- (7) Perlindungan sosial,
- (8) Bantuan sosial.

Sedangkan kewajiban lansia, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- (1) Membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Mengamalkan dan mentransformasi ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus.
- (3) Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Menarik bila menyetarakan kelompok lansia ini dilihat kondisinya dengan kelompok sosial lain dalam kancah sosial, politik, dan ekonomi. Tampak bahwa kelompok ini sebagai suatu kelompok yang lemah yang harus diperhatikan oleh negara, karena dianggap rentan dalam pencapaian kewarganegaraannya di perkotaan. Kelompok lansia adalah salah satu kelompok yang berada di perkotaan dan merupakan kelompok minoritas.² Kelompok ini cenderung mempunyai sikap

²Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, golongan atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai

ketidakberdayaan, karena kondisi fisik yang sudah menurun, dan ada kecenderungan tersisihkan perannya oleh kelompok-kelompok lainnya. Oleh karena itu, kelompok minoritas kurang mendapat perhatian. Permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah di Indonesia, adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik dari segi etnis, agama, umur, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya. Diskriminasi berarti menunjukkan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kelahiran atau status lainnya seperti lansia, yang mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang yang setara (Husein, Iskandar, 2003).

Rambu-rambu perlindungan yang akan menguntungkan kaum minoritas mencakup pengakuan dihadapan hukum, adalah persamaan dihadapan badan-badan pengadilan, perlindungan hukum yang sama di samping hak penting seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat. Dalam hubungan ini telah diberlakukan berbagai peraturan perundangan sebagai instrumen hukum dan HAM nasional di samping instrumen HAM Internasional, seperti: (a) Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (Pasal 1); (b) Deklarasi UNESCO tentang Ras dan prasangka Ras 1978 (Pasal 1, 2 dan 3); dan (c) Deklarasi berdasarkan agama dan kepercayaan 1981 (Pasal 2). Sedangkan penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial ekonomi, jenis

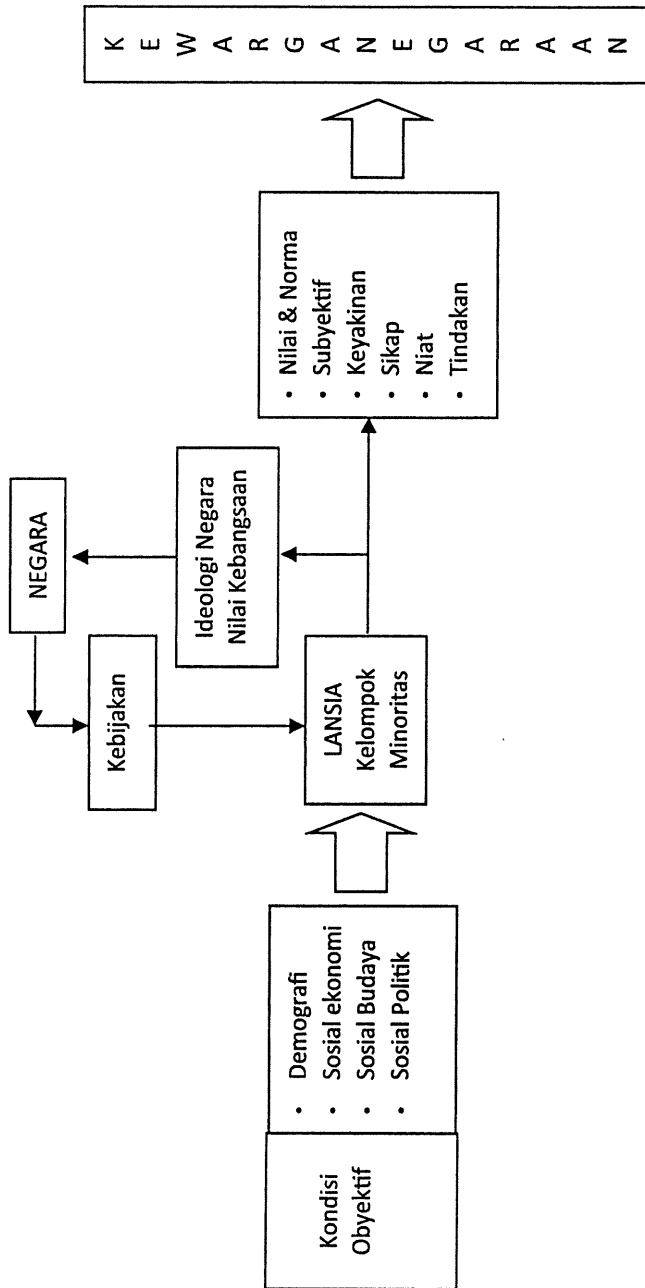
kelompok yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya, dan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnik, agama, golongan, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya, dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya.

kelamin, usia, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Secara normatif, bentuk perlindungan hukum telah diatur melalui instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM terhadap kelompok minoritas, namun dalam implementasi masih perlu untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mencakup pola interaksi antara kelompok minoritas dengan kelompok lainnya untuk dilakukan dengan baik berlandaskan azas keterbukaan dan toleransi tata nilai semua kelompok yang ada di masyarakat.

Pada tulisan ini hanya membatasi lingkup permasalahan pada kelompok lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya di perkotaan. Dalam konteks ini kelompok lansia akan dilihat sebagai salah satu bagian kelompok minoritas di perkotaan. Bila kelompok lansia dilihat kondisinya dengan kelompok sosial lainnya tampak bahwa kelompok ini sebagai suatu kelompok yang lemah yang harus diperhatikan oleh negara karena dianggap rentan dalam pencapaian kewarganegaraannya di perkotaan. Kelompok ini cenderung mempunyai sikap ketidakberdayaan karena kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi yang sudah menurun dan ada kecenderungan tersisihkan perannya oleh kelompok-kelompok lainnya.

Dalam tatanan operasional proses interaksi kelompok lansia dalam merealisasikan kewarganegaraan, bagaimana sikap dan tindakan yang dilindungi nilai-nilai kultural dalam melakukan tindakan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks itu juga akan dilihat pengaruh sosial budaya, demografi, politik dan ekonomi yang merupakan faktor kontekstual dalam merealisasikan kewarganegaraannya.

Bagan Alur pikir



Sehubungan itu dalam pengumpulan data, digunakan metode pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang valid dan relevan. Sebelumpengumpulan data di lapangan terlebih dahulu disusun suatu pedoman wawancara. Penelitian ini merupakan suatu studi induktif tentang kelompok lansia dengan pendekatan bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk melihat persoalan kewarganegaraan secara komprehensif dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Juga dilakukan diskusi terfokus (FGD). Dinamika dan keterkaitan antar konteks struktural dan kultural akan dideskripsikan dan dijelaskan secara kualitatif.

Hasil pengamatan, wawancara mendalam, diskusi terfokus (FGD) akan diolah, dan dianalisis untuk mendeskripsikan kondisi kewarganegaraan serta dinamikanya. Kesemuanya itu disajikan secara deskriptif analitis. Penelitian pada tahap ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta dan Bali. Kedua kota ini dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut termasuk kategori daerah yang tinggi jumlah lansianya, dan tinggi pula tingkat angka harapan hidupnya serta memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Sebagai sebuah studi longitudinal tentang kewarganegaraan dan relevansi modal sosial, penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 2010 menghasilkan beberapa buku. Tahun pertama (2010) penelitian difokuskan pada kelompok etnis di Kota Bandung dan Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dua kota ini menjadi tempat yang subur untuk persemaian kesadaran dan pelaksanaan kewarganegaraan secara dinamis. Akulturasi antar kelompok etnis dalam mengartikulasikan kewarganegaraannya berjalan secara damai. Ada persaingan kepentingan dalam masyarakatnya, baik secara politik dan ekonomi. Tetapi kompetisi ini dapat hidup berdampingan dalam konteks sosial budaya masyarakat Sunda dan Jawa yang relatif toleran, terbuka, sopan santun dan fleksibel dalam pergaulan sehari-hari.

Realisasi hak kewarganegaraan yang sifatnya kultural tampaknya difasilitasi oleh modal sosial struktural yaitu komunitas-komunitas etnis. Hal inilah yang membuat arti penting kehadiran komunitas-komunitas etnis di kedua kota. Namun modal sosial struktural ini lebih difungsikan untuk memperjuangkan hak-hak budaya. Upaya untuk mempromosikan identitas etnis melalui jalur perdagangan, makanan dan souvenir bernuansa etnis juga sudah dilakukan. Ekspresi ini merupakan hal yang positif dari prinsip kewarganegaraan *free and equal*.

Tahun kedua (2011) penelitian difokuskan pada kelompok sosial dari aspek pekerjaannya yang dilakukan di Kota Manado dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok pekerja kesehatan di Kota Manado dan Surabaya, tampaknya mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kelompok pekerja profesional kesehatan (Ikatan Dokter Indonesia/IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PDGI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI) secara profesional aspirasinya tersalurkan dalam hubungan aktifitas yang berdimensi politik. Keterkaitan yang terjadi antara anggota terhadap organisasinya menunjukkan keadaan di mana organisasi dapat menjadi pintu keberhasilan dalam pekerjaan, dan membentuk suatu jaringan sosial dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Realisasi hak kewarganegaraan khususnya yang sifatnya sosial tampaknya difasilitasi oleh modal sosial struktural yaitu kelompok-kelompok sosial pekerja kesehatan. Hal inilah yang membuat arti penting kehadiran kelompok-kelompok sosial pekerja kesehatan di perkotaan. Modal sosial struktural ini lebih difungsikan untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi. Upaya untuk memperjuangkan eksistensi dan hak-hak sosialnya melalui jalur birokrasi politik, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Namun hak politik, kurang mendapat perhatian khusus bagi kelompok ini. Ekspresi ini merupakan hal yang positif dari prinsip kewarganegaraan.

Tahun ketiga (2012) mengkaji dinamika kewarganegaraan di perkotaan dengan fokus pada kelompok kelas sosial berdasarkan status sosialnya. Penelitian di tahun ketiga ini menunjukkan adanya dinamika yang bersifat vertikal terhadap kesadaran dan pelaksanaan kewarganegaraan dari kelompok kelas sosial yang ada di dua daerah penelitian. Melalui dimensi sejarah yang berbeda, masing-masing kelompok sosial yang terbentuk selalu mencari justifikasi atas eksistensinya, dan ada kalanya dipolitisasi untuk kepentingan individu. Keadaan ini cenderung memunculkan kelompok sosial yang tereksklusikan oleh minimnya aset sosial yang dimilikinya. Keadaan sekarang pun akulturasi antar kelompok sosial yang ada dalam mengartikulasikan kewarganegaraannya masih berjalan secara fluktuatif.

Tahun keempat (2013) kajian dinamika kewarganegaraan kelompok sosial perkotaan difokuskan pada kelompok anak jalanan, sebagai kaum marginal yang hidup di perkotaan. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok anak jalanan masih dipandang sebagai obyek bukan sebagai subyek anak bangsa yang seharusnya mendapat perlindungan pengamanan, pembinaan dan pelayanan sebagaimana anak bangsa lainnya. Nilai-nilai komunal yang ada di lingkungannya menumbuhkan nilai solidaritas kelompok atas dasar teritorial. Batasan teritorial terkait dengan wilayah aktifitas mereka. Pemahaman tentang simbol-simbol negara tampaknya terkait dengan tingkat pendidikan pada umumnya. Namun, dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara tingkat pendidikan tidak menjadi ukuran, karena secara naratif anak jalanan yang tidak berpendidikan pun dapat membedakannya.

Substansi berbagai produk peraturan daerah dan kebijakan lokal yang telah dikeluarkan, relatif berpihak pada anak jalanan. Namun, dalam tahap implementasinya bagaikan “tulisan indah tak berujung”. Pada hal wujud negara yang paling konkrit dalam tatanan masyarakat adalah terlaksananya berbagai kebijakan yang ditetapkan. Tanpa itu negara kehilangan makna bagi segenap warganya. Kondisi ini membawa implikasi luas atas pemahaman negara di kalangan anak jalanan. Bagi anak jalanan, negara tidaklah dipahami sebagai sebuah

organigram untuk mewujudkan landasan konstitusionalnya. Perilaku aparat dengan segala atributnya dianggap sebagai personifikasi negara. *Maindset* aparat yang memandang anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban, ketenteraman dan keindahan kota mendorong tindakan aparat untuk bersikap otoriter dan represif. Dalam hal ini secara diametral negara dianggap berada di luar kelompok anak jalanan.

Tahun kelima (2014), penelitian akan mengkaji dinamika kewarganegaraan kelompok sosial dengan fokus pada kelompok lansia di perkotaan. Tahun kelima yang merupakan tahun terakhir ini dari satu rangkaian kajian tentang kewarganegaraan kelompok sosial di perkotaan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kewarganegaraan adalah sekumpulan warga negara yang mendapat hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan aktifitas hidup sehari-hari dan ada kaitannya dengan peran dan kebijakan pemerintah.
- Kelompok lansia adalah kelompok penduduk yang berusia di atas 60 tahun, yang biasanya disertai dengan penurunan fungsi organ fisik, dan aktifitas dari biasanya.
- Kelompok Minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dan jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya, terutama dilihat dari segi golongan umur.
- Demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan dalam melakukan aktifitas dalam kelompok sesuai yang diinginkan.

3. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tulisan ini dibagi dalam tujuh bagian, uraian pada Bab 1 lebih terfokus pada pembahasan secara makro yaitu tentang perkembangan kehidupan penduduk lanjut usia dan permasalahannya. Dalam konteks ini dibahas realisasi peran negara terhadap perlindungan lansia secara normatif dalam mewujudkan kohesi dan stabilitas sosial. Pada bagian ini juga dibahas analisis tentang konsep kewarganegaraan dan definisi operasionalnya. Kerangka konsep tersebut dijadikan landasan perspektif untuk melihat dinamika kewarganegaraan yang

terjadi bagi kehidupan lanjut usia khususnya kasus di Yogyakarta dan Bali.

Pembahasan pada Bab II difokuskan pada dinamika kewarganegaraan kelompok lansia dalam perspektif sosial budaya di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini dibahas tentang profil lokasi penelitian, masalah sosial dan kesejahteraan sosial, Yogyakarta sebagai kota lansia, lansia dalam dimensi sosial kultur dan agama. Pembahasan dinamika sosial dalam bab ini juga menguraikan tentang permasalahan pendidikan penduduk lansia, permasalahan kesehatan lansia dan problematik lansia di rumah tinggal dan di Panti Werdha. Selanjutnya yang terakhir diarahkan pembahasan tentang realita kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan di Panti Werdha.

Pembahasan pada Bab III difokuskan pada dinamika kewarganegaraan Kelompok lansia dalam perspektif sosial ekonomi di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini dibahas tentang profil sosial ekonomi Kota Yogyakarta, profil kelompok lansia dan jaringan sosial yang dimilikinya serta pemahaman tentang kewarganegaraan dari kelompok lansia tersebut. Pembahasan tentang dinamika sosial ekonomi pada bagian ini lebih diarahkan juga pada faktor pendorong dan penghambat dari kelompok lansia yang dikategorisasikan baik yang masih potensial maupun terlantar atau yang tinggal bersama keluarga dan tinggal di Panti Jompo atau Panti Werdha.

Pembahasan pada Bab IV difokuskan pada kehidupan lansia dalam sistem sosial masyarakat di Bali. Dalam konteks itu dibahas tentang kosmologi masyarakat Bali, sistem sosial masyarakat Bali yang dalam hal ini akan diuraikan tentang lansia dalam keluarga masyarakat di Bali dan implikasi *purusa* terhadap perawatan lansia. Selanjutnya dalam bab ini akan dibahas pula negara dalam sistem nilai masyarakat Bali, uraian tentang peran negara ini mengupas pada satu sisi negara sebagai negara moderen dan sisi lainnya peran negara secara tradisional atau yang berbasis kehidupan masyarakat lokal di Bali.

Pembahasan pada Bab V difokuskan pada peranan lansia dalam keluarga di lingkungan masyarakat Bali. Dalam konteks itu

dibahas tentang kondisi dan dinamika daerah penelitian, kondisi kehidupan lansia di Bali akan menguraikan tentang lansia yang tinggal di Panti Jompo atau Panti Werdha dan lansia yang tinggal di rumah bersama keluarganya disertai alasan-alasan mengapa mereka tinggal di panti dan di rumah. Selanjutnya dalam bab ini dibahas tentang keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menguraikan tentang posisi lansia dalam keluarga dan kontribusi lansia dalam kehidupan keluarga. Pembahasan tentang dinamika sosial bagian ini juga diarahkan kepada hak dan kewajiban lansia sebagai warga negara.

Pembahasan pada Bab VI difokuskan pada peran dan potensi lansia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Dalam konteks itu dibahas tentang profil lansia, potensi dan peran lansia dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam hal ini akan diuraikan mengenai potensi secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas pula tentang peran adat terhadap eksistensi lansia dalam masyarakat Bali dan terakhir pembahasan diarahkan tentang pemahaman kewarganegaraan menurut perspektif lansia.

Akhirnya pada Bab VII mencoba memberikan uraian yang disusun berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yakni beberapa hal yang penting digaribawahi menyangkut temuan empiris penelitian di dua kota yakni Yogyakarta dan Bali maupun implikasi yang perlu diperhatikan agar pengembangan kewarganegaraan dapat berjalan secara berkualitas.

Daftar Pustaka

- Coleman, James. 1988. *"Social Capital in the Creation of Human Capital"*, *American Journal of Sociology*, Vol. 94 (supplement), pp. S95-S120.
- Dieter Evers, Hans. 1995. *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*". Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

- Edwards, Bod dan Michael Foley. 1997. "Social Capital and the Political Economy of Our Discontent," *American Behavioral Scientist*, Vol. 40, No. 5.
- Edwards, Bob dan Michael Foley. 1998. "Social Capital and Civil Society Beyond Putnam," *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).
- Fatimah, Nyayu (ed.), 2011. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan, Kasus Kelompok Pekerja Profesional di Bidang Kesehatan*, Jakarta: LIPI Press.
- (ed.). 2013. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan, Kasus Kelompok Anak Jalanan di Yogyakarta dan Bandung*. Jakarta: LIPI Press.
- Firman, Tommy. 1994. Migrasi Antar Provinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia, dalam *Majalah Prisma* No. 7, 1994, LP3ES, Jakarta.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Iskandar, Husein. 2003. *Perlindungan Kelompok Rentan Dalam Perpektif Hak asasi Manusia*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Khrisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader. 1999. "Social Capital Assessment Tool". (Makalah pada Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni).
- Khrisna, Anirudh, dan Norman Uphoff. 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*, (Working Paper No. 13, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Kukathas, B. 1992. "Are They any Cultural Right?" *Political Theory*, 20:105-139.

- Kymlica, W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlica, W dan Norman, W. (eds). 2000. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Marshall, T.H. 1963. *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann Educational Books.
- , 1965. *Social Policy in the Twentieth Century*. London: Hutchinson.
- Nas, P.J.M. 1984. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Nasikoen, 1989, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali.
- Pantoja, Enrique, 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Parker, SR, Brown, RK, 1990. *Sosiologi Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Portes, Alejandro, 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology," *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 1-24.
- Putnam, Robert, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rachmad, Sarwito, 2009. *Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Tingkat Depresi pada Lanjut Usia di Desa Pabelan Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura II*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Robison, Lindon J., dan Marcelo Siles, 2000. *Social Capital: Sympathy, Socio Emotional Goods, and Institutions* (Staff Paper No. 00-45, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, December).

- Sen, Amartya. 2000. "Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny" (Social Development Papers No. 1, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank).
- Sasson, A.S. 1983. 'Civil Society, dalam T. Bottmore, *et.al.*, *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekamto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemarno, Setyo, dkk, 2011. Evaluasi Program Jaminan Sosial Lanjut Usia, Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI).
- Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, 1999. *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta.
- Tonnies, Ferdinand. 1974. *Community and Association (trans)*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Turner, Bryan. S. 1990. "An Outline of a Theory of Citizenship". *Sociology*, Vol. 24: 3, hlm. 89-217.
- Uphoff, Norman, 2000. "*Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation*" (Makalah pada Staff Seminar, Mansholt Institute, Wageningen, 13 September).
- Willem van Genugten J.M (ed.). 1994. *Human Rights Reference*. The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs.
- Woolcock, Michael. 1998. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", *Theory and Society*, Vol. 27, No. 2, pp. 151-208.
- Zaenuddin, Dundin (ed.). 2010, *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Bandung dan Semarang*, Jakarta: LIPI Press.

BAB II

ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN DINAMIKA KEWARGANEGARAN KELOMPOK LANSIA DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh Sukri Abdurrachman

1. Pengantar

Keberhasilan pembangunan berdampak terhadap meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dan jumlah penduduk lanjut usiadi Indonesia. UHH penduduk Indonesia pada tahun 2014 adalah 70,8 tahun meningkatkan dibandingkan pada tahun 2012 usia harapan penduduk Indonesia 70,6 tahun (Kompas, 25 Juli 2014). Begitu pula jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan penduduk lansia di Indonesia berjumlah 18,04 juta orang (7,59%) meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan hasil Sensus Penduduk 1971 berjumlah 5,31 juta orang (4,48%). Penduduk lansia perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk lansia laki-laki. Dari 18,04 juta orang lansia, penduduk lansia perempuan sebanyak 9,75 juta orang dan penduduk lansia laki-laki sebanyak 8,29 juta orang. Sebarannya jauh lebih banyak di daerah perdesaan (10,36 juta orang) dibandingkan di daerah perkotaan (7,69 juta orang) (BPS, 2010:21). Jumlah lansia terlantar di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 2.851.606 orang (*ibid*).

Tabel 1
Perkembangan Penduduk Lansia di Indonesia
Hasil SensusPenduduk Tahun 1971 - 2010

No. Urut	Tahun Sensus Penduduk	Jumlah Penduduk Lansia (orang juta)
1	1971	5,31 juta
2	1980	8,00 juta

No. Urut	Tahun Sensus Penduduk	Jumlah Penduduk Lansia (orang juta)
3	1990	11,28 juta
4	2000	14,44 juta
5	2010	18,04 juta

Sumber Data: Penduduk Lansia di Indonesia 2010, Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS, hlm. 22.

Penduduk lansia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Lansia muda (60–69 tahun) sebanyak 10,75 juta; (2) Lansia menengah (70-79 tahun) 5,43 juta dan (3) Lansia tua (80 tahun ke atas) sebanyak 1,86 juta. Persentase penduduk lansia Indonesia sebesar 7,59% menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging structured population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh persen (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 20).

Meningkatnya jumlah penduduk lansia dan makin panjangnya usia harapan hidup penduduk Indonesia di abad millennium ini merupakan tantangan persoalan yang harus dijawab pemecahannya oleh pemerintah maupun masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang dalam resolusi PBB No. 45/206 Tahun 1991. Namun, Pemerintah Indonesia menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei.³

Dengan ditetapkan Hari Lansia Nasional, pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia. Paling tidak penduduk lansia ditempatkan sebagai sasaran pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan

³Ditetapkannya hari lansia tanggal 29 Mei adalah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat anggota BPUPKI paling tua/lansia yang memimpin sidang BPUPKI dengan kearifannya mencetuskan perlunya dasar filosofis bagi Negara Indonesia.

keberlangsungan hidupnya. Lansia memiliki pengalaman, keahlian, kearifan dan memiliki potensi untuk dikembangkan dan diberi kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Bagaimana para lansia dapat mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan secara mandiri di hari tuanya dan tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan juga bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penuaan penduduk terutama dalam struktur demografis.

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan, salah satunya adalah beban ketergantungan penduduk lansia. Rasio ketergantungan penduduk lansia (*old dependency ratio/ODR*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk lansia pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini, tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk lansia. Pada tahun 2010 secara nasional, rasio ketergantungan penduduk lansia (ODR) adalah sebesar 11,95. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-59 tahun), harus menanggung sekitar 11-12 orang penduduk lansia. Angka tersebut akan semakin meningkat, seiring dengan tingginya angka rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia. Rasio ketergantungan penduduk lansia di perdesaan (14,20) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (9,85). Provinsi yang memiliki rasio ketergantungan penduduk lansia tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 19,92 yang diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,32, dan Jawa Timur sebesar 15,99. Sedangkan provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan penduduk lansia terendah adalah Papua sebesar 3,08, Papua Barat sebesar 4,93 dan Kepulauan Riau sebesar 5,02 (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 23-24).

Secara keseluruhan penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 8,2% dan diperkirakan meningkat 8,7% pada tahun

2015 dan diprediksi akan mencapai 9,7% pada tahun 2019. Mayoritas penduduk Indonesia masih produktif. Kondisi ini dianggap sebagai bonus demografi. Betapa tidak, Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China saat ini sudah mengalami masalah penuaan (*aging*) pada mayoritas penduduknya. Sedangkan Indonesia, baru akan mengalami masalah serupa pada tahun 2020. Itu pun dengan tingkat yang masih rendah hanya 10%. Hal ini harus diantisipasi dari sekarang, jangan sampai lansia ini masuk Panti Jompo. Justru kita akan merasa bonus kedua demografi kalau lansia itu masih produktif dan berkontribusi kepada perekonomian negara. Bonus demografi sudah dinikmati Indonesia sejak tahun 2013 dengan ratio ketergantungan 40,3%. Artinya setiap 100 pekerja menanggung beban 49,3% penduduk usia tidak produktif.⁴

Sugiri Syarif, mengemukakan:

“Perubahan struktur penduduk lansia tak dipahami pemerintah pusat dan daerah. Perhatian masih terfokus pada layanan untuk penduduk yang produktif. Di Jakarta, ketidakpedulian pemerintah ditunjukkan dengan tidak ramahnya fasilitas umum terhadap keterbatasan lansia, misalnya curamnya tangga bus transjakarta, angkutan umum menaikturunkan penumpang secara cepat di sembarang tempat, dan tidak adanya akses bagi pengguna kursi roda. Peningkatan jumlah lansia ini berdampak luas, mulai dari politik, ekonomi hingga sosial budaya. Begitu pula, aspirasi politik lansia akan semakin menentukan pada proses demokrasi. Produk-produk untuk lansia akan makin banyak di produksi oleh industri. Hampir setiap keluarga akan memiliki lansia. Dari aspek sebaran, penduduk lansia lebih banyak di pedesaan. Ini membahayakan program ketahanan pangan karena sektor pertanian di dominasi lansia yang tenaganya jauh berkurang”.⁵

⁴Idris Rusadi Putra, Reporter merdeka.com mengutip Armida Alisjahbana, Kepala BAPPENAS, <http://www.merdeka.com>, 7 Februari 2014, diakses 18 Februari 2014.

⁵Sugiri Syarif (mantan Kepala BKKBN), <http://health.kompas.com>, 3 Februari 2012, diakses 31 Desember 2013.

Meningkatnya jumlah lansia juga berimplikasi terhadap pola hidup masyarakat seperti perubahan sistem nilai masyarakat. Dalam beberapa kasus keberadaan lansia sering dianggap beban dalam keluarga, sehingga mereka kurang mendapat perhatian keluarga, masyarakat dan pemerintah, bahkan tidak jarang yang diterlantarkan. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan antisipasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia di Indonesia pada masa mendatang.

Untuk memperoleh gambaran yang mendalam permasalahan aspek sosial budaya dan dinamika kewarganegaraan kelompok lansia di perkotaan, penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Sebagaimana diketahui terdapat 5 (lima) provinsi paling banyak penduduk lansia, yaitu: (1) Daerah Istimewa Yogyakarta (12,48%); (2) Jawa Timur (9,36%); (3) Jawa Tengah (9,26%); (4) Bali (8,77%); dan (5) Jawa Barat (7,09%). Di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah lansia terlantar pada tahun 2010 sebanyak 29.742 jiwa.⁶

2. Profil Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta adalah Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini didirikan pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Bekas Hutan Bering, kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code suatu lokasi strategis dari segi pertahanan keamanan. Pemerintah Kotamadya Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 7 Juni 1947 yang saat berdirinya disebut Kota Praja. Pada masa penjajahan Belanda, Kota Yogyakarta belum pernah menjadi kota otonom atau memiliki pemerintahan tersendiri. Kota Praja Yogyakarta ditetapkan dengan Undang-undang No. 17/1947 tanggal 7 Juni 1947. Kotamadya Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan karena bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan dan pada saat perjuangan

⁶<http://adjhis.wordpress.com>, 21 Januari 2013, diakses 27 Januari 2014.

nasional, ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 (BPS Kota Yogyakarta, 2013: XV).

Luas wilayah Kota Yogyakarta 32,50 km² yang mencakup 14 kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT. Secara demografi, perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2012 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2007 hingga 2010 terjadi penurunan 0,27%–0,28%. Namun, dari tahun 2011 hingga akhir 2012 terjadi peningkatan 0,50%–0,89%. Tahun 2007 penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 391.821 jiwa. Tahun 2008 menjadi 390.783 jiwa atau menurun 1.038 jiwa (0,27%). Tahun 2009 menjadi 389.685 jiwa atau menurun 1.098 jiwa (0,28%). Tahun 2010 menjadi 388.627 jiwa atau menurun 1.058 jiwa (0,27%). Pada Tahun 2011 meningkat menjadi 390.553 jiwa atau bertambah 1.926 jiwa (0,50%). Dan tahun 2012 meningkat menjadi 394.012 jiwa atau bertambah 3.459 jiwa (0,89%) (BPS, 2013:68).

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 12.123 jiwa per km². Penduduk yang paling padat di Kecamatan Ngampilan, yaitu sebesar 20.002 jiwa per km² dan yang paling jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo, yakni 9.708 jiwa per km² (BPS Kota Yogyakarta, 2013:44). Menurut jenis kelamin, penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2012 lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Penduduk perempuan berjumlah 202.567 jiwa (51,41%) dan laki-laki 191.445 jiwa (48,59%) (BPS Kota Yogyakarta 2013, *ibid*, hlm. 58).

Keadaan penduduk menurut kelompok umur di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 didominasi usia produktif (15–59 tahun), yakni sebesar 278.442 orang (70,67%). Sisanya 78.228 (19,85%) kelompok umur di bawah 15 tahun, dan 37.342 orang (9,48%) kelompok umur lansia atau umur 60 tahun ke atas (lihat tabel 2). Menurut agama, penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mayoritas memeluk agama Islam, yaitu 336.339 orang (80,74%). Disusul Agama Katolik 46.195 orang (11,09%); Kristen 31.193

orang (7,49%); Budha 2.024 orang (0,49%); Hindu 782 orang (0,19%), dan lainnya 45 orang (0,01%). Adapun sarana peribadatan yang tersedia pada tahun 2012 adalah terdiri dari: 487 Mesjid; 468 Musholla; 7 gereja Katolik; 41 gereja Kristen; 6 Wihara; 1 *Pura*; 2 Klenteng (BPS Kota Yogyakarta 2013, *ibid*, hlm. 181-182).

Tabel 2
Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2012

No. Urut.	Kelompok Umur	Jumlah	
		F	%
1	0 - 4 tahun	28.522 orang	(7,24)
2	5 - 9 tahun	24.369 orang	(6,18)
3	10 - 14 tahun	25.337 orang	(6,43)
4	15 - 19 tahun	35.268 orang	(8,95)
5	20 - 24 tahun	46.325 orang	(11,76)
6	25 - 29 tahun	41.493 orang	(10,53)
7	30 - 34 tahun	32.303 orang	(8,20)
8	35 - 39 tahun	27.353 orang	(6,94)
9	40 - 44 tahun	27.287 orang	(6,93)
10	45 - 49 tahun	25.929 orang	(6,58)
11	50 - 54 tahun	23.429 orang	(5,95)
12	55 - 59 tahun	19.055 orang	(4,84)
13	60 - 64 tahun	12.625 orang	(3,20)
14	65 - 69 tahun	9.058 orang	(2,30)
15	70 - 74 tahun	6.904 orang	(1,75)
16	75 tahun ke atas	8.755 orang	(2,22)
Total		394.012 orang	(100,00)

Sumber Data: Diolah dari BPS, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013, Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2013, hlm. 58

Di bidang pendidikan, Kota Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan terkemuka di Tanah Air, bahkan dijuluki sebagai “Kota Pelajar”. Berbagai sarana dan prasarana pendidikan sejak dari pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi tersedia di Kota Yogyakarta. Jumlah sarana pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 (lihat Tabel 3). Di Kota Yogyakarta juga terdapat 5 buah SLB Swasta dan Program Keaksaraan Fungsional (KF). Peserta

Program Keaksaraan Fungsional sejak tahun 2009 hingga 2012 telah diikuti 750 peserta.

Tabel 3
Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta
di Kota Yogyakarta tahun 2012

No. Urut.	Kategori Jenjang Pendidikan	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Total
1	Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfa	-	217	217
2	SD	92	74	166
3	Madrasah Ibtidaiyah	1	1	2
4	SMP	16	43	59
5	Madrasah Tsanawiyah	1	6	7
6	SMA	11	36	47
7	Madrasah Aliyah	2	4	6
8	SMK	8	25	33
9	Perguruan Tinggi (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik)	-	67	67

Sumber Data: Diolah dari data BPS, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013, Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2013, hlm. 93 - 148.

Dukungan sarana pendidikan yang cukup baik ini, tampaknya mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta, penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebagian besar (58,44%) berpendidikan tamat SLTA ke atas dan 41,56% berpendidikan tamat SLTP/ sederajat ke bawah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan SLTA ke atas sebanyak 61,79% dan yang berpendidikan SLTP ke bawah sebanyak 38,21%. Sebaliknya penduduk perempuan yang menamatkan SLTA ke atas sebanyak 55,45% dan yang berpendidikan SLTP ke bawah 44,45% (lihat Tabel 4).

Tabel 4

Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditatamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2011

No. Urut.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
1	Tidak/Belum Tamat SD	9,73	12,70	11,30
2	SD/MI/Sederajat	12,04	16,23	14,26
3	SLTP/MTs/ sederajat	16,44	15,62	16,00
4	SLTA/Sederajat	42,42	35,68	38,86
5	Diploma I/II	0,53	1,53	1,06
6	Akademi/D-III	5,22	4,84	5,02
7	S1/D-IV/S2/S3	13,62	13,40	13,50
Total		100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013, Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2013, hlm. 62.

Di bidang kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah 11 rumah sakit, 18 Puskesmas, 14 Puskesmas Keliling, 11 Puskesmas Pembantu, 9 Rumah bersalin, 56 Klinik/Balai Kesehatan, 119 dokter praktik (81 dokter umum dan 38 dokter gigi), 126 apotik dan 29 toko obat (BPS, 2013, *ibid*, hlm. 152 dan 159). Sementara jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2012 adalah terdiri dari Tenaga Medis, yakni: 931 orang, Dokter; 3.670 orang Perawat; 299 orang Bidan; 639 orang Farmasi. Tenaga Non Medis, yakni: 94 orang Ahli gizi; 213 orang Teknisi Medis; 28 orang Sanitasi; 20 orang Kesehatan Masyarakat (BPS, 2013, *ibid*, hlm. 152-154)

Terdapat 10 jenis penyakit yang banyak di derita masyarakat Kota Yogyakarta pada tahun 2012, yaitu: (1) Infeksi akut lain pada saluran pernapasan atas sebanyak 62.783 kasus; (2) Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas sebanyak 34.199 kasus; (3) Penyakit pada sistem otot & jaringan pengikat sebanyak 32.341 kasus; (4) Penyakit pulpa dan jaringan periapikat sebanyak 15.964 kasus; (5) Diare (termasuk kolera) sebanyak 10.696 kasus; (6) Penyakit kulit infeksi sebanyak 10.229 kasus; (7) Penyakit tekanan

darah tinggi sebanyak 8.117 kasus; (8) Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah sebanyak 7.145 kasus; (9) Penyakit kulit alergi sebanyak 5.981 kasus; (10) Penyakit mata sebanyak 5.741 kasus. Selain itu, terdapat 64 kasus HIV/AIDS dan 359 kasus demam berdarah (BPS Kota Yogyakarta, 2013, *ibid*, hlm. 85 dan 169).

3. Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Berbagai persoalan yang sering dihadapi lansia seperti: penurunan kondisi fisik dan psikis, menurunnya penghasilan atau kehilangan pekerjaan, kesepian akibat ditinggalkan oleh pasangan atau keluarga dan teman seusia, dan lain-lain.

Menurut Edi Suharto,⁷ mengemukakan:

“Masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial sebagai dua konsep yang identik dan dapat dipertukarkan (lihat misalnya Chambers, 2000). Ini persis seperti istilah “kebijakan sosial” (*social policy*) yang senantiasa dirujuk dengan “kebijakan kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) (lihat, Huttman, 1982; Gilbert dan Specht, 1986; Spicker, 1995, Hill, 1996). Dalam konteks ke Indonesia, istilah “masalah sosial” dan “masalah kesejahteraan sosial” tampaknya (atau terpaksa) perlu sedikit dibedakan karena dua alasan: Pertama, dalam ranah pembangunan di Tanah Air dikenal istilah pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Masalah pembangunan sosial atau kesejahteraan sosial adalah isu yang senantiasa hangat dan belum terpecahkan. Kedua, dalam benak publik, istilah kesejahteraan sosial seringkali hanya diartikan sebagai ‘kondisi kehidupan’ (*well-being*) dan sangat jarang yang mengartikan sebagai ‘arena’ atau ‘aktivitas’ pekerjaan sosial. Karenanya, pembangunan kesejahteraan sosial masih sering dianggap sebagai ‘kegiatan coca-cola’, yaitu kegiatan

⁷Edi Suharto, Ph.D., *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu (Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trend and Issues*, <http://www.policy.hu>, diakses 12 Februari 2014.

apa saja yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Masalah sosial dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, disabilitas/difabel, anak terlantar, lansia terlantar, dan rumah tidak layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sejalan dengan ide tersebut, maka respon terhadap masalah masalah sosial juga dapat dibedakan, meskipun sangat bersinggungan. Penanganan masalah sosial dilakukan melalui strategi pembangunan sosial. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya lebih difokuskan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial”.

Di Tanah Air, masalah utama yang masih dihadapi adalah kemiskinan dengan berbagai wajah serta keturunannya. Dari data yang tersedia secara nasional, sedikitnya ada empat masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan masalah kemiskinan (*poverty*), yaitu kefakirmiskinan, disabilitas/difabel, keterlantaran, dan ketidaklayakan hunian. Keterlantaran mencakup dua kategori, yaitu anak terlantar dan lansia terlantar. Dalam kategori data lansia terlantar adalah prosentase ‘lansia terlantar’ dan ‘lansia rawan terlantar’ terhadap jumlah lansia di Indonesia.

Menurut Kementerian Sosial/Dinas Sosial “Permasalahan sosial mempunyai arti kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Ini berarti selama dalam masyarakat terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi maka permasalahan sosial akan selalu ada. Terjadinya permasalahan sosial diakibatkan munculnya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita atau kenyataan yang ada” (Dinas Sosial DIY, 2013:1).

Munculnya permasalahan sosial, menurut Pete and Stark (Dinas Sosial DIY, *loc.cit*). dilatarbelakangi tiga hal, yaitu: (1) Adanya

konflik dan kesenjangan; (2) Perilaku menyimpang; dan (3) Adanya perkembangan manusia. Permasalahan sosial itu dapat menimpa semua orang, baik mereka dalam suatu kelompok, masyarakat maupun individu. Kelompok, masyarakat ataupun individu yang mengalami permasalahan sosial itu disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 08/2012, PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat kesejahteraan sosial.

Tingginya PMKS di Indonesia, tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah. Perlu upaya terintegrasi dan terorganisasi untuk menangani permasalahan sosial dengan menekan jumlah PMKS maupun sosialisasi serta tindakan preventif bagi masyarakat pada umumnya. Upaya-upaya tersebut terangkum dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat. Masyarakat dapat bertindak sebagai pelaksana utama, sedangkan pemerintah menetapkan regulasi atau aturan serta mekanisme untuk penanganan PMSK. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD dan UUD 1945 yang mananegara harus bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal itu dipertegas lagi dengan dikeluarkan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah memiliki mandat yang lebih kuat daripada masyarakat maupun dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 24).

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, pemerintah bekerja secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dinas Sosial DIY, 2013, *loc.cit*).

Berdasarkan Permensos No. 08/2012 terdapat 25 jenis PMKS, yaitu: 1. Anak Balita Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Anak berhadapan dengan hukum; 4. Anak Jalanan; 5. Anak dengan Kedisabilitas; 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; 8. Lanjut Usia Terlantar; 9. Penyandang Disabilitas; 10. Tuna Susila; 11. Gelandangan; 12. Pengemis; 13. Pemulung; 14. Kelompok Minoritas; 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat; 16. ODHA; 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA; 18. Korban *Trafficking*; 19. Korban Tindak Kekerasan; 20. Pekerja Migran Bermasalah; 21. Korban Bencana Alam; 22. Korban Bencana Sosial; 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; 24. Fakir Miskin; 25. Keluarga Bermasalah (Dinas Sosial DIY, *ibid*, hlm. 2-3). Hasil pemutakhiran datayang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 jumlah dan prosentase PMKS menurut kabupaten/kota dan provinsi (lihat Tabel 5).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak terkonsentrasi di Kabupaten Gunung Kidul di banding kabupaten/kota lainnya. Terdapat 9 jenis PMKS persentase tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu: 1. Pemulung (62,70%); 2. Korban Tindak Kekerasan (49,95%); 3. Lanjut Usia Terlantar (49,47%); 4. Korban *Trafficking* (40%); 5. Anak Korban Tindak Kekerasan/KTK (38,19%); 6. Penyandang Disabilitas (31,54%); 7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (27,82%); 8. Anak Terlantar (30,51%); 9. Korban Bencana Alam (27,31%). Terdapat juga 5 jenis PMKS di Kabupaten Gunung Kidul yang menonjol/urutan kedua prosentase tertinggi, yaitu: 1. Anak Balita Terlantar (30,09%); 2. Fakir Miskin (27,49%); 3. Anak Jalanan (26,89%); 4. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (26,51%); 5. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (15,07%).

Tabel. 5 Jumlah dan Prosentase Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

No. Urut.	Jenis PMKS	PMKS	PMKS	PMKS	PMKS	PMKS	PMKS
		Di Kota Yogyakarta	Di Kab. Kulon Progo	Di Kab. Bantul	Di Kab. Gunung Kidul	Di Kab. Sleman	Di Prov. Yogya- karta
		F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
1	Anak Balita Terlantar	17 (0,70)	780 (31,93)	268 (10,97)	735 (30,09)	643 (26,32)	2.443 (100,00)
2	Anak Terlantar	433 (1,66)	6.194 (23,69)	4.426 (16,93)	7.976 (30,51)	7.117 (27,22)	26.149 (100,00)
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	-	-	-	-	-	119
4	Anak Jalanan	57 (26,89)	17 (8,02)	62 (69,25)	57 (26,89)	19 (8,96)	212 (100,00)
5	Anak Dengan Kedisabilitas	256 (6,64)	677 (17,55)	1.191 (30,870)	826 (21,41)	908 (23,54)	3.858 (100,00)
6	Anak Korban Tindak Kekerasan (KTK)/di perlakukan Salah	47 (5,90)	177 (22,24)	65 (8,17)	304 (38,19)	203 (25,50)	796 (100,00)
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	73
8	Lanjut Usia (Lansia) Terlantar	2.303 (6,23)	5.551 (15,02)	7.976 (21,57)	14.851 (40,17)	6.289 (17,01)	36.970 (100,00)
9	Penyandang Disabilitas	2.357 (8,36)	4.546 (16,140)	5.892 (20,92)	8.881 (31,54)	6.520 (23,16)	28.196 (100,00)
10	Tuna Susila	74 (46,84)	11 (6,96)	51 (32,28)	13 (8,23)	9 (7,44)	158 (100,00)
11	Gelandangan	9 (7,44)	21 (17,36)	30 (24,79)	8 (6,61)	53 (43,80)	121 (100,00)
12	Pengemis	37 (16,74)	41 (18,98)	83 (38,43)	34 (15,74)	26 (12,04)	221 (100,00)
13	Pemulung	6 (4,70)	10 (7,94)	19 (15,08)	79 (62,70)	12 (9,52)	126 (100,00)
14	Kelompok Minoritas	117 (54,17)	-	41 (18,98)	-	58 (26,85)	216 (100,00)
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	665 (15,95)	543 (13,03)	1.174 (28,17)	433 (10,39)	1.353 (32,46)	4.168 (100,00)
16	HIV/AIDS (ODHA)	633 (35,23)	108 (6,01)	438 (24,37)	105 (5,84)	513 (28,55)	1.797 (100,00)

No. Urut.	Jenis PMKS	PMKS Di Kota Yogyakarta	PMKS Di Kab. Kulon Progo	PMKS Di Kab. Bantul	PMKS Di Kab. Gunung Kidul	PMKS Di Kab. Sleman	PMKS Di Prov. Yogyakarta
		F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	251 (17,06)	85 (5,78)	336 (22,86)	178 (12,11)	621 (42,24)	1.471 (100,00)
18	Korban <i>Trafficking</i>	1 (20,00)	-	2 (40,00)	20 (40,00)	-	5 (100,00)
19	Korban Tindak Kekerasan	183 (4,50)	461 (11,33)	502 (12,33)	2.033 (49,95)	891 (21,89)	4.070 (100,00)
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	34 (11,64)	93 (11,85)	27 (9,25)	44 (15,07)	94 (32,19)	292 (100,00)
21	Korban Bencana Alam ^{*)}	299 (18,07)	444 (26,83)	185 (11,18)	452 (27,31)	275 (16,62)	1.655 (100,00)
22	Korban Bencana Sosial ^{*)}	51 (32,28)	6 (3,80)	24 (15,19)	21 (13,29)	56 (35,44)	158 (100,00)
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.436 (11,88)	1.636 (13,57)	3.051 (25,30)	3.354 (27,82)	2.609 (21,64)	12.086 (100,00)
24	Fakir Miskin ^{*)}	20.253 (5,61)	52.895 (14,65)	112.300 (31,10)	99.277 (27,49)	76.356 (21,15)	361.081 (100,00)
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ^{*)}	192 (5,65)	534 (15,73)	677 (19,94)	900 (26,51)	1098 (32,34)	3.401 (100,00)

Sumber Data: Diolah dari *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2013*, Yogyakarta: Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, hlm. 19 dan 21.

Keterangan:*) Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Fakir Miskin dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah jumlah keluarga bukan jumlah orang.

Bagaimana dengan PMKS di Kota Yogyakarta?. Berdasarkan data tabel di atas PMKS di Kota Yogyakarta terdapat 3 jenis PMKS persentase tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: 1. Kelompok Minoritas (54,17%); Tuna Susila (46,84%) 3. ODHA (35,23%). PMKS lainnya yang menonjol (di atas 5%) di Kota Yogyakarta adalah Korban Bencana Sosial/KBS (32,28%); Anak Jalanan (26,89%); Korban Bencana Alam (18,07%); Korban *trafficking* (20%); Korban Penyalahgunaan Napza (17,06%); Pengemis (16,74%); Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (15,95%); Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (11,88%); Pekerja Migran Bermasalah Sosial (11,64%); Penyandang Disabilitas (8,36%); Gelandangan (7,44%); Anak dengan Kedisabilitas (6,64%); Lanjut

Usia Terlantar/LUT (6,23%); Anak Korban Tindak Kekerasan/KTK (5,90%); Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (5,65%); dan Fakir Miskin (5,61%).

4. Yogyakarta Kota Lansia

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang penduduk lansia tertinggi di Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010 penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta berjumlah 448.223 orang (12,96%) dari jumlah keseluruhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 berjumlah 3.457.491 orang. Jumlah penduduk lansia perempuan (249.784 orang) lebih banyak dari jumlah penduduk lansia laki-laki (198.439 orang). Sebarannya lebih banyak di daerah perkotaan (246.178 orang) dibandingkan di daerah pedesaan (202.045 orang). Menurut kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (60–69 tahun) sebanyak 230.497 orang, lansia menengah (70-79 tahun) 155.740 orang, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebanyak 61.986 orang. Persentase penduduk lansia sebesar 12,96% menunjukkan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging structured population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh persen (BPS DIY, 2010:20-21). Diprediksikan penduduk lansia Kota Yogyakarta akan mencapai 13,4% pada tahun 2015, meningkat 14,7% pada tahun 2020, dan 19,5% pada tahun 2030. Yogyakarta memang bisa dikatakan “kota lansia” dan “kota pension”. Mungkin dikarenakan bisa menciptakan kondisi hidup *adem ayem* dan hidup tenteram.⁸

Tingginya jumlah penduduk lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan angka rasio ketergantungan penduduk lansia (ODR) di Provinsi DI Yogyakarta tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 19,92. Angka rasio sebesar 19,92 menunjukkan bahwa setiap

⁸Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, dikutip oleh Idris Rusadi Putra, Reporter Merdeka Com, <http://www.merdeka.com>, 7 Februari 2014, diakses 18 Februari 2014.

100 orang penduduk usia produktif (15-59) harus menanggung sekitar 19-20 orang penduduk lansia di Yogyakarta. Angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan tingginya angka rata-rata harapan hidup di Provinsi DI Yogyakarta. Ratio ketergantungan penduduk lansia di daerah perdesaan DI Yogyakarta sebesar 28,87% lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 15,88% (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 22).

Usia harapan hidup masyarakat Kota Yogyakarta rata-rata lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup tingkat nasional. Tuti Setyowati⁹ menyatakan:

“Di Yogyakarta pada tahun 2012 rata-rata usia harapan hidup untuk laki-laki adalah 72 tahun atau lebih tinggi 3 tahun dibandingkan rata-rata usia harapan hidup laki-laki secara nasional 69 tahun. Sedang rata-rata usia harapan hidup untuk perempuan adalah 74 tahun. Angka tersebut lebih tinggi 3 tahun dibandingkan rata-rata nasional 71 tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh suasana Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni sehingga cukup banyak dipilih oleh para pensiunan atau kaum lansia sebagai tempat tinggal. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, jumlah lansia di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 mencapai 9,7% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Jumlah lansia pada tahun 2010 di Kota Yogyakarta sebanyak 44.425 orang dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 457.668 orang. Dengan jumlah persentase tersebut, Kota Yogyakarta masuk dalam era kota berstruktur tua karena jumlah lansia sudah lebih dari tujuh persen dari total penduduk”.

Menurut narasumber, faktor yang mempengaruhi tingginya penduduk lansia dan angka harapan hidup tertinggi di Yogyakarta adalah: 1. Karena kenyamanan dan ketenteraman hidup (*adem ayem*) di Yogyakarta. Penduduk lansia dari luar Yogyakarta banyak yang memilih hari tua atau pensiun tinggal di Yogyakarta. 2. Penduduk

⁹Tuti Setyowati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, <http://www.republica.co.id>, 2 Juni 2012, diakses 18 Pebruari 2014.

usia produktif banyak yang bekerja di luar Yogyakarta yang sukses. 3. Biaya hidup relatif murah; 4. Pola makan yang baik dan teratur; 5. Nilai kultural generasi muda masih menghormati orang tua; 6. Lansia merasa “*diwongke*” atau dihargai, dihormati, dituakan dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. 7. Masih bertahannya budaya “*nrimo*” atau “*nrimo in pandum*” menerima apa adanya dan tidak banyak meminta. 8. Kohesi Sosial Warga Yogyakarta terhadap lansia masih tinggi. 9. Tingkat pendidikan masyarakat di Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sehingga ada kesadaran untuk memelihara kesehatannya. 10. Perhatian pemerintah Kota Yogyakarta terhadap penduduk lansia cukup baik, seperti akses untuk memelihara kesehatan cukup mudah dan tersedia, adanya jaminan kesehatan, bantuan sosial, bahkan lansia yang tinggal dipanti kalau meninggal sudah disediakan makam milik pemerintah Kota Yogyakarta dan lain-lain.¹⁰

Lansia terbagi dua, yaitu lansia terlantar dan lansia tidak terlantar. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah: 1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, 2. Terlantar secara psikis dan sosial (Dinas Sosial, 2013: 9).

Hasil pemutakhiran data Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, di Kota Yogyakarta terdapat 2.303 orang LUT atau 6,23% dari 36.970 orang LUT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan posisi terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁰Narasumber antara lain: Hadi Muchtar, Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 Maret 2014. Nanik Trisnajayanti, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 Maret 2014. Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Wreda Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014. Petty, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 28 Maret 2014.

Urutan pertama adalah Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 14.851 orang LUT (40,17%); Disusul, Kabupaten Bantul 7.976 orang LUT (21,57%); Kabupaten Sleman 6.289 orang LUT (17,01%); dan Kabupaten Kulon Progo 5.551 orang LUT (15,02%). Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk lansia di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 yang berjumlah 27.343 orang lansia terdapat sekitar 8,42% (2.303 orang) diantaranya LUT. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari instansi terkait di Kota Yogyakarta. Temuan di lapangan menunjukkan cukup banyak lansia terlantar yang kehidupannya tidak menentu berada di pinggir jalan, trotoar, di *emper-emper* toko dan lain-lain. Apalagi daya tampung Panti Werdha Budhi Dharma milik Pemerintah Kota Yogyakarta kapasitasnya hanya dapat menampung 60 orang lansia terlantar.

Dari 2.303 orang LUT di Kota Yogyakarta tersebar di 14 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Umbulhardjo yakni sebanyak 304 orang. Urutan kedua, Kecamatan Tegalrejo 232 orang, dan urutan ketiga, Kecamatan Mantriweron 216 orang. Menurut jenis kelamin dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta menunjukkan penduduk LUT perempuan lebih banyak dari laki-laki (lihat Tabel 6).

Tabel 6
Jumlah Lansia Usia Terlantar (LUT) di Kota Yogyakarta
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Th. 2012

No. Urut.	Nama Kecamatan	Jumlah LUT Laki-laki	Jumlah LUT Perempuan	Total
1	Danurejan	49	87	136
2	Gedongtengen	47	166	213
3	Gondokusuman	53	120	173
4	Gondomanan	17	66	83
5	Jetis	57	125	182
6	Kotagede	42	91	133
7	Kraton	42	75	117
8	Mantriweron	69	147	216
9	Mergangsan	28	100	128

No. Urut.	Nama Kecamatan	Jumlah LUT Laki-laki	Jumlah LUT Perempuan	Total
10	Ngampilan	29	92	121
11	Pakualaman	16	35	51
12	Tegalrejo	67	165	232
13	Umbulharjo	82	222	304
14	Wirobayan	63	151	214
Total		661	1.642	2.303

Sumber Data: Diolah dari data *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2013*, Yogyakarta: Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, 2013, hlm.149, 152, dan 155.

5. Lansia dalam Dimensi Sosial Kultur dan Agama

Persoalan lansia bukan sekedar persoalan jumlah orang tua yang membutuhkan santunan, melainkan menyangkut persoalan nilai-nilai sosial kultural dan agama yang menjadi landasan kelangsungan hidup masyarakatnya.

Menurut pandangan narasumber yang di wawancarai terdapat dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan “dari segi kultural sudah ada pergeseran nilai, di mana orang tidak lagi “*mikul duwur mendem jero*”, perubahan Kota Yogya sudah seperti Jakarta misalnya dari segi sumbangan sosial sudah bergeser. Gotong royong sudah “*luweh-luweh*” atau “acuh tak acuh”, mereka lebih cenderung menyerahkan kepada pemerintah. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial termasuk terhadap lansia sudah bergeser. Namun, budaya “*nrimo in pandum*” atau “tidak banyak meminta atau” menerima apa adanya” dan bersikap pasrah masih berlaku cukup kuat dikalangan lansia”.¹¹ Pandangan kedua menyatakan “Kohesi sosial warga Kota Yogyakarta terhadap lansia cukup tinggi. Di Kota Yogyakarta, terdapat kecenderungan kalau lansia masih bisa bekerja tidak mau ke panti meskipun lansia tersebut tidak punya anak, isteri dan keluarga. Istilah

¹¹Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Wredha Budi Dharma Kota Yogyakarta, *wawancara*, 25 Maret 2014 dan beberapa narasumber lainnya.

orang Yogyakarta “Kalau masih doyan makan, masih mau mencari nafkah tidak mau tinggal dipanti. Istilah budaya setempat “*pingin mangan kudu nyambut gawe*”. Juga budaya “malu” untuk tinggal dipanti masih bertahan karena ada anggapan “masuk ke panti itu seperti di buang”. Budaya/falsafah “*mikul nduwur mendem jero*” masih bertahan. “Dulu kita *diopeni* orang tua sekarang kita yang wajib *mengopeni* orang tua”.¹²

Asri Wuria Ningrum, dkk.¹³ mengemukakan:

“Orang lanjut usia dalam kultur Timur dan Islam, bukan sekedar ‘orang yang sudah tua’ melainkan golongan masyarakat yang menjadi figur pemegang nilai-nilai sosial budaya sehingga posisinya sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam kultur masyarakat Timur, orang tua menempati posisi yang sangat terhormat di dalam lingkungan sosialnya. Dalam budaya Jawa (termasuk Jawa Barat), ada tiga golongan warga masyarakat yang menempati posisi terhormat dan menjadi sumber keteladanan bagi warga masyarakat banyak, yaitu: “guru, ratu, *wong* atau *karo*” (guru, pemimpin, dan orang tua). Orang tua menjadi salah satu sumber keteladanan karena sejalan dengan pertambahan usia, kearifan mereka bertambah sehingga menjadi tempat generasi muda berkonsultasi tentang berbagai hal. Dalam ajaran Islam yang dianut sebagian besar warga masyarakat Indonesia, sangat tegas diperintahkan untuk menghormati orang tua, bahkan jikapun orang tua melakukan kesalahan, generasi muda harus tetap menjaga adab perilaku mereka kepada orang tua walaupun tidak perlu meneladani kesalahannya. Dengan demikian, dalam kultur Timur dan ajaran Islam yang menjadi sumber nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, seseorang memiliki kewajiban selain

¹²Nanik Trisnajayanti, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 dan 24 Maret 2014 dan beberapa narasumber lainnya.

¹³Asri Wuria Ningrum dkk, <http://stikeskabmalang.wordpress.com>, 3 Oktober 2009, diakses 12 Pebruari 2013.

interaksi horizontal (dengan isteri, kerabat, teman) juga vertikal kebawah dan ke atas. Ke bawah, ia berkewajiban memelihara generasi penerus (anak-anak), sementara ke atas, ia berkewajiban menyantuni orang tua. Demikian jaringan rantai sosial terjalin erat antar generasi sebagai cerminan dari masyarakat (dan keluarga) harmonis”.

Dalam pandangan Islam tentang lansia, Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 23–24 mengatakan “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu”. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil”. Al Qur'an Surat An-Nisa 36 menyatakan “Anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya”. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan “Ketika anak mendapat kedua orang tuanya lanjut usia, jalan ke surga adalah anak berkewajiban memelihara orang tuanya”. Hadis lain menyatakan “surga di bawah telapak kaki ibu”.

Dengan demikian, dalam ajaran Islam seorang anak berkewajiban menghormati, menyantuni dan memelihara orang tua hingga akhir hayatnya. Tidak diperkenankan anak menelantarkan orang tua, bahkan menempatkan orang tua di panti-panti wreda kurang diperkenankan, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa, seperti tidak mempunyai keluarga, hidup terlunta-lunta, tertimpa bencana dan lain-lain. Bencana gempa yang melanda Yogyakarta juga menimpa para lansia. Kondisi Lansia korban begitu memprihatinkan, sebagian mengalami luka fisik karena tertimpa bangunan dan ada pula luka secara psikis. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Lansia korban gempa diwujudkan dalam bentuk kepasrahan terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT

tanpa melupakan usaha dalam menjalani kehidupan. Kebermaknaan hidup yang dimiliki oleh para lansia setelah bencana terjadi dapat mereka peroleh melalui berbagai proses setelah mengalami kesedihan, kesepian, dan ketidakpercayaan diri. Dari penyikapan terhadap makna hidup yang harus dijalani membuat mereka tetap tegar dan bersemangat menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam di dalam Al Qur'an Surat Ar. Ra'd ayat 11 menyatakan "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum apabila mereka tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

Adanya anggapan bahwa lansia merasa damai, tenang dan dapat santai menikmati hasil kerja dan jerih payahnya di masa muda dan dewasanya, berbagai badai dan goncangan kehidupan seakan-akan sudah berhasil dilewati. Namun kenyataannya sering ditemukan lansia yang stress karena kemiskinan dan berbagai keluhan serta penderitaan karena penyakit depresi, kekhawatiran, paranoid dan masalah psikotik. Lansia sering dinilai konservatif, tidak kreatif, menolak inovasi, berorientasi ke masa silam dan merindukan masa lalu, kembali ke masa kanak-kanak, susah berubah, keras kepala dan cerewet, bingung dan tidak peduli terhadap lingkungan, penyakit kesepian dan tidak bahagia dan merasa tidak berguna di masyarakat. Namun, bagi lansia yang beriman dan taat beribadah menurut agama dan kepercayaannya akan tampak bahagia, tidak murung atau sedih, tidak takut akan masa depannya karena ia percaya kepada Allah Swt yang melindunginya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dijanjikan surga.

Ada keterkaitan tingkat religiusitas dengan depresi, semakin tinggi tingkat religiusitas semakin kecil kemungkinan mengalami depresi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Soewadi, bahwa ketaatan beribadah mampu meredam segala ketegangan jiwa yang terjadi, karena ketaatan beribadah telah terbukti mampu sebagai pelindung terhadap timbulnya berbagai penyakit terutama depresi, dan berdampak menenangkan yang dapat mengurangi gangguan insomania. Namun Caria R. dkk. menyatakan sebaliknya, bahwa

ritual religiusitas tanpa pemahaman yang benar terhadap agama justru akan menambah kemungkinan depresi.¹⁴

Dengan segala dampak yang ditimbulkan, tampaknya model penanganan masalah lansia yang berbasis nilai-nilai sosial kultural dan agama di dalam masyarakat yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman semakin penting untuk dikembangkan.

6. Permasalahan Pendidikan Penduduk Lansia

Pendidikan memegang peranan penting baik bagi penduduk usia muda maupun tua. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Begitu pula penduduk yang berusia tua perlu mendapat pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang baik dan berkualitas diharapkan lansia menjadi mandiri dan professional sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah, keluarga, masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD RI 1945, Pasal 31 ayat (1) UUD RI, Pasal 5 ayat (5) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 menyatakan:

“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

¹⁴Caria R. Marchira dkk, *Pengaruh Faktor-Faktor Psikososial dan Insomnia Terhadap Depresi Pada Lansia di Kota Yogyakarta*, SMF Kedokteran Jiwa FK UGM/RS. Sardjito, Yogyakarta: Berita Kedokteran Masyarakat Vo. 23, No. 1, Maret 2007, hlm. 2

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Pasal 5 ayat (5) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan “Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dan Pasal 5 ayat (2) menyatakan “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial”.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 13/1998 dinyatakan

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan lansia. Seperti program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar), dan program Keaksaraan Fungsional. Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional di Kota Yogyakarta sejak tahun 2009 hingga 2012 telah diikuti 750 peserta.

Program pembangunan pendidikan pengembangan dan peningkatan keterampilan bagi pendidikan lansia memerlukan penanganan yang

lebih khusus dan terfokus. Hal itu dikarenakan secara nasional penduduk lansia berpendidikan sangat rendah, sebagian besar (85,16%) tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD dan tamat SD/ sederajat. Selebihnya 8,54% tamat SMP/ sederajat, 6,51% tamat SMA/sederajat dan 2,49% tamat Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan lansia perempuan lebih rendah dibandingkan lansia laki-laki. Persentase penduduk lansia perempuan yang tidak pernah sekolah sebesar 39,5%, jauh lebih besar dibandingkan lansia laki-laki (22,63%). Begitu pula lansia perempuan yang menamatkan SMA/ sederajat ke atas/perguruan tinggi sebesar 5,52% dibandingkan lansia laki-laki sebesar 13,11%. Penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan lebih baik tingkat pendidikannya dibandingkan daerah pedesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD/sederajat ke atas lebih tinggi (64,03%) dari penduduk lansia di daerah pedesaan (39,63%). Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD di daerah pedesaan (60,37%) hampir dua kali lipat dibandingkan lansia yang tinggal di perkotaan (35,97%) (BPS, 2010:31-32).

Bagaimana dengan tingkat pendidikan penduduk lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta? Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan lansia di Yogyakarta tergolong sangat rendah sebagian besar (81,08%) tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD dan tamat SD/sederajat (55,51% tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD/sederajat dan 25,57% berpendidikan tamat SD/sederajat); Selebihnya 6,58% berpendidikan SMP/sederajat; 7,87% tamat SMA/sederajat, dan 4,47% tamat Perguruan Tinggi (BPS, 2010:31). Jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lansia secara nasional sebagaimana dikemukakan di atas, tingkat pendidikan yang ditamatkan lansia di Yogyakarta lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan lansia memperlihatkan kualitas SDM lansia di Indonesia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan lansia perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lansia laki-laki. Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan persentase perempuan yang tidak pernah sekolah sebesar 53,02% atau hampir dua kali lipat dibandingkan lansia laki-laki (26,71%). Penduduk lansia perempuan yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat ke atas sebesar 7,62% sedangkan lansia laki-laki sebesar 18,26% (BPS, 2010:31). Hal ini menunjukkan secara budaya, pola pendidikan di masa lalu orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan.

Dilihat dari pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan di Yogyakarta, tingkat pendidikan lansia yang tinggal di perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan pendidikan SD/ sederajat ke atas sebesar 53,42% sedangkan penduduk lansia di daerah perdesaan 33,61%. Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang tidak/ belum pernah sekolah yang tidak tamat SD/ sederajat di daerah perdesaan sebesar 66,39% lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia yang tinggal di perkotaan sebesar 46,58% (BPS, 2010:32). Hal ini mencerminkan bahwa akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan lebih baik dibandingkan di daerah perdesaan.

Dalam studi ini tidak diperoleh data tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk lansia di Kota Yogyakarta. Diperkirakan tingkat pendidikan lansia di Kota Yogyakarta lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan lansia di Provinsi di luar Yogyakarta secara nasional. Hal ini dapat dilihat data hasil sensus 2010 tingkat pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara nasional, tingkat pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan di daerah perdesaan. Seluruh penduduk lansia di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori penduduk lansia di daerah perkotaan.

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk lansia di DI Yogyakarta mempunyai pengaruh terhadap kemampuan membaca dan menulis. Hasil Sensus 2010 menunjukkan sebesar 43,88% penduduk lansia di DI Yogyakarta masih buta huruf. Keterbatasan berbagai fasilitas pendidikan di masa lalu menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka buta huruf, terutama banyak dirasakan penduduk lansia di daerah perdesaan (55,13%) yang lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (34,64%). Menurut jenis kelamin, prosentase penduduk lansia perempuan yang buta aksara sebesar 57,18% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki sebanyak 27,13% (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 33-34).

Dalam kemampuan berbahasa Indonesia, terdapat 61,05% penduduk lansia DI Yogyakarta mampu berbahasa Indonesia. Kemampuan penduduk lansia berbahasa Indonesia di daerah perkotaan lebih tinggi (69,92%) dibandingkan dengan di daerah perdesaan 50,25% (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 35). Hal ini dikarenakan penduduk lansia di perkotaan umumnya lebih beragam suku bangsa dan interaksi masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam studi ini diperoleh informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bahwa di Kota Yogyakarta program pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk lansia adalah program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar), dan program Keaksaraan Fungsional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Kenyataan ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait pemerintah Kota Yogyakarta pada masa mendatang, terutama untuk mengembangkan pendidikan non formal atau pendidikan ketrampilan yang tepat bagi penduduk lansia.

7. Permasalahan Kesehatan Lansia

Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor

tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya. Proses menua pada manusia dapat terlihat secara fisik terjadi perubahan penurunan fungsi dan organ tubuh, seperti penurunan indera penglihatan dan pendengaran, penurunan kemampuan motorik sehingga mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Pada lansia juga terjadi penurunan fungsi sel otak, yang menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, sulit berkonsentrasi, melambatnya informasi sehingga dapat mengakibatkan kesulitan berkomunikasi.

Semakin lanjut usia seseorang mengalami kemunduran kemampuan fisik yang dapat mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan di dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain. Pemberian obat pada lansia bersifat *palliative care* adalah ditujukan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh lansia. Fenomena poli farmasi dapat menimbulkan masalah, yaitu adanya interaksi obat dan efek samping obat. Penggunaan obat, medikasi pada lansia memerlukan yang khusus dan merupakan persoalan yang seringkali muncul di masyarakat atau rumah sakit. Persoalan utama dan terapi obat pada lansia adalah terjadinya perubahan fisiologi pada lansia akibat efek obat yang luas, termasuk efek samping obat tersebut (Waston, 1992). Dampak praktis dengan adanya perubahan usia ini adalah obat dengan dosis yang lebih kecil cenderung diberikan untuk lansia. Namun hal itu tetap bermasalah karena lansia seringkali menderita bermacam-macam penyakit untuk diobati sehingga mereka membutuhkan beberapa jenis obat. Persoalan yang dialami lansia dalam pengobatan adalah: bingung; lemah ingatan; penglihatan berkurang; Tidak bisa memegangadaldikarenakan kurang memahami pentingnya program tersebut untuk dipatuhi dan dijalankan. Selain mengalami kemunduran fisik, lansia juga mengalami kemunduran mental. Semakin lanjut usia seseorang,

kesibukan sosialnya akan semakin berkurang dan dapat mengakibatkan berkurangnya integrasi dengan lingkungannya.¹⁵

Menurut Caria R. Marchira dkk.,¹⁶ faktor psikososial lansia merupakan permasalahan yang sangat membebani kehidupan lansia yang pada gilirannya berpengaruh terhadap gangguan fisik, sosial dan mentalnya. Peningkatan usia harapan hidup tentunya mempunyai dampak lebih banyak terjadinya gangguan penyakit pada lansia. “Lima gangguan mental yang sering ditemukan pada usia lanjut adalah depresi, insomnia, anxietas, dan delirium”. Gangguan depresi yang sering dijumpai pada lansia merupakan masalah psikososiogeriatric dan perlu mendapat perhatian khusus. Depresi pada lansia kadang-kadang terdiagnosis dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya karena gejala-gejala yang muncul seringkali dianggap sebagai suatu proses penuaan yang normal. Depresi adalah suatu gangguan atau penyakit, sedangkan proses penuaan bukanlah penyakit, meskipun ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan. Gangguan depresi dapat diobati, sehingga para lansia dapat terbebas dari penderitaan depresi apalagi mendapat dukungan dari lingkungan dan keluarganya. “Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang dipengaruhi oleh stressor psikososial. Depresi dapat sebagai simtom, sindrom. *Stresor* psikososial dapat mencetuskan gangguan jiwa tergantung pada potensi *stressor*, maturitas, pendidikan, kondisi fisik, tipe kepribadian, sosial-budaya lingkungan dan situasi”.¹⁷

¹⁵n.n., *Trend dan Isu Pelayanan Kesehatan Lansia*, <http://jie30.wordpress.com>., diakses 31 Oktober 2013.

¹⁶Caria R. Marchira dkk, *Pengaruh Faktor-Faktor Psikososial dan Insomnia Terhadap Depresi Pada Lansia di Kota Yogyakarta*, SMF Kedokteran Jiwa FK UGM/RS. Sardjito, Yogyakarta: Berita Kedokteran Masyarakat Vol. 23, No. 1, Maret 2007, hlm 1, mengutip dari Departemen Kesehatan RI, *Pelayanan Gangguan Jiwa Usia Lanjut (Psikogeriarik) di Puskesmas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI, 2000.

¹⁷Caria R. Muria dkk, 2007, *Ibid.*, hlm 1 mengutip Dadang Hawari, 1997 dan Soewandi, 1999.

Hasil studi Widiatmoko (2001) (Caria R. Muria dkk, 2007, *ibid*, hlm. 2) menunjukkan “dukungan sosial memiliki korelasi negatif yang tinggi dan bermakna terhadap timbulnya gejala-gejala depresi lanjut usia. Depresi lebih banyak pada umur yang lebih tua dan dukungan keluarga yang rendah. Faktor-faktor psikososial usia lanjut merupakan permasalahan yang sangat rawan membebani kehidupannya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi gangguan fisik, sosial dan mentalnya”.

Stresor yang dihadapi lansia antara lain: modernisasi (adanya pola keluarga besar ke pola keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dapat menempatkan lansia di luar sistem keluarga kecil tersebut, sehingga lansia merasa diabaikan), kesepian (adanya ibu rumah tangga yang bekerja, meninggalkan beban pekerjaan pada lansia), pekerjaan (pensiun seringkali disamakan kehilangan kegiatan, penghasilan, kedudukan, berkurangnya harga diri, dan tidak mempunyai peran)”(Caria R. Muria dkk, 2007, *loc.cit*).

Penurunan fungsi dan organ tubuh tersebut menyebabkan semakin tua semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan melihat, mendengar, berjalan atau naik tangga, berkonsentrasi, berkomunikasi, dan mengurus diri sendiri hingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari disebut sebagai “kesulitan fungsional (*functional difficulty*)” (BPS, 2010, *op.cit*, hlm. 47-48).

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan penduduk lansia di DI Yogyakarta berjumlah 448.071 orang, diantaranya terdapat 402.258 orang lansia (87,88%) tidak mengalami kesulitan melihat dan 45.813 orang lansia (10,22%) mengalami kesulitan melihat. Dari 45.813 orang lansia yang mengalami kesulitan melihat, diantaranya 40.004 orang lansia (87,32%) dengan tingkat kesulitan melihat sedikit dan 5.809 orang lansia (12,68%) dengan tingkat kesulitan melihat parah (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 50). Terdapat kecenderungan semakin tua umur lansia semakin tinggi tingkat kesulitan melihatnya. Pada lansia kelompok umur muda (60–69 tahun) berjumlah 230.416 orang,

diantaranya terdapat 217.671 orang (94,47%) tidak mengalami kesulitan melihat dan 12.745 orang (5,53%) mengalami kesulitan melihat. Pada lansia kelompok umur menengah (70–79) berjumlah 155.691 orang, diantaranya 136.951 orang (87,96%) tidak mengalami kesulitan melihat dan 18.740 orang (12,04%) mengalami kesulitan melihat. Pada lansia kelompok umur tua (80 tahun ke atas) berjumlah 61.964 orang, diantaranya 47.636 orang (76,88%) tidak mengalami kesulitan melihat dan 14.328 orang (23,12%) mengalami kesulitan melihat. Menurut jenis kelamin, lansia perempuan mengalami kesulitan melihat lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 51).

Dalam hal kesulitan mendengar, dari total penduduk lansia DI Yogyakarta 448.071 orang pada tahun 2010, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 393.778 orang (87,88%) tidak mengalami kesulitan mendengar dan sebanyak 54.293 orang (12,12%) mengalami kesulitan mendengar. Diantaranya 46.791 orang (10,44%) kesulitan mendengar sedikit dan 7.502 orang (1,68%) kesulitan mendengar parah (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 50). Kondisi kesulitan mendengar sama halnya dengan kesulitan melihat semakin tinggi usia lansia semakin tinggi prosentase yang mengalami kesulitan mendengar. Pada kelompok umur lansia muda (60–69 tahun) dari 230.416 orang lansia diantaranya terdapat 219.417 orang (95,23%) tidak mengalami kesulitan mendengar dan 10.999 orang (4,77%) mengalami kesulitan mendengar (9.760 orang kesulitan mendengar sedikit dan 1.239 orang kesulitan mendengar parah). Pada kelompok umur lansia menengah (70–79 tahun) dari 155.691 orang diantaranya terdapat 132.298 orang (84,97%) tidak mengalami kesulitan mendengar dan 23.393 orang (15,03%) mengalami kesulitan mendengar (20.672 orang kesulitan mendengar sedikit dan 2.721 orang kesulitan mendengar parah). Pada kelompok umur lansia tinggi (80 tahun ke atas) dari 61.964 orang terdapat 42.063 orang (67,88%) tidak mengalami kesulitan mendengar dan 19.901 orang (32,12%) mengalami kesulitan mendengar (16.359 orang lansia mengalami kesulitan mendengar sedikit dan 3.542 orang mengalami kesulitan

mendengar parah). Menurut jenis kelamin, lansia perempuan mengalami kesulitan mendengar lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 52).

Dalam hal kesulitan berjalan/naik tangga dari 448.071 orang lansia pada tahun 2010, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 397.484 (88,71%) tidak mengalami kesulitan berjalan/naik tangga dan 50.587 orang (11,29%) mengalami kesulitan berjalan/naik tangga (39.722 orang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga sedikit dan 10.865 orang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga parah (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 50). Ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur lansia semakin tinggi pula kesulitan lansia dalam berjalan/naik tangga. Pada kelompok umur lansia muda (60-69 tahun) secara prosentase terdapat 4,73% yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga. Pada kelompok umur lansia menengah (70-79 tahun) meningkat menjadi 13,59% lansia yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga. Dan pada kelompok umur lansia tinggi (80 tahun ke atas) meningkat menjadi 29,89% mengalami kesulitan berjalan/naik tangga (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 54).

Dalam hal kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi dari 448.071 orang lansia di DI Yogyakarta pada tahun 2010, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan sebanyak 411.110 orang (91,75%) tidak mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi, dan terdapat 36.961 orang (8,25%) mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi, diantaranya terdapat 30.896 orang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi sedikit dan 6.065 orang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi parah (BPS, 2010, *Ibid*, hlm. 50). Terdapat kecenderungan semakin tinggi umur lansia semakin banyak jumlah lansia yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi. Pada kelompok umur lansia muda (60-69 tahun) dari 230.416 orang terdapat 7.615 orang (3,30%) mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi. Pada kelompok umur lansia menengah (70-79 tahun) dari 155.691 orang terdapat 15.013 orang (9,64%) mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi. Pada kelompok umur lansia

tinggi (80 tahun ke atas) dari 61.964 orang terdapat 14.333 orang (23,13%) mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi. Menurut jenis kelamin, penduduk lansia perempuan yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki pada semua kelompok umur (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 55).

Kesulitan lain yang dialami para lansia adalah dalam mengurus diri sendiri. Hasil Sensus 2010 dari 448.071 lansia DI Yogyakarta menunjukkan 419.625 orang (93,65%) tidak ada kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan 28.446 orang (6,35%) mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 50). Terdapat kecenderungan semakin tinggi umur lansia semakin banyak lansia yang mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri. Pada kelompok umur lansia muda (60–69 tahun) dari 230.416 orang diantaranya terdapat 5.452 orang (2,37%) mengalami kesulitan mengurus diri sendiri. Pada kelompok umur lansia menengah (70-79 tahun) dari 155.691 orang lansia diantaranya terdapat 11.181 orang (7,18%) mengalami kesulitan mengurus diri sendiri. Pada kelompok umur lansia tinggi (80 tahun ke atas) dari 61.964 orang diantaranya terdapat 11.813 orang (19,06%) mengalami kesulitan mengurus diri sendiri. Menurut jenis kelamin, secara persentase penduduk lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia laki-laki yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri (BPS, 2010, *ibid*, hlm. 56-57).

Dr. Albert GO Sumampouw¹⁸ mengemukakan:

“Panjang umur dan awet muda menjadi dambaan setiap insan sejak zaman dahulu, banyak cara yang dilakukan oleh raja raja dan permaisuri di seluruh belahan dunia untuk dapat panjang umur. Kemajuan ilmu kedokteran barat telah terbukti berhasil menekan angka kematian karena penyakit infeksi dan meningkatkan usia harapan hidup seseorang,

¹⁸Dr. Albert Sumampouw, *Kiat Sehat di Usia Senja*, <http://indonesiaindonesia.com>, diakses 12 Pebruari 2013.

sehingga semakin banyak jumlah manusia lanjut usia (Lansia). Perubahan demografi akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan lanjut usia, baik secara individu maupun dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. Permasalahan yang dapat terjadi pada lansia adalah 1. Proses ketuaan yang terjadi secara alami dengan konsekuensi timbulnya masalah fisik, mental, dan sosial. 2. Perubahan sosialisasi karena produktivitas yang mulai menurun, berkurangnya kesibukan sosial dan interaksi dengan lingkungan. 3. Produktivitas yang menurun dengan akibat terbatasnya kesempatan kerja karena kemampuan dan keterampilan menurun, namun kebutuhan hidup terus meningkat. 4. Kebutuhan pelayanan kesehatan terutama untuk kelainan degeneratif yang memerlukan biaya tinggi.”

Ia lebih lanjut mengatakan “Permasalahan tersebut membawa pengaruh bahwa panjang umur saja tidak berguna bila menderita berbagai macam penyakit ketuaan serta ketidakmampuan fisik dan mental yang prima untuk menjadi sumber daya manusia yang optimal. Kecepatan terjadinya proses penuaan selain tergantung pada faktor-faktor rancang bangun setiap mahluk hidup yang merupakan faktor keturunan dan tidak dapat dirubah, juga tergantung dari faktor-faktor luar yang selama bertahun-tahun merusak kebugaran dan kesehatan tubuh, misalnya: kerja yang melebihi batas kemampuan tubuh, kebiasaan hidup sehat yang tidak dijalankan dengan benar, faktor lingkungan lain yang memapar kita hampir setiap hari dan sulit dihindari atau dihilangkan. Beberapa pemicu utama yang membuat seseorang berisiko terjadinya penuaan dini adalah: 1. Asap rokok, bila kita sering terpapar asap rokok orang lain di rumah, di kantor atau di tempat lain. 2. Pencemaran udara. 3. Sinar matahari dan sinar Ultra violet. Umumnya terpapar selama 30 menit oleh sinar matahari setiap hari sudah cukup menyenangkan kita, termasuk pembentukan vitamin D yang cukup dalam tubuh kita. Lebih dari itu tidak baik dan dapat menyebabkan kanker kulit”.

Menurut Dr. Albert GO Sumampuow (*ibid*) strategi yang dapat dilakukan agar dalam usia lanjut tetap sehat dan mempunyai

kemampuan untuk mandiri selama mungkin, tetap produktif dan turut berperan aktif dalam pembangunan adalah:

- (1) Pola hidup sehat yang meliputi: a. Hindari stress; b. Cukup istirahat dan rekreasi; c. Cukup olah raga; d. Makan cukup gizi dan berimbang; e. Mempertahankan berat badan ideal; f. Hindari merokok dan alkohol; g. Hindari polutan.
- (2) Preventif dan terapi alternatif.
- (3) Menggunakan healing nutrients (makanan kesehatan)

Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menyebutkan pola penyakit pada lansia secara nasional yang terbanyak adalah gangguan sendi, disusul hipertensi, katarak, stroke, gangguan mental emosional, penyakit jantung dan diabetes melitus. Penyebab kematian lansia laki-laki adalah penyakit stroke (20%); saluran pernapasan bawah kronik (10,5%); Tuberkulosis paru (8,9%); hipertensi (7,3%); NEC (7%); penyakit jantung iskemik (6,9%); penyakit jantung lainnya (5,9%); diabetes mellitus (4,9%); penyakit hati (4,4%) dan pneumonia (3,8%). Sedang lansia perempuan adalah NEC (9,6%); saluran pernapasan bawah kronik (6,6%); diabetes mellitus (6%); penyakit jantung iskemik (6%); penyakit jantung lainnya (5,9%), TBC (5,6%), pneumonia (3%) dan penyakit hati (2,2%).¹⁹

Untuk Kota Yogyakarta menurut Dr. Pretty²⁰ “Berdasarkan data laporan hasil kegiatan menangani lansia di Kota Yogyakarta oleh Dinas Kesehatan tahun 2013 terdapat 10 jenis penyakit yang banyak diderita lansia di Kota Yogyakarta, yaitu:

- (1) Hipertensi Esensial (primer) dengan jumlah 4.707 kasus.
- (2) Diabetes Melitus dengan jumlah 1.728 kasus.
- (3) Gastritis dengan jumlah 1.723 kasus.
- (4) Penyakit jaringan periodontal dengan jumlah 625 kasus.
- (5) Urtikaria dengan jumlah 590 kasus.
- (6) Asma dengan jumlah 560 kasus.

¹⁹<http://health.liputan6.com>, diakses 27 Januari 2014.

²⁰Dr. Pretty, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 28 Maret 2014.

- (7) Anemia dengan jumlah 430 kasus.
- (8) Karies gigi dengan jumlah 366 kasus.
- (9) Stroke dengan jumlah 172 kasus.
- (10) Hipertensi lainnya dengan jumlah 126 kasus.

Tingginya angka kasus penyakit hipertensi yang diderita lansia di Kota Yogyakarta menurut Dr. Petty adalah:

“erat kaitannya dengan pola makan seharusnya para lansia tidak sembarang makan. Di Kota Yogyakarta tahun-tahun belakangan ini kuliner sudah sangat beraneka ragam, makanan tradisional, modern dari dalam negeri dan luar negeri tersedia diberbagai tempat dan dapat dinikmati setiap saat. Hal itu berakibat ada penduduk gizi lebih dan gizi kurang. Sebagai antisipasinya sangat tergantung dari SDM itu sendiri, agar tidak muncul penyakit degeneratif diperlukan latihan kegiatan preventif, seperti olah raga, senam lansia, senam jantung sehat, rekreasi dllnya. Persoalannya lansia yang menderita penyakit degeneratif ada kecenderungan “minum obat yang diberikan saja kadangkala susah”. Dan mereka mengatakan “Masih minum obat terus kapan sembuhnya”. Di Kota Yogyakarta juga banyak kasus lansia depresi dan kasus gangguan depresi cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Faktor penyebabnya belum diketahui. Karena itu, di setiap Puskesmas di Kota Yogyakarta sudah tersedia tenaga psikolog yang dapat membantu penduduk lansia. Meskipun kenyataannya terdapat lansia yang bolak balik ke psikolog di Puskesmas. Padahal persoalan sebenarnya dapat diatasi oleh lansia itu sendiri”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caria R, dkk., terhadap 128 orang lansia berusia 60 tahun ke atas di dua Kecamatan di Kota Yogyakarta (Mergangsan dan Wirosaban) menunjukkan: *Pertama*, adanya perbedaan bermakna pada variabel-variabel jenis kelamin dan usia ($p=0,05$), pendidikan dan tingkat religiusitas ($p=0,001$), dan *stresor* psikososial dan insomania ($p<0,001$) terhadap depresi. *Kedua*, adanya perbedaan antara skor dukungan sosial terhadap depresi yaitu kelompok depresi nilai rata-rata dukungan sosial lebih rendah dibandingkan kelompok tidak depresi. *Ketiga*, hasil analisis logistik

regresi depresi, variabel dukungan sosial yang paling berbeda makna untuk terjadinya depresi. *Keempat*, pada kelompok depresi, jumlah perempuan (53,3%) lebih banyak daripada laki-laki (46,7%). Pada kelompok tidak depresi, jumlah perempuan (67,2%) lebih banyak daripada laki-laki (32,8%). *Kelima*, untuk status perkawinan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik antara status perkawinan dengan kejadian depresi. *Keenam*, terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara pendidikan dan depresi. *Ketujuh*, semakin besar stressor psikososial semakin besar kemungkinan mengalami depresi. *Kedelapan*, Tingkat religiusitas terhadap depresi terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik. Semakin tinggi tingkat religiusitas semakin kecil kemungkinan mengalami depresi. Hal ini sesuai dengan hasil Soewadi bahwa ketaatan beribadah mampu meredam segala ketegangan jiwa yang terjadi, karena ketaatan beribadah telah terbukti mampu sebagai pelindung terhadap timbulnya berbagai penyakit terutama depresi, dan berdampak menenangkan yang dapat mengurangi gangguan insomamnia. Namun Caria R dkk menyatakan sebaliknya, bahwa religiusitas ritual tanpa pemahaman yang benar terhadap agama justru akan menambah kemungkinan depresi. *Kesembilan*, terdapat perbedaan yang bermakna antara insomnia dengan depresi. Semakin tinggi insomnia semakin besar kemungkinan mengalami depresi. *Kesepuluh*, adanya korelasi yang cukup tinggi antara dukungan sosial dengan depresi (semakin tinggi dukungan sosial semakin rendah depresi) (Caria R. Maria, dkk, 2007, *ibid*, hlm. 54).

Dengan demikian, tingkat pendidikan, religiusitas/ketaatan beribadah dan dukungan sosial memberikan kontribusi terbesar terhadap pengurangan kejadian depresi pada lansia. Juga ada pengaruh yang positif antara “olah raga seperti senam lansia terhadap penurunan tingkat kecemasan lansia”.²¹

²¹Ni Made Evi Tursina Sari, *Pengaruh Pelaksanaan Senam Lansia Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Lansia di RT 11 Kelurahan Muja Muja Yogyakarta*, <http://skripsistikes.wordpress.com>, 1 Mei 2009, diakses 18 Februari 2014.

Upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi azas, pendekatan, dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima. Azas menurut WHO (1991) adalah *to Add life to the Years that Have Been Added to life* dengan prinsip kemerdekaan (*independence*), partisipasi (*participation*), perawatan (*care*), pemenuhan diri (*self fulfillment*), dan kehormatan (*dignity*). Sedangkan Azas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah *Add life to the Years, Add Health to life, and Add Years to Life*, yaitu meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia.

Pendekatan, menurut WHO (1982), pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Menikmati hasil pembangunan (*sharing the benefits of social development*);
- (2) Masing-masing lansia mempunyai keunikan (*indivuality of aging persons*);
- (3) Lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal (*nondependence*);
- (4) Lansia turut memilih kebijakan (*choice*);
- (5) Memberikan perawatan di rumah (*home care*);
- (6) Pelayanan harus dicapai dengan mudah (*accessibility*);
- (7) Mendorong ikatan akrab antar kelompok/antar generasi (*engaging the aging*);
- (8) Transfortasi dan utilitas bangunan yang sesuai dengan lansia (*mobility*);
- (9) Para lansia dapat terus berguna dalam menghasilkan karya (*productivity*);
- (10) Lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia (*self help care and family care*).

Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi lima upaya, yaitu:

- (1) Promotif, yaitu upaya promotif, merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga professional dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Upaya perlindungan kesehatan bagi lansia,

yaitu: 1. Mengurangi cedera, dan 2. Meningkatkan keamanan di tempat kerja.

- (2) Meningkatkan perlindungan dari kualitas udara yang buruk, yaitu:
- Meningkatkan keamanan, penanganan makanan dan obat-obatan;
 - Meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan gigi dan mulut.
- (3) Preventif, yaitu: mencakup pencegahan primer, sekunder dan tersier.

Pencegahan primer: program imunisasi, konseling, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stress, menggunakan medikasi yang tepat.

Pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala. Jenis pelayanan pencegahan sekunder: kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, skrining: pemeriksaan rektal, mammogram, papsmear, gigi, mulut.

Pencegahan tersier dilakukan sesudah gejala penyakit dan cacat. Jenis pelayanan mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan anggota badan yang masih berfungsi.

- (4) Rehabilitatif. Terdapat 11 prinsip, yaitu:
- (a) Pertahankan lingkungan aman;
 - (b) Pertahankan kenyamanan, istirahat, aktivitas dan mobilitas;
 - (c) Pertahankan kecukupan gizi;
 - (d) Pertahankan fungsi pernafasan;
 - (e) Pertahankan aliran darah;
 - (f) Pertahankan kulit;
 - (g) Pertahankan fungsi pencernaan;
 - (h) Pertahankan fungsi saluran perkemihan;
 - (i) Meningkatkan fungsi psikososial;
 - (j) Pertahankan komunikasi;
 - (k) Mendorong pelaksanaan tugas.

Terkait upaya pelayanan kesehatan lansia di Kota Yogyakarta dr. Petty²² menyatakan:

“Dinas Kesehatan hanya melaksanakan program kesehatan penduduk lansia yang sakit, baik lansia terlantar dan tidak terlantar. Para lansia dapat berobat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta terdapat 18 Puskesmas dan 9 Puskesmas Pembantu. Seluruh Puskesmas melaksanakan program kesehatan lansia. Jumlah lansia yang dibina oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2013 berjumlah 50.926 orang lansia, dan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan berjumlah 28.918 orang. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas penduduk lansia harus memiliki kartu Jamkesda/Jamkesmas. Salah satu persyaratan mendapat kartu Jamkesda/Jamkesmas harus memiliki KTP. Bagi lansia yang tidak memiliki KTP harus ada Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Surat Keterangan dari Panti Werdha. Namun dalam praktik, meskipun tidak ada KTP atau Surat Keterangan dari Kelurahan/Panti Werdha, Puskesmas juga memberi pelayanan kesehatan. Di Kota Yogyakarta terdapat 605 Posyandu Lansia tersebar di 18 Kelurahan dengan jumlah kader 4.643 orang. 605 kelompok Posyandu lansia ini aktif melaksanakan kegiatan Posyandu lansia dan kegiatan senam lansia. Persoalan yang dihadapi Posyandu Lansia adalah kadernya kebanyakan sudah sepuh-sepuh dan honor kader relatif kecil Rp.25.000,- perbulan/perorangan. Tempat untuk melaksanakan kegiatan Posyandu lansia agak terbatas, kadangkala harus didirikan tenda. Lansia ada yang aktif datang ke Posyandu dan ada yang tidak aktif karena merasa tidak berguna lagi. Padahal kedatangan lansia sebulan sekali ke Posyandu Lansia sangat diperlukan untuk mengukur tensi, berat badan, makan tambahan gizi berimbang. Juga ada penyuluhan kesehatan, gizi, jenis penyakit tertentu dllnya. Jika ditemukan

²²Dr. Petty, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 28 Maret 2014.

ada penyakit yang diderita lansia dapat dirujuk ke Puskesmas setempat”.

Di Kota Yogyakarta terdapat Rumah Sehat Lansia yang didirikan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2012. Pelayanan Rumah Sehat Lansia adalah memberikan kemudahan akses khususnya untuk penduduk lansia untuk mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan dan penyuluhan agar tetap sehat dan bugar. Jenis pelayanan, promotif dan preventif berupa konsultasi kesehatan oleh dokter spesialis geriatric, ahli gizi, perawat, dan senam lansia. Pada tahun 2013 mulai melakukan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan oleh dr. Probosuseno, Sp.PD, K-Her yang diikuti 173 orang lansia dari 293 orang lansia yang terdaftar.

Menurut Ita Sarah Sitorus²³ mengemukakan:

“dokter yang menangani Rumah Sehat Lansia berjumlah 64 orang yang dilakukan secara bergantian. Setiap kegiatan ditangani satu orang dokter, satu orang perawat dan satu orang ahli gizi. Juga Psikolog dari Puskesmas Umbulhardjo I dan II dua kali sebulan datang ke Rumah Sehat Lansia. Hasil pemeriksaan kesehatan lansia di Rumah Sehat Lansia menunjukkan jenis penyakit yang banyak diderita lansia adalah 1. Hipertensi; 2. Diabetes Mlitus; 3. Asam Urat; 4. Kalestrol; 5. Pernapasan; 6. Radang sendi/reumatik; 7. Austrioporosis; 8. Kelebihan Gizi; 9. Kekurangan Gizi. Rata-rata lansia yang datang ke Rumah Sehat Lansia masih memiliki keluarga. Mereka kebanyakan stress/depresi karena keluarganya tidak serumah lagi. Ada lansia yang secara ekonomi berkecukupan tetapi kesepian ditinggal keluarganya. Mereka datang ke Rumah Lansia setiap ada kegiatan. Setiap kegiatan diikuti sekitar 50–70 orang lansia. Baik lansia terlantar maupun tidak terlantar. Di antara yang datang ada yang sehat dan ada pula yang sakit. Umumnya lansia yang datang ke Rumah Sehat Lansia kurang mandiri, rewel, ngeyel, manja, ada

²³Ita Sarah Sitorus, Perawat Rumah Sehat Lansia Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 26 Maret 2014.

pula yang sudah pikun. Kalau diberikan obat, kalau sudah enak badannya tidak diminum lagi. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera. Masalah kesehatan lansia meliputi masalah mental, penurunan daya tahan tubuh dan menderita bermacam-macam penyakit. Lansia memerlukan obat yang jumlah dan macamnya tergantung dari penyakit yang diderita. Semakin banyak penyakit yang diderita semakin banyak pula obat yang diperlukan. Banyaknya jenis obat yang digunakan akan menimbulkan masalah antara lain memerlukan ketaatan juga kemungkinan menimbulkan kebingungan dalam menggunakan atau cara minum obat. Juga dapat meningkatkan risiko efek samping obat atau interaksi obat”.

Mengenai gizi lansia, Hatta Apriani²⁴ mengemukakan:

“kita memotivasi lansia agar makan sehat dan bergizi. Misalnya ada lansia mengeluh pusing dan tensinya tinggi atau gejala hipertensi, maka kita anjurkan mengurangi makanan yang asin dan minum juice timun, semangka, melon dan sayur-sayuran yang dapat menurunkan hipertensinya. Kalau penyakitnya diabet maka dianjurkan minum air putih yang banyak, dan melakukan diet atau mengurangi makan. Umumnya banyak lansia yang melanggar makanan yang tidak diperbolehkan “jangan makan tetapi tetap makan. Juga menganjurkan agar lansia aktif mengikuti senam lansia”.

8. Problematik Lansia di Rumah Tangga dan di Panti Werdha

Idealnya masa tua diharapkan dapat dinikmati tanpa beban kehidupan yang berat. Namun kenyataannya, penduduk lansia di DI Yogyakarta masih banyak berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga ia harus bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kehidupan keluarganya, baik dari segi ekonomi

²⁴Hatta Apriani, Ahli Gizi Rumah Sehat Lansia Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 26 Maret 2014.

maupun sosial budaya lingkungan masyarakat di sekitarnya. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 56,62% penduduk lansia di DI Yogyakarta berperan sebagai kepala rumah tangga dan 43,38% sebagai anggota rumah tangga. Persentase penduduk lansia yang menjadi tulang punggung keluarga didominasi oleh penduduk lansia laki-laki yaitu sebesar 88,46% sebagai kepala rumah tangga dan 11,54% sebagai anggota rumah tangga. Sedangkan penduduk lansia perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yaitu 31,34% sebagai kepala rumah tangga dan 68,66% sebagai anggota rumah tangga. Selain itu, terdapat pula lansia yang berperan sebagai isteri/suami sebanyak 21,69% dan sebagai orang tua/mertua sebanyak 18,44%. Lansia yang tinggal dengan famili/kerabat sebanyak 2,82% dan lansia yang tinggal dengan orang lain sebagai pembantu rumah tangga sebanyak 0,15% (BPS, 2010: *ibid*, hlm. 24-25).

Peran lansia sebagai kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga tampaknya berkorelasi dengan status perkawinan penduduk lansia di DI Yogyakarta. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 61,94% berstatus kawin, 34,41% berstatus cerai mati, 1,97% cerai hidup, dan 1,69% belum kawin. Menurut jenis kelamin, status perkawinan lansia laki-laki mempunyai pola yang berbeda dengan lansia perempuan. Persentase penduduk lansia laki-laki sebagian besar (83,25%) berstatus kawin lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus cerai mati (14,66%). Sebaliknya, penduduk lansia perempuan 50,10% berstatus cerai mati dan 45,01% berstatus kawin (BPS DI Yogyakarta, 2010: hal 24-25).

Mengingat urgensi masalah lansia, maka masalah lansia membutuhkan perhatian dan penanganan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai persoalan lansia, pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial mengupayakan suatu wadah atau sarana untuk menampung penduduk lansia dalam satu institusi yang disebut Panti Werdha. Pada awalnya institusi ini dimaksudkan untuk menampung lansia yang miskin dan terlantar untuk diberikan fasilitas yang layak dari mulai kebutuhan makan minum sampai kebutuhan

aktualisasi. Namun lambat laun dirasakan yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan lanjut usia yang berbasis panti tidak hanya bagi mereka yang miskin dan terlantar saja, tetapi orang yang berkecukupan dan mapan pun membutuhkannya. Maka bermunculan panti-panti yang dikelola oleh swasta. Bahkan dalam perkembangannya seperti di Jakarta telah terjadi pergeseran/perubahan tata nilai sosial budaya pandangan anak terhadap orang tuadi kalangan generasi muda kelas elite/kaya, yang menempatkan orang tuanya pada apartemen mewah lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya, seperti dokter, ahli gizi, lansia sister dan lain-lain. Lantas muncul pertanyaan, mengapa terjadi demikian? Apakah model panti merupakan jawaban yang tepat dalam menanggulangi masalah lansia, atau malah akan mendorong warga masyarakat untuk lebih mudah “menelantarkan” para lansia ?

Menurut Mariani dan Subhan Kadir²⁵ mengemukakan:

“Ada beberapa alasan yang menyebabkannya, *Pertama*, perubahan tipe keluarga dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga kecil (*nuclear family*). Di mana pada awalnya dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Tapi sesuai dengan perkembangan keluarga ada tahap di mana keluarga menghadapi anak yang menikah atau membentuk keluarga sendiri, sehingga yang terjadi adalah orang tua akan tinggal berdua saja, tentu saja kondisi ini membutuhkan peran pengganti keluarga. *Kedua*, adalah perubahan peran ibu. Pada awalnya peran ibu adalah mengurus rumah tangga, anak-anak dan lain-lain. Sekarang telah mengalami perubahan di mana ibu juga bertindak sebagai pencari nafkah bekerja di kantor dan sebagainya. Sehingga, anggota keluarga seperti anak-anak dan kakek serta nenek dititipkan pada institusi tertentu. *Ketiga*, kebutuhan sosialisasi orang lanjut usia itu sendiri. Apabila ia tinggal dalam keluarga mengalami perasaan bosan ditinggal

²⁵Mariani dan Subhan Kadir, *Panti Werdha Adalah Pilihan*, <http://subhankadir.wordpress.com>, 20 Agustus 2007, diakses 12 Pebruari 2013.

sendiri, anaknya mungkin berangkat bekerja dan cucunya ke sekolah. Sehingga ia membutuhkan suatu lingkungan sosial di mana di dalam komunitas tersebut terdapat beberapa kesamaan sehingga ia merasa betah dan kembali bersemangat”

Inilah dilema yang terjadi pada masyarakat perkotaan, yakni dihadapkannya seseorang pada suatu pilihan yang sulit, di mana keluarga mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk merawat sendiri ayah dan ibu yang telah senja/lansia karena alasan pekerjaan dan kesibukan lainnya, membuat keluarga tidak memiliki waktu untuk lebih banyak bersama kedua orang tua. Sebaliknya karena lebih seringnya ditinggal seorang diri di rumah membuat orang tua merasa kesepian dan membutuhkan suatu lingkungan dengan komunitas yang sama yaitu Panti Werdha atau Panti Jompo.

Tidak dipungkiri bahwa keluargalah yang merupakan unit yang paling tepat untuk memberikan pelayanan terhadap orang tuanya yang lansia, dan peran keluarga ini perlu dimaksimalkan. Tetapi jika menghadapi kondisi yang disebutkan di atas maka inilah yang dapat dikatakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi keluarga yang memiliki orang tua lansia. Menggunakan jasa Panti Werdha sebagai suatu solusi adalah tepat. Asalkan pengambilan keputusan/kesepakatan untuk tinggal di Panti Werdha melibatkan seluruh anggota keluarga serta persetujuan orang tua yang sudah lansia. Keluarga yang memasukkan orang tuanya ke Panti Werdha harus tetap menunjukkan kasih sayangnya meski mereka berada di Panti Werdha. Panti Werdha bisa menjadi pilihan yang baik untuk menikmati hari tua. Akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia ada pula yang memandangnya sebagai suatu yang negatif menempatkan lansia di Panti Werdha. Pandangan masyarakat tentang Panti Werdha dan lansia yang dititipkan di panti agaknya perlu diluruskan. Orang tualansia yang dititipkan di Panti Werdha tidak berarti mereka terbuang, mereka tetap memiliki keluarga yang merupakan bagian penting dari keberadaannya. Di Panti Werdha mereka menemukan teman yang relatif seusia dengannya di mana mereka dapat berbagi cerita, pengalaman dan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya.

Keberadaan lansia di panti dengan berbagai karakter dan memiliki berbagai ragam problematika maka dipandang perlu untuk memberikan suatu penanganan khusus sesuai kelebihan serta kekurangan yang mereka miliki. Di Panti Werdha selain mendapatkan pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan dasar juga diberikan fungsi positif lainnya yaitu program-program pelayanan sosial yang bisa memberikan kesibukan buat mereka sebagai pengisian waktu luang, diantaranya pemberian bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, rekreasi, penyaluran bakat dan hobby, terapi kelompok, senam lansia dan kegiatan lainnya. Di panti mereka mendapatkan fasilitas serta kemudahan-kemudahan (*aksesibilitas*) lainnya, bersama teman-teman seusianya, mereka juga mendapatkan pelayanan maksimal dari para pekerja sosial sebagai pendamping mereka di Panti Werdha.

Kehidupan lansia di Panti Werdha tidak selama menyenangkan. Apalagi lansia yang tidak lagi memiliki keluarga untuk berbagi, tidak hanya usia tua yang mengancam kehidupannya tetapi juga rasa kesepian, perasaan terbuang disingkirkan oleh anak dan keluarganya, meratapi kesedihan mendalam ketika sakit yang tidak didampingi oleh anak dan keluarga untuk merawatnya, menjadikan mereka bagaikan “mati rasa”. Berbagai kisah sedih mengharukan para lansia penghuni panti yang menghabiskan sisa usianya di Panti Werdha. Menghabiskan masa tua bersama keluarga adalah impian semua orang. Ketika tua dapat berbagi bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, diurus, diperhatikan dan dimanja keluarga dan dapat melihat anak dan cucu bahagia. Hal seperti itu sulit untuk di dapat para lansia penghuni Panti Werdha. Yang bisa mereka lakukan adalah berbagi pengalaman dan cerita masa lalu dengan sesama penghuni panti atau pengelola panti.

Menjadikan teman penghuni panti sebagai keluarga tempat mencurahkan suka dan dukanya, bersuka cita ketika menerima kunjungan keluarga dan tamu/donatur yang peduli terhadap nasib mereka begitu di dambakan dan dimpikan. Kehadiran keluarga di panti mempunyai pengaruh besar untuk mengatasi kesendirian dan kesepian para lansia di usia senja. Betapa pentingnya arti sebuah

keluarga di dalam kehidupan lansia penghuni panti. Menjaga hubungan cinta dan kasih sayang anak, keluarga dengan orang tua/lansia penghuni panti adalah kewajiban setiap manusia. Meskipun kenyataannya tidak semua anak dan keluarga melakukannya. Terkadang ada cinta dan kasih sayang yang terlewatkan anak kepada orang tua/lansia penghuni Panti Werdha. Peribahasa “Cinta Ibu sepanjang masa, cinta anak sepanjang galah” kadangkala merupakan bukti pembenaran di antara penghuni panti.

Terhadap keberadaan lansia di Panti Werdha, Sofa Nurdiyanti²⁶ mempertanyakannya:

”Mengapa lansia harus tinggal di Panti Werdha? Bukankah kultur Indonesia sangat menghargai relasi kekeluargaannya. Patriarki, bilateral, matrilineal semuanya merupakan sistem kekeluargaan yang mengatur pola kekeluargaan di Indonesia. Meski berbeda, tapi semuanya menghargai kekerabatan. Adanya marga untuk beberapa suku juga merupakan salah satu tanda kuatnya relasi kekeluargaan di Indonesia. Marga sebagai salah satu penanda adanya ikatan satu darah. Mereka yang mempunyai marga yang sama akan merasa senang ketika bertemu di lain tempat. Rasa persaudaraan yang kuat membuat mereka saling membantu jika ada kesulitan. Entah karena ikatan kekeluargaan yang mulai luntur atukah karena proses akulturasi budaya di Indonesia yang ikut mempengaruhi berkurangnya kasih sayang antara anak/keluarga dengan orang tuanya. Yang pasti Panti Werdha/jompo bukanlah tempat yang layak untuk setiap orang tua menghabiskan sisa hidupnya”.

Menurut Sofa Nurdiyanti “hasil studi yang dilakukannya“ lansia yang tinggal di rumah lebih bahagia dibandingkan dengan lansia yang tinggal di Panti Jompo. Lansia yang tinggal di rumah lebih bahagia karena merasa masih dibutuhkan dan disayangi oleh anggota

²⁶Sofa Nurdiyanti, *Panti Jompo dan Cinta yang Terlewatkan*, [http://www.andaluar biasa.com](http://www.andaluarbiasa.com)., 23 Desember 2009, diakses 12 Pebruari 2013.

keluarganya. Masa pensiun/lansia diisi dengan melakukan berbagai kegiatan seperti berkebun, melakukan aktivitas sosial, berolahraga secara rutin, menjaga cucu, dan lain-lainnya. Kegiatan itu menjadikan mereka lebih bahagia dan dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori aktivitas yang dikemukakan oleh George Maddox (1964), *the activity theory* (teori aktivitas) yang menyatakan “kebahagian dan kepuasan timbul dari adanya keterlibatan dan penyesuaian diri dalam menghadapi tantangan hidup. Semakin orang-orang dewasa lansia aktif dan terlibat, semakin kecil kemungkinan mereka menjadi renta dan semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya”(Sofa Nurdianti, *ibid*).

Banyak alasan yang dikemukakan anak atau keluarga yang menitip orang tua di Panti Werdha. Karena merasa sibuk dan tidak cukup waktu mengurus/merawat orang tua, adanya ketidaksepahaman antara orang tua dan anak, ketidakcocokan antara menantu dengan mertua sehingga membuat menantu menolak kehadiran orang tua dalam kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Tentu saja alasan tersebut logis tetapi tidak disertai dengan nurani. Karena orang tua telah membesarkan anaknya dengan limpahan kasih sayang. Tindakan anak/keluarga menitipkan orang tua ke Panti Werdha atau menyerahkan perawatannya kepada orang lain bukanlah ide yang tepat. Orang tuaseharusnya melewatkan sisa hidupnya dengan bahagia, berkumpul bersama dengan orang-orang yang disayangi. Bukannya terasing di tempat lain.

Menurut Sofa Nurdianti, “Memberikan materi cukup bukan berarti kebutuhan akan kasih sayang bisa diganti. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Materi memang penting, tapi tidak bisa mengganti kebutuhan akan kasih sayang. Contohnya, ada seorang lansia ibu dari seorang Bupati di Jawa Tengah yang tinggal di Panti Jompo. Setiap bulan hanya pegawai bupati yang menengok keadaannya. Bupati dan keluarganya tak pernah sekalipun mengunjunginya. Ternyata pendidikan dan jabatan yang bagus tidak menjamin adanya perubahan cara pandang seseorang. Ia tetap menitipkan orang tuanya di Panti Jompo.

Apa pun alasannya merupakan hal yang sulit diterima oleh akal sehat” (Sofa Nurdiyanti, 2009, *ibid*).

Terdapat dua Panti Werdha, yaitu (1) Panti Werdha yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang umumnya menampung penduduk lansia terlantar. (2) Panti Werdha yang dimiliki/dikelola oleh swasta (Yayasan atau Institusi keagamaan). Di Kota Yogyakarta terdapat tiga panti werdha/jompo, yaitu:

- (1) Panti Werdha Budhi Dharma yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- (2) Panti Werdha Hanna yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Panti Werdha Hanna yang didirikan Persekutuan Doa Wanita Oikumene Hanna (PDWOH).
- (3) Panti Werdha Prandan Padudan yang dimiliki dan dikelola oleh Gereja Kristen Jawa (GKJ).

Di Kota Yogyakarta belum terdapat Panti Werdha yang dimiliki dan dikelola di bawah naungan organisasi keagamaan/ormas Islam, Budha dan Hindu.²⁷

Menurut Herry Supriyanto²⁸ “hal itu dikarenakan mengurus lansia penghuni Panti Werdha itu susah dibandingkan mengurus anak di panti anak. Anak jelas kaderisasi untuk masa depan yang masih diharapkan untuk membantu keluarga, panti, masyarakat dan pemerintah, sedangkan lansia di Panti Werdha tidak banyak yang dapat diharapkan lagi kecuali harapan meninggal dunia. Selain itu, bagi pemeluk agama Islam terdapat ayat Al Qur’an yang menyatakan “anak mempunyai kewajiban memelihara orang tua hingga akhir hayatnya” juga ada hadis “surga di telapak kaki ibu”.

²⁷Nanik Trisnajayanti, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 Maret 2014.

²⁸Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

Pandangan lain dikemukakan Sigit Warkito, SAg. MSi²⁹ yang menyatakan “Panti Werdha yang secara langsung ditangani/dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta hingga sekarang belum ada, karena sudah ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Yang ada adalah kegiatan-kegiatan keagamaan dengan mengirim ustaz/pendakwah atau petugas penyuluhan ke Panti Werdha Budhi Dharma bekerjasama dengan Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan pengurus Panti Werdha Budhi Dharma untuk menyampaikan ceramah, pengajian dan penyuluhan lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, baik rutin maupun temporer. Begitu pula Panti Werdha/jompo yang dikelola oleh ormas Islam atau yayasan-yayasan Islam juga belum ada. Memang dalam ajaran agama Islam anak berkewajiban memelihara orang tuanya hingga akhir hayatnya apakah itu faktor penyebabnya Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain tidak mendirikan Panti Werdha/jompo? Saya kira perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam”.

Dalam studi ini pengumpulan data dilakukan di Panti Werdha Budhi Dharma dan Panti Werdha Hanna. Sedangkan Panti Werdha Prandan Padudan setelah dilakukan kunjungan pengurus Panti Werdha Prandan Padudan sedang tidak berada di di tempat. Secara garis besar gambaran kedua panti yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Panti Werdha Budhi Dharma

Panti Werdha Budhi Dharma berdiri sejak tahun 1952, semula berlokasi di jalan Solo No. 62 (sekarang Hotel Sri Manganti) menggunakan tanah milik kraton dengan nama Panti Jompo Budhi Dharma. Pada saat itu panti masih menerima/ menampung penghuni dari berbagai penyandang masalah sosial, seperti: lansia terlantar, anak jalanan/terlantar, gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna

²⁹Sigit Warkito, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 27 Maret 2014.

wisma dan lain-lain. Setelah 15 tahun, tepatnya tanggal 15 Agustus 1967 Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memisahkan penghuni panti menurut kelompoknya. Khusus untuk lanjut usia/lansia terlantar ditempatkan di kampung Tegalgendu Kecamatan Kotagede DI Yogyakarta dengan nama Panti Werdha Budhi Dharma (PWBD) dengan status menyewa. Sepuluh tahun kemudian (1977), Panti Werdha Budhi Dhama dipindahkan lagi ke areal resmi milik PemDa di Ponggalan UH 7/203 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulhardjo Kota Yogyakarta hingga sekarang.

Panti Sosial adalah wadah atau institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani dan sosial serta perlindungan guna memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar. Lanjut usia adalah setiap warga negara baik lelaki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik yang potensial maupun tidak potensial.

Tujuan pendirian panti adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi lanjut usia karena sesuatu dan beberapa hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti berupa: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan baik, sehingga mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin.

Panti Werdha Budhi Dharma memiliki visi dan misi. Visi Werdha Budhi Dharma adalah terselenggaranya usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memungkinkan mereka dapat menjalani hari tuanya dengan diliputi rasa kenyamanan serta ketentraman lahir dan batin. Sedangkan Misinya adalah: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan lanjut usia, meliputi: a. Kesejahteraan fisik, sosial, mental dan spiritual; b. Pengetahuan dan ketrampilan; c. Jaminan sosial dan kehidupan; d. Jaminan perlindungan hukum. 2. Meningkatkan kesadaran dalam beribadah dan memelihara kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

Jangkauan pelayanan/wilayah kerja Panti Werdha Budhi Dharma adalah penduduk lansia di Kota Yogyakarta dan DI

Yogyakarta, namun tidak menutup kemungkinan penduduk luar kota lainnya, terutama lansia terlantar hasil razia Dinas Sosial dan Satpol PP di Kota Yogyakarta, dan lansia yang diserahkan dari kepolisian. Daya tampung panti ini adalah 60 orang lansia.

Persyaratan yang harus dipenuhi calon penghuni Panti Werdha Budhi Dharma adalah:

- (1) Usia minimal 60 tahun.
- (2) Terlantar (kondisi sosial, ekonomi lemah/tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar);
- (3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak berpenyakit menular yang dinyatakan oleh dokter/Puskesmas setempat;
- (4) Mandiri (masih mampu mengurus diri sendiri untuk memenuhi aktifitas minimal sehari-hari berupa makan, mandi, ibadah dsb);
- (5) Bersedia untuk tinggal di Panti dan menerima pelayanan dengan mematuhi peraturan yang ada;
- (6) Ada penanggung jawabnya;
- (7) Mengisi blangko permohonan beserta lampirannya;
- (8) Menerima hasil seleksi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Jenis pelayanan yang diberikan di Panti Sosial Werdha Budhi Dharma adalah:

- (1) Pelayanan kebutuhan makan dan minum dengan pengaturan menu sesuai dengan kebutuhan gizi lanjut usia yang telah dikonsultasikan dengan Puskesmas serta pemenuhan kebutuhan sandang;
- (2) Pelayanan kesehatan dan pemeriksaan rutin setiap bulan dua kali bekerjasama dengan pihak Puskesmas terdekat, dan di rujuk ke rumah sakit pemerintah bila diperlukan;
- (3) Bimbingan rohani berupa bimbingan mental, keagamaan dan kemasyarakatan bekerjasama dengan instansi terkait atau mendatangkan pemuka agama sesuai dengan agama klien;
- (4) Bimbingan fisik dilaksanakan dalam bentuk senam khusus lanjut usia seminggu sekali;

- (5) Bimbingan ketrampilan untuk mengisi waktu luang seminggu sekali;
- (6) Kegiatan kreatif/rekreasi di luar panti untuk menambah pengalaman setahun sekali.

Pelayanan tersebut dilaksanakan sampai dengan penghuni lanjut usia meninggal dunia. Termasuk didalamnya prosesi perawatan jenazah dan pemakaman.

Jadwal kegiatan penghuni Panti Werdha Budhi Dharma perminggu adalah:

- (1) Hari Senin : Pukul 07.30–10.00 : Kegiatan Pengajian.
- (2) Hari Selasa : Pukul 07.30 –10.00 : Kegiatan ketrampilan (Membuat sulak dari raffia, hiasan bunga dari daun lontar; taplak meja dari anyaman benang wol dan keranjang parcel dari rotan.
- (3) Hari Rabu : Pukul 09.00–14.00 : Kegiatan musik menggunakan alat musik electone.
- (4) Hari Kamis : Pukul 07.30–09.00 : Kegiatan pembinaan mental spiritual.
- (5) Hari Jum'at : Pukul 08.00–selesai : Kegiatan kerja bakti di lingkungan panti.
- (6) Hari Sabtu : Pukul 07.30–09.00 : Kegiatan senam lansia.

Kegiatan ketrampilan di panti diasuh oleh mantan guru SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta seperti membuat sulak, bunga, taplak meja, keset dan lain-lain. Umumnya penghuni panti sangat senang mengikutinya. Hasilnya tidak untuk dijual karena sifatnya bukan untuk ekonomi produktif. Hasil kegiatan keterampilan penghuni panti pada prinsipnya tidak di jual, kecuali ada tamu/ donatur yang datang ke panti atau dalam acara amal dan pameran membeli hasil karya penghuni panti. Hasil penjualannya masuk ke kas Panti Werdha Budhi Dharma untuk digunakan kepentingan bersama penghuni

panti. Kadangkala untuk oleh-oleh keluarga penghuni panti yang datang ke panti atau ketika penghuni panti kembali ke keluarganya. Kegiatan keagamaandilakukan bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Untuk penghuni panti yang beragama Islam pengajian dilakukan pada hari senin dan Kamis. Guru/Ustazd agama Islam didatangkan dari kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga dari luar untuk memberi ceramah dan pengajian kepada penghuni panti. Bagi penghuni panti yang beragama non muslim, yaitu Kristen dan Katolik ke gereja hari Selasa dan Minggu juga mendatangkan pendeta/romoke panti untuk acara kebaktian dan kerohanian. Terdapat pula penghuni panti atas kemauan sendiri mengikuti kegiatan kerohanian di luar panti. Sedangkan untuk penghuni panti yang beragama Hindu dan Budha diserahkan kepada masing-masing lansia karena di panti belum tersedia rohaniawan agama Hindu dan Budha. Penghuni panti yang beragama Hindu 1 orang dan Budha 1 orang. Untuk mengisi waktu luang, dipanti diadakan acara hiburan musik dan menyanyi dengan diiringi organ tunggal pada hari Kamis dan olahraga senam lansia pada hari Sabtu dengan instruktur senam dari luar panti untuk menjaga kebugaran lansia penghuni panti. Dalam setiap tahun dilakukan kegiatan rekreasi untuk penghuni panti. Tahun 2012 ke pantai Waru Bantul dan Tahun 2013 ke Museum Merapi.³⁰

Dari sisi pegawai dan sarana prasana yang tersedia di Panti Werdha Budhi Dharma, menurut Nurcahyo³¹ "Jumlah pegawai keseluruhannya adalah 29 orang, terdiri dari 11 orang berstatus PNS dan 18 orang pegawai honorer. Jumlah 29 orang pegawai ini belum mencukupi, terutama perawat hanya berjumlah 6 orang (3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Idealnya 1 orang perawat melayani 5 orang lansia. Minimal 8 orang perawat dan maksimal 10 orang perawat. Karena kekurangan perawat, maka jadwal perawat jaga/

³⁰Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

³¹Nurcahyo, Kepala Tata Usaha UPT Panti Werdha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

bertugas dibagi dalam 3 sip, yaitu: Sip I pukul 07.00–14.00 WIB dengan perawat jaga 2 orang; Sip II pukul 14.00–20.00 WIB dengan perawat jaga 2 orang; Sip III pukul 20.00–07.00 WIB dengan perawat jaga 1 orang. Setiap perawat 3 hari jaga dan 1 hari libur. Untuk menambah jumlah perawat dan pegawai di Panti, Pemkot Kota Yogyakarta menghadapi masalah karena sudah terlalu banyak belanja untuk pegawai, dan jumlah pegawai yang ada harus dikurangi. Sarana dan prasarana yang tersedia di Panti Werdha Budhi Dharma masih terbatas, seperti tabung oksigen hanya 2 buah dan sudah mengajukan tambahan 2 buah ke Pemkot, tetapi belum mendapat persetujuan. Komputer masih diperlukan 2 unit, Komputer yang ada sekarang sudah lama sudah harus diganti. Printer diperlukan 2 buah. Mesin fotocopy sudah tidak layak dan harus diganti. Kursi roda berjumlah 8 buah sudah mencukupi. Peralatan yang diperlukan dan belum tersedia di panti adalah alat pengasapan (abuliser), alat perawatan luka lengkap (gunting steril) 3–5 buah”.

Dari sisi jumlah penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, Nurcahyo menyatakan “ Panti ini dayaampungnya adalah 60 orang lansia. Jumlahnya dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah penghuni panti 52 orang. Tahun 2014 (Maret 2014) jumlah penghuni panti 57 orang lansia (awal Januari 2014 berjumlah 59 orang lansia. Pertengahan Januari hingga Pebruari 2014 terdapat 1 orang lansia meninggal dunia dan 1 orang lansia keluar dari panti kembali kepada keluarganya). Latar belakang ekonomi lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma umumnya berasal dari keluarga miskin. Tetapi terdapat pula lansia penghuni panti dulunya berasal dari keluarga menengah dan kaya yang menjadi miskin terlantar dan jumlahnya relatif kecil ”.

Dari 57 orang lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma terdapat 37 lansia perempuan dan 20 orang lansia laki-laki. Umur Lansia penghuni panti terendah 60 tahun dan tertinggi 93 tahun. Menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah (1) Kelompok umur lansia muda (umur 60–69 tahun) berjumlah 19 orang (6 orang lansia laki-laki dan 13 orang lansia perempuan). (2) Kelompok umur

lansia menengah (umur 70-79 tahun) berjumlah 29 orang (11 orang lansia laki-laki dan 18 orang lansia perempuan). (3) Kelompok umur lansia tinggi (80 tahun ke atas) berjumlah 9 orang (3 orang lansia laki-laki dan 6 orang lansia perempuan). Menurut daerah asal/tempat lahir lansia, penghuni panti sebagian besar (49 orang lansia) berasal dari Provinsi DI Yogyakarta; 6 orang lansia dari Provinsi Jawa Tengah; 1 orang lansia dari Jawa Timur, dan 1 orang tidak jelas daerah asal/ tempat kelahirannya. Tingkat pendidikan lansia penghuni panti tergolong rendah, terdiri dari 32 orang tidak sekolah; 16 orang tamat SD; 4 orang tamat SLTP; 4 orang tamat SLTA, dan 1 orang pernah kuliah di Fakultas Farmasi UGM (tidak tamat tinggal Skripsi berhenti karena terkendala biaya).³²

Menurut Hadi Muchtar³³ “Penghuni Panti Werdha Budhi Dharma ada yang ditemukan di jalanan, hasil razia Dinas Sosial dan Satpol PP, diserahkan oleh Kepolisian, terbanyak yang diantar/diserahkan oleh anak/familinya untuk menjadi penghuni panti dan cukup banyak yang masih antri. Di antara penghuni panti, terdapat penghuni panti yang keluarganya sudah meninggal atau tidak mempunyai anak dan keluarga. Juga lansia penghuni panti yang dikembalikan kepada keluarganya karena tidak betah tinggal di panti. Karena cukup banyak lansia yang antri untuk menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma maka diseleksi”.

Masalah yang dihadapi pengurus/pengelola Panti Werdha Budhi Dharma dalam melayani lansia penghuni panti, menurut Nurcahyo: “Setiap lansia mempunyai masalah sendiri-sendiri. Lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma umumnya berasal dari keluarga miskin. Tetapi terdapat pula yang dulunya berasal dari kelas menengah dan keluarga kaya. Misalnya Pak Sumardiman, umur 85 tahun, suku Jawa, berasal dari Kota Yogyakarta, Pendidikan SMA. Ia dulu bekerja sebagai

³²Sumber Data: Diolah dari data laporan Panti Werdha Budhi Dharma tanggal 25 Maret 2014.

³³Hadi Muchtar, Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 Maret 2014.

PNS Juru Penerangan di Jawatan Penerangan (1964–1974) pernah menjadi Kepala Juru Penerangan di Kabupaten Temanggung. Ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS oleh Bupati Temanggung Maskum Sofyan, SH tahun 1974. Ia pendiri dan pendekar sakti ilmu bela diri BIMA (Budaya Indonesia Mataram) yang dulu di segani/ditakuti di Yogyakarta dan sekitarnya. Ia merupakan anggota pendiri tertua yang masih hidup. Pernah melatih ilmu bela diri di AKABRI Udara dan di Jakarta. Ia juga pernah sebagai Sekretaris PNI Kota Yogyakarta pada tahun 1953. Setelah berhenti sebagai PNS menyalurkan hobibynya sebagai penulis tentang sosial budaya. Status perkawinannya duda cerai yang pernah menikah dua kali. Dengan isteri pertama mempunyai 3 orang anak. Yang masih hidup satu orang anak laki-laki dan tinggal di Cinere Jakarta. Tahun 1991 anaknya menikah dan pada saat itulah ia bertemu dengan anaknya untuk pertama kali setelah bercerai dengan isteri yang pertama. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi hingga sekarang. Dengan isteri kedua tidak mempunyai anak. Ia tidak bersedia mengemukakan alasan perceraian dengan isteri pertama maupun kedua. Masuk Panti Werdha Budhi Dharma 29 Mei 2012 sebagai lansia terlantar dan tidak mempunyai pekerjaan. Ia masuk panti atas saran tetangganya yang bekerja sebagai petugas di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Sebelum tinggal dipanti, ia tinggal di rumah saudara dan teman-temannya. Karena merasa maluterus menerus tinggal di rumah saudara dan teman-temannya akhirnya ia mengikuti saran tetangganya pindah ke Panti Wredha Budhi Dharma. Ia termasuk penghuni panti yang pintar, kritis, agak sukar diatur tetapi mau mengatur, sering menceritakan masa jayanya dan kehidupan keluarganya dulu yang tidak harmonis dan kerinduan dengan anaknya yang tidak pernah datang ke panti untuk menjenguknya. Selama tinggal di panti hanya saudara dari ibunya yang sering datang berkunjung ke panti. Di panti kalau malam hari hingga larut malambaru tidur. Sebelum tidur selalu minta ditemani petugas panti untuk mendengar cerita suka dan dukanya ketika masih muda dan di usia senja. Contoh lain, Endro Pratomo, umur 73 tahun, Pendidikan tamat STM, iadulu tergolong kaya karena bekerja di sektor tambang, pernah dikirim bekerja di Jepang,

Singapura dan Kalimantan. Pada saat di Kalimantan ketika dia bersama keluarganya mendaki gunung terjadi kecelakaan dan seluruh keluarganya meninggal. Setelah itu dia sakit dan di dirawat di rumah sakit dan harta yang dimilikinya habis untuk membiayainya. Ia menggelandang di Yogyakarta dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 2003 masuk Panti Werdha Budhi Dharma. Ia masuk panti ditemukan oleh petugas Dinas Sosial di jalanan Kota Yogyakarta. Pada awalnya di panti ia lebih banyak diam dan menyendiri, sekarang sudah bisa bergaul. Ada pula penghuni panti yang tidak betah bertahan dengan kehidupan di panti. Namanya tidak disebutkan, sebelum di panti ia adalah seorang yang kaya raya karena bekerja di Bea Cukai. Karena kasus korupsi ia masuk penjara dan hartanya habis dan ia menjadi miskin hidup terlunta-lunta. Isteri dan anaknya tidak memperdulikannya lagi. Kemudian ia masuk panti akhir tahun 2013. Di panti ia seakan-akan masih menjadi orang kaya, sombong dan tidak peduli dengan sesama penghuni yang lain termasuk petugas panti. Ia hanya bertahan dalam beberapa bulan tinggal di panti kemudian keluar. Mungkin karena ia merasa penghuni panti yang lainnya kurang menyukainya atau sebab lain ia keluar dari panti”³⁴

Pandangan lain dikemukakan Herry Supriyanto³⁵ yang menyatakan:

“Masalah utamanya lansia penghuni panti adalah karena lansia mempunyai keterbatasan secara sosial dan fungsi fisiknya. Rata-rata penghuni panti untuk melaksanakan kedua fungsi itu berkurang. Fungsi panti Werdha Budhi Dharma adalah untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang tidak terpenuhi itu untuk dilayani. Fungsi struktural umumnya yang tinggal di panti masyarakat miskin. Dari segi kultural sudah ada pergeseran orang tidak *mikul duwur mendem jero* juga Kota Yogya sudah seperti Jakarta. Bantuan dan sumbangan sosial sudah bergeser. Gotong royong sudah “*luweh-luweh*” atau “*acuh tak acuh*” dan

³⁴Nurchahyo, *Opcit*, Wawancara, 21 Maret 2014.

³⁵Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Werdha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

cenderung menyerahkan kepada pemerintah. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial sudah meluntur. Apalagi lansia penghuni panti dari keluarga menengah ke atas malas datang ke panti. Diberitahukan bahwa keluarganya yang sudah lansia dipanti sakit saja tidak ada yang datang, kalau toh datang sudah lebih dari 2 hari baru datang”.

Hal senada dikemukakan Nanik Trisnajayanti.³⁶ Ia menyatakan:

“Masalahnya sudah terjadi pergeseran budaya. Dulu tetangga atau masyarakat begitu peduli dengan orang tua lansia. Sekarang kepedulian masyarakat dengan lansia semakin berkurang. Anak/keluarga justru memasukkan orang tuanya ke panti dengan berbagai alasan seperti sibuk bekerja, orang tuanya rewel/cerewet, orang tuanya mengajak anak cucu dan keluarganya mendengar ceritanya sampai larut malam dan alasan lainnya. Dinas sosial sendiri mengarahkan/menganjurkan lansia sebaiknya dipelihara dan dilayani dalam kehidupan keluarganya di rumah. Di Panti Werdha Budhi Dharma masalah yang sering dihadapi pengurus/petugas panti dalam melayani lansia penghuni panti adalah di antara lansia penghuni panti ada yang sikap dan tingkah lakunya seperti anak-anak, rewel, cerewet, senang bercerita masa lalunya dan keluarganya, sukar tidur karena stres, sakit dan lain-lain. Kadangkala terjadi pertengkaran antar sesama lansia penghuni panti, seperti ada tamu yang datang memberi uang atau barang, dan menanyakan kepada sesama penghuni panti yang lain berapa uang yang diberikan, atau barang apa yang diberikan. Jika berbeda menimbulkan pertengkaran antar sesama lansia penghuni panti. Begitu pula suasana di dalam kamar, ada lansia yang senang kalau tidur gelap dan ada lansia kalau tidur dengan menggunakan alat penerangan. Ada lansia yang terus menerus ngoceh/ngomong hingga larut malam dan mengganggu lansia penghuni kamar lainnya dan itu menimbulkan pertengkaran yang kadangkala menyebabkan

³⁶Nanik Trisnajayanti, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 21 Maret 2014 dan 25 Maret 2014.

antara penghuni satu dengan yang lainnya tidak bertegur sapa. Tetapi secara umum lansia penghuni panti lebih senang tinggal dipanti karena dipanti mendapat pakaian, makanan, uang saku perbulan, kamar penginapan dan berbagai fasilitas lainnya yang dijamin pemerintah/negara. Kadang-kadang mendapat uang dan barang dari tamu atau donatur yang datang ke panti. Tidak jarang lansia penghuni panti membawa pulang oleh-oleh yang diperolehnya di panti untuk keluarganya. Keluarga yang datang ke panti umumnya keluarga dekat. Terdapat beberapa penghuni panti yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya dikarenakan tidak punya keluarga, atau keluarganya tinggal jauh di luar panti dan sebab lainnya. Di Kota Yogyakarta kohesi sosial warga terhadap lansia cukup tinggi. Di Panti Werdha Budhi Dharma terdapat lansia penghuni panti yang menjadi penanggung jawabnya adalah pengurus RT. Si mbah lansia sakitwarga RT tersebut secara bergantian menjaga dan membezuknya di RS. Kalau ada lansia penghuni panti meninggal diberitahu keluarganya dan RT yang bersangkutan. Berbagai masalah yang terjadi di panti umumnya dapat diselesaikan oleh pengurus/petugas Panti Wredha Budhi Dharma dan dilaporkan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta”.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pengurus Panti Werdha Budhi Dharma dengan lansia penghuni panti, selain melalui kegiatan-kegiatan rutin, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu saresehan setiap akhir bulan antara pengurus dengan penghuni Panti Werdha Budhi Dharma. Dalam serasehan itu diinformasikan mengenai berbagai hal seperti kondisi lansia penghuni panti dan permasalahannya, kondisi panti dan permasalahan yang dihadapi serta program kegiatan yang telah dan akan diselenggarakan. Setiap serasehan yang diadakan, respon atau pandangan yang dikemukakan lansia, ada yang kritis, ada yang diam, ada yang *merem/*tidur, ada yang sudah *semeleh*, ada yang kembali ke karakter orang pemalu, karakter *seriwanti* = yang di bawa mati atau *digawe mati*. Hikmah yang dapat dipetik sebagai penguru panti adalah semakin

memahami berbagai persoalan dan latar belakang kehidupan lansia di panti. Bekerja di Panti Werdha Budhi Dharma akan semakin menyadarkan kita bahwa “kita tidak selalu menoleh ke atas, secara perlahan tapi pasti kita juga akan memasuki lanjut usia seperti mereka dan makin menyadarkan kita akan taqdir kematian.³⁷

Selain pandangan pejabat Dinas Sosial dan pengurus Panti Werdha Budhi Dharma. Dalam tulisan ini dikemukakan pandangan tiga petugas yang langsung menangani penghuni Panti Werdha Budi Dharma sebagai berikut:

Retno, S.Km,³⁸ umur 24 tahun, tempat lahir Yogyakarta, agama Islam, suku Jawa, pendidikan Sarjana Kemasyarakatan, status belum menikah, pekerjaan tenaga perawat honorer penghuni Panti Werdha Budhi Dharma sejak tahun 2012. Ia mengemukakan:

“Sebagai petugas perawat lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma banyak pengalaman yang didapatkan. Sikap dan tingkah laku lansia penghuni panti kembali seperti anak kecil, manja, agak rewel, ada yang ngambek dan iri. Pola tidur lansia kadang-kadang di siang hari tidur, malam hari tidak bisa tidur dan minta ditemani petugas. Umumnya lansia di panti membutuhkan perhatian kasih sayang dari keluarga. Masalahnya tidak semua keluarga lansia penghuni panti rutin datang ke panti, bahkan terdapat beberapa lansia penghuni panti yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Sebagai tenaga perawat di panti merasakan tenaga perawat yang hanya 6 orang dipanti masih kurang, apalagi sewaktu lansia banyak yang sakit. Idealnya jumlah perawat 10–12 orang perawat untuk melayani sekitar 57 - 60 orang lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma. Satu orang perawat itu idealnya melayani 5 orang lansia. Selain itu, peralatan di panti masih kurang seperti tabungan gas masih

³⁷Herry Supriyanto, Kepala UPT Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

³⁸Retno, perawat Panti Werdha Budhi Dharma, *Dalam FGD Penghuni Panti*, Yogyakarta, 27 Maret 2014.

terbatas, peralatan pelayanan kesehatan masih terbatas. Belum ada dokter tetap yang rutin setiap hari di panti dan belum ada tenaga psikolog di Panti. Juga diperlukan ruang khusus/UGD di panti terutama untuk lansia penghuni panti yang sakit. Suka dan duka bekerja di panti. Sukanya dapat merawat lansia penghuni panti yang umumnya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Dukanya, jika lansia sakit parah dan meninggal dunia. Pernah di tengah malam si mbah penghuni panti meninggal dan kebetulan petugas yang jaga hanya saya sendiri”

Prihadi Bimantara, SS,³⁹ umur 56 tahun, tempat lahir Yogyakarta, suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Sosiologi, Status Kawin, Pekerjaan PNS Dinas Sosial Kota Yogyakarta sejak tahun 1988-sekarang. Tahun 1988–1999 pekerja sosial di kecamatan. Pada tahun 2000 Departemen Sosial oleh Presiden Abdurrachman Wachid Departemen Sosial dihapus dan ia di tempatkan di KecamatanKraton untuk menangani program keluarga miskin/tidak mampu. Tahun 2008- 2010 ditugaskan di Panti Karya menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti gepeng, anak jalanan, lansiatertinggal, waria, PSK lain-lainnya. Tahun 2011 ditugaskan di panti Werdha Budhi Dharma hingga sekarang. Sebagai pekerja sosial di panti, ia mengatakan:

“Tugasnya memberikan pencerahan dan pengarahan tentang berbagai hal kehidupan lansia penghuni panti. Latar belakang lansia penghuni panti ini berbeda-beda, karena itu harus beradaptasi dulu dengan kehidupan di panti. Ada lansia yang gampang di atur dan ada pula yang susah diatur. Ada lansia yang cepat beradaptasi dan ada yang lambat. Ada lansia yang masih punya keluarga dan ada yang tidak punya keluarga. Kebanyakan berasal dari keluarga miskin tetapi ada pula yang berasal dari keluarga mampu. Misalnya ada lansia dikirim dari Polsek Umbulhardjo ke ini sekarang sudah meninggal. Sebelum si mbah meninggal sebagai petugas

³⁹Prihadi Bimantara, pekerja sosial Panti Werdha Budhi Dharma, Dalam FGD Penghuni Panti, Yogyakarta 27 Maret 2014.

sosial ia menggali persoalan yang dihadapi si mbah. Ternyata Si Mbah mempunyai saudara kaya tetapi sering menghina si mbah. Karena sering dihina, si mbah pergi meninggalkan rumah saudaranya yang kaya dan menjadi lansia terlantar yang kemudian ditemukan oleh polisi di Polsek Umbulhardjo. Di antara penghuni panti ini ada yang tidak memiliki KTP. Kebanyakan yang tidak punya KTP adalah lansia terlantar hasil dari operasi razia Dinas Sosial dan Satpol PP dan lansia terlantar yang diserahkan oleh kepolisian. Kesulitannya mereka tidak punya KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan untuk mendapatkan KTP yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Memang persoalan lansia tidak memiliki KTP belum mendapat perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya selaku petugas panti dan ke depan akan diperhatikan dengan kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta”.

Andri,⁴⁰ umur 44 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SLTA, status kawin. pekerjaan Satpam honorer Panti Werdha Budhi Dharma sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sebelum menjadi Satpam sebagai tenaga honorer cleaning service Panti Werdha Budhi Dharma dari tahun 2006–2012. Pengalaman selama bekerja di panti ini adalah:

“Lansia penghuni panti sikap dan tingkah lakunya seperti anak-anak lagi. Kalau mendapat sesuatu baik dari panti atau tamu yang datang semuanya ingin mendapatkannya. Kalau tidak mendapatkan mereka protes. Ada pula si mbah yang susah tidur untuk minta ditemani. Selain itu, latar belakang mbah-mbah penghuni panti ada yang dari kampung dan juga berasal dari kota. Juga ada yang dulu punya dan tidak punya/miskin. Ada pula lansia penghuni panti yang ingin bebas atau tidak mau terikat dengan tata tertib panti. Juga, ada perbedaan antara lansia terlantar hasil operasi razia dari Dinas Sosial dan Satpol PP dengan lansia terlantar yang diserahkan oleh keluarganya. Lansia terlantar hasil razia sering pergi keluar dari

⁴⁰Andri, Satpam Panti Werdha Budhi Dharma, *Dalam FGD Penghuni Panti*, Yogyakarta, 27 Maret 2014.

panti melewati batas waktu yang diizinkan. Lansia yang pergi ke luar dari panti harus melapor ke Satpam panti. Batas waktunya habis magrib harus kembali ke panti. Kadangkala melewati batas waktu yang ditetapkan. Kalau ada kejadian di panti dilaporkan kepada Kepala Panti. Jumlah Satpam di Panti Werdha Budhi Dharma 4 orang Satpam. Tenaga Satpam panti masih kurang. Idealnya 6 orang. Dalam menjaga keamanan panti di bagi 3 shift jaga, yakni: sip I pukul 07.00–14.00; Sip II pukul 14.00–20.00, dan Sip III pukul 20.00–07.00. Setiap sip dijaga oleh 1 orang Satpam. Dalam dua hari jaga satu hari libur. Suka dan dukanya sebagai Satpam di Panti Werdha Budhi Dharma. Sukanya dapat menjaga keamanan lansia penghuni panti dan dapat menemani dan mendengar cerita dan pengalaman masa lalu si mbah lansia dan keluarganya yang dapat dijadikan pengetahuan berharga bagi dirinya. Dukanya, kalau malam hari ada si mbah yang belum bisa tidur, nongkrong dan minta ditemani padahal sudah di atas pukul 23.30 malam. Kadangkala ada lansia penghuni panti yang sakit dan meninggal. Sebagai petugas Satpam Panti Werdha Budhi Dharma ia harus sabar, ikhlas dan menyayangi si mbah dan tidak boleh membuat perasaan si mbah kecewa dan menambah beban hidup si mbah penghuni panti”.

Untuk ke depan hal-hal yang diperlukan Panti Werdha Budhi Dharma menurut pengurus dan petugas panti adalah Dokter tetap di panti yang dapat melayani pengobatan lansia penghuni panti setiap hari. Tersedianya tenaga psikolog di panti. Keberadaan psikolog di panti dirasakan penting mengingat terdapat cukup banyak kasus lansia penghuni panti yang menderita stress dan umumnya lansia yang masuk ke panti ini dalam keadaan kurang normal. Tenaga perawat di panti masih kurang, idealnya 10–12 orang tenaga perawat atau 1 orang perawat melayani 5 orang lansia penghuni panti. Tenaga Satpam panti hanya 4 orang belum mencukupi. Idealnya 6 orang Satpam. Begitu pula terdapatnya beberapa petugas di panti berstatus tenaga honorer hendaknya menjadi perhatian instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Terbatasnya sarana dan prasarana di Panti Werdha Budhi Dharma, seperti tabung oksigen hanya 2 buah, peralatan komputer, printer dan mesin foto copy yang sudah tidak layak perlu diganti dan ditambah. Begitu pula peralatan kesehatan untuk pengobatan penghuni panti yang diperlukan dan belum tersedia di panti, seperti alat pengasapan (abuliser), alat perawatan luka lengkap (gunting steril) 3-5 buah dan alat untuk menstrilalat-alat kesehatan. Untuk kenyamanan lansia penghuni panti mandi dan buang hajat, kamar mandi perlu dilengkapi dengan shower dan kloset jongkok diganti dengan kloset duduk. Hal lain, kalau dana memungkinkan jumlah kamar di panti ini perlu ditambah. Karena jumlah kamar yang tersedia hanya dapat mampu menampung 60 orang lansia. Sementara di luar panti masih banyak lansia terlantar yang antri untuk menjadi penghuni panti. Hal-hal tersebut hendaknya mendapat perhatian instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Meskipun penghuni Panti Werdha Budhi Dharma telah mendapat jaminan pelayanan kesehatan Jamkesda dari APBD untuk berobat di Puskesmas dan Jamkesos dari dana APBN untuk berobat di RSUD. Namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan Jamkesda dan Jamkessos birokrasinya tidak sederhana dan perlu disederhanakan. Karena kenyataannya mulai dari pendataan nama-nama lansia oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), kemudian diusulkan ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan mengisi syarat-syarat yang disediakan oleh petugas. Selanjutnya diseleksi oleh Tim Seleksi dan hasilnya dirapatkan untuk menentukan penghuni lansia yang akan diterima atau ditolak. Berikutnya petugas sosial menghubungi lansia yang bersangkutan untuk mengecek kondisi yang sesungguhnya lansia yang bersangkutan. Hasil pengecekan dirapatkan kembali apakah layak atau tidak untuk menjadi penghuni panti. Jika layak selanjutnya diserahkan ke Panti Werdha Budhi Dharma.

Terdapatnya persyaratan untuk mendapat Jamkesda dan Jamkessos adalah memiliki KTP Kota Yogyakarta dan lansia yang bersangkutan harus sehat secara jasmani dan rohani menjadi kendala lansia penghuni panti. Karena cukup banyak lansia penghuni panti ini

yang tidak memiliki KTP, terutama lansia terlantar hasil razia Dinas Sosial dan Satpol PP dan lansia yang diserahkan pihak Kepolisian. Begitu pula persyaratan lansia penghuni panti harus sehat secara jasmani dan rohani perlu dipertimbangkan. Karena kenyataannya, lansia penghuni panti kondisi fisik dan non fisik karena faktor usia umumnya tidak/kurang sehat.

Masalah kepemilikan KTP juga berimbas pada hak-hak politik penghuni Panti Werdha Budhi Dharma. Penghuni panti yang tidak memiliki KTP tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Ini berarti penghuni panti tidak dapat menyalurkan aspirasi politik dan hak-hak politiknya selaku warga negara. Kepemilikan KTP juga berimbas terhadap persyaratan Akte Kematian. Salah satu syarat untuk mendapat Akte Kematian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah memiliki KTP Kota Yogyakarta. Kalau penghuni panti meninggal dan masih mempunyai keluarga meskipun tidak memiliki KTP, akte kematian dapat dikeluarkan dengan Surat Pernyataan Kematian dari panti yang ditandatangani oleh keluarga dengan dilengkapi/dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari RT, RW dan Kelurahan. Dalam Surat Pernyataan Kematian juga disebutkan prosesi pemakaman dan tempat dimakamkan. Apakah akan dilakukan oleh keluarga atau diserahkan kepada panti ini. Kalau di panti, prosesi pemakamannya sesuai dengan agama dan kepercayaan lansia penghuni panti yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman milik Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pemakaman milik Dinas Sosial ini tidak hanya diperuntukkan lansia penghuni panti melainkan diperuntukkan untuk seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Yogyakarta yang meninggal dunia. Dan setiap makam tidak hanya diperuntukkan satu orang tetapi beberapa orang yang meninggal dunia.

Dalam hal pelayanan kesehatan, peralihan dari Jamkesda atau Jamkessos ke BPJS untuk penghuni Panti Werdha Budhi Dharma belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala yang dihadapi.

Program BPJS dalam implimentasinya banyak yang tidak tepat, salah satunya terapi untuk penderita diabet yang banyak diderita lansia. Jamkesda atau Jamkessos pelayanan pengobatan diabet dapat dilakukan di Puskesmas dan di RS. Sedangkan BPJS hanya di Puskesmas dan dalam pelaksanaannya banyak Puskemas yang belum siap. Contoh lain penyakit hipertensi yang paling banyak diderita lansia di Yogyakarta. Jamkesda atau Jamkessos untuk penyakit hipertensi dapat diopname di RS selama sebulan. Sedang BPJS untuk penyakit hipertensi diopname di RS maksimal 5 hari. Dan itu menjadi problem bagi lansia. Hal lain yang penting untuk dilakukan perubahan dari sisi pelayanan pengobatan lansia di Puskesmas atau di RS adalah diperlukan ruang khusus bagi lansia. Karena dalam praktik selama ini lansia harus antri untuk berobat di Puskesmas atau RS. Begitu pula ketika menebus obat di apotik.

2. Panti Werdha Hanna

Yayasan Panti Werdha Hanna didirikan oleh Persekutuan Doa Wanita Oikumene Hanna (PDWOH) dengan Akte Notaris Tan A Sioe No. 38 pada tanggal 28 Nopember 1978. Yayasan Panti Werdha Hanna pada bulan Mei 1979 mendirikan Panti Wredha yang diberi nama "Panti Werdha Hanna" yang dikhususkan untuk wanita lansia dengan kapasitas 35 orang lansia.

Tujuan didirikan Panti Werdha Hanna adalah untuk memberikan pelayanan kasih kepada masyarakat khususnya kepada kaum lanjut usia, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, tanpa membedakan suku, bahasa dan agama. Panti ini dibangun di atas tanah seluas 1.823 m², terdiri dari: 16 kamar tidur; 1 buah aula; 1 buah ruang baca; 1 buah ruang ketrampilan; 1 buah ruang isolasi; 1 buah ruang jenazah; 1 rumah Dinasl.

Syarat-syaratnya menjadi penghuni panti adalah:

- (1) Wani
- (2) ta berusia 60 tahun ke atas;
- (3) Mempunyai sponsor/penanggung jawab;

- (4) Mandiri, dalam arti dapat menolong diri sendiri;
- (5) Sehat jasmani dan rohani;
- (6) Tidak merokok dan minum minuman beralkohol;
- (7) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (8) Membayar biaya Rp.900.000,- perbulan untuk kamar yang ditempati dua orang penghuni. Dan terdapat 2 kamar yang ditempati perorangan dengan biaya Rp.1.500.000,- per bulan.

Kegiatan yang diberikan oleh Panti Werdha Hanna kepada lansia penghuni panti adalah

- (1) Kegiatan rutin, pagi-pagi sesudah membersihkan diri, bersama-sama menerima pembinaan rohani dan dilanjutkan senam lansia, kecuali hari minggu. Pembinaan rohani keagamaan hanya bagi mereka yang beragama Kristen dan Katolik. Sedangkan lansia yang beragama Islam, Hindu, Budha diberi kebebasan sesuai ajaran agama yang dipeluknya.
- (2) Pada saat santai atau waktu luang bebas mengerjakan hobynya sendiri, misalnya berkebun, menjahit, menyulam, menyiram tanaman, memberi makan ikan lele, membaca, mengobrol, berjemur, dan menerima kunjungan keluarga, latihan paduan suara, nonton TV dan lain-lain. Kegiatan ini bukan untuk ekonomi produktif tetapi hanya untuk menyenangkan lansia penghuni panti.
- (3) Setiap minggu pagi diadakan kebaktian bagi lansia yang beragama Kristen/ Katolik.
- (4) Pada hari Rabu Minggu I dan III diantar dengan mobil Panti Werdha Hanna menghadiri persekutuan lansia di GKI Ngupasan.
- (5) Pada hari Jum'at menerima kunjungan kasih dari para wanita gereja, terutama yang tergabung dalam Persekutuan Doa Wanita Oikumene Hanna.
- (6) Pemeriksaan kesehatan seminggu sekali oleh dokter panti, serta bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.
- (7) Perayaan hari besar Kristen diadakan bersama-sama Persekutuan Doa Wanita Oikumene Hanna dan sering menerima kunjungan kasih dari gereja-gereja, persekutuan, sekolah atau lembaga lain yang kami sebut sahabat-sahabat "Hanna".

- (8) Rekreasi setahun dua kali (wisata di luar kota atau keliling Kota Yogyakarta).
- (9) Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) bersama panti-Panti Werdha se DI Yogyakarta.

Untuk mengetahui lebih dalam lansia penghuni Panti Werdha Hanna, telah dilakukan wawancara dengan Ibu Dabora Setiadi,⁴¹ umur 48 tahun, berasal dari Yogyakarta, suku Jawa, pendidikan SLTA, Agama Kristen, berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak pertama di SD, anak kedua di SMP dan anak ketiga di SMA. Ia telah bekerja di Panti Werdha Hanna selama 3 tahun. Sebelum di Panti Werdha Hanna, ia pernah bekerja menjadi guru TK dan SD dan berwiraswasta. Alasan ia bekerja di Panti Werdha Hanna karena senang melayani lansia yang umumnya kurang mendapat kasih sayang dari keluarganya. Suka dan dukanya selama bekerja di panti:

Sukanya merasa senang seperti memelihara ibu sendiri dan mereka tentu akan mendoakan segala kebaikan yang kita berikan. Sedangkan dukanya, di antara lansia penghuni panti ada yang berantem, bertengkar, sudah makan dikatakan belum makan, kalau ada yang sakitnya sudah parah dan mau meninggal tetapi ketika keluarganya dihubungi ada yang datang dan ada yang tidak datang. Perasaan sedih ketika penghuni panti ada yang meninggal. Pada bulan Pebruari 2013 tiga orang lansia penghuni panti meninggal dan bulan maret 2013 satu orang lansia penghuni panti meninggal. Selain itu, ada kasus Ibu Murni dari Jawa Timur yang sudah tiga tahun tidak mampu membayar biaya yang ditetapkan panti. Pengurus/petugas begitu terharu terhadapnya dan berusaha mencari donatur. Dan berhasil mendapatkan donatur untuk membiayanya hingga dia meninggal tiga hari yang lalu. Duka lainnya adalah kadangkala untuk menagih biaya panti kepada penghuni/keluarga lansia penghuni panti susah sekali”.

⁴¹Dabora Setiati, Kepala panti *Werdha Hanna*, Wawancara, 29 Maret 2014.

Jumlah petugas pengelola Panti Werdha Hanna saat ini berjumlah 23 orang, terdiri dari 1 orang kepala panti, 11 orang perawat, 2 orang staf administrai, 2 orang cleaning service, 2 orang pencuci pakaian, 2 orang satpam, 2 orang bagian dapur, 1 orang dokter relawan yang datang seminggu sekali ke panti. Di Panti Werdha Hanna belum ada psikolog dan baru direncanakan untuk mendatangkan seorang psikolog. Belum ada dokter tetap. Perawat juga masih kurang. Perawat yang bertugas terdiri dari tiga sip, yaitu: Sip pertama: pukul 07.00–14.00. Sip kedua: pukul 14.00–22.00 dan Sip ketiga: Pukul 22.00–07.00.

Jumlah penghuni Panti Werdha Hanna saat ini 37 orang lansia perempuan. Umur penghuni panti terendah 62 tahun dan tertinggi 97 tahun. Menurut kelompok umur lansia muda (60-69 tahun) berjumlah 6 orang; kelompok umur lansia menengah (70–79 tahun) berjumlah 17 orang; dan kelompok umur lansia tinggi (80 tahun ke atas) berjumlah 14 orang. Daerah asal/tempat kelahiran penghuni panti adalah 19 orang lansia penghuni panti berasal dari Provinsi DI Yogyakarta dan 18 orang lansia berasal dari luar Provinsi DI Yogyakarta, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta dan lain-lain. Menurut agama terdiri dari: 24 orang pemeluk agama Kristen dan Katolik; 10 orang pemeluk agama Islam; 2 orang Hindu, dan 1 orang Budha. Suku bangsa penghuni panti terdiri dari 21 orang suku/ etnis Tionghoa dan 16 orang suku/etnis Jawa. Di antara 37 penghuni Panti Werdha Hanna yang paling lama menjadi penghuni adalah selama 19 tahun. Lansia yang masuk panti diperlukan adaptasi selama tiga bulan. Kapasitas daya tampung Panti Werdha Hanna maksimal 44 orang lansia. Seluruh lansia penghuni Panti Werdha Hanna membayar biaya bulanan Rp.900.000,- untuk kamar yang penghuninya 2 orang dan Rp.1.500.000 untuk kamar yang penghuninya 1 orang. Umumnya lansia datang ke Panti Werdha Hanna atas kemauan sendiri dan diantar oleh anak/keluarganya. Dari 37 lansia penghuni Werdha

Hanna diantaranya 36 lansia masih memiliki anak/keluarga dan 1 orang lansia tidak memiliki anak/keluarga.⁴²

Menurut Ibu Dabora, alasan anak/keluarga menitipkan orang tua/lansia ke Panti Werdha Hanna adalah:

- (1) Tidak cocok dengan menantu;
- (2) Anak/keluarga sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu merawat orang tuanya;
- (3) Perubahan status pernikahan, sebagian besar penghuni panti janda ditinggal mati suami atau cerai.
- (4) Tidak mau merepotkan famili atau keluarganya.
- (5) Tidak menikah, tidak punya anak kandung atau famili yang merawatnya.

Kebanyakan anak/keluarga masih mengunjungi lansia penghuni panti. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Terdapat pula lansia penghuni panti yang tidak pernah sama sekali dikunjungi oleh keluarganya terutama lansia penghuni panti yang tidak menikah. Kemajuan teknologi seperti telpon/Hp tidak perlu tatap muka secara langsung, terutama bagi anak/keluarga penghuni yang tinggal di luar DI Yogyakarta”.

Masalah yang dihadapi pengelola/petugas Panti Werdha Hanna terhadap lansia penghuni pantimenurut ibu Dabora adalah:

“Lansia penghuni panti umumnya manja, cerewet, rewel, malam tidak tidur atau sukar tidur dan minta ditemani. Ada pula lansia penghuni panti sakit tetapi anak/keluarganya tidak memperdulikannya meskipun telah dihubungi via telpon/hp. Sehingga pengurus/petugas panti yang harus mengurus surat keterangan dokter dan membawa ke RS. Sebagai pengurus/petugas panti kadangkala mengalami kata-kata kasar dari keluarga lansia penghuni panti yang sakit. Ada pula keluarga lansia penghuni panti yang menuntut atau bersikap bahwa

⁴²Sumber Data: Diolah dari data yang tersedia di papan pengumuman panti Werdha Hanna dan keterangan yang disampaikan pengurus panti 29 Maret 2014.

orang tua selama tinggal di panti “ makin tambah tua dan makin kurang sehat”. Atau mengatakan “Ibunya kenapa kamarnya dipindahkan, dulu kamarnya lebih bagus sekarang kamarnya kurang baik”. Pernah juga terjadi lansia penghuni panti memberitahukan anak/keluarganya bahwa ia sakit tetapi tidak diperhatikan oleh pengurus/petugas panti, tetapi setelah diperiksa oleh dokter ternyata tidak sakit. Masalah miskomunikasi antara pengurus/petugas panti dengan lansia penghuni panti terutama dengan lansia yang kurang pendengarannya kadangkala juga terjadi. Ada juga kasus lansia yang ingin masuk panti tetapi kapasitasnya terbatas, ketika ditolak keluarganya marah-marah. Adapula yang ditolak karena lansia yang bersangkutan menderita sakit menular, tetapi keluarganya memaksa untuk menjadi penghuni panti. Terdapat pula lansia penghuni panti yang keluar dari panti diambil anak/keluarganya karena keterbatasan biaya. Masalah lansia yang tidak mempunyai keluarga padahal persyaratannya harus ada keluarga yang bertanggungjawab terhadap lansia penghuni panti. Lansia penghuni panti yang sakit ada yang diambil keluarga untuk dirawat sendiri, tetapi kebanyakan pengurus/petugas panti yang mengurus, merawat dan membawa ke Puskesmas atau RS. Untuk penyakit yang ringan diobati di lingkungan panti. Dari segi pembiayaan penghuni panti yang sakit, untuk yang biayanya ringan panti yang menanggung, karena di panti juga menyediakan obat-obatan untuk mereka yang sakit flu, batuk dan lain-lain. Akan tetapi kalau ada penghuni panti yang sakit dan perlu dirawat di RS atau Puskesmas, pengurus/petugas melapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mendapat pengobatan dan perawatan di Puskesmas atau RS. Karena saat ini Jamkesmas/Jamkesda tidak berlaku bagi penghuni Panti Wredha Hanna. Kebanyakan penghuni panti yang sakit dibawa ke RS Bathesda untuk mendapat perawatan dan pengobatan. Kalau biaya obat dan perawatannya mahal, kita konsultasikan dengan keluarga lansia yang bersangkutan untuk membayar biaya tambahannya. Penghuni panti kebanyakan meninggal di panti, pernah terjadi satu malam tiga orang yang meninggal. Mereka yang meninggal itu selanjutnya diserahkan kepada keluarganya” (Dabora Setiati, *ibid*).

Sumber dana Panti Werdha Hanna selain berasal dari penghuni panti, juga dari donatur insidental yang membantu dalam bentuk uang, barang, pakaian, makanan dan minuman. Juga setiap tahun panti menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta dan Kementerian Sosial RI. Tahun 2013 menerima bantuan sebesar Rp.43.800.000,- dari Kementerian Sosial melalui Kanwil. Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta dan dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebesar Rp.12.500.000,- pertahun. Dalam setiap bulan Panti Werdha Hanna melaporkan keadaan keuangan, jumlah penghuni panti yang masuk, keluar dan meninggal juga masalah-masalah yang dihadapi panti kepada kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Juga melaporkan ke Badan Kesejahteraan Sosial (BKSK) di Kelurahan dan Kecamatan. Hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan ke depan adalah SDM masih kurang, seperti Psikolog, dokter tetap, perawat masih kurang. Selain itu, terdapat beberapa penghuni panti tidak memiliki KTP. Bagi penghuni panti yang tidak memiliki KTP maka hilanglah haknya sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada. Karena persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih salah satu persyaratannya memiliki KTP. Hal lain seluruh penghuni panti tidak mendapat BLT karena dianggap berasal dari keluarga mampu yang setiap bulan membayar biaya bulanan ke panti. Padahal terdapat beberapa penghuni yang tidak mampu lagi membayar biaya bulanan karena ekonomi keluarganya menurun atau keluarganya telah meninggal.

9. Realita Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Kebangsaan di Panti Werdha

Untuk memperoleh gambaran realita pemahaman kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan di Panti Werdha dilihat dari dua sisi sudut pandang, yaitu pandangan petugas Panti Werdha di satu sisi dan pandangan lansia penghuni Panti Werdha pada sisi lain.

Dalam pandangan pejabat, pengurus dan petugas Panti Werdha tentang hak-hak lansia penghuni panti selaku warga negara,

seperti makanan, pakaian, uang saku, pendidikan keterampilan, hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya serta mendapatkan pendidikan/pengetahuan keagamaan, olah raga, hiburan dan rekreasi, hak mendapat kunjungan keluarga atau mengunjungi keluarga, hak untuk mendapat jaminan kesehatan/perawatan dan pengobatan, hak untuk mendapatkan identitas diri seperti KTP dan KK, hak untuk mendapatkan akte kematian dan prosesi pemakaman, hak untuk mendapat bantuan sosial, dan hak politik seperti Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada umumnya telah dilaksanakan oleh petugas Panti Werdha terhadap penghuni.

Mengenai KTP, umumnya penghuni panti memiliki KTP karena itu sebagai syarat untuk dapat diterima sebagai penghuni Panti Werdha. Demikian juga lansia penghuni panti ini umumnya 60 tahun ke atas yang secara otomatis mendapat KTP seumur hidup. Pengecualiannya adalah penghuni panti terlantar hasil razia Dinas Sosial dan Satpol PP serta lansia terlantar penghuni panti yang diserahkan oleh pihak kepolisian yang umumnya tidak memiliki KTP. Terhadap lansia penghuni panti yang tidak memiliki KTP karena hilang atau oleh sebab lain, pengurusan untuk mendapatkan KTP tidak diperlukan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu persyaratannya. Karena KK penghuni Panti Werdha umumnya ada pada keluarga penghuni panti. Panti Werdha belum memiliki KK penghuni panti secara bersama-sama. Prosedur untuk mendapatkan KTP cukup dengan Surat Keterangan Pengurus/Petugas Panti yang diajukan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mendapatkan rekomendasi. Dengan surat rekomendasi tersebut, penghuni panti bersama-sama pengurus Panti Werdha ke kantor kelurahan dan kecamatan setempat untuk mendapatkan KTP. Aparat kelurahan dan kecamatan setempat yang menangani KTP lansia penghuni panti cukup baik dan tanggap. Bahkan terdapat kasus lansia penghuni panti yang tidak memiliki KTP dalam keadaan sakit dan tidak bisa di bawa ke kantor kelurahan dan kecamatan setempat. Setelah dilaporkan pengurus panti ke kantor kelurahan dan kecamatan setempat. Pihak aparatkelurahan dan

kecamatan setempat mendatangi lansia penghuni panti untuk menyelesaikan prosedur mendapatkan KTP.

Ita Rusanti,⁴³ mengemukakan:

“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat program memobile KTP dalam rangka percepatan KTP Elektrik (E-KTP) yaitu “Program Penjemputan Bola E-KTP” bagi warga kota yang mengalami keterbatasan (Lansia, Dipabel, dan lain-lain). Semua warga negara tidak boleh ada yang dibedakan antara yang rentan dan tidak rentan. Rentan artinya penduduk yang tidak punya KTP, termasuk penduduk lansia yang tinggal di Panti Werdha. Penghuni panti yang tidakmemiliki KTP dapat diajukan oleh pengurus panti dengan mengajukan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Setelah 1 tahun diterbitkan Kartu Keluarga yang penanggungjawabnya Ketua Panti/Yayasan. Program Ini merupakan program baru yang mulai dilaksanakandi Kota Yogyakarta. Selanjutnya Dinas Kependudukan menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Bagi lansia penghuni panti yang telah memiliki KTP, KK dan identitas lain yang dipersyaratkan maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta melalui program penjemputan bola E-KTP petugasnya akan datang ke panti/yayasan penghuni panti atau dari rumah ke rumah bagi lansia yang belum memiliki KTP. Dikeluarkan UU No. 24/2013 sebagai pengganti UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan maka seluruh penduduk Indonesia yang telah berumur 17 tahun mendapat KTP seumur hidup. Sebelumnya KTP seumur hidup hanya diberikan bagi penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Meskipun di dalam KTP dicantumkan masa berlakunya 5 tahun tetapi dengan UU No. 24/2013 telah ditetapkan berlaku seumur hidup. Selain KTP seumur hidup, terdapat program tentang kepemilikan akte kematian. Dulu Pemerintah Kota Yogyakarta ada program pemberian santunan kematian bagi

⁴³Ita Rusanti, Sekretaris Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 26 Maret 2014.

lansia terlantar. Salah satu syarat untuk mendapatkan santunan kematian adalah memiliki akte kematian. Sekarang terkendala dengan UU Bantuan Sosial yang hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin. Produk program kependudukan untuk lansia yang ditangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah KTP; KK; dan Akte Kematian. Untuk Akte Kematian, RT dan RW berkewajiban melaporkan warganya yang meninggal dunia. Dulu dengan UU No. 23/2006 keluarga yang melaporkan kematian anggota keluarganya. Dan semua urusan kependudukan dikenakan biaya, sekarang dengan UU No. 24/2013 semuanya gratis. Dulu azas yang digunakan peristiwa sekarang azas domisili dengan tidak mengabaikan azas peristiwa. Kalau ada penduduk lansia yang meninggal dunia di Yogyakarta tetapi berasal dari luar Kota Yogyakarta, misalnya berdasarkan KTP dari Kabupaten Sleman, maka pengurusan untuk mendapatkan akte kematian di Kantor Kependudukan Kabupaten Sleman. Khusus penduduk lansia terlantar penghuni panti yang meninggal di Panti Werdha tanpa identitas, maka yang mengurusnya Dinas Sosial dengan menunjukkan Surat Kematian kemudian diajukan ke Dinas Kependudukan untuk dibuat akte kematian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta melalui kebijakan program Jemput Bola diharapkan seluruh penduduk di Kota Yogyakarta memiliki E-KTP. Dalam pelaksanaannya program E-KTP 97% pada akhir tahun 2013 telah terlaksana di Kota Yogyakarta”.

Dalam mendapatkan hak-hak selaku warga negara terdapat kecenderungan penghuni Panti Werdha menyerahkan sepenuhnya pasrah kepada pemerintah/negara melalui pengurus/petugas panti ini dan pejabat di instansi terkait yang menangani lansia terlantar di panti dan kurang memperhatikan atau mengabaikan kewajiban selaku warga negara. Mereka beranggapan bahwa pemerintah/negara lah yang berkewajiban memenuhi hak-hak sosial budaya, ekonomi dan politik. Padahal selaku warga negara yang baik selain hak yang diperoleh dari pemerintah/negara terdapat pula kewajiban yang melekat selaku warga negara. Misalnya dalam pengurusan KTP, KK, pelayanan kesehatan, Akte kematian, bantuan sosial dan lain-lain

terdapat berbagai persyaratan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lansia atau keluarganya.

Realita pemahaman penghuni Panti Werdha terhadap nilai-nilai kebangsaan terhadap Ideologi dan simbolisasi negara seperti Pancasila, Bahasa Negara dan Pahlawan Nasional dalam pandangan pejabat, pengurus dan petugas Panti Werdha masih minim pemahamannya. Mengenai ideologi Pancasila umumnya penghuni Panti Werdha tahu Pancasila tetapi tidak hafal lima sila Pancasila dan tidak tahu lambang dari setiap sila dan tidak memahami makna yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Rendahnya tingkat pendidikan formal lansia penghuni panti ini (sebagian besar tidak sekolah dan tamat SD) berpengaruh terhadap pemahaman ideologi negara dan simbolisasi negara, seperti Pancasila, Bahasa Negara, nama Proklamator dan Pahlawan Nasional. Apalagi selama ini di panti ini belum pernah diberikan penerangan tentang ideologi negara, simbolisasi negara dan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, umumnya penghuni panti berkomunikasi dengan pengurus/petugas Panti Werdha atau antara sesama penghuni panti menggunakan bahasa Jawa. Meskipun mereka juga dapat berbahasa Indonesia. Di luar panti termasuk dengan masyarakat di sekitar panti, penghuni panti juga berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Dengan menggunakan bahasa Jawa di dalam dan di luar panti, maka dapat terjalin komunikasi secara timbal balik. Penggunaan bahasa Jawa dalam berkomunikasi lebih sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi sebagian besar penghuni panti tingkat pendidikannya tergolong rendah yakni tidak sekolah dan tamat SD. Mereka berasal dan tempat kelahirannya di Pulau Jawa. Karena itu bagi penghuni panti dari luar Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa dan tidak memahami tata nilai sosial budaya setempat dalam berkomunikasi di panti diharapkan dapat beradaptasi dengan bahasa dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Tampaknya pandangan pejabat, pengurus dan petugas Panti Werdha di atas sejalan dengan pandangan penghuni panti ini tentang pemahaman kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan. Dari 9 orang lansia penghuni yang diteliti penulis di Panti Werdha Budhi Dharma pemahaman kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan masih minim. Dalam tulisan ini hanya dikemukakan 3 orang lansia penghuni sebagai berikut:

Sutinah,⁴⁴ umur 84 tahun, tempat lahir/daerah asal Yogyakarta, agama Katolik, suku Jawa, pendidikan tidak sekolah, status perkawinan belum menikah, masuk Panti Werdha Budhi Dharma 8 oktober 2012. Latar belakang keluarga, ayah bekerja sebagai abdi dalem Kraton Yogyakarta dan Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga. Mempunyai saudara kandung 8 orang, semuanya sudah meninggal. Ia anak *ragil*/bungsu. Di antara saudara kandungnya yaitu saudara nomor 6 bekerja sebagai abdi dalem Kraton Yogyakarta. Ia dulu sering ikut bersama orang tua yang bekerja sebagai abdi dalem Kraton Yogyakarta. Pekerjaan sebelum di Panti Werdha Budhi Dharma sebagai pembantu rumah tangga. Ketika ikut orang tuanya bekerja sebagai abdi dalem kraton ia pernah menggendong Sri Sultan Hamengkubuwono ke X yang waktu itu masih berumur sekitar lima tahun. Tahun 1952 ia ke Jakarta bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Sumadi selama 7 tahun. Kemudian pindah bekerja sebagai pembantu di rumah Ibu Sofia ST. Alisjahbana majalah femina selama 3 tahun. Ia diberhentikan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sofia ST. Alisjahbana karena majikannya mendapat pembantu yang muda berpendidikan tamat SMA. Kemudian ia pindah bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Purnomo Sidisarosa, Menteri PU selama 5 tahun. Selanjutnya ia membuka warung nasi di Pondok Gede Jakarta Timur selama lebih kurang 3 tahun dan berjualan bumbu dapur (kayu manis, lada, pala, dan lain-lain) selama 2 tahun. Membuka warung nasi dan berjualan bumbu dapur dikarenakan

⁴⁴Sutinah, penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

belum mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian ia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Sudjarwo, Menteri Kehutanan pada masa Orde Baru selama 15 tahun. Selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta yang paling berkesan dan menyenangkan adalah bekerja di rumah Pak Sudjarwo. Gaji perbulan cukup besar Rp.300.000,- dan tiap hari masih diberi uang jajan Rp.10.000–Rp.20.000,- Kalau Pak Sudjarwo ke luar negeri diberi oleh-oleh berupa cincin atau souvenir lainnya. Selepas bekerja di rumah Pak Sudjarwo, Ia pernah berkeinginan bekerja sebagai TKW di luar negeri tetapi dilarang oleh keluarga. Pada tahun 2008 ia kembali ke Yogyakarta tinggal di Kagungan Dalem Pawon Kraton. Ia pernah melamar bekerja sebagai abdi dalem kraton tapi tidak diterima karena sudah terlalu tua. Selama 2 tahun ia terlunta-lunta menjadi gelandangan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010 ia ditemukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol yang sedang merazia lansia terlantar, gepeng, anak jalanan, PSK dan PMKS lainnya di Kota Yogyakarta, dan oleh petugas Dinas Sosial ia di bawa ke Panti Jompo Abiyoso sebagai penghuni lansia terlantar selama 2 tahun lebih. Pada bulan oktober 2012 oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta ia dipindahkan ke Panti Werdha Budhi Dharma sebagai penghuni lansia terlantar. Semenjak kembali ke Yogyakarta ia belum pernah bertemu dengan 2 orang keponakan anak dari kakaknya. Kedua orang ponakannya itu ia pernah membantu biaya sekolah hingga tamat SMA. Setelah ia menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma cucu dari kedua keponakannya itu mengetahui keberadaannya di panti Werdha Budhi Dharma dan sering mengunjunginya di panti dengan membawa makanan dan kadangkala memberikan uang. Semenjak bertemu cucu dari kedua keponakannya, Ia setiap bulan berkunjung ke rumah cucu keponakannya. Tetapi karena keterbatasan keuangan pertengahan tahun 2013 dan ongkos naik becak semakin mahal pulang pergi ke rumah cucu keponakan Rp.30.000,- maka ia baru empat bulan lalu berkunjung ke rumah cucu keponakannya.

Selama menjalani kehidupan sebagai lansia penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, ia mengemukakan:

“Cukup menyenangkan semua serba gratis. Dulu ketika menjadi penghuni Panti Jompo Abiyoso tidak dapat apa-apa kecuali makan. Ia pernah menjual pakaian untuk mencukupi kebutuhannya. Tinggal di Panti Werdha Budhi Dharma semua tercukupi, makan minum, pakaian, uang saku setiap bulan Rp.50.000–Rp.70.000, makan tiga kali sehari enak dan cocok dengan selera. Tersedia snack, susu, kacang hijau. Kadangkala dari tamu/donatur ia mendapat pemberian uang dan barang. Dalam menjalankan ibadah agama yang dipeluknya, ia ikut acara kebaktian di panti setiap hari Selasa, hari minggu pertama dan ketiga Romo datang ke panti. Kata Romo “Mbah tidak boleh marah”. Tetapi kalau ia “tidak marah-marah malah sakit”. Selama tinggal di panti ia pernah sakit pusing kepala, batuk, flu dan sakit gigi. Yang sering adalah sakit pusing kepala maklum sudah tua. Untuk menghilangkan sakit pusing kepala ia pergi jalan-jalan ke luar panti kadangkala sembuh. Kalau tidak sembuh dibawa oleh perawat panti ke Puskesmas terdekat dan tidak bayar. Hubungan antar sesama teman penghuni panti, ada yang baik dan ada yang tidak. Saya ini “orang tua pemarah dan sering ngomel”. Pernah terjadi temannya satu kamar marah karena ia terus ngomel. Tapi ternyata temannya itu malah marah dan ngomel terus hingga larut malam. Kalau saya marah atau ngomel pada siang hari. Kalau malam lebih banyak diam. Untuk mengisi luang di panti, ia membuat taplak meja karena dulu pernah kursus kapsul (kursus jahit menjahit dan masak memasak). Hasilnya untuk oleh-oleh buat cucu dan tetangga. Dalam berkomunikasi dengan teman sesama penghuni panti lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Tetapi ia juga dapat berbahasa Indonesia terutama dengan tamu/donatur yang datang ke panti. Selama menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma ia merasa senang karena semua diurus pemerintah Kota Yogyakarta. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan perhatian pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup memadai terhadap lansia seperti saya.

Ia tidak memiliki KTP karena hilang selama ia menjadi gelandangan di Kota Yogyakarta. Ia juga tidak mengetahui manfaat

dari KTP dan tidak tahu tata cara mendapatkannya. Ia juga tidak tahu apakah terdaftar dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres. Karena dalam Pilkada Kota Yogyakarta tidak ikut mencoblos. Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan datang jika terdaftar dan diperintahkan pengurus/petugas panti untuk mencoblos ia akan mengikutinya. Terhadap ideologi negara Pancasila ia mengetahuinya tetapi tidak hafal lima sila dari Pancasila dan tidak mengetahui dan mengerti lambang dari lima sila Pancasila. Pahlawan Nasional yang ia kenal Jenderal Sudirman dan Proklamator Sukarno. Ia berharap pemerintah Kota Yogyakarta lebih memperhatikan lansia terlantar di luar Panti Werdha Budhi Dharma yang masih banyak jumlahnya. Ia sangat beruntung dan bernasib baik karena dapat tinggal di Panti Werdha Budhi Dharma di usia tua.

Slamet,⁴⁵ umur 70 tahun, tempat lahir/daerah asal Solo Jawa Tengah dan telah tinggal di Kota Yogyakarta sejak tahun 1966, Agama Islam, Suku Jawa, pendidikan tidak sekolah, status belum kawin. Latar belakang keluarga, ia anak tunggal. Orang tuanya (bapak) tinggal di Madiun meninggal pada awal tahun 2000. Dan ibunya tinggal di Solo meninggal akhir tahun 2000. Bapaknya bekerja sebagai penarik becak dan ibunya berjualan. Orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Saudara-saudara bapaknya tinggal di Madiun, dan saudara-saudara ibunya tinggal di Solo. Ia sudah lama tidak bertemu keluarga di Madiun dan Solo. Selama menjadi penghuni werdha budhi dharma belum pernah dikunjungi keluarga/famili karena belum diberitahu ia tinggal dipanti. Masuk Panti Werdha Budhi Dharma 23 Mei 2013.

Sebelum menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma selama 5 bulan penghuni Panti Karya. Dan sebelum menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma dan Panti Karya adalah sebagai penarik becak. Ia tidak mempunyai rumah tempat berteduh, tempat tidur dan istirahat adalah di becak. Baginya becak itu adalah rumahnya. Ia

⁴⁵Slamet, penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014.

mulai bekerja sebagai penarik becak sejak umur 14 tahun. Umur 16 tahun hingga 17 tahun pernah bekerja sebagai penggulung rokok. Pabriknya tutup dan ia kembali bekerja sebagai penarik becak hingga masuk panti karya. Ia pernah memiliki becak sendiri. Karena menderita sakit dan punya utang akhirnya di jual. Karena becak miliknya sudah dijual dan butuh biaya hidup karena sakit ia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penarik becak. Setiap hari ia harus menyeter dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh juragan becak. Karena usia sudah semakin tua dan sering sakit sakitan kadangkala tidak dapat menyeter uang setoran ke juragan dan utangnya semakin banyak. Ia akhirnya tidak diperkenankan lagi menggunakan becak milik juragan. Dalam keadaan sakit ia menjadi gepeng di pinggir jalan atau di *emper-emper* toko dan hidupnya hanya tergantung dari belas kasihan orang lain. Pada akhir tahun 2012 dalam kondisi sakit ia ditemukan oleh Tim Operasi Razia dari Dinas Sosial dan Satpol PP Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan ia dibawa ke Panti Karya Kota Yogyakarta selama lima bulan.

Setelah di Panti Karya, ia dipindahkan ke Panti Werdha Budhi Dharma pada tanggal 23 Mei 2013 hingga sekarang. Selama menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, ia mengemukakan: "Merasa senang, lebih dapat menikmati hidup sebagai lansia penghuni panti karena semuanya serba dijamin. Ia merasa sangat tertolong tinggal di panti di usia tua, dan belum menikah serta tidak mempunyai keluarga. Ia lebih sehat dan berat badannya menjadi naik. Sakit diobati, kalau dulu tidur di becak dan disembarangan tempat. Sekarang tidur di dipan berkasur dan bantal. Makan minum tiga kali sehari. Mendapat uang saku Rp.50.000,- perbulan. Mendapat pakain setahun dua kali. Dapat melaksanakan ibadah dengan husyu', pengetahuan agama menjadi bertambah karena setiap hari senin rutin di panti dilakukan kegiatan keagamaan dan pengajian agama Islam dengan ustaz dari luar. Hari Selasa mengikuti kegiatan ketrampilan membuat sulak dari rafia dengan guru keterampilan mantan guru SMP Negeri. Hari Sabtu mengikuti olahraga senam lansia. Setiap

tahun ada acara rekreasi. Hubungan dengan teman-teman sesama penghuni tidak ada masalah dan semuanya baik-baik.

Dalam berkomunikasi antar sesama penghuni panti dan pengurus/petugas panti lebih banyak menggunakan bahasa Jawa tetapi ia bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Begitu pula hubungan dengan tetangga di sekitar panti berjalan dengan baik, dan sering bertemu mereka di Musholla milik panti. Tetangga dan masyarakat di luar panti pernah memberi ia dan teman-teman penghuni panti berupa bantuan uang, kain, baju dan makanan. Ia tidak memiliki KTP karena dompetnya hilang pada saat ia sakit dan pingsan menggelandang di pinggir jalanan termasuk uang ikut hilang dan hingga kini belum mengurus KTP. Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ia ingin ikut serta memilih, tetapi ia belum terdaftar sebagai pemilih hingga saat ini. Sebelum tinggal di panti karya dan Panti Werdha Budhi Dharma ia pernah ikut mencoblos dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada. Tentang ideologi Negara Pancasila ia mengetahuinya tetapi tidak hapal lima sila dari Pancasila dan tidak mengetahui dan memahami lambang lima sila Pancasila. Pahlawan Nasional yang ia kenal Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX. Ia juga menyebut nama Kolonel Untung sebagai pahlawan nasional. Padahal Kolonel Untung adalah tokoh dibalik peristiwa G30S yang telah dihukum mati dan tidak termasuk Pahlawan Nasional. Ia mengetahui nama Proklamator Sukarno-Hatta. Pandangannya terhadap rasa nasionalisme generasi muda sekarang tidak seperti generasi terdahulu yang semangat juang dan rasa nasionalismenya tinggi.

Pandangannya terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saat ini "semakin jauh dengan rakyat kecil dan rakyat kecil hanya dianggap sampah". Tetapi ia merasa beruntung dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Yogyakarta karena akhirnya ia dapat ditampung sebagai penghuni Panti Werdha Budhi Dharma. Baginya pemerintah tetap diperlukan untuk melindungi dan menangani serta meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar, gepeng, anak-anak terlantar dan rakyat kecil warga miskin lainnya. Ke depan ia berharap

jenis keterampilan lebih ditingkatkan di panti, agar penghuni memiliki berbagai keterampilan, seperti menggosok batu, membuat asbak, ikat pinggang dari kulit dan lain-lain, hasil ketrampilan penghuni panti kalau bisa dijual, dan hasil penjualan selain untuk panti juga penghuni panti yang membuatnya. Terhadap pengurus dan petugas Panti Werdha Budhi Dharma umumnya baik-baik. Khusus untuk perawat panti luar biasa pengabdianya kepada penghuni panti.

Suparno,⁴⁶ umur 77 tahun, agama Katolik, suku Jawa, pendidikan SMP, tempat lahir/daerah asal Solo dan sebelum pendudukan Jepang ia pindah ke Yogyakarta ikut orang tuanya (bapak) yang bertugas sebagai polisi. Bapaknya Sukimin Joyo Puspo pernah menjadi Kapolres Kota Yogyakarta. Ia pernah tinggal di Purwokerto dan Tegal sebagai staf Musik 4807. Kemudian kembali menetap di Yogyakarta (maaf tahunnya tidak ingat). Status perkawinan duda, isterinya sudah lama meninggal. Mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya tidak jelas kini berada di mana. Ketika ia bekerja di Jakarta anaknya tinggal dengan neneknya. Pernah bertemu dengan anaknya pada tahun 1971 waktu itu anaknya masih berumur 7 tahun. Setelah itu tak pernah bertemu lagi dengan anaknya. Mempunyai saudara kandung 2 orang tetapi sudah meninggal. Mempunyai keponakan anak dari saudara kandungnya tinggal di Pingit Kota Yogyakarta dan kadangkala mengunjunginya di Panti Werdha Budhi Dharma. Pekerjaan sebelum di panti, ia bekerja serabutan. Ia pernah bekerja sebagai staf musik 4807 Purwokerto dan Tegal. Masuk Panti Werdha Budhi Dharma 16 September 2009. Ia mengetahui Panti Werdha budi dharma dari keponakannya. Alasan masuk panti karena sudah tua, sering sakit-sakitan dan tidak ada biaya untuk berobat dan tidak bisa bekerja lagi. Kemudian ia mengajukan permintaan bantuan untuk menjadi penghuni Panti Werdha Budhi Dharma dan ternyata permohonannya diterima oleh pengurus panti. Ia begitu gembira ketika permohonannya di kabulkan.

⁴⁶Suparno, penghuni Panti Werdha Budhi Dharma, *Wawancara*, 25 Maret 2014 dan *Dalam FGD Penghuni Panti*, 27 Maret 2014.

Selama menjadi penghuni semua serba terjamin, makan tiga kali sehari, pakaian setahun dua kali, uang saku perbulan Rp.50.000,- - Rp.70.000,-. Kalau sakit dapat berobat ke Puskesmas terdekat tanpa dipungut biaya. Ia dapat melaksanakan kebaktian secara rutin pada hari Selasa dan Minggu di panti bersama-sama penghuni panti yang beragama Katolik. Minggu pertama dan ketiga Romo datang ke panti untuk acara kebaktian. Waktu luang di panti digunakan untuk bermain musik menghibur penghuni panti dan kadangkala ikut kegiatan ketrampilan membuat sulak. Hari Sabtu kadangkala ikut senam lansia. Setiap tahun ia ikut acara rekreasi yang diadakan oleh panti. Hubungan dengan sesama penghuni berjalan dengan baik dan tidak pernah ada masalah. Dalam berkomunikasi dengan sesama penghuni panti dan pengurus/petugas panti menggunakan bahasa Jawa. Begitu pula dengan tetangga di luar panti. Menggunakan bahasa Indonesia ketika ada tamu yang datang ke panti. Ia tidak memiliki KTP karena tidak pernah mengurusnya. Ke depan ia mengharapkan pengurus/petugas panti dapat mengusahakan penghuni panti yang tidak memiliki KTP agar memiliki KTP. Mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan datang ia berkeinginan ikut mencoblos. Tetapi ia tidak tahu apakah terdaftar atau tidak sebagai pemilih belum diberitahu. Mengenai ideologi negara Pancasila ia mengetahuinya waktu sekolah di SD dan SMP, tetapi ia tidak hafal lima sila Pancasila dan tidak tahu lambang setiap sila Pancasila. Pahlawan Nasional yang ia kenal hanya Jenderal Sudirman dan nama Proklamator Ir. Sukarno dan Muhammad Hatta. Mengenai kehidupan di Panti Werdha Budhi Dharma ia menerima segala apa yang telah diberikan oleh pemerintah selama di panti. Itu sudah cukup baik bagi dirinya.

Saran dari penghuni lainnya adalah perlu dibentuk Forum Komunikasi Sambung Rasa baik antara penghuni dan pengurus Panti Werdha Budhi Dharma maupun penghuni dan pengurus/pengelola Panti Werdha lainnya yang ada di Kota Yogyakarta. Acara rekreasi penghuni panti sebaiknya dua kali dalam setahun. Juga hiburan wayang kulit atau pemutaran film di panti perlu diadakan agar dapat menyenangkan para lansia penghuni panti. Secara umum menurut

penghuni Panti Werdha buhdi dharma adanya peningkatan dari tahun ke tahun tentang penanganan lansia di Panti Werdha Budhi Dharma.

10. Penutup

Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2012 cenderung berfluktuatif. Dari sisi kelompok umur didominasi usia produktif (15–59 tahun). Namun, penduduk kelompok lansia (umur 60 tahun ke atas) cukup tinggi (9,48%). Kondisi ini menunjukkan Kota Yogyakarta telah memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging structured population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh persen.

Tingkat pendidikan formal yang ditamatkan penduduk Kota Yogyakarta tergolong tinggi sebagian besar (58,44%) berpendidikan Tamat SLTA ke atas. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan. Kondisi ini menandakan bahwa prioritas dalam menempuh pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan dewasa ini cenderung sama. Tidak seperti dulu secara budaya pola pendidikan dalam menempuh pendidikan lebih mengutamakan anak-laki.

Dalam studi ini tidak diperoleh data tingkat pendidikan penduduk lansia di Kota Yogyakarta. Diperkirakan tingkat pendidikan lansia di Kota Yogyakarta lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional. Hal itu didasari dua alasan. *Pertama*, tingkat pendidikan formal yang ditamatkan penduduk Kota Yogyakarta sebagian besar (58,44%) berpendidikan SLTA ke atas. *Kedua*, tingkat pendidikan penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta di daerah perkotaan lebih baik dibanding dengan daerah pedesaan. Wilayah Kota Yogyakarta adalah seluruhnya daerah perkotaan.

Tingkat pendidikan penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta tergolong sangat rendah. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia secara nasionaltingkat

pendidikan yang ditamatkan lansia di DI Yogyakarta lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan lansia memperlihatkan kualitas SDM penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta masih rendah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah terutama dalam menentukan arah kebijakan dan program pendidikan non formal atau pendidikan keterampilan yang tepat bagi penduduk lansia.

Dari sisi jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk lansia perempuan di Provinsi DI Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lansia laki-laki. Hal ini menunjukkan secara budaya, pola pendidikan di masa lalu orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk memberi peluang pendidikan yang sama terutama dalam pendidikan non formal/pendidikan keterampilan, maka arah kebijakan dan program pendidikan keterampilan untuk penduduk lansia perempuan ke depan prekuensi dan jenis keterampilan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Tingkat pendidikan lansia di perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses masyarakat perkotaan di masa lalu dalam memperoleh pelayanan pendidikan lebih baik dibandingkan di daerah perdesaan. Program pendidikan penduduk lansia selama ini hanya tertuju program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan program Keaksaraan Fungsional baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Untuk ke depan diharapkan arah kebijakan dan program pendidikan non formal yang dibutuhkan penduduk lansia di perkotaan dan perdesaan yang tepat guna dan bermanfaat bagi penduduk lansia semakin penting dan urgen untuk dirumuskan dan diimplimentasikan.

Usia harapan hidup masyarakat Kota Yogyakarta rata-rata lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup tingkat nasional. Pada tahun 2012 rata-rata usia harapan hidup untuk penduduk laki-laki adalah 72 tahun atau lebih tinggi tiga tahun dibandingkan rata-rata usia harapan hidup penduduk laki-laki secara nasional 69 tahun.

Sedang rata-rata usia harapan hidup untuk perempuan adalah 74 tahun lebih tinggi tiga tahun dibandingkan rata-rata nasional 71 tahun.

Faktor yang mempengaruhi tingginya penduduk lansia dan angka harapan hidup tertinggi di Kota Yogyakarta dan Provinsi DI Yogyakarta adalah: (1) Karena kenyamanan dan ketenteraman hidup (*adem ayem*) di Yogyakarta. Penduduk lansia dari luar DI Yogyakarta banyak yang memilih hari tua atau pensiun tinggal di Yogyakarta. (2) Penduduk usia produktif di DIY banyak yang bekerja di luar DIY yang sukses. (3) Biaya hidup relatif murah; (4) Pola makan yang baik dan teratur; (5) Nilai kultural generasi muda masih menghormati orang tua; (6) Lansia merasa "*diwongke*" atau dihargai, dihormati, dituakan dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. (7) Masih bertahannya budaya "*nrimo in pandum*" menerima apa adanya dan tidak banyak meminta. (8) Kohesi Sosial Warga Yogyakarta terhadap lansia masih tinggi. (9) Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Yogyakarta dan DI Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, sehingga ada kesadaran untuk memelihara kesehatannya. (10) Perhatian pemerintah Kota Yogyakarta terhadap penduduk lansia cukup baik, seperti akses untuk memelihara kesehatan cukup mudah dan tersedia, adanya jaminan kesehatan, bantuan sosial, Lansia di Panti Werdha kalau meninggal sudah disediakan makam milik Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Terdapat 10 jenis penyakit yang banyak diderita lansia di Kota Yogyakarta, yaitu: (1) Hipertensi Esensial (primer) dengan jumlah 4.707 kasus; (2) Diabetes Melitus dengan jumlah 1.728 kasus; (3) Gastritis dengan jumlah 1.723 kasus; (4) Penyakit jaringan periodontal dengan jumlah 625 kasus; (5) Urtikaria dengan jumlah 590 kasus; (6) Asma dengan jumlah 560 kasus; (7) Anemia dengan jumlah 430 kasus; (8) Karies gigi dengan jumlah 366 kasus; (9) Stroke dengan jumlah 172 kasus; (10) Hipertensi lainnya dengan jumlah 126 kasus. Juga kasus lansia depresi yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta hendaknya mendapat perhatian dan penanggulangannya dari instansi terkait di Kota Yogyakarta.

Persoalan lansia bukan sekedar persoalan jumlah orang tua yang membutuhkan santunan, melainkan menyangkut persoalan nilai-nilai sosial kultural dan agama yang menjadi landasan kelangsungan hidup masyarakatnya. Dalam pandangan narasumber terdapat dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan “Dari segi kultural sudah ada pergeseran orang tidak *“mikul duwur mendem jero”*, Kota Yogya sudah seperti Jakarta dan dari segi sumbangan sosial sudah bergeser. Gotong royong sudah *“luweh-luweh”* atau *“acuh tak acuh”* mereka lebih cenderung menyerahkan kepada pemerintah. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial terhadap lansia sudah meluntur atau bergeser. Namun, budaya *“nrimo in pandum”* atau *“tidak banyak meminta atau “ menerima apa adanya”* dan bersikap pasrah masih berlaku cukup kuat dikalangan lansia”. Pandangan kedua menyatakan *“Kohesi sosial warga Kota Yogyakarta terhadap lansia cukup tinggi. Di Kota Yogyakarta terdapat kecenderungan kalau lansia masih bisa bekerja tidak mau ke panti meskipun lansia tersebut tidak punya anak, isteri dan keluarga. Istilah orang Yogyakarta “Kalau masih doyan makan, masih mau mencari nafkah tidak mau tinggal dipanti. Istilah budaya setempat “pingin mangan kudu nyambut gawe”. Budaya “malu” untuk tinggal dipanti masih bertahan karena ada anggapan “masuk ke panti itu seperti di buang”. Budaya/falsafah “mikul duwur mendem jero” masih tetap bertahan. “Dulu kita diopeni orang tua sekarang kita yang wajib mengopeni orang tua”.*

Dalam budaya Jawa ada tiga golongan warga masyarakat yang menempati posisi terhormat dan menjadi sumber keteladanan bagi warga masyarakat banyak, yaitu: *“guru, ratu, wong atau karo”* (guru, pemimpin, dan orang tua). Orang tua menjadi salah satu sumber keteladanan bagi generasi muda. Pengalaman dan kearifan orang tua sebagai tempat untuk berkonsultasi berbagai hal bagi generasi muda. Begitu pula dalam ajaran Islam, baik di dalam Al Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW sangat tegas diperintahkan untuk menghormati orang tua dan anak berkewajiban menyantuni dan memelihara orang tua hingga akhir hayatnya. Dengan segala dampak yang ditimbulkan, tampaknya model penanganan

masalah lansia yang berbasis nilai-nilai sosial kultural dan agama di dalam masyarakat setempat tetapi adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman semakin penting untuk dikembangkan di masa mendatang.

Idealnya masa tua dapat menikmati kehidupan tanpa beban yang berat. Namun, penduduk lansia di DI Yogyakarta masih banyak berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga ia harus bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kehidupan keluarganya, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya lingkungan masyarakat di sekitarnya. Penduduk lansia yang menjadi tulang punggung keluarga didominasi oleh penduduk lansia laki-laki dibandingkan penduduk lansia perempuan. Peran penduduk lansia sebagai kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga tampaknya berkorelasi dengan status perkawinan penduduk lansia.

Problematic utama lansia di Panti Werdha adalah pengumpulan antara struktural dengan nilai-nilai sosial kultural dan agama. Problematic struktural terkait model penanganan di panti ada yang berpandangan merupakan jawaban yang tepat sebagai solusi alternatif pemecahan berbagai permasalahan penduduk lansia, tetapi ada pula yang berpandangan tidak tepat menempatkan lansia di panti. Dari sisi kelembagaan/institusi yang menangani penduduk lansia apakah sepenuhnya di kelola oleh panti-panti pemerintah (seperti Panti Werdha Budhi Dharma dan lain) ataukah sebaliknya sepenuhnya dikelola oleh swasta (Yayasan lembaga keagamaan, masyarakat dan perorangan) dengan pendanaan/pembiayaan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) dan sumber dana masyarakat. Dari studi yang dilakukan pada dua panti, yaitu (1) Panti Werdha Budhi Dharma yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan sumber dana dari APBD dan APBN yang diperuntukkan bagi penduduk lansia terlantar dan keluarga miskin tanpa dipungut biaya apapun. (2) Panti Werdha Hanna yang dikelola oleh swasta (Yayasan Keagamaan) yang sumber pendanaan/pembiayaannya sebagian besar dari keluarga lansia penghuni panti dan sebagian kecil dari Yayasan Werdha Hanna dan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi

penduduk lansia dari keluarga menengah dan kaya. Dari studi yang dilakukan tampaknya model kedua panti masih dibutuhkan dan perlu dikembangkan yang lebih luas di masa mendatang. Berbagai permasalahan yang dihadapi di kedua panti sebagaimana telah dikemukakan di atas hendaknya menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Problematis nilai-nilai sosial kultural dan agama adalah terkait dengan masalah nilai-nilai kepatutan, kepatutan, kewajaran, keharusan dan kewajiban menempatkan orang tua/lansia di panti. Dari sudut nilai “pantas” dan “patut” nilai-nilai sosial kultural yang berlaku di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya menempatkan orang tua/lansia di panti dipandang “tidak pantas” dan “tidak patut”. Masalahnya sangat tergantung dengan warga masyarakat itu sendiri sebagai pemilik atau pemegang tunggal nilai-nilai sosial kultural “pantas” dan “patut”. Apakah masih bertahan atau “*ajeg*”, ataukah sudah bergeser dan berubah. Hasil studi menunjukkan dua sudut pandang yang berbeda. Satu sisi mengatakan sudah bergeser dan pada sisi yang lain masih tetap bertahan. Begitu pula nilai “wajar” tergantung dari sisi mana melihatnya. Bagi penduduk lansia terlantar dan miskin menjadi lansia penghuni Panti Werdha milik pemerintah merupakan suatu kewajaran karena warga miskin dan terlantar menjadi tanggungjawab pemerintah/negara. Tentu sangat tidak wajar bagi warga lansia yang mampu atau kaya menjadi penghuni Panti Werdha milik pemerintah. Sementara dari sudut pandangan agama Islam, merupakan suatu keharusan dan kewajiban memelihara orang tua/lansia hingga akhir hayatnya. Karena itu menempatkan orang tua/lansia di Panti Werdha tidak diperbolehkan kecuali keadaan terpaksa. Karena itu, di Kota Yogyakarta tidak terdapat Panti Werdha yang didirikan oleh ormas/lembaga/yayasan dengan latarbelakang agama Islam. Hal itu berbeda dengan panti anak yatim/anak terlantar yang dikelola yayasan dengan latarbelakang agama cukup banyak di Kota Yogyakarta dan bahkan ditempat lain. Namun terdapat pula pandangan yang menyatakan “tidak berdirinya Panti Werdha oleh kalangan umat Islam dikarenakan mengelola Panti

Werdha itu susah dibandingkan mengurus anak di panti anak. Anak jelas kaderisasi untuk masa depan yang masih diharapkan untuk membantu keluarga, panti, masyarakat dan pemerintah, sedangkan lansia di Panti Werdha tidak banyak yang dapat diharapkan lagi kecuali harapan meninggal dunia”.

Menempatkan lansia di Panti Werdha adalah dilemma masyarakat perkotaan, yakni dihadapkannya seseorang pada suatu pilihan yang sulit, di mana keluarga mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk merawat sendiri ayah dan ibu yang telah senja/lansia karena alasan pekerjaan dan kesibukan lainnya, membuat keluarga tidak memiliki waktu untuk lebih banyak bersama kedua orang tua. Sebaliknya karena lebih seringnya ditinggal seorang diri di rumah membuat orang tua merasa kesepian dan membutuhkan suatu lingkungan dengan komunitas yang sama yaitu Panti Werdha. Menghadapi kondisi pilihan sulit tersebut, maka menggunakan jasa Panti Werdha sebagai suatu solusi adalah tepat. Asalkan pengambilan keputusan/kesepakatan untuk tinggal di Panti Werdha melibatkan seluruh anggota keluarga serta persetujuan orang tua yang sudah lansia. Keluarga yang memasukkan orang tuanya ke Panti Werdha harus tetap menunjukkan kasih sayangnya meski mereka berada di Panti Werdha. Panti Werdha bisa menjadi pilihan yang baik untuk menikmati hari tuanya. Lansia yang dititipkan di Panti Werdha tidak berarti mereka terbuang, mereka tetap memiliki keluarga yang merupakan bagian penting dari keberadaannya. Di Panti Werdha mereka menemukan teman yang dapat berbagi cerita, pengalaman dan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya. Di Panti Werdha selain mendapatkan pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan dasar juga diberikan fungsi positif lainnya yaitu program-program pelayanan sosial yang bisa memberikan kesibukan buat mereka sebagai pengisian waktu luang. Meskipun kenyataannya tidak selamanya kehidupan lansia di Panti Werdha menyenangkan. Terdapat lansia di panti yang tidak lagi memiliki keluarga atau memiliki keluarga tetapi tidak pernah mengunjunginya untuk berbagi, tidak hanya usia tua yang mengancam kehidupannya tetapi juga rasa kesepian, perasaan

terbuang disingkirkan oleh anak dan keluarganya, meratapi kesedihan mendalam ketika sakit yang tidak didampingi oleh anak dan keluarga untuk merawatnya. Terkadang ada cinta dan kasih sayang yang terlewatkan anak kepada orang tua/lansia penghuni Panti Werdha. Peribahasa “Cinta orang tua sepanjang masa, cinta anak sepanjang galah” merupakan bukti pembenaran di antara penghuni panti yang diteliti. Karenanya ada yang berpandangan menempatkan lansia di Panti Werdha suatu yang negatif. Keluargalah yang merupakan unit yang paling tepat untuk memberikan pelayanan terhadap orang tuanya yang lansia, dan peran keluarga ini perlu dimaksimalkan. Menghabiskan masa tua bersama keluarga adalah impian semua orang. Ketika tua dapat berbagi bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, diurus, diperhatikan dan dimanja keluarga dan dapat melihat anak dan cucu bahagia. Hal seperti itu sulit untuk di dapat para lansia penghuni Panti Werdha. Betapa pentingnya arti sebuah keluarga di dalam kehidupan lansia penghuni panti. Menjaga hubungan cinta dan kasih sayang anak, keluarga dengan orang tua/lansia penghuni panti adalah kewajiban setiap manusia.

Realita kewarganegaran hak-hak lansia penghuni selaku warga negara dari kedua panti yang diteliti sebagian besar telah dipenuhi/dilaksanakan. Persoalan yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak adalah di antara penghuni panti cukup banyak tidak memiliki KTP, KK dan Akte Kematian. Hal ini membawa implikasi terhadap pemenuhan hak-hak penduduk lansia selaku warga negara, seperti Jaminan Kesehatan, bantuan sosial, hak politik dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada dan lain-lain. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan penghuni di kedua Panti Werdha yang diteliti masih minim dan perlu penerangan dan penyuluhan kepada penghuni panti yang selama ini belum pernah diberikan kepada penghuni Panti Werdha yang diteliti.

Daftar Pustaka

BPS, 2010, *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010, Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: BPS.

- , 2010, *Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi DI Yogyakarta 2010, Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: BPS.
- BPS, 2013, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta
- Dinas Sosial, 2013, *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PKSK Tahun 2013*, Yogyakarta: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ikawati, 2013, "Pengaruh Pengisian Waktu Luang Terhadap Kebahagiaan Lanjut Usia (The Effect of Sparetime Activities on Ages Happiness)", Artikel, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 12 No. 1 Maret 2013.
- Marchira, Caria R. dkk., *Pengaruh Faktor-faktor Psikososial dan Insomnia Terhadap Depresi pada Lansia di Kota Yogyakarta*, SMF Kedokteran Jiwa FK UGM/RS. Sardjito, Yogyakarta: Berita Kedokteran Masyarakat Vol. 23, No. 1, Maret 2007
- Mariani dan Kadior, Subhan, *Panti Werdha Adalah Pilihan*, <http://subhankadir.wordpress.com>, 20 Agustus 2007, diakses 12 Pebruari 2013.
- Ningrum, Wuria, Asri dkk, <http://stikeskabmalang.wordpress.com>, 3 Oktober 2009, diakses 12 Pebruari 2013.
- n.n., *Trend dan Isu Pelayanan Kesehatan Lansia*, <http://qie30.wordpress.com>, diakses 31 Oktober 2013.
- Nurdiyanti, Sofa, *Panti Jompo dan Cinta yang Terlewatkan*, [http://www.andaluar biasa.com](http://www.andaluarbiasa.com), 23 Desember 2009, diakses 12 Pebruari 2013.
- <http://health.kompas.com>, 3 Pebruari 2012, diakses 31 Desember 2013.
- <http://adjhis.wordpress.com>, 21 Januari 2013, diakses 27 Januari 2014.
- <http://health.liputan6.com>, diakses 27 Januari 2014.

- Pratiwi, Lely, Niniek, Dr., drg, M.Kes (Editor), 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Kesehatan (Teori dan Praktik) Strategi Percepatan MDG's-Post MD's*, Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Putra, Rusadi, Idris, Reporter Merdeka.com, mengutip Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, <http://www.merdeka.com>, 7 Pebruari 2014, diakses 18 Pebruari 2014.
- Sari, Tursina, Ni Made Evi, *Pengaruh Pelaksanaan Senam Lansia Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Lansia di RT 11 Kelurahan Muja Muju Yogyakarta*, <http://skripsistikes.wordpress.com>, 1 Mei 2009, diakses 18 Pebruari 2014.
- Sriyanto, Eko, 2009, *Pengembangan Model Jaminan Sosial Informal Bagi Lansia di Perdesaan Wonogiri*, Skripsi S1, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosiatri FISIP-UGM.
- Suharto, Edi, Ph.D, *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu (Social Welfare Problems and Sosial Work in Indonesia: Trend and Issues*, <http://www.policy.hu>, diakses 12 Pebruari 2014.
- Sumampopuw, Alber, Dr, *Kiat Sehat di Usia Senja*, <http://indonesia.indonesia.com>, diakses 12 Pebruari 2013.
- Sumarno, Setyo, dkk., 2011, *Evaluasi Program Jaminan Lanjut Usia*, Cetakan Pertama, Jakarta: P2KS Press.
- Topatimasang, Roem (Penyunting), 2013, *Memanusiakkan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk & Pembangunan di Indonesia*, Kumpulan Makalah dan Diskusi Lokakarya “Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan & Langkah Lanjut”, Yogyakarta, 19–20 Nopember 2012, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Survey METER.
- Yuniati, Rosina, Dyah, 2001, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia Dalam Menghadapi Naiknya Angka Harapan Hidup*

(Studi Tentang Upaya Pembinaan Kesejahteraan Lansia Pensiunan PNS Oleh Tim PKK RW 17 di Wilayah RW 17 Perumnas Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Skripsi S1, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosiatri FISIP - UGM, Yogyakarta.

Media Massa

Harian Kompas, 25 Juli 2014

BAB III

ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK LANSIA DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh: Supriyadi

1. Pengantar

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari peningkatan angka harapan hidup dan jumlah lanjut usia (lansia). Peningkatan harapan hidup ini tercermin dari sensus penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya anak-anak yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi anak-anak yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, kemudian tahun 1990 meningkat lagi menjadi 59,8 tahun dan bagi anak yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000 (<http://www.datastatistik-indonesia>).

Rata-rata Angka Harapan Hidup pada saat lahir adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan umur penduduk seperti telah diuraikan di atas maka harapan penduduk Indonesia (Laki-laki dan perempuan) naik dari 67,8 tahun pada periode 2000-2005 menjadi 73,6 tahun pada periode 2020-2025. Peningkatan angka harapan hidup tersebut dapat dilihat dari jumlah lansia di Indonesia yang semakin banyak. Menurut BPS tahun 2010,

jumlah lansia telah mencapai 18.028.271 jiwa atau 9,30%, dan diperkirakan tahun 2020 akan mencapai 28.822.879 jiwa.

Peningkatan angka harapan hidup dan bertambah jumlah lansia di satu sisi merupakan salah satu keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, namun keberhasilan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya usia, kondisi dan kemampuan lansia untuk beraktifitas semakin menurun. Penurunan kemampuan lansia dapat dicermati dari beberapa aspek:

- (1) Aspek sosial, yakni intensitas hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain semakin berkurang, dan semakin terbatasnya kesempatan lansia untuk mengaktualisasikan diri.
- (2) Aspek ekonomi, yakni hilangnya pekerjaan dan atau menurunnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai;
- (3) Aspek fisik, semakin berkurangnya kemampuan untuk beraktifitas sehari-hari;
- (4) Aspek mental, penurunan kemampuan daya ingat, proses berfikir, emosi (mudah tersinggung) dan menurunnya rasa percaya diri (Sumarno, S, dkk, 2011: 2-3).

Di samping beberapa aspek di atas fenomena lainnya adalah, perhatian keluarga untuk melayani lansia semakin berkurang, seiring dengan meningkatnya aktifitas keluarga dan adanya pergeseran pola kerja dari suami istri yang bekerja akibat dari meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup. Kondisi yang demikian akan berdampak pada meningkatnya jumlah lansia yang dikategorikan sebagai lansia terlantar. Menurut catatan Kementerian Sosial RI (2008), lansia terlantar berjumlah sebanyak 1.644.002 jiwa, bahkan data tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan menjadi 2.994.330 jiwa, atau terjadi kenaikan sebanyak 1.350.328 jiwa atau 82,1%.

Kaitannya dengan dinamika kewarganegaraan kelompok lansia, dilihat daridimensi sosial ekonomi di perkotaan, maka dalam tulisan ini akan mengungkapkan tentang profil Kota Yogyakarta di

bidang sosial ekonomi, yang merupakan bagian dari tulisan sebagai pintu masuk untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya. Bagian lain yang cukup penting adalah, kondisi kelompok lansia yang berkaitan dengan aktifitas sosial ekonomi dan dinamikanya serta jaringan sosial dalam hubungannya dengan pemahaman dan realisasi tentang kewarganegaraan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Profil Sosial Ekonomi Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak bisa menghindarkan diri dari kehadiran para penanam modal yang ditunjukkan dengan semakin menjamurnya tempat-tempat perdagangan. Hal ini, berkaitan juga dengan posisi Kota Yogyakarta yang dikonstruksikan sebagai sebuah kota pusat perdagangan bagi daerah-daerah sekitarnya. Selama dua puluh tahun terakhir ini, sarana-sarana perdagangan cukup marak, dan para investor hadir membangun pusat-pusat perdagangan seperti pasar swalayan, mal-mal, yang pada akhirnya mengalahkan pasar-pasar tradisional lokal. Pusat-pusat perdagangan di Kota Yogyakarta terkenal, dan terpusat di sepanjang Jalan Malioboro berlanjut ke jalan Ahmad Yani, di sepanjang Jalan Solo dan bersambungan dengan Jalan Adi Sucipto. Pusat-pusat perdagangan yang terkenal antara lain: Malioboro Plaza, Ambarukmo Plaza, Galeri Plaza, Matahari, Ramayana, dan sebagainya.

Keberadaan sarana-sarana perdagangan sebagai sarana kegiatan ekonomi warga masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan kota. Di wilayah Kota Yogyakarta tercatat ada 29 buah pasar permanen, 17 buah pasar semi permanen, 7 buah pasar tidak permanen, 1.969 buah toko, 1.125 buah kios, dan 3015 buah warung yang tersebar baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran kota. Sarana-sarana ini dapat menunjang kehidupan ekonomi warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

Keberadaan sarana-sarana perdagangan tersebut juga didukung oleh keberadaan dua buah stasiun kereta api yang terletak di Lempuyangan (Stasiun Lempuyangan), dan Tugu (Stasiun Tugu). Stasiun Tugu lebih diarahkan untuk keberangkatan dan kedatangan para penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif. Sedangkan stasiun Lempuyangan, untuk keberangkatan dan kedatangan para penumpang kelas ekonomi dan kereta api barang. Sarana lainnya didukung oleh keberadaan Terminal bus moderen antar kota, terletak di Giwangan yang mulai beroperasi tahun 2004. Dalam pelayanan transportasi, pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Bantul, dan kabupaten Sleman dengan membangun sarana transportasi berupa Bus Trans-Yogya, sehingga dapat memperlancar transportasi penduduk dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi. Pendukung sarana transportasi lainnya, adalah Bandara Udara Adi Sutjipto yang terletak di Maguwohardjo. Keberadaan prasarana dan sarana transportasi tersebut telah mempengaruhi perkembangan Kota Yogyakarta, baik ditinjau dari aspek sosial ekonomi maupun budaya masyarakat lokal.

Kota Yogyakarta merupakan daerah perkotaan yang kondisi masyarakatnya heterogen. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non pertanian (90%), sisanya di sektor pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian semakin lama semakin menurun, karena lahannya dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan, terutama pembangunan perumahan/permukiman, dan sarana-sarana usaha sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan di sektor non pertanian semakin lama semakin menonjol, dan meningkat terutama di bidang jasa, seperti: jasa perumahan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa perdagangan, jasa sosial dan kemasyarakatan, dan sebagainya.

Dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk, distribusi pekerjaan di Kota Yogyakarta memberi gambaran bahwa penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri (34,81%). Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai buruh (22,31%), dan pensiunan (22,18%) serta sisanya bekerja sebagai pegawai swasta, wirausaha dan lain-lain.

Mereka yang tergolong bekerja sebagai pensiunan ternyata relatif besar, karena berkaitan dengan kesan Kota Yogyakarta sebagai semacam “kota nostalgia”. Perantau dari Kota Yogyakarta, ke kota lain, pada umumnya setelah sukses merantau memiliki kecenderungan untuk kembali ke daerah asal Yogya, setelah menjalani purna tugas, baik mereka pensiunan dari ABRI, PNS, Pegawai Swasta atau pengusaha dan sebagainya. Kota Yogyakarta memang terkenal tenang, aman dan tenteram sehingga cocok bagi mereka yang menginginkan hidup tenang, jauh dari keramaian, hiruk-pikuk seperti tinggal di kota-kota besar lainnya.

Tabel 3.1
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta
1971 - 2010

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1971	340.908	10.489	0,90
1980	398.192	12.252	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.944	12.891	0,33
2000	396.711	12.228	0,37
2005	435.236	13.392	1,87
2010	388.627	11.958	-2,24

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2013

Yogyakarta, juga merupakan kota yang menarik dan dapat memotivasi para wisman dan wisnus untuk berkunjung ke kota ini. Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta berada di peringkat menengah-tengah kota-kota di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta di atas 5%, bahkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai angka 5,76%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata, dan sarana-sarana lainnya (BPS Kota Yogyakarta, 2013).

Selain itu, dilihat dari pembangunan ekonomi di berbagai sektor di Kota Yogyakarta, kondisinya bisa terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB, merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2010, nilai PDRB Kota Yogyakarta atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp.11.777.579,04 milyar rupiah. Sedangkan PDRB tahun 2012, nilainya sebesar Rp.14.327.563,50 milyar rupiah (BPS Kota Yogyakarta, 2013, *ibid*).

Sementara itu, struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB di suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Struktur ekonomi Kota Yogyakarta masih didominasi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota jasa sangat relevan terhadap aktivitas ekonomi di sektor jasa, dan kepariwisataan. Angka lainnya yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB perkapita. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah.

Untuk mendukung percepatan dalam pembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta, antara lain dengan cara memberikan kemudahan berinvestasi. Pemerintah, telah menetapkan suatu perubahan kebijakan investasi yang mempunyai sasaran untuk memberikan kemudahan dan mendorong investasi sektor swasta melalui implementasi, dan perubahan yang transparan, terprediksi, kebijakan yang berorientasi pasar, perlakuan yang sama baik investor domestik maupun asing. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah kota berkomitmen untuk mempermudah terhadap pelayanan jasa, pelayanan perizinan untuk memudahkan warga masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

3. Profil dan Jaringan Sosial Kelompok Lansia

Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Definisi batasan penduduk lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.⁴⁷ Di samping itu, lansia dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa, biasanya kelompok ini masih tinggal di rumah bersama keluarganya. Sedangkan lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain, dan kelompok ini biasanya tinggal bersama keluarga atau anak dan sebagian ada kecenderungan bertempat tinggal di Panti-panti Jompo baik panti yang dikelola oleh pemerintah/negara maupun panti yang dikelola oleh yayasan atau pihak swasta.

Penduduk lansia, atau penduduk usia 60 tahun ke atas merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad milenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia, dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penuaan penduduk terutama dalam struktur demografis. Terjadinya perubahan struktur penduduk lansia membawa implikasi pada perumusan dan arah kebijakan pembangunan, salah satunya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Maka masalah kehidupan kelompok lansia ini penting yang harus diperhatikan dari semua pihak, apalagi semakin bertambah tahun ada kecenderungan jumlah penduduk lansia semakin meningkat yang dibarengi pula dengan permasalahan yang perlu mendapatkan solusi pemecahannya.

⁴⁷Lihat Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Bab I, Pasal I, Butir 2, 3, dan 4.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) secara umum jumlah penduduk lansia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 448.223 orang atau 12,96% dari keseluruhan penduduk. Jumlah penduduk lansia perempuan (249.784 orang) lebih banyak dari jumlah penduduk lansia laki-laki (198.439 orang). Sebarannya jauh lebih banyak di daerah perkotaan yaitu 246.178 orang, sedangkan di daerah pedesaan sebanyak 202.045 orang. Jika dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun) sebanyak 230.497 orang, lansia menengah (70-79 tahun) sebanyak 155.740 orang dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebanyak 61.986 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang telah memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging structured population*), karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh persen (12,96%), demikian pula kondisi penduduk lansia di Kota Yogyakarta, jumlahnya sekitar 11% dari total penduduk yang terdapat di Kota Yogyakarta.

Dilihat dari pola hubungan sosial pada kelompok lansia terutama yang masih potensial umumnya masih beraktivitas aktif, terutama bagi mereka yang masih berusia antara 60-69 tahun. Mereka ini umumnya yang bekerja sebagai pengusaha atau profesi lainnya misalnya seperti tenaga pengajar, pedagang dan berwirausaha. Pola hubungan sosial kelompok lansia dalam kehidupan sehari-hari di Yogyakarta berjalan dengan baik, meskipun kondisi fisik sudah menurun karena faktor usia tetapi semangat untuk hubungan sosial sesama warga masyarakat tetap tinggi. Menurut pengakuan seorang tokoh masyarakat,⁴⁸ bahwa seseorang bisa berhasil hidup di Kota Yogyakarta ini tidak terlepas dengan dorongan ikatan sesama anggota

⁴⁸Wawancara dengan Pengurus Gapensi yang sudah berusia kategori Lansia di Kota Yogyakarta, Narasumber mengatakan bahwa sebagai pengusaha wajib masuk anggota Kadin meskipun sudah lanjut usia, karena di samping untuk mempererat persatuan pengusaha, juga dapat menjangkau komunikasi sesama pengusaha untuk memperoleh peningkatan pengetahuan.

masyarakat yang dilatarbelakangi profesi dan mitra kerja, baik dengan mereka yang berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi, menengah dan rendah.

Sebagai anggota masyarakat meskipun sudah lansia, mereka tetap menghormati dan mengikuti aturan-aturandalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi dalam Bab I, Pasal 1 (ayat 1): bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sementara Pasal 1 (ayat 2), menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Maka kelompok lansia sebagai warga negara bagi setiap penduduk di wilayah seperti di Yogyakarta ini mempunyai hak dan derajat yang sama.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak, adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dalam pengertian warga negara, dan penggunaannya tergantung kepada kita dalam menjalankan hidup. Misalnya, setiap warga negara yang sudah memasuki umur sekolah berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang memadai, atau setiap warga negara berhak menjalankan aktivitas-aktivitas sosial ekonomi, dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh dari kewajiban adalah, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, wajib menghormati hak azazi orang lain demi kehidupan berbangsa dan bernegara (Fatimah, Nyayu (ed.), 2011: 64-65). Oleh karena itu, sebagai warga negara wajib untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakatnya, sebagai perwujudan diri dari sebuah negara kesatuan.

Kegiatan di bidang ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan warga masyarakat seperti pengusaha, pedagang dan

sebagainya meskipun sudah memasuki lanjut usia, karena di samping dapat menguntungkan bagi mereka itu sendiri, juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Pengembangan usaha ini, tidak terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak, terutama sesama kelompok mereka yang berlatarbelakang pengusaha, profesi, pedagang maupun ikatan lainnya. Di Kota Yogyakarta, ada pengelompokan-pengelompokan masyarakat lansia dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada usaha, etnis, maupun jenis pekerjaan. Ada kecenderungan, bahwa kelompok etnis Cina mayoritas bekerja di bidang perdagangan, kelompok etnis Minangkabau bekerja di sektor perdagangan seperti yang berjualan di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta. Sementara kelompok etnis Jawa sebagai etnis lokal jenis pekerjaannya bervariasi. Mereka yang bekerja sebagai pedagang atau melakukan kegiatan usaha terkenal dengan jiwa kewirausahaannya, sebagian lain sebagai pensiunan dari kantor pemerintah atau swasta. Masyarakat Jawa sebagai penduduk lokal yang dominan, lebih memiliki berbagai variasi latarbelakang jenis pekerjaan atau banyak pilihan jika dibandingkan dengan kelompok etnis pendatang.

Masyarakat lansia dari etnis Jawayang bermukim di Yogyakarta umumnya bervariasi ada yang sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, dan pekerja di sektor jasa. Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata, meskipun perekonomian dikuasai oleh pengusaha etnik Cina, tetapi masyarakat lokal yang berasal dari etnis Jawamasih memiliki peran dalam dunia perdagangan, baik sebagai pengusaha, pedagang, maupun buruh di sektor perdagangan dan jasa. Namun kondisi warga masyarakat lansia ini meskipun sudah menurun kondisi fisiknya, tetapi tetap semangat dalam menjalankan kegiatan ekonominya karena masih dibutuhkan untuk menopang kehidupan keluarganya. Ada salah satu warga lansia, mengatakan bahwa sejak usia 20 tahun telah mulai berjualan sebagai pedagang bakso di Yogyakarta dan sampai sekarang sudah berumur 62 tahun tetap berjualan. Penghasilan yang diperoleh sehari dari penjualan itu bisa mencapai antara Rp.50.000,- - Rp.150.000,-, aktivitas itu dirasakan sebagai sumber penghasilan pokok untuk

menghidupi keluarganya. Ia mengemukakan selama fisik masih kuat dan tidak merasa sakit tetap dijalankan terus kegiatan berjualan ini, asalkan bekerja sungguh-sungguh dan ada usaha pasti mendapatkan penghasilan yang khalal. Jaringan pekerjaan, dia juga mempunyai hubungan dengan kampung halaman sebagai tempat kelahirannya, harapannya kalau nanti sudah tidak kuat berjualan karena kondisi fisik atau sakit karena usia tua, tetap akan diwariskan kepada anak-anaknya. Semua keluarganya hidup merantau ke Kota Yogyakarta, karena di kampung sulit mencari pekerjaan yang pada umumnya di kampung hanyalah sebagai buruh tani.

Pandangan salah satu tokoh warga lansia berdasarkan wawancara tentang hubungan di bidang ekonomi antara anggota masyarakat yang berlainan status, atau keturunan bangsawan/kraton dengan bukan bangsawan cukup bervariasi. Hubungan antara mereka tidak memiliki masalah dan terjalin kemitraan dengan baik, terutama jika mereka mempunyai saling kepentingan. Tetapi, tidak sedikit dari mereka yang berasal dari keturunan keluarga bangsawan seperti dari *kraton* (Yogyakarta) akan merasa lebih tinggi statusnya. Namun kondisi semacam ini, semakin lama semakin melebur, karena yang terpenting adalah prestasi. Pengusaha atau pedagang yang bukan bangsawanpun, apabila berprestasi secara ekonomi cenderung akan dihormati. Demikian pula, bagi mereka yang bekerja seperti pensiunan pegawai negeri atau swasta, umumnya sudah tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi karena menganggap dirinya sudah berusia lanjut, dan kecenderungan yang dilakukan hanyalah melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan. Mereka umumnya anak-anaknya sudah dewasa, bahkan ada yang sudah menikah dan mempunyai seorang cucu, sehingga ketenangan hidup lebih diutamakan. Umumnya penghasilan warga lansia yang berstatus bekerja sebagai pensiunan berkisar antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.500.000,-, ia mengatakan merasa cukup untuk hidup di Kota Yogyakarta yang terkenal tenang, tenteram, aman dan damai. Pemanfaatan penghasilan ini selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang

dan pangan, bahkan kadang-kadang penghasilannya untuk kebutuhan rekreasi bersama anak-anak dan cucunya.

Dari sisi penghasilan, masing-masing warga lansia untuk memperoleh pendapatan setiap bulannya adalah berbeda-beda, tergantung dari jenis pekerjaannya. Warga lansia yang masih potensial ada yang masih semangat melakukan aktivitasnya terutama yang masih dalam kondisi sehat dan berumur sekitar 61-69 tahun. Penghasilan yang diperoleh dalam sehari, menurut pengakuan dari responden yang bekerja sebagai pedagang penghasilan sehari bisa mencapai Rp.50.000,- sampai Rp.200.000,-, pekerjaan ini sudah ditekuni semenjak diberhentikan dari perusahaan karena terkena PHK, waktu itu usianya sekitar 43 tahun. Maka untuk mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya, ia mencari pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Dinamika hidup selalu berubah dalam strategi mencari penghasilan, selama ada kemauan pasti ada jalan. Sementara bagi yang bekerja di bidang jasa, masih tetap semangat melakukan aktivitasnya seperti tukang cukur, sol sepatu, dan sebagainya yang rata-rata penghasilan sehari bisa mencapai Rp.50.000,- - Rp.150.000,-.

Di samping itu, pengembangan peran kelompok masyarakat lansia yang bekerja sebagai pengusaha atau berwirausaha untuk tujuan sosial telah dilakukan dengan cara kerjasama dengan mitra kerja, antara lain dengan Kadin, dan organisasi-organisasi profesi. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan kepedulian sosial untuk membangun masyarakat. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan bhakti sosial. Misalnya, memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, dan lainnya. Pembauran antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda status sosial ekonominya baik yang mampu, kurang mampu tetap dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas untuk membangun kepentingan bersama, mengingat usia sudah lanjut apalagi yang dipikirkan kecuali untuk kepentingan sosial dan kedermawanan. Hidup perlu bervariasi meskipun usia sudah lanjut, secara ekonomi sudah tidak perlu mengejar lagi pendapatan yang

maksimal seperti ketika masih muda karena sudah melewati periode umur-umur produktif, kecuali untuk mengisi sisa umur ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah dan memperdalam keagamaan.

Pada sisi lain, bagi kelompok lansia yang tidak potensial, misalnya yang menetap di panti-panti sosial⁴⁹ antara lain di Panti Werdha Budhi Dharma⁵⁰ di Yogyakarta memiliki pandangan yang bervariasi. Kelompok ini dilatarbelakangi karena kondisi fisik dan dari segi ekonomi merasa dirinya kurang mampu karena sudah tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi secara wajar. Namun ada pula yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, tetapi karena sudah tidak memiliki sanak keluarga akhirnya menempati Panti Jompo dengan jalur bantuan pihak lain. Hubungan sosial yang dilakukan terutama dengan warga Panti Werdha sendiri, di samping ada kunjungan-kunjungan sanak saudara atau teman-teman kelompok yang tinggal di luar panti. Warga lansia yang menempati panti Werdha Budhi Dharma ini sebenarnya bervariasi latar belakang sosial ekonominya, ada yang mempunyai profesi Pelawak, pemusik, ahli farmasi, pensiunan PNS, dan bahkan ada yang merupakan anak dari salah satu mantan Kapolda di Yogyakarta. Meskipun mereka tinggal di Panti Jompo tetapi masih mempunyai jaringan sosial di luar panti.

Latar belakang penghuni Panti ini, ada yang karena betul-betul miskin secara ekonomi, tetapi ada pula karena sudah tidak

⁴⁹Panti sosial adalah wadah atau institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani dan sosial serta perlindungan guna memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar. Sedangkan lanjut usia adalah setiap warga negara baik lelaki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik yang potensial maupun tidak potensial.

⁵⁰Panti ini berdiri sejak tahun 1952 dengan nama panti Budhi Dharma, yang mulanya panti masih bersifat umum dan dapat menerima semua penyandang masalah sosial mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis, tuna susila dan lansia terlantar. Setelah 15 tahun berdiri, kini panti ini mengkhususkan diisi untuk lansia terlantar.

berdaya karena kondisi fisik sehingga tidak mampu untuk mencari penghasilan, serta tidak mempunyai sanak keluarga. Hubungan sosial antar penghuni tetap akrab, dan ada rasa saling menghargai, dan bahkan sering mengikuti aktivitas-aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh pengelola panti. Umumnya para lansia terlantar ini, mengatakan bahwa pelayanan yang dijalankan oleh dinas sosial cukup bagus, dan hubungan sosial sudah terbina dengan baik seperti halnya dalam kehidupan keluarga. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Panti Werdha Budhi Dharma Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- (1) Pelayanan kebutuhan makan dan minum, dengan pengaturan menu sesuai dengan kebutuhan gizi lansia yang telah dikonsultasikan kepada Puskesmas serta pemenuhan kebutuhan sandang.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pemeriksaan rutin setiap bulan dua kali, bekerjasama dengan pihak Puskesmas terdekat, dan dirujuk ke rumah sakit pemerintah bila diperlukan.
- (3) Bimbingan rohani berupa bimbingan mental, keagamaan dan kemasyarakatan bekerjasama dengan instansi terkait atau mendatangkan pemuka agama sesuai dengan agama klien.
- (4) Bimbingan fisik dilaksanakan dalam bentuk senam khusus lanjut usia seminggu sekali.
- (5) Bimbingan keterampilan untuk mengisi waktu luang seminggu sekali.
- (6) Kegiatan rekreatif di luar panti untuk menambah pengalaman setahun sekali.

Pelayanan tersebut dilaksanakan sampai dengan klien lansia meninggal dunia, termasuk didalamnya prosesi perawatan jenazah secara keseluruhan. Namun demikian, dari pihak keluarga panti boleh melakukan permintaan kepada pengurus panti, apabila nantinya warga tersebut meninggal boleh diambil jenazahnya untuk dimakamkan sendiri asalkan disertai dengan perjanjian tertulis. Hubungan pengurus panti dengan penghuni panti dan keluarganya sangat baik dan saling pengertian, mereka berkomunikasi ibarat tinggal dalam satu rumah tangga.

Pelayanan yang dilakukan di Panti Werdha ini sudah dikondisikan seperti dalam kehidupan keluarga pada umumnya. Secara ekonomi, bagi penghuni panti ini merasa diuntungkan karena kebutuhan hidup seluruhnya telah dipenuhi, dari kebutuhan sandang, pangan, uang saku, perawatan kesehatan, dan ditunjang dengan tersedianya sarana-sarana sosial lainnya. Suasana keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari di panti terlihat sekali, mereka merasakan hidup tenang, tenteram, guyub dan saling menghargai satu sama lain. Hidup di lingkungan panti sudah merasakan seperti di rumahnya sendiri tanpa sanak keluarga, namun yang melayaninya sudah bukan anggota keluarganya sendiri, tetapi digantikan oleh pihak lain seperti apabila sedang sakit dilayani oleh perawat, makan-minum dilayani petugas dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Aktivitas-aktivitas sosial ekonomi yang terdapat di Panti Werdha ini juga diciptakan untuk membuat semangat hidup mereka dan disesuaikan dengan kondisi para lansia yang memiliki keterampilan. Hal ini dilakukan agar para lansia yang dahulu ketika belum memasuki lansia memiliki kegiatan keterampilan seperti menjahit, membuat sulak, anyam-anyaman, dan sejenisnya. Aktivitas ini dilakukan, bukan bertujuan secara ekonomi mendapatkan keuntungan finansial, akan tetapi dimaksudkan agar mereka mempunyai aktivitas untuk membangkitkan semangat hidupnya. Mereka akan mempunyai kebanggaan dengan merasa dirinya masih bisa berprestasi dan berkarya serta merasa dianggap masih sehat dan mempunyai kemampuan bekerja seperti warga masyarakat yang sehat pada umumnya.

Masalah yang dihadapi pengurus Panti Werdha dalam melayani lansia penghuni panti selalu ada setiap harinya, namun sudah dianggap biasa karena sudah menjadi kewajiban dan selalu mendapatkan jalan solusi pemecahannya. Menurut salah satu narasumber, bahwa masalah utama bagi lansia penghuni panti adalah karena lansia mempunyai keterbatasan secara sosial dan fungsi fisiknya. Rata-rata penghuni panti untuk melaksanakan kedua fungsi itu berkurang. Fungsi panti adalah untuk mengembalikan fungsi-

fungsi yang tidak terpenuhi itu untuk dilayani. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pengurus panti dengan lansia penghuni panti, selain melalui kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi standar pelayanan di panti, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum yaitu sarasehan setiap akhir bulan antara pengurus dengan penghuni Panti Wredha. Dalam sarasehan itu diinformasikan mengenai berbagai hal seperti kondisi lansia penghuni panti dan permasalahannya, kondisi panti dan berbagai permasalahan yang dihadapi serta program kegiatan yang telah dan akan diselenggarakan. Setiap diselenggarakan sarasehan, respon lansia panti ada berbagai tanggapan ada yang kritis, ada yang diam dan adapula yang acuh-tak acuh karena pasrah dengan keadaannya. Mereka tetap menerima apa adanya dan pasrah kehidupannya di panti, perjalanan hidupnya akan diakhiri di panti sampai meninggal.

Lain halnya dengan kondisi warga yang tinggal di Panti Werdha Hanna yang dikelola oleh yayasan swasta yaitu ditempati khusus bagi wanita lansia dengan kapasitas 35 orang. Yayasan ini didirikan oleh Persekutuan Doa Wanita Oikumene Hanna (PDWOH) pada bulan Mei 1979. Tujuan didirikan panti adalah untuk memberikan pelayanan kasih kepada masyarakat khususnya kepada kaum lansia, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah, tanpa membedakan suku, bahasa dan agama. Setiap warga boleh masuk Panti Werdha Hanna asalkan memenuhi syarat-syarat.⁵¹ Namun demikian, warga yang masuk ke panti ini umumnya secara ekonomi berasal dari lapisan menengah ke atas dan warga yang kondisinya miskin dan terlantar sulit untuk menghuni panti ini, dikarenakan mereka tidak akan mampu membayar iuran bulanan.

⁵¹Syarat-syarat menjadi penghuni Panti Hanna adalah: (1) Wanita berusia 60 tahun ke atas; (2) Mempunyai sponsor/penanggung jawab; (3) Mandiri, dalam arti dapat menolong diri sendiri; (4) Sehat jasmani dan rohani (5) Tidak merokok dan minum-minuman beralkohol. (6) Membayar biaya Rp.900.000,- perbulan untuk kamar yang ditempati dua orang penghuni.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di panti, secara rutin setiap hari dilakukan pembinaan kerohanian khususnya bagi yang beragama kristen dan katolik. Sedangkan yang beragama lain seperti Islam, Hindu dan Budha diberikan kebebasan sesuai dengan ajaran yang dipeluknya. Pada saat santai atau waktu kosong diberikan waktu bebas, sehingga bisa berinteraksi satu sama lain dan dapat menambah suasana keakraban. Aktivitas-aktivitas seperti berkebun, menjahit, menyulam, menyiram tanaman, memberikan makanan ikan lele, tetap dilakukan sesuai dengan hobinya masing-masing. Kondisi ini diciptakan bukan untuk tujuan ekonomi produktif, melainkan hanya untuk menyenangkan dan memberikan hiburan agar mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang produktif seperti kehidupan warga masyarakat pada umumnya. Namun kondisi penghuni Panti Hanna ini berbeda dengan di panti lainnya, karena masing-masing penghuni mempunyai sanak keluarga yang bertanggung jawab atau menitipkannya. Pihak pengurus panti selalu berkomunikasi dengan keluarga penghuni panti, terutama bila terjadi permasalahan-permasalahan dan bahkan sering terjadi komplain dari pihak keluarga, seperti masalah perawatan, kesehatan dan lainnya.

Menurut narasumber,⁵² bahwa anak atau keluarga menitipkan orang tuanya yang sudah lansia ke Panti Hanna pada umumnya mempunyai berbagai alasan, antara lain dikarenakan merasa tidak cocok dengan menantu, dan juga karena anak/keluarga mempunyai kesibukan bekerja sehingga tidak ada waktu merawat orang tuanya. Faktor lainnya karena perubahan status pernikahan, sebagian besar penghuni Panti Hanna berstatus janda karena ditinggal mati atau cerai. Alasan lainnya karena tidak menikah atau tidak mempunyai anak kandung atau famili yang merawatnya. Namun demikian, meskipun mereka tinggal di panti, tetap menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan sanak keluarga baik yang tinggal di dalam kota maupun luar kota. Hal ini bisa terlihat, kebanyakan

⁵²Adalah pengurus Panti Hanna di Yogyakarta, yang sehari-hari bertugas merawat dan melayani penghuni panti Hanna

anak/keluarga masih sering mengunjungi lansia penghuni panti yang masih ada hubungan dengan keluarga. Mereka ada yang datang setiap hari, setiap seminggu sekali dan ada pula yang berkunjung setiap sebulan sekali. kunjungan

4. Pemahaman dan Realitas Kewarganegaraan

Pemahaman tentang kewarganegaraan yang dimiliki oleh kelompok Lansia yang berdasarkan status sosial ekonomi, tidak hanya penting untuk keberhasilan kelompok lansia dalam merealisasikan hak-hak kultural mereka, tetapi juga penting bagi pengembangan kesadaran, dan budaya sipil yang akan mewarnai sikap dan perilaku masyarakat di perkotaan. Untuk pemahaman tentang kewarganegaraan bagi kelompok lansia yang kondisinya sudah menurun baik dari segi fisik, sosial dan ekonomi, namun mereka tetap ada kepedulian sebagai warga negara terutama tentang hak dan kewajibannya. Sejauh mana pemahaman dan aktivitas kewarganegaraan yang dapat dijadikan indikator tingkat keterikatan pada lingkup internal maupun eksternal dalam hidup bermasyarakat bisa terlihat dalam unsur modal sosial, yaitu (1) Adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) Jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) Rasa aman dan saling percaya (*reciprocal trust*), (4) Keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) Kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) Adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) Kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) Adanya solidaritas sebagai sesama warga negara.⁵³

Dalam dunia nyata, kewarganegaraan memiliki dinamika yang berbeda dengan aturan normatifnya. Dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok lansia yang berkaitan dengan status sosial

⁵³Lihat dalam (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Coleman, 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahra, 2007, Zainuddin, 2003;)

ekonomi seperti pengusaha, pensiunan pegawai, pekerja biasa di Kota Yogyakarta ini tampaknya cukup mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Profesi pengusaha meskipun sudah lansia misalnya, sebagai warga negara akan berpengaruh secara tidak langsung ikut menyumbangkan pemikiran atau suri tauladan melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang ada ikatannya dengan latar belakang bidang pekerjaannya. Warga lansia yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang dan lainnya sebagai warga negara mempunyai rasa memiliki, bahwa kota sebagai tempat tinggal dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan dan keberhasilannya serta jaringan sosialnya. Di Kota Yogyakarta, terdapat organisasi profesi seperti Gapensi yang anggotanya dari para Pengusaha yang berusia lanjut (lansia), muda, dan organisasi lainnya yang berdasarkan pekerjaan. Para Pengusaha yang bekerja sesuai bidangnya seperti kontraktor, perdagangan, transportasi, dan lainnya, cenderung bekerja sesuai dengan keahliannya agar lebih profesional dan selanjutnya dapat meningkatkan karier. Sementara kelompok lansia lainnya umumnya yang tinggal di Yogyakarta ini ada perkumpulan atau organisasi lansia mulai dari tingkat RW sampai dengan walikota. Perkumpulan ini dimaksudkan sebagai wadah pertemuan, agar terjadi interaksi antar lansia dengan mengadakan berbagai aktivitas seperti arisan, dan kegiatan sosial lainnya yang dapat mendukung keakraban. Dengan suasana keakraban ini akan menambah semangat hidup, karena masing-masing anggota bisa berperan menyampaikan pendapat atau urun rembung setiap ada permasalahan-permasalahan yang dialami anggotanya.

Menurut pengakuan dari informan⁵⁴ sebagai pengusaha yang sudah lansia, proses untuk menjadi berhasil adalah melalui proses panjang yang dimulai dari bawah dan semuanya mempunyai tujuan. Setidaknya terdapat dua macam kekuatan terus-menerus yang dapat

⁵⁴Wawancara dengan seorang Pengusaha Lanjut Usia, di kota Yogyakarta, beliau menuturkan pengalaman hidupnya tentang perjalanan kariernya sebagai pengusaha dan pengalaman-pengalaman aktivitas-aktivitas sosial yang dijalani.

mempengaruhi keutuhan profesi di bidang pekerjaannya. Pertama, harus bekerja keras dan mau belajar secara terus-menerus dan aktif mengikuti organisasi profesimeskipun usia sudah lanjut, antara lain Gapensi dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan spesialisasinya. Dan kedua, sebagai warga negara harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang sesuai latar belakang budaya tuan rumah. Tinggal di daerah perkotaan ini harus bisa mengendalikan hubungan-hubungan dinamis antara kebertahanan dan perubahan yang mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi.

Sebagai Pengusaha yang sudah lansia, dia bisa berperan banyak dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran melalui organisasi itu dan selanjutnya bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah khususnya pembangunan di bidang ekonomi di wilayah perkotaan. Demikian pula sebagai warga masyarakat yang baik, karena eksistensinya di dalam masyarakat diakui, dan aktif di berbagai kegiatan sosial yang terdapat di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan meskipun merasa sudah berumur kategori lansia sebagai warga negara perlu menjalankan hak dan kewajibannya. Sebagai warga yang sudah memasuki lansia perlu mendapat hak untuk dilindungi dari pemerintah, tetapi juga berkewajiban memberikan contoh tauladan kepada generasi penerus, dan menularkan ilmu, dan pengalamannya sebagai pengusaha. Hal ini sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa dalam Pasal 5 (2) Hak Lansia: a. Mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b. Mendapatkan pelayanan kesehatan, c. Mendapatkan pelayanan kesempatan kerja d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan, e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, g. Perlindungan sosial dan h. Bantuan sosial. Sedangkan dalam Pasal 6 (2); kewajiban Lanjut Usia, adalah: a. Membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. b. Mengamalkan dan mentransformasi ilmu pengetahuan, keahlian,

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus. c. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Yogyakarta sebagai kota budaya yang strategis terletak di kawasan Indonesia Barat, merupakan kota yang penduduknya memiliki berlatar belakang etnik yang berbeda-beda, mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Membuat Yogyakarta maju dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan umum merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu, bagi anggota masyarakat sebagai pendatang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bekerja sebaik-baiknya dalam mencari nafkah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Keberhasilan dalam hidup harus bisa menjalin hubungan antar sesama manusia meskipun berlatar belakang sosial ekonomi yang berbeda, demikian pula hubungan dengan pemerintahan di mana mereka bertempat tinggal.

Keberadaan kelompok pengusaha anggotanya ada yang muda, dan lansia seperti yang tergabung dalam Gapensi secara tidak langsung telah membawa pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial maupun perkembangan masyarakat di daerah perkotaan. Anggota Gapensi telah ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, sekaligus menyumbang terhadap proses integrasi sosial. Pada umumnya pandangan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dianggap penting, karena pembangunan di daerah perkotaan untuk kepentingan bersama. Kelompok pengusaha ini tumbuh karena tuntutan profesi, sehingga memiliki kecenderungan memajukan pembangunan di wilayah sesuai dengan bidangnya. Sikap kelompok positif terhadap program pembangunan di perkotaan, keikutsertaan mereka pada kegiatan sosial di lingkungannya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, mereka ikut serta merayakannya dengan menyumbangkan bantuan baik berupa dana maupun tenaga secara suka rela. Sebagai contoh mereka memberikan pelatihan pengetahuan manajemen usaha kecil menengah, kegiatan

pembangunan sosial, penyuluhan berbagai kegiatan ekonomi, seperti kegiatan pemasaran pedagang kecil, dan penanggulangan bantuan bencana.

Pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan hak-hak sipil yang dimiliki oleh kelompok lansia potensial umumnya tinggi. Mereka umumnya memiliki KTP seumur hidup dan tidak masalah dengan urusan-urusan untuk mendapatkan hak seperti Askes, bantuan sosial, hak politik mengikuti pilkada, pemilu legislatif dan pilpres. Ketika terjadi pemilu legislatif (DPR, DPRD), kelompok lansia ini cenderung semangat berpartisipasi dengan memilih salah satu anggota yang menjadi pilihannya. Demikian pula pemilu untuk memilih walikota (pilkada) ada perasaan memiliki terhadap Kota Yogyakarta ini, dengan antusiasnya mereka memilih walikota yang sesuai dengan pilihannya dan diharapkan dapat membawa perubahan. Meskipun usia sudah lanjut, mereka tidak pantang menyerah karena merasa bahwa hidup mereka agar diperhatikan dan dilindungi dengan kebijaksanaan yang memihak pada nasib kehidupan warga lansia. Pengetahuan tentang pancasila, umumnya mengetahuinya dan hafal dari sila satu sampai kelima, mereka sadar dan tahu bahwa pancasila dan UUD 1945 sebagai lambang negara kita dan harus dijaga. Pengetahuan tentang pahlawan nasional dan daerah, rata-rata mengetahuinya karena warga lansia yang sekarang dilahirkan sekitar tahun 1945. Pahlawan nasional dan proklamator kita mengetahuinya yaitu Soekarno Hatta, sedangkan pahlawan nasional yang diketahui dan diunggulkan adalah Jenderal Soedirman. Adapula yang mengetahuinya bahwa yang banyak disebut oleh warga lansia, bahwa pahlawan daerah khususnya di Yogyakarta yang dikenal dan menjadi panutan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau ini sebagai tokoh yang dikemukakan oleh narasumber karena selain disebut sebagai pahlawan daerah juga sebagai tokoh panutan yang dihormati dan disegani oleh seluruh warga Yogyakarta. Umumnya para warga lansia di Yogyakarta, mempunyai pandangan yang positif terhadap sosok Sri Sultan Hamengkubuwono baik beliau sebagai Raja atau Sultan maupun

kepala pemerintahan, hal ini karena adanya kewibawaan sebagai pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya.

Lain halnya dengan pemahaman kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok lansia terlantar khususnya yang tinggal di Panti Werdha. Mereka umumnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi keluarganya. Mereka yang dahulunya tingkat pendidikannya tinggi dan mempunyai penghasilan cukup ketika belum menginjak lansia, ada kecenderungan lebih memahami antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Budaya tepo seliro yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan panti masih tampak ketika mereka berkomunikasi satu sama lain. Perasaan tidak tega atau kasihan sesama penghuni, ditunjukkan oleh mereka yang masih merasa sehat kepada mereka yang sedang mengalami sakit. Hubungan kerjasama antar warga penghuni sangat tinggi, dan menghargai satu sama lainnya. Mereka ada perasaan senasib dan sepenanggungan, seperti hidup ketika masih remaja dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan hobinya. Pandangan terhadap pancasila dan UUD 1945, umumnya mereka mengetahuinya tetapi kurang memahami, tetapi pemahaman itu bisa dilakukan dengan tindakan tetapi kurang bisa diucapkan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan bagi warga lansia panti umumnya telah mendapat jaminan pelayanan kesehatan Jamkesda dari dana APBD untuk berobat ke Puskesmas dan Jamkesos dari dana APBN untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan Jamkesda dan Jamkessos birokrasinya tidak sederhana seperti yang diharapkan. Prosesnya harus melalui pendataan nama-nama lansia oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian diusulkan ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta setelah mengisi syarat-syarat yang disediakan oleh petugas. Selanjutnya dilakukan seleksi oleh tim seleksi dan hasilnya dirapatkan untuk menentukan penghuni apakah lansia itu akan diterima atau ditolak. Petugas sosial akan menghubungi lansia untuk mengecek kondisi fisik lansia yang bersangkutan, dan hasil pengecekan dirapatkan kembali apakah layak atau tidak untuk

menjadi penghuni panti. Berdasarkan tahapan proses-proses tersebut bila para lansia dikatakan layak baik secara fisik dan kesehatan selanjutnya oleh petugas diserahkan ke Panti Werdha Budhi Dharma.

Sedangkan hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh warga panti, umumnya belum sepenuhnya memiliki. Banyak warga panti yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), padahal kartu tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan kesehariannya. Pemilikan kartu ini mempunyai konsekuensi dalam hal mendapatkan hak yang dimiliki seperti untuk mendapatkan jaminan kesehatan, akte kematian, bantuan uang tunai, dan lainnya. Hak politik juga berkaitan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti pemilu legislatif, pilkada dan pilpres, kondisi yang demikian mengakibatkan setiap pemerintah mempunyai hajatan pesta demokrasi seperti pemilu, pilkada dan pilpres, mereka tidak bisa menggunakan haknya karena tidak memiliki KTP atau KK. Keinginan warga panti umumnya juga senang disertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah, karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, telah sering dilakukan di lokasi panti dan sekitarnya dan mendapat respon yang baik oleh warga penghuni panti karena dibina dengan mengadakan komunikasi yang baik antara pengurus panti dan warga penghuni secara kekeluargaan.

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan

Dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Dinas-dinas Pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat serta narasumber lainnya seperti tokoh lansia menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat khususnya bagi kelompok lansia dari status sosial ekonomi yang berbeda akan mempengaruhi terhadap pemahaman tentang kewarganegaraan. Beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam kehidupan masyarakat terhadap pemahaman

realisasi kewarganegaraan yang tinggal di wilayah perkotaan dapat diuraikan dalam uraian berikut ini.

Adanya beberapa masalah mendesak yang menyangkut kepentingan bersama dan pemecahannya memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan pekerjaan perlu adanya sikap saling menghargai, saling bekerjasama, saling isi-mengisi dalam kehidupan, misalnya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti pengusaha lansia di Yogyakarta ini tujuan utama bekerja adalah untuk mencari nafkah dan mengembangkan karier tetapi tidak boleh melanggar ajaran-ajaran agama, etika, maka perlu membangun komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam kehidupan sosial dengan menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga kerjanya. Demikian pula kondisi kelompok lansia yang tinggal di Kota Yogyakarta berbeda latar belakang sosial budaya dan ekonominya. Namun demikian, budaya etnis Jawa masih tampak kental, karena dalam komunikasi orang tua terutama lansia harus dihormati dan bagi yang muda harus menghargai dan mengetahui perasaan unggah-ungguh. Perasaan tepo seliro dan pihak yang muda menghargai kepada yang lebih tua dalam berkomunikasi setiap kehidupan sehari-hari adalah mutlak dilakukan. Kondisi ini masih bertahan yang merupakan pola hubungan sosial antara anak dan orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, komunikasi yang intensif dan penyampaian semua informasi yang diperlukan secara transparan kepada semua pihak yang memerlukan dengan tidak boleh melanggar etika budaya sopan santun. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kesadaran sebagai warga negara kota yang tidak boleh membedakan antar golongan baik berdasarkan pekerjaan, agama maupun golongan umur dan status sosial. Pertemuan dan dialog yang dilakukan secara intensif yang melibatkan para pejabat dan dinas terkait di bidang pemerintahan yang menyangkut urusan pelayanan kepada masyarakat akan mempererat hubungan koordinasi dan sinkronisasi serta rasa kebersamaan. Misalnya, dalam menanggulangi anggota masyarakat yang sakit perlu diadakan dialog yang dilakukan antara pengurus

kelompok untuk memecahkannya, meskipun sudah ada peraturan secara tertulis, sehingga bisa memberikan kontribusi optimal bagi pemecahan masalah bersama. Hal ini penting dilakukan karena urusan pertolongan ada kaitannya dengan kesadaran kewarganegaraan, apalagi bagi anggota masyarakat yang berasal dari warga yang kurang mampu secara ekonomi.

Faktor keterbukaan dan kemauan untuk mendahulukan kepentingan bersama demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat adalah sangat penting, mengingat bahwa kondisi masyarakat kota adalah masyarakat yang pluralistik. Pihak Pemerintah kota harus berhati-hati untuk menyepakati yang berkaitan dengan pembiayaan secara proporsional berbagai kegiatan di bidang pelayanan kepada masyarakat di wilayah perkotaan. Jangan sampai ada diskriminasi antar kelompok masyarakat sebagai warga masyarakat yang sama-sama terutama antara yang muda dengan yang lanjut usia sebagai warga negara, mereka harus dilakukan pelayanan yang sama agar mereka menganggap bahwa sebagai warga negara tidak dibedakan sehingga akan tumbuh perasaan bahwa sebagai warga negara sama-sama dihargai hak dan kewajibannya. Melalui perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh kelompok lansia dari tingkat RW sampai kecamatan, adalah kegiatan yang bisa membangkitkan motivasi hidup bahwa mereka merasa berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam perkumpulan tersebut terjadi saling berinteraksi sosial satu sama lain, dan membahas masalah-masalah sosial dan solusi yang dialami oleh warga lansia.

Adanya kesadaran bahwa pelayanan masyarakat tidak mungkin lagi menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah kota sepenuhnya. Oleh karena itu, pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat terutama kelompok-kelompok lansia seperti di bidang sosial ekonomi di perkotaan perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Berdasarkan prinsip hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal ini yang paling penting adalah komitmen besar yang ditunjukkan pemerintah kota untuk sebagai pelayan masyarakat atau mitra masyarakat dan membangun secara bersama-sama untuk kepentingan

masyarakat yang lebih luas. Apabila kondisi ini bisa tercipta dengan baik akan melahirkan tingkat kesadaran yang semakin tinggi terhadap kesadaran kewarganegaraan di perkotaan. Kesadaran kewarganegaraan bagi kelompok lansia, terutama yang potensial umumnya mereka merasa mempunyai pemahaman yang tinggi terutama apabila bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke atas, yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka semakin tinggi pula terhadap kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat bahwa, mereka juga turut bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Pendekatan melalui dialog dengan warga komunitas di perkotaan dilakukan sejak awal, dari perencanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dapat ditingkatkan. Dengan cara demikian juga dapat diciptakan rasa memiliki pada warga masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat maka nilai swadaya atau kerjasama yang diberikan masyarakat juga semakin tinggi. Dalam hal ini akan semakin terbukti bahwa komunikasi yang terbina, baik antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan pembangunan khususnya dalam bidang pelayanan kepada kehidupan warga masyarakat. Terutama pelayanan kepada kelompok lansia, yang mana kelompok ini merupakan kelompok yang relatif sedikit jumlahnya dibanding kelompok lainya dilihat dari sisi umur penduduk. Ada kecenderungan di bidang pelayanan ini untuk kepentingan lansia di era reformasi ini ada peningkatan meskipun belum maksimal, hal ini dikarenakan didasari kesadaran dan pemahaman oleh pihak pemerintah daerah.

Mengingat masyarakat Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan kondisi masyarakatnya multi- etnik, antara lain: etnik Jawa, Madura, Sunda, Minangkabau, Cina, dan etnik lainnya, perlu

diciptakan hubungan yang harmoni yang dapat menumbuhkan budaya gotong-royong, sehingga dapat meringankan beban kegiatan di bidang pelayanan di berbagai bidang bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dapat bersinergi dalam memecahkannya yang mana kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan status sosial ekonomi di masyarakat itu mempunyai hak dan derajat yang sama sebagai warga negara. Dinamika kehidupan masyarakat termasuk kelompok masyarakat lansia di daerah perkotaan telah mempengaruhi pergeseran kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kelas sosial atau strata sosial, bahwa yang dahulu tergolong dari bangsawan semakin lama ada kecenderungan memudar pengakuannya. Faktor ini dipengaruhi oleh prestasi-prestasi dalam aktivitas anggota masyarakat terutama di bidang ekonomi, seperti banyak pengusaha dari latar belakang masyarakat kalangan non bangsawan karena menjadi pengusaha yang sukses akhirnya cenderung mendapat pengakuan dari masyarakat, karena telah bisa membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah dan membantu sumbangan-sumbangan sosial dalam kehidupan masyarakat lainnya.

Budaya kelompok lansia yang berkaitan dengan status sosial, seperti bangsawan sebagai warga negara dan menetap di Kota Yogyakarta ini sudah menunjukkan sikap terbuka. Meskipun mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi, masing-masing golongan mempunyai perbedaan, tetapi sebagai warga negara tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sikap ini ditunjukkan dalam partisipasi dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat untuk turut berpartisipasi membangun daerah ini khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gerakan bergotong royong bersama komunitas masyarakat untuk membangun kota yang lebih maju dan kondusif, seperti kesadaran lingkungan kebersihan dan kegiatan sosial lainnya. Dinamika kehidupan masyarakat terutama setelah era reformasi, yang berkaitan dengan status sosial menunjukkan adanya kelonggaran, masing-masing

lapisan akan mendapat pengakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi dan peran pemerintah kota juga merupakan salah satu faktor penentu yang penting dalam menentukan kebijakan program pelayanan terhadap masyarakat. Faktor pimpinan juga turut menentukan, seperti Walikota Yogyakarta yang berasal dari putera daerah disegani masih tetap merupakan tokoh panutan baik secara formal maupun informal, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Kota Yogyakarta yang warga masyarakatnya pluralistik sehingga perlu adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok sosial di kota ini, terutama kelompok yang dominan. Kelompok lansia di bidang sosial ekonomi sangat mengharapkan untuk dilindungi oleh pemerintah sehingga dapat berperan sebagai warga kota ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk memajukan Kota Yogyakarta. Mereka telah turut berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan lansia baik di tingkat RW sampai kecamatan, meskipun masih belum sempurna, terutama gerakan sosial pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. Kesadaran kelompok lansia cukup tinggi sebagai warga negara yang baik dan selalu partisipasi dalam pembangunan sosial segaris dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

6. Penutup

Kota Yogyakarta adalah kota yang pluralistik dan dihuni oleh berbagai kelompok etnik dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, tetapi didominasi oleh kelompok etnis Jawa sebagai penduduk lokal. Oleh karena itu, cukup menarik dijadikan lokasi penelitian dinamika kewarganegaraan. Yogyakarta juga merupakan salah satu kota budaya, dengan kondisi kota yang tenang, tenteram dan bahkan dikatakan sebagai kota yang cocok untuk tempat tinggal lansia. Salah satu kelompok sosial masyarakat di Kota Yogyakarta adalah kelompok Sosial lansia yang dengan latarbelakang sosial

budaya berbeda yang ada kecenderungan mewarnai aktivitas kehidupan sosial ekonomi di wilayah perkotaan.

Dinamika kelompok lansia di bidang sosial ekonomi yang anggotanya dengan latar belakang berbeda status sosialnya, baik itu sebagai pengusaha maupun pedagang dan para pensiunan pekerja swasta dan pemerintah dari berbagai kelas yang tinggal di perkotaan baik di Panti Werdha ataupun di luar (keluarga) dalam mengartikulasikan kewarganegaraan tetap berjalan secara damai dan tidak menemui masalah-masalah yang berarti. Terdapat kerjasama kepentingan antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat baik secara sosial dan ekonomi. Tetapi kondisi ini dapat hidup berdampingan yang relatif tolerans, terbuka dan tetap saling menghargai dalam pergaulan sehari-hari seperti melalui perkumpulan-perkumpulan lansia.

Realisasi hak kewarganegaraan khususnya bagi kelompok sosial lansia tampaknya memang difasilitasi secara organisatoris dan sangat mendukung bagi perkembangan kehidupannya. Misalnya, pengusaha yang berusia lansia masih terikat dengan organisasi profesinya seperti di Gapensi dan ada pula kelompok lansia yang ikut organisasi kemasyarakatan. Sedangkan anggota lainnya misalnya sebagai pensiunan pegawai negeri atau swasta terikat dengan organisasi di lingkungannya, mereka juga harus taat pada peraturan yang digariskan dalam organisasi profesi. Hal inilah yang membuat arti penting adanya perkumpulan masyarakat bagi komunitas masyarakat yang berkategori lansia. Upaya untuk membuat hidup tenang dan kreatif dilakukan melalui perkumpulan adalah sebagai sarana kegiatan sosial untuk melakukan aktivitas baik melakukan hubungan dengan komunitas lain maupun antar sesama lansia. Ekspresi ini merupakan hal yang positif dari prinsip kewarganegaraan.

Fenomena dinamika kewarganegaraan bagi kelompok lansia di Kota Yogyakarta dengan latar belakang berbagai strata sosial ekonomi sebagai modal sosial struktural komunitas juga perlu mengembangkan *bridging social capital* untuk konektifitas dengan

komunitas kelompok lain dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat dengan lingkungan yang baik serta kebebasan sipil dan sosial. Peran komunitas kelompok lansia terutama kelompok yang potensial di bidang sosial ekonomi dalam pembentukan multikulturalisme sangat diperlukan yaitu dengan membentuk adanya *social networking* dengan komunitas-komunitas lain untuk mengurangi budaya dominan, sehingga akan tercipta komunikasi yang lebih terbuka.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2011. "*Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010: Hasil Sensus Penduduk 2010*". Jakarta: Badan Pusat Statistik.
-, 2011. "*Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi di Yogyakarta 2010: Hasil Sensus Penduduk 2010*". Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kota Yogyakarta, 2013. *Kota Yogyakarta dalam Angka 2013*. Yogyakarta: Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta.
- , 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2009*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta.
- Coleman, James, 1988; "Social Capital in the Creation of Human Capital" *American Journal of Sociology*. Vol. 94 (supplement), pp. S95-S120.
- Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, 2013; *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2013*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis, 1995. "*Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*". New York: The Free Press. P3KS Press.
- Habib Asyhad, M; 2014; "Dinamika Dari Pantj Jompo Berharap Perempuan Indonesia Tetap Bejuang". Dalam *Majalah INTISARI*, edisi September 2014.

- Hans, Dieter Evers, 1995; *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat, 1983; *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mulyana, Deddy, Prof,MA,Ph.D, (2010); *Komunikasi Lintas Budaya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan pertama.
- Pelly, Usman, 1994; *Urbanisasi dan Adaptasi*, Jakarta: LP3ES. The American Prospect, Vol. 13. Pp. 35-42.
- Nasikoen, 1989; *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Parker, SR, Brown, RK, 1990; *Sosiologi Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suseno, Magnis, Franz, 1985; *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Tumanggor, Roesmin, 2009; Pengembangan Penelitian Masalah Kesehatan Sosial. *Jurnal Puslitbang Kesejahteraan Sosial DEPSOS*, Vol. 14 No. 01, Januari-April 2009, Jakarta.
- Zainuddin, Dundin, dkk; 2010; *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan*. Jakarta: LIPI Press.
- Zudianto, Herry, 2008; “*Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*”. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

BAB IV

LANSIA DALAM SISTEM SOSIAL MASYARAKAT BALI

Oleh: Dede Wardiat

1. Pengantar

Konsep pembangunan yang diderivasi dari paradigma modernisme produktivitas sebagai acuan utama, dalam konteks ini penduduk lansia yang dipandang kurang produktif cenderung akan termajinalisasi. Padahal keberhasilan pembangunan menstimulasi pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada peningkatan angka harapan hidup, kondisi ini pada akhirnya mendorong meningkatnya jumlah lansia dari tahun ketahun. Di Indonesia jumlah lansia cenderung mengalami peningkatan, menurut catatan BPS, pada tahun 2003 jumlah lansia mencapai 16,1 juta jiwa, pada tahun 2004 meningkat menjadi 17,7 juta jiwa, pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 19 juta jiwa dan tahun 2010 menjadi 23,9 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah lansia diperkirakan akan mencapai 28,8 juta jiwa. Dengan kondisi seperti ini tampaknya pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap para lansia, sebab mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pelayanan pemerintah terhadap para lansia hingga saat ini tampaknya masih relatif terbatas, beban berat masih dipikul oleh pembiayaan negara, sementara program-program bersifat insidental dan *charity* masih mewarnai bentuk pelayanan pemerintah terhadap lansia.

Bila peran pemerintah masih relatif terbatas dalam perlindungan dan perawatan lansia, berarti bahwa kondisi eksisting saat ini mayoritas lansia hidup dengan keluarganya ditengah-tengah masyarakat sekelilingnya, hal ini masyarakat menjadi penyangga

utama dalam perlindungan dan perawatan terhadap lansia. Atas dasar keadaan ini, kajian mendalam tentang posisi lansia dalam sistem sosial suatu masyarakat sangat dibutuhkan guna memberi masukan bagi kebijakan tentang perlindungan dan perawatan lansia yang berbasis masyarakat di masa depan. Kajian tentang posisi lansia dalam sistem sosial suatu masyarakat tampaknya harus dimulai dari analisis tentang kosmologi masyarakat yang bersangkutan, sebab hal itulah yang membentuk struktur sosial, dan budaya masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan itu maka tulisan ini diawali dengan analisis tentang masyarakat yang menjadi objek kajian.

Masyarakat Bali menjadi objek kajian dalam penelitian ini, sistem sosial masyarakat Bali merupakan fenomena yang kompleks, sebab sistem sosial tersebut dibangun berdasarkan nilai-nilai dan norma campuran antara agama Hindu Bali (*Hindu Syiwa*) dengan adat-istiadat orang Bali. Di tengah sistem nilai seperti ini, institusi adat, seperti Banjar dan Desa Pakraman hidup berdampingan dengan institusi negara modern. Atas dasar fakta sosial ini, maka melihat kehidupan kenegaraan, termasuk kewarganegaraan di lingkungan masyarakat Bali tidak bisa dilihat secara tunggal dalam konsep negara modern, sebab dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali perspektif negara modern berada dalam lingkup sistem nilai tradisional masyarakat setempat. Tidaklah mungkin membahas negara modern (NKRI) dengan menisbikan sistem nilai yang ada, sebab sistem nilai tersebut menjadi jiwa dalam kehidupan sosial mereka dari dahulu hingga saat ini. Dengan pertimbangan ini, pembahasan tentang peran negara dalam melindungi dan melayani lansia serta peran lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya dilihat dalam perspektif negara dalam sistem nilai masyarakat Bali.

2. Kosmologi Masyarakat Bali

Masyarakat Bali meyakini akan adanya perbedaan (hukum *rwa-bhineda*), baik perbedaan yang berdimensi ruang, waktu maupun nilai. Perbedaan tersebut tidak selalu saling menisbikan dan tidak selalu bersifat sejajar, kadang bersifat subordinasi, namun saling

melengkapi sebagai bagian dari keseluruhan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan di dunia. Dengan cara berfikir yang berlandaskan hukum *rwa-bhineda* tersebut masyarakat Bali meyakini bahwa seluruh kehidupan ini berada dalam ikatan-ikatan hukum *rwa-bhineda* seperti: ikatan antara Buana Agung dengan *Buana alit*; *segara-gunung* (laut-gunung); *kaja-kelod* (utara-selatan) atau *kangin-kauh* (timur-barat); *hulu-leben* (atas-bawah); *suci-leleh* (suci-kotor); *purusa-predana* (laki-laki-perempuan); *dharma-adharma* (kebajikan-kejahatan); *hulu huluan - teben*.⁵⁵

Konsep tentang Buana Agung merepresentasikan pengakuan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi (supranatural) di luar kekuatan manusia. Dalam konteks ini Buana Agung melambangkan kekuatan alam semesta karena kekuasaan *Sang Hyang Widy*. Sementara itu, *Buana alit* melambangkan kekuatan yang ada pada diri manusia. Bila relasi Buana Agung dengan *Buana alit* dihubungkan dengan ajaran *Tri Hita Karana*, maka relasi Buana Agung dengan *Buana alit* disatu sisi bersifat Subordinasi, sedangkan disisi lain bersifat setara atau sejajar dan saling melengkapi (komplementer). Konsep Parahyangan dalam *Tri Hita Karana* yang mengajarkan keselarasan hubungan manusia dengan *Sang Hyang Widy* menempatkan posisi *Buana alit* menjadi Subordinasi Buana Agung, sebab kekuatan alam semesta karena kekuasaan *Sang Hyang Widy* sangat mempengaruhi karakter dan tindakan manusia (*buana alit*). Dalam konteks ini Buana Agung lebih superior dibanding *Buana alit*. Namun demikian, dalam konsep Palemahan pada *Tri Hita Karana* yang mengajarkan keselarasan dengan alam sekelilingnya menempatkan posisi *Buana alit* sejajar dan saling melengkapi dengan Buana Agung, sebab untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia harus menghidupkan *Buana alit* dan Buana Agung secara selaras dalam arti bahwa manusia harus mengembangkan kemampuan dirinya (*Buana alit*) secara seimbang dengan kekuatan alam semesta.

⁵⁵Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Wiyasa, 21 Maret 2014.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Tabanan, konsep *Kaja-Kelod* (utara-selatan) mengacu pada kondisi geografis yang ada, kaja mengacu pada daerah gunung dan bukit sedangkan kelod mengacu pada daerah pantai. Daerah pantai dianggap sebagai daerah yang profan atau tidak suci, sedangkan Gunung dianggap suci, Gunung Maha Meru dipandang sebagai *Rama* (Bapak) kehidupan, dari sanalah para dewa mengatur kehidupan ini. Gunung sebagai kosmos menempati posisi yang dominan dalam keyakinan orang Bali, bagian penting dari ritual keagamaan dalam masyarakat Bali adalah upacara yang dilakukan di Gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung yang dianggap sebagai "*Puser Bumi*". Selain konsep yang membedakan kondisi geografis, konsep tentang *purusa-predana* membedakan secara diametral dalam relasi gender. Secara kosmologis perbedaan laki-laki dengan perempuan (*purusa-predana*) tidak semata-mata memiliki perbedaan yang bersifat biologis, tetapi juga memiliki perbedaan secara sosio kultural yang bersandar pada akar religiusitas yang diyakini. Sebagaimana telah diuraikan di muka, dengan pola berpikir yang dilandaskan pada hukum rwa-bhineda, orang Bali meyakini bahwa laki-laki merupakan representasi para Dewa (kekuatan *purusa*) yang berkuasa di Kahyangan (*buana Agung*), sedangkan perempuan adalah representasi para Dewi (kekuatan *predana*) yang berkuasa di bumi (*buana alit*). Sebagai representasi para Dewa, laki-laki memiliki sifat untuk menjadi pemimpin, penguasa dan penerus keturunan. Atas dasar sifat inilah kemudian hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin agama, sehingga dapat memediasi kepentingan manusia di bumi dengan kekuasaan para Dewa di Kahyangan. Sementara itu, perempuan sebagai representasi para Dewi memiliki peran sebagai pemelihara, perawat, dan pemberi cinta kasih. Secara biologis, laki-laki adalah pemberi benih kepada perempuan. Sebaliknya perempuan berperan dalam mengandung benih dari laki-laki, melahirkan, menyusui dan merawatnya. Menurut keyakinan orang Bali, adanya perbedaan peran secara biologis merupakan bukti empiris bahwa laki-laki sebagai pewaris keturunan, karena benih manusia berasal darinya.

Selain hukum *rwa-bhineda* sebagaimana telah dideskripsikan di atas, menurut salah seorang tokoh agama di Tabanan, masyarakat Bali juga memiliki konsep *Tri Hita Karana* sebagai landasan utama sistem nilai dalam mengarungi hidupnya. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa secara historis *Tri Hita Karana* merupakan warisan ajaran Maha Mpu Kuturan yang meletakkan dasar Desa Pakraman dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali sejak abad ke 11. Secara harfiah, *Tri Hita Karana* berasal dari kata iri yang berarti tiga; hita berarti sejahtera atau bahagia; dan karena berarti sumber penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* berarti tiga sumber penyebab adanya kesejahteraan dan kebahagiaan, yakni:

- (1) Keselarasan hubungan antara Manusia dengan Sang Hyang Widhi (*Parahyangan*);
- (2) Keselarasan dalam hubungan manusia dengan sesama (*Pawongan*);
- (3) Keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidup atau alam sekitar (*Palemahan*).

Keselarasn, keserasian dan keseimbangan dalam ketiga hubungan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (komplementer) dalam satu sitem kehidupan. Menurut I Gusti Ngurah Gorda, dalam bentuk yang lebih hakiki, *Tri Hita Karana* pada dasarnya muncul dari tujuan hidup manusia itu sendiri. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani secara selaras dan seimbang (*Moksartham Jagadhitaya Ca iti dharmah*). Jadi situasi yang muncul dari kerjasama timbal balik dan hubungan dimensional itu adalah keselarasn hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan hidup, hal ini merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, manusia dalam *Tri Hita Karana* harus membangun dan mengembangkan tiga dimensi kehidupan yang senantiasa selaras, harmonis dan seimbang.⁵⁶ Prinsip-

⁵⁶Lihat I.Gusti Ngurah Gorga dalam P.Y. Don Bosko, *Tri Hita Karana* Suatu Nilai Hindu Yang Universal, Widya Satya Dharma, Jurnal

prinsip dalam *Tri Hita Karana* ini tidak saja menjadi dasar sikap dan perilaku orang Bali secara individual, tetapi juga terinternalisasi serta terintitusalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali.

3. Sistem Sosial Masyarakat Bali

Secara terminologis sistem sosial adalah kumpulan dari sub-sub sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia, baik secara individu maupun kelompok (organisasi) yang berinteraksi satu sama lain secara konstan menurut pola-pola tertentu berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dimiliki guna mencapai tujuan bersama. Dalam dinamika sosial suatu masyarakat, sistem sosial merupakan perangkat sosial yang digunakan di dalam interaksi antar sub sistem sosial yang ada. Sistem sosial sangat mempengaruhi perilaku manusia yang terlibat didalamnya, pada tingkat-tingkat tertentu cenderung mempertahankan batas-batas yang memisahkan dan membedakan dengan sistem sosial masyarakat lainnya. Sistem sosial masyarakat Bali memiliki keunikan tersendiri, karena sistem sosial tersebut didasarkan pada nilai-nilai dan norma campuran antara agama Hindu Bali (*Hindu Syiwa*) dengan adat istiadat Bali. Menurut I Wayan Geria dasar-dasar pokok sistem sosial kemasyarakatan orang Bali bertumpu pada empat landasan utama, yaitu:

- (1) Kekerabatan;
- (2) Kewilayahan;
- (3) Agraris;
- (4) Kelompok Kepentingan Khusus (seka) (Lihat Geria, Wayan, I, 2000).

Sistem kekerabatan masyarakat Bali berlandaskan prinsip patrilineal (*purusa*). Atas dasar prinsip ini ikatan kekerabatan dan garis keturunan didasarkan pada pihak laki-laki. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih diutamakan dibanding anak perempuan. Di lingkungan

Kajian Hindu, Budaya, dan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Vol.7 No.1, Maret 2000.

masyarakat Bali, secara kosmologis perbedaan laki-laki dengan perempuan (*purusa-predana*) tidak semata-mata memiliki perbedaan yang bersifat biologis, tetapi juga memiliki perbedaan secara sosio kultural yang bersandar pada akar religiusitas yang diyakini. Dengan berlandaskan pada prinsip *purusa* kemudian terbentuk kelompok-kelompok kekerabatan yang memiliki tingkatan dalam hubungan geneologis keluarga orang Bali. Kelompok-kelompok kekerabatan berdasarkan hubungan geneologis keluarga Bali mulai dari keluarga batih (*inti*), keluarga luas dalam satu lingkungan pemukiman (*iunggalin sanggahfnaiah*), keluarga besar dalam satu klen (*dadia*), keluarga luas dari satu garis leluhur (*iunggalin kawitan*), keluarga luas dari satu garis leluhur yang membedakan kasta (*soroh'wangsa*). Jalinan ikatan kekerabatan berdasarkan tingkatan geneologis ini yang kemudian membentuk sistem kekerabatan masyarakat Bali.

Ikatan dalam kesatuan kewilayahan (teritorial) terwujud dalam bentuk komunitas Desa Pakraman (Desa Adat) dan Banjar sebagai sub-sistem dari desa adat. Merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Dalam ketentuan tersebut secara implisit ditegaskan bahwa agama Hindu Bali memberikan corak yang khas bagi Desa Pakraman, Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan menjadi simbol pemersatu bagi seluruh masyarakat adat yang ada di wilayah yuridiksi Desa Pakraman. Dalam konteks ini Banjar merupakan bagian integral dari Desa Pakraman, Banjar merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam institusi inilah gotongroyong masyarakat dihimpun, diatur dan dilaksanakan berdasarkan *awig-awig* yang disepakati bersama. Dalam dinamika sosial masyarakat Bali, Banjar dikelilingi oleh sejumlah organisasi non politik, kelompok kepentingan khusus (*Seka*), kelompok-

kelompok kekerabatan, organisasi sukarela. Dilihat dalam kontelasinya dengan peran kewargaan lansia dalam Banjar tampaknya kelompok kepentingan khusus (seka) memegang peranan yang relatif menonjol. Seka pada dasarnya merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dalam lapangan kehidupan yang khusus. Seka ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni: *pertama*, seka yang bersifat permanen dan diwariskan secara turun-temurun; *kedua*, seka yang bersifat sementara, jenis seka ini biasanya didirikan berdasarkan kebutuhan tertentu. Seka yang bersifat permanen misalnya seka yang fungsinya menyelenggarakan berbagai upacara di desa adat, seperti: *seka baris* (perkumpulan baris-berbaris); *seka teruna-teruni*. Seka yang bersifat sementara, misalnya: *seka memula* (perkumpulan menuai); *seka gong* (perkumpulan gamelan). Sementara itu, dalam bidang sosial-ekonomi, khususnya pertanian (agraris) muncul organisasi subak. Dalam konteks ini subak sebagai unit produksi dapat didefinisikan sebagai kumpulan sawah (tebih) yang diari dari satu saluran air utama (*telabeh gde*) (Geertz, Clifford, 2000). Keanggotaan organisasi ini melintasi batas teritorial Banjar dan Desa Pakraman, secara organisasional terlepas dari Banjar dan Desa Pakraman. Para anggota Subak terdiri dari pemilik atau penggarap sawah, mereka memiliki pimpinan sendiri serta memiliki seperangkat aturan yang disepakati bersama para anggotanya. Dengan realitas seperti ini, subak menjadi komunitas tersendiri yang membentuk ikatan kekerabatan di luar batas teritorial dan keluarga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas satu-persatu secara mendalam landasan utama sistem sosial masyarakat Bali, sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian yang dilakukan, landasan utama sistem sosial masyarakat Bali yang dianalisis hanya yang secara langsung terkait dengan penduduk lansia sebagai warga negara. Oleh karena itu, pembahasan lebih diarahkan pada posisi lansia dalam sistem sosial masyarakat Bali dan implikasi *purusa* terhadap perawatan lansia.

Lansia dalam Keluarga Masyarakat Bali

Sebagaimana telah disinggung di atas, Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondamen utama dalam sistem sosial masyarakat Bali. Sistem kekerabatan diawali dari keluarga batih, kemudian keluarga besar (*dadia*). Sementara itu, dalam kesatuan teritorial unit sosial terkecil adalah Banjar, kemudian Desa Pakraman (Desa Adat). Atas dasar fakta sosial seperti ini, maka bila hendak melihat lansia dalam sistem sosial masyarakat Bali termasuk didalamnya pandangan masyarakat Bali terhadap hal itu tampaknya harus dimulai dengan melihat posisi lansia dalam keluarga di lingkungan masyarakat Bali.

Orang Bali percaya bahwa setiap orang memiliki tiga hutang (*Tri R'na*) yang harus dibayar dalam kehidupannya di dunia, yakni hutang kepada Dewa, hutang kepada leluhur dan hutang kepada orang tua. Dalam konteks ini tampak bahwa mengurus orang tua merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan seorang anak sebagai wujud pelunasan hutang yang harus dibayar dalam kehidupannya. Kewajiban seorang anak kepada orang tua dan para leluhurnya dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra sebagai berikut:

“...Rinani trinyapakritya manomokse niwesayet, ana pakritya moksam tu sewama no wrajatyadhah...”

Artinya:

“...Kalau ia telah membayar tiga macam hutangnya (kepada tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua), hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir, ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutangnya akan tenggelam ke bawah (neraka)...”.

Dengan demikian, kewajiban anak untuk mengurus orang tuanya merupakan ajaran agama yang dianut masyarakat Bali, selain itu, menurut salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat di Tabanan, hubungan anak dengan orang tuanya bersifat timbal balik, setiap orang tua wajib mengurus anaknya dari mulai

anak dalam kandungan, saat bayi, mulai menginjak remaja hingga menikahkannya bila dipandang sudah dewasa. Seluruh pola pengurusan tersebut tidak terbatas hanya memberi makan untuk pertumbuhan fisiknya semata, tetapi juga dilakukan penyempurnaan rohaniah melalui serangkaian upacara adat dan keagamaan. Pada saat bayi lahir diadakan upacara nyambutin, dalam bahasa setempat disebut upacara jatakarma samskara, setelah puser bayi lepas juga diadakan upacara khusus. Pada saat usia bayi menginjak satu bulan tujuh hari diadakan upacara colongan, ketika bayi pertama kali menyentuh tanah/turun tanah (biasanya usia tiga bulan) diadakan upacara *nelu bulanin*. Demikian juga pada saat usia bayi menginjak umur enam bulan diadakan upacara potong rambut (*otonan*), ketika usia bayi menginjak umur tujuh bulan diadakan upacara magedonggedongan. Rangkaian upacara tidak hanya pada saat anak masih bayi, tetapi juga dilanjutkan hingga saat menginjak dewasa. Pada saat anak perempuan pertama kali mengalami menstruasi diadakan upacara *Ng'raja Singa*, demikian juga pada saat anak laki-laki pertama kali mengalami mimpi basah diadakan upacara *Ng'raja Swala*. Setelah kedua upacara tersebut, ketika seorang anak menjelang dewasa dilanjutkan dengan upacara potong gigi (*mepandes*), tujuan upacara ini untuk menghilangkan enam musuh dalam diri manusia, dalam kepercayaan orang Bali disebut *Sandripu*, yakni: *Ahimsa*, yaitu tidak menyakiti sesama manusia; *Akroda*, yaitu tidak marah; *Mada* atau mabuk; *Kama*, yaitu hawa nafsu; *Mat Sarya*, yaitu iri hati; *Moha*, yaitu tidak bingung.⁵⁷

Dalam uraian di atas telah disinggung bahwa hubungan anak dengan orang tuanya bersifat timbal balik, setiap orang tua wajib mengurus anaknya dari mulai anak dalam kandungan, saat bayi, mulai menginjak remaja hingga menikahkannya bila dipandang sudah dewasa. Kewajiban mengurus tersebut tidak terbatas pada pengurusan secara fisik semata, tetapi juga pengurusan yang bersifat spiritual

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ida Bagus Ketut Winaya, salah seorang Ulake (Pendeta) di Banjar Kutuh Kelot, Kelurahan Sain Sam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, 21 Maret 2014.

untuk mencapai kesempurnaan rohaniah sang anak. Setelah kewajiban orang tua dalam pengurusan anak dilaksanakan, maka ketika orang tua tersebut memasuki masa lanjut usia menjadi kewajiban sang anak untuk merawat hingga orang tua yang bersangkutan meninggal dunia. Bila hubungan antara anak dengan orang tua yang bersifat timbal balik dikaitkan dengan konsep *Tri R'na* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kewajiban anak untuk mengurus orang tua tidak saja merupakan kewajiban moral yang bersifat humanistik atas berbagai kebaikan orang tua, tetapi juga merupakan bagian dari *sraddha* (iman atau ketulusan dalam menjalankan bhakti) yang berpijak pada agama yang dianut. Secara tegas salah seorang narasumber menyatakan bahwa:

“Seorang anak yang menterlantarkan orang tuanya akan dikutuk oleh *Sang Hyang Widy*, sekalipun anak tersebut mendapat rizki yang banyak, namun akan habis untuk berbagai hal yang tidak berguna. Untuk menghindari kutukan *Sang Hyang Widy*, maka mengurus orang tua harus dijadikan kewajiban mutlak dalam kehidupan setiap orang. Jangan kan orang tua yang masih hidup, setelah meninggal pun harus dirawat dengan baik. Perawatan tersebut dimulai dari upacara Ngaben untuk menyempurnakan roh yang meninggal agar dapat masuk surga, setelah itu dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan upacara (*yadnya*), terutama *pitra yadnya* kepada para leluhur agar roh mereka mendapat kebebasan untuk masuk surga”.⁵⁸

Dalam pernyataan narasumber tersebut di atas tersirat, bahwa menterlantarkan orang tua membawa akibat berupa kutukan dari *Sang Hyang Widy* terhadap kehidupan seseorang. Oleh karena itu, merawat orang tua merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh seorang anak. Selain itu, juga roh orang tua yang telah meninggal merupakan bagian dari roh para leluhur yang harus di puja melalui upacara (*yadnya*). Orang Bali sangat mempercayai bahwa Roh

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ida Bagus Putu Karya, warga Banjar Kutuh Lod, Kecamatan Keramitan, Tabanan, 23 Maret 2014.

bersifat abadi. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal, jasadnya dibakar melalui upacara Ngaben agar mendapat kesempurnaan menuju surga. Setelah upacara tersebut, abu mayat yang bersangkutan disimpan dalam *pure* keluarga. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Bali, menempatkan abu mayat dalam *pure* keluarga dimaknai sebagai penghormatan terhadap roh yang telah meninggal, sehingga mereka tetap berada dalam lingkungan keluarga. Setiap anak yang berbakti akan memuja roh leluhurnya, termasuk roh orang tuanya yang telah meninggal. Dalam konteks ini sering seorang anak melakukan sembahyang di *pure* keluarga dengan membawa berbagai jenis makanan kesukaan orang tuanya sebagai wujud pengabdian mereka. Orang yang melakukan sembahyang di *pure* keluarga tidak hanya mereka yang tinggal di Banjar di mana *pure* tersebut berada, tetapi juga banyak mereka yang tinggal di luar daerah, bahkan di luar kota sengaja datang ke *pure* keluarga untuk melakukan pemujaan terhadap roh leluhur mereka. Keadaan ini menunjukkan kuatnya ikatan orang Bali dengan roh para leluhurnya, termasuk roh orang tuanya yang telah meninggal.

Dalam uraian di atas disinggung bahwa orang Bali sangat mempercayai bahwa Roh bersifat abadi, hubungan dengan roh leluhur tidak bersifat sepihak, komunikasi langsung dengan roh leluhur dapat dilakukan melalui “orang pintar” yang disebut *Dasaran*. Salah seorang narasumber dari kalangan generasi muda mengakui bahwa dirinya pernah melakukan komunikasi langsung dengan ibunya yang telah meninggal melalui perantara seorang *dasaran*. Menurut pengakuannya, setelah beberapa bulan ibunya meninggal, dia sangat rindu ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian dia berangkat menemui salah seorang *dasaran*, setelah membaca mantra dalam suatu upacara khusus, kemudian *Dasaran* tersebut mengalami trans dan kerasukan roh ibunya. Perilaku dan suara yang dikeluarkan oleh *dasaran* pada saat mengalami trans sangat mirip dengan suara ibunya. Oleh karena itu, dia sangat mempercayai bahwa roh yang datang adalah roh ibunya yang telah meninggal. Komunikasi dengan roh ibunya tidak berlangsung lama, ibunya hanya menanyakan tentang kesehatan

dirinya serta memberikan nasihat agar dia bisa hidup mandiri dan merelakan kepergian ibunya karena kematian merupakan keharusan bagi setiap insan yang hidup didunia. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa pengalaman spiritual tersebut mempertebal kepercayaan dirinya akan keabadian roh para leluhur, sekalipun mereka berada di alam lain namun tetap dapat berhubungan dengan manusia yang masih berada di dunia.

Menanggapi tentang keabadian roh, salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat menyatakan bahwa orang Bali tidak menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, tetapi kematian merupakan fase kehidupan baru. Hal ini sejalan dengan pesan dalam *Bhagavadgita* bahwa akhir dari kehidupan adalah kematian dan awal dari kematian adalah kehidupan. Atas dasar keyakinan tersebut kemudian Reinkarnasi dipandang sebagai sebuah keniscayaan dalam kesinambungan kehidupan di dunia. Dalam konteks kepercayaan ini lebih jauh narasumber tersebut menjelaskan bahwa setiap ada anak yang dilahirkan, kebanyakan orang tuanya akan datang kepada dasaran untuk menanyakan tentang roh leluhur siapa yang datang melalui raga si anak yang dilahirkan tersebut, dan upacara apa yang diminta oleh roh leluhur tersebut agar reinkarnasi mengalami kesempurnaan. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, fakta sosial seperti ini menunjukkan bahwa roh leluhur, termasuk orang tua yang telah meninggal dengan anak-anaknya yang masih hidup di dunia merupakan kesatuan dalam jalinan pengabdian kepada *Sang Hyang Widya*. Kematian tidaklah memisahkan hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan di antara mereka terus berlangsung, kepercayaan terhadap keabadian roh leluhur merupakan perekat hubungan di antara keduanya. Dalam konteks ini orang tua yang sudah meninggal beserta para leluhur dipersonifikasikan dalam kehidupan di alam nirwana atau alam para Dewa. Untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tua yang sudah meninggal beserta para leluhur, maka dibuatkan tempat persemayaman roh mereka yang telah disucikan ditempat pemujaan keluarga, baik di *pure sanggah* keluarga, *pure dadia* atau *pure karawitan*.

Hubungan yang terus berlangsung antara seorang anak dengan roh orang tua serta leluhurnya sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan hubungan geneologis keluarga-keluarga dalam suatu sistem kekerabatan secara transendental (*niskale*). Tingkatan geneologis tersebut mulai dari keluarga batih (inti), keluarga luas dalam satu lingkungan pemukiman (*iunggalin sanggahfnaiah*), keluarga besar dalam satu klen (*dadia*), keluarga luas dari satu garis leluhur (*iunggalin kawitan*), keluarga luas dari satu garis leluhur yang membedakan kasta (*soroh'wangsa*). Seluruh tingkatan geneologis tersebut merupakan kesatuan dalam jalinan pengabdian kepada *Sang Hyang Widy*. Jalinan hubungan geneologis secara transendental ini memperkokoh sistem kekerabatan yang sudah terbentuk dalam dunia nyata (alam skale).

Selain konsep *Tri R'na* sebagaimana telah dideskripsikan di atas, masyarakat Bali juga mempercayai konsep Guru sebagai personifikasi figur yang harus diikuti (digugu) dan ditiru segala perilakunya. Dalam ajaran Hindu Bali dikenal adanya konsep “*catur guru*” atau empat guru, yakni:

- Guru Rupaka adalah orang tua dan para leluhur;
- Guru Pengajian adalah guru di sekolah;
- Guru Wisesa adalah Pemerintah;
- Guru Swadhyaya adalah Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa (Haris, Muhamad, 2009).

Guru rupaka dalam konsep catur guru tidak hanya menafsirkan orang tua sebagai pembentuk wajah dan postur tubuh seorang anak semata, tetapi juga orang tua membentuk sifat dan karakter anak sebagai hasil pendidikan dan sosialisasi di tingkat rumah tangga. Atas dasar fungsi dan peran orang tua tersebut, maka seorang anak wajib untuk menghormati orang tua dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi anak yang menghormati orang tua dalam kehidupannya, maka anak tersebut akan mendapat pahala dari Hyang widy sebagaimana dinyatakan dalam Weda Smrti sebagai berikut:

“...dengan menghormati ibunya ia akan mencapai kebahagiaan di bumi ini, dengan menghormati ayahnya ia menikmati dunia angkasa, tetapi dengan ketaatan terhadap gurunya ia mencapai alam brahmana.....” (Haris, Muhamad, 2009, *ibid*, hlm. 4).

Dalam seloka di atas tersirat penghormatan yang sangat tinggi terhadap orang tua, bila ketaatan terhadap guru bisa mencapai alam brahmana, maka menghormati orang tua dapat mencapai kebahagiaan di bumi sekaligus menikmati dunia angkasa. Dalam penafsiran yang lebih luas derivasi konsep guru rupaka ini menempatkan posisi orang tua sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mewariskan nilai-nilai sosial dan budaya kepada generasi berikutnya. Menurut salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat, pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya dari orang tua pada generasi berikutnya biasanya dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi di lingkungan rumah tangga, kerabat serta masyarakat luas. *Kedua*, dilakukan melalui perilaku dan tindakan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan dan perilaku orang tua ini secara ideal harusnya menjadi contoh untuk ditiru oleh generasi berikutnya, sehingga peran orang tua sebagai *Widy Sekale* (Tuhan Yang Kelihatan) dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Guru Rupaka, *Widy Sekale* pada dasarnya menempatkan orang tua pada posisi paling dihormati dalam sistem nilai masyarakat Bali. Ucapan orang tua wajib dituruti, perilakunya wajib ditiru oleh anak dan keturunannya. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, konsep Guru Rupaka dan *Widy Sekale* ini menegaskan tentang peran orang tua (lansia) dalam kehidupan sosial masyarakat Bali.

Implikasi Purusa Terhadap Perawatan Lansia

Sebagaimana telah disinggung di atas, *purusa* atau sistem patrilineal merupakan fondamen garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali. Dalam sistem patrilineal (*purusa*) hubungan kekerabatan dan garis keturunan didasarkan pada pihak laki-laki. Oleh

karena itu, anak laki-laki lebih diutamakan dibanding anak perempuan. Dilihat dalam perspektif hukum *rwa-bhineda*, secara kosmologis perbedaan laki-laki dengan perempuan (*purusa-predana*) tidak semata-mata memiliki perbedaan yang bersifat biologis, tetapi juga memiliki perbedaan secara sosio kultural yang bersandar pada akar religiusitas yang diyakini.

Selain pola berpikir yang didasarkan hukum *rwa-bhineda* sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pentingnya anak laki-laki (putera) bagi orang Bali memiliki dasar religiusitas dalam ajaran agama yang mereka anut. Dalam berbagai kitab yang menjadi rujukan ajaran agama mereka secara eksplisit menyebutkan tentang pentingnya anak laki-laki (putera) dalam kehidupan orang Bali. Arti penting anak laki-laki “putera” bagi masyarakat Bali dapat dilihat dalam sloka sebagai berikut:

“...Bagi seorang dermawan membuat sebuah waduk, lebih mulia amalnya dari pada menggali seratus sumur, melaksanakan satu *yadnya*, nilainya lebih mulia dari pada membuat seratus waduk. Tetapi dengan memperoleh “putera” lebih mulia dari pada menjalankan seratus *yadnya*....” (Manuaba 1993:81).

Dalam pustaka Niti Sastra Bab IV Sloka I yang dikutip oleh Rai Sudharta, disebutkan sebagai berikut:

“...Sangyang Chandra Taranggana, pinaka dipa mamadangi rikala ning wengi, sangyang surya sedeng praghata napa dipa mamadangi ring bhumi mandala, widya sasatra sudharma dipanikanang tri bhuwana sumena prabaswara, yaning putra suputra sadhu gunawan mamadangi kula wandhu wandhawa...”

Artinya:

“...Bulan dan gugusan bintang adalah lampu yang menerangi malam, matahari yang sedang bersinar adalah lampu yang menerangi daratan bumi, semua pengetahuan ajaran *dharma* adalah lampunya *triloka* yaitu tiga alam, bumi, angkasa dan

sorga yang bersinar cemerlang, sedangkan seorang “putera” yang baik, saleh dan pandai adalah lampu yang menerangi semua keluarga...”(*ibid*, hlm. 72).

Dalam sloka di atas secara eksplisit dinyatakan betapa pentingnya memiliki anak laki-laki, dapat dibayangkan bila memperoleh anak laki-laki lebih mulia dari pada menjalankan seratus *yadnya* dan anak laki-laki yang baik dapat menjadi lampu penerang bagi seluruh keluarganya dalam mengarungi hidup. Orang Bali sangat percaya bahwa anak laki-laki dapat menjadi pembuka pintu surga, sebab hanya anak laki-laki yang dapat memimpin *yadnya* (upacara), terutama upacara *pitra yadnya* kepada para leluhurnya. Sementara perempuan tidak bisa menjadi pemimpin upacara, bahkan dalam hukum adat Bali yang asli, perempuan tidak memperoleh hak waris dari orang tuanya.

Bila sistem *purusa* ini dikaitkan dengan perkawinan adat Bali, derivasi dari sistem *purusa* ini mengharuskan seorang perempuan yang telah menikah untuk ikut bersama suaminya (*ninggal kedaton*). Mengingat keluarga inti orang Bali sangat terikat dengan keluarga besarnya (*dadia*), maka perempuan yang telah menikah menjadi bagian dari keluarga besar pihak suaminya. Dilihat kontelasinya dengan hukum adat Bali, maka seorang perempuan yang sudah *ninggal kedaton* tidak ada lagi kewajiban hukum baginya untuk melaksanakan *Tri Hita Karana*, yakni kewajiban untuk melaksanakan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Bahkan seorang perempuan yang sudah *ninggal kedaton* tidak lagi harus melaksanakan *tri rna* (tiga hutang) terhadap keluarga yang telah ditinggalkannya (*ibid*, hlm. 79).

Dengan kondisi sosio-kultural, sosio-religius serta hukum adat sebagaimana dideskripsikan di atas, maka kewajiban utama untuk mengurus orang tua beserta anggota keluarga lainnya berada pada anak laki-laki. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa sistem *purusa* membawa implikasi luas dalam pengurusan keluarga (*lansia*), anak laki-laki lah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus orang tua. Menurut salah seorang narasumber, telah

menjadi norma umum bagi anak laki-laki untuk mengurus orang tuanya disaat mereka telah memasuki lanjut usia, bahkan membantu membukakan pintu kesurga pada saat orang tuanya telah meninggal dunia. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa banyak kasus orang tua terlantar pada masa lanjut usia karena mereka tidak mempunyai anak laki-laki, sebagian dari mereka terpaksa dirawat di Panti Jompo atas rekomendasi dari desa di mana lansia tersebut tinggal. Hal ini dialami oleh Mangku Padredan Ketut Hari yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha "*Wana Seraya*", Denpasar. Mangku Padre, seorang perempuan berusia 81 tahun berasal dari Bangli telah empat tahun tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha "*Wana Seraya*", Denpasar. Menurut pengakuannya sekalipun mengalami dua kali pernikahan dalam hidupnya, namun dia tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak perempuannya, setelah menikah harus mengikuti suaminya. Akibat keadaan seperti itu, maka dia terpaksa harus tinggal di Panti Jompo. Hal yang hampir sama juga dialami oleh Ketut Hari, perempuan berusia 72 tahun berasal dari Banjar Pasikan, Kabupaten Tabanan. Menurut pengakuannya, dia memiliki dua anak, kedua-duanya perempuan. Dengan kondisi seperti ini, atas keinginan sendiri tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha "*Wana Seraya*", Denpasar. Lebih jauh informan tersebut menyatakan bahwa:

“Sebagai perempuan, saya merasakan, anak-anak perempuan saya akan merasa malu membawa orang tua untuk tinggal di rumahnya”.⁵⁹

Dua kasus yang dialami oleh lansia di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai tentang perbedaan tentang fungsi, peran serta tanggungjawab antara laki-laki dengan perempuan dalam mengurus orang tua terinternalisasi dengan kuat di lingkungan masyarakat Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Haris tentang Orang Bali di Panti Sosial Tresna Werdha "*Wana Seraya*", Denpasar pada tahun

⁵⁹Wawancara dengan Mangku Padre dan Ketut Hari tanggal 22 Maret 2014 di Panti Sosial Tresna Werdha "*Wana Seraya*", Denpasar.

2009 mempertegas bahwa tidak adanya anak laki-laki menyebabkan seorang lansia terlantar, sehingga harus tinggal di Panti Jompo. Ni Wayan Warsiki berumur 72 tahun secara tegas mengungkapkan:

“Saya masuk Panti karena saya tidak mempunyai anak laki-laki, saya mempunyai anak perempuan satu orang, sekarang sudah menikah dan sudah tinggal dengan suaminya. Dulu saya pernah tinggal dengan menantu, tapi tidak berlangsung lama karena saya merasa tidak enak, orang Bali biasanya tidak ada yang ikut menantu karena dianggap tidak biasa, tidak tahu kenapa seperti itu. Di Bali, anak perempuan yang sudah kawin atau menikah, sudah masuk dalam keluarga suaminya. Sebelum masuk ke Panti, setelah bercerai dengan suami saya bekerja jadi tukang masak di SPG (Sekolah Pendidikan Guru) yang sekarang sudah ditutup oleh pemerintah dan dijadikan SMAN 7 Denpasar, karena sekolah ditutup saya cari kerja di tempat lain dan jadi tukang masak di kantor Bupati untuk membiayai hidup dengan anak saya, setelah keluar dari kantor Bupati saya jualan kue di SD sampai anak saya besar dan menikah. Saya memutuskan masuk Panti karena saya merasa sudah tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidup saya, suami sudah tidak ada, anak sudah menikah, akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di dalam panti sosial ini, walaupun anak saya melarangnya tapi saya bersikeras karena saya merasa tidak enak untuk ikut dengannya” (*Op cit*, hlm. 76). Selanjutnya Ni Made Rayik (umur 84 tahun) mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan sehingga bisa berada dalam Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya sebagai berikut:

“...saya masuk Panti karena saya tidak mempunyai anak laki-laki yang akan menyantuni hidup saya. Saya mempunyai anak delapan orang, semuanya perempuan, sekarang sudah menikah dan ikut dengan suaminya masing-masing. Saya merasa sungkan untuk ikut dalam keluarga anak saya, orang Bali kan biasanya tidak ikut sama anak perempuannya, beda dengan di Jawa mau perempuan, mau laki-laki kan masih bisa ikut bersama mereka. Kebetulan saya dan suami tidak punya harta warisan apa-apa, jadi tidak ada laki-laki yang mau *nyentana* dengan anak saya. Orang Panti yang membawa saya masuk ke

sini, karena melihat saya sudah tua hidup sendiri tidak ada yang merawat. Anak-anak saya setuju saya tinggal di Panti, mungkin karena mereka merasa semuanya perempuan, di sinikan menurut adat Bali orang tua tidak bisa ikut anak perempuan...(*Op cit*, hlm. 77)”.

Ungkapan beberapa informan sebagaimana dideskripsikan di atas secara empiris menunjukkan bahwa tidak memiliki anak laki-laki dan rasa sungkan untuk mengikuti anak perempuan menyebabkan para lansia tidak dirawat di lingkungan keluarganya, melainkan dirawat di Panti Jompo. Padahal norma umum dalam sistem sosial masyarakat Bali, kewajiban anak untuk mengurus orang tua tidak saja merupakan kewajiban moral yang bersifat humanistik atas berbagai kebaikan orang tua, tetapi juga merupakan bagian dari *sraddha* (iman atau ketulusan dalam menjalankan bhakti) yang berpijak pada agama yang dianut sebagaimana telah diuraikan di atas. Menanggapi hal ini salah seorang lansia yang menjadi Ketua Karang Lansia di Desa Bajre, Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa dalam ajaran agama Hindu Bali, pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban yang sama dalam mengurus orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, masyarakat cenderung salah dalam menafsirkan *purusa*, sehingga kewajiban mengurus orang tua hanya ada anak laki-laki, karena setelah menikah anak perempuan mengikuti suaminya, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya.⁶⁰ Pendapat narasumber ini tampaknya hanya melihat kewajiban mengurus orang tua berdasarkan ajaran agama semata, tanpa dikaitkan dengan adat istiadat setempat dengan seperangkat nilai-nilai didalamnya yang hingga saat ini masih tetap dipatuhi oleh masyarakat Bali. Bila melihat kewajiban mengurus orang tua dalam kontelasinya dengan adat Bali, maka ungkapan para informan tentang kewajiban anak laki-laki dalam mengurus orang tua dan rasa sungkan untuk mengikuti anak perempuan tampaknya memiliki legitimasi yang kuat sebagaimana pendapat Pedanda Gede Made Gunung selaku tokoh

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Wayan Ruasma, Ketua Karang Lansia Desa Bajre, Kabupaten Tabanan, 24 Maret 2014.

masyarakat Hindu di Bali yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“...Pendapat yang menyatakan bahwa orang tua cenderung tidak mau ikut dalam keluarga anak perempuannya selama kita melihat dalam perspektif hukum adat Bali ada benarnya, karena sistem kekeraban di sini kan berdasarkan sistem patrilineal, jadi bukan agama, karena dalam agama Hindu mempunyai konsep *Purusa Predana* yang melihat laki-laki dan perempuan itu sama saja dalam hal kehidupan memelihara orang tua, jadi sah-sah saja anak perempuan memberikan pengabdianya kepada orang tua mereka. Sebenarnya adanya orang tua yang merasa sungkan untuk ikut dengan anak perempuannya yang sudah kawin keluar, tidak terlepas dari adat istiadat masyarakat Bali yang lebih meninggikan anak laki-laki, logikanya anak perempuan yang kawin keluar berarti dia sudah menjadi milik suaminya, dia sudah keluar dari keluarga asalnya sedangkan anak laki-laki masih tetap hidup dengan orang tuanya karena dia yang berkewajiban terhadap orang tuanya...”.

Diskursus tentang kewajiban mengurus orang tua lansia terus berlasung seiring dengan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat Bali, keluarga modern yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi cenderung menggugat tradisi yang meletakkan kewajiban mengurus lansia hanya pada anak laki-laki, namun masyarakat umum, terutama di pedesaan cenderung resisten dalam mempertahankan tradisi setempat yang diwariskan para leluhur mereka. Oleh karena masyarakat Bali hidup dengan landasan agama dan adat istiadat yang kuat, maka sistem nilai masyarakat Bali tentang kewajiban dalam mengurus lansia terlihat “*ambigu*”, disatu sisi menempatkan kewajiban untuk mengurus orang tua sebagai suatu kewajiban yang bersifat mutlak harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam kehidupannya didunia sebagai wujud pembayaran hutang (*Tri r'na*). Disisi lain, menempatkan kewajiban untuk mengurus orang tua hanya pada anak laki-laki sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Terlepas dari ambiguitas yang terjadi, dalam realitas kehidupan

masyarakat kewajiban mengurus orang tua tetap bersandar pada adat istiadat yang ada, berbagai kasus yang dialami para informan sebagaimana telah dideskripsikan di atas secara empiris menunjukkan hal itu. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas hal ini menunjukkan bahwa *purusa* sebagai dasar dalam sistem sosial membawa implikasi luas pada pengurusan orang tua (lansia) di lingkungan masyarakat Bali.

4. Negara Dalam Sistem Nilai Masyarakat Bali

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, di Bali sudah ada beberapa kerajaan yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan tertentu. Dalam sistem nilai masyarakat Bali, para Raja merupakan representasi kekuasaan Para Dewa di muka Bumi. Sementara itu, Banjar dan Desa Pakraman (Desa Adat) merupakan unit-unit sosial yang menjadi instrumen para Raja dalam menjalankan kekuasaannya di dunia. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, kemudian muncul sebuah organisasi kekuasaan (negara) yang menerapkan konsep negara modern. Dalam konteks ini struktur kekuasaan disusun secara hierarkhis berdasarkan wilayah administratif, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga Desa sebagai unit pemerintahan terendah. Perkembangan lebih lanjut dalam kehidupan kenegaraan di Bali, organ negara modern mengakomodir unit-unit sosial yang telah ada sebagai intitusi adat untuk hidup berdampingan dengan institusi formal pemerintahan dengan fungsi dan tugas masing-masing. Dengan demikian, maka dalam unit pemerintahan terendah di Bali, kemudian muncul konsep Desa Dinas dan Desa Adat (Desa Pakraman) yang menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Desa Dinas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai bagian dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Desa Pakraman yang dipimpin oleh seorang Klian Adat mengurus berbagai masalah yang berkaitan dengan adat istiadat (hukum adat) masyarakat Bali yang

hingga saat ini masih menjadi landasan hidup masyarakat secara umum.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa negara modern di lingkungan masyarakat Bali berada ditengah-tengah kuatnya sistem nilai masyarakat setempat, keduanya hidup berdampingan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan secara komplementer. Bila mengikuti pemikiran Clifford Geertz tentang negara dalam sistem nilai masyarakat Bali, maka konsep negara dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali saat ini disebut dengan Negara Komposit (*campuran*) (Geertz, Clifford, 2000). Atas dasar fakta sosial ini, maka melihat kehidupan kenegaraan, termasuk kewarganegaraan di lingkungan masyarakat Bali tidak bisa dilihat secara tunggal dalam konsep negara modern, sebab dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali prespektif negara modern berada dalam lingkup sistem nilai tradisional masyarakat setempat. Tidaklah mungkin membahas negara modern (NKRI) dengan menisbikan sistem nilai yang ada, sebab sistem nilai tersebut menjadi jiwa dalam kehidupan sosial mereka dari dahulu hingga saat ini. Tulisan ini tidak bermaksud membahas negara dalam sistem nilai masyarakat Bali secara luas, fokus pembahasan diarahkan pada peran negara dalam melindungi dan melayani lansia serta peran lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya. Dalam konteks itu konsep negara komposit hanya akan dijadikan landasan terminologis dan katagoris negara dalam sistem nilai masyarakat Bali. Dengan demikian, untuk kepentingan praktis pembahasan tentang negara dalam sistem nilai masyarakat Bali akan dibagi dalam dua kelompok, *pertama* pembahasan tentang Negara Modern (NKRI) dan *Kedua* pembahasan tentang Negara Tradisional. Sesuai dengan fokus kajian dalam tulisan ini, pembahasan tentang kedua katagori tentang negara tersebut akan dikaitkan dengan peran negara dalam melindungi dan melayani lansia serta peran lansia dalam merealisasikan kewarganegaraannya.

Negara Modern (NKRI)

Negara modern yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fungsi negara modern pada dasarnya adalah mewujudkan amanat konstitusi yang menjadi dasar dan sekaligus tujuan bernegara bagi segenap warganya. Dalam konteks ini kelompok Lansia merupakan salah satu bagian dari warga negara lainnya yang memiliki hak yang sama. Menurut salah seorang narasumber dari kalangan pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali, kelompok lansia di Bali ini perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah sebab implikasi keberhasilan pembangunan dan pengendalian penduduk dimasa lalu membawa peningkatan pada angka harapan hidup bagi para penduduk. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, angka harapan hidup penduduk Bali mengalami peningkatan dari tahun-ketahun (lihat tabel 4.1.).

Tabel: 4.1.
Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Bali

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2013	71,20
2	2012	70,84
3	2011	70,78
4	2010	70,72
5	2009	70,67

Sumber: Bali Dalam Angka, BPS Provinsi Bali, 2013.

Dalam tabel 4.1. tampak bahwa Angka Harapan Hidup penduduk dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan menjadi 71,20. Hal ini membawa dampak ikutan terhadap pertambahan jumlah lansia di wilayah tersebut, sehingga pertambahan jumlah lansia Di Provinsi Bali relatif lebih cepat dibanding Provinsi lain, seperti Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah lansia yang ada di Provinsi Bali (lihat tabel 4.2.).

Tabel: 4.2.
Jumlah Penduduk Lajut Usia di Provinsi Bali

Kabupaten Kota	Luas Wilayah	Total Penduduk			Usia 60+ (Lansia)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jembrana	841.80	130 062	131 576	261 638	11 611	14 250	25 861
Tabanan	839.33	209 308	211 605	420 913	26 819	32 538	59 357
Badung	418.52	277 536	265 796	543 332	19 121	21 391	40 512
Gianyar	368.00	237 493	232 284	469 777	24 836	26 877	51 713
Klungkung	315.00	84 503	86 040	170 543	10 880	13 189	24 069
Bangli	520.81	109 109	106 244	215 353	13 277	13 610	26 887
Karangasem	839.54	198 650	197 837	396 487	23 608	26 221	49 829
Buleleng	1 365.88	311 394	312 731	624 125	29 955	36 170	66 125
Denpasar	127.78	403 293	385 296	788 589	17 414	18 348	35 762
Bali	5 636.66	1 961 348	1 929 409	3 890 757	177 521	202 594	380 115

Sumber: Biro Pusat Statistik, Provinsi Bali, 2013.

Dalam tabel 4.2. tampak bahwa jumlah lansia di Provinsi Bali mencapai sekitar 9,76% dari keseluruhan penduduk yang ada, daerah yang memiliki jumlah penduduk lansia relatif banyak dibanding daerah lainnya adalah Kabupaten Buleleng, Karang Asem, dan Kabupaten Tabanan. Atas dasar kondisi itu, makasalah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk lansia relatif banyak, yakni Kabupaten Tabanan menjadi fokus perhatian dalam studi ini. Namun sekalipun demikian, berbagai kasus yang diangkat tetap dilihat dalam kontelasinya dengan wilayah Bali sebagai satu kesatuan Budaya.

Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial (BKS), Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, secara ideal ada dua jenis layanan terhadap lansia, yakni:

- Layanan di dalam Panti Sosial (Panti Jompo),
- Layanan di Rumah (*Home Care*).

Namun demikian, hingga saat ini pelayanan pemerintah terhadap kelompok lansia masih relatif terbatas, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan tenaga yang tersedia. Layanan di rumah (*home care*) dilakukan dengan cara memberikan pendampingan terhadap lansia di rumah keluarganya, namun program ini masih bersifat pilot projek, di Provinsi Bali baru dilaksanakan di satu desa,

yakni Desa Nagari, Kabupaten Kelungkung. Sementara itu, layanan di panti sosial juga masih relatif terbatas, sebab di Provinsi Bali hanya ada dua panti sosial, yaitu Panti Sosial Tresna Werdha Jara Mara Pati yang berada di Buleleng dengan daya tampung sekitar 75 orang dan Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya yang berada di Denpasar dengan daya tampung sebanyak 50 orang. Bila daya tampung kedua panti sosial tersebut dibandingkan dengan jumlah lansia yang ada sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2, tampaknya jauh dari memadai, padahal sistem sosial setempat kurang memberi ruang untuk merawat lansia di Panti Jompo. Di antara kedua Panti Jompo tersebut, dalam studi ini dipilih Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya yang ada di Denpasar sebagai obyek penelitian, namun kasus-kasus mikro yang ada tetap dilihat dalam kontelasinya dengan masyarakat Bali secara keseluruhan.

Menurut Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya, panti sosial ini didirikan tahun 1975 dengan tujuan untuk membantu merawat lansia yang terlantar, baik terlantar karena tidak memiliki sanak keluarga maupun karena kemiskinan. Dengan dirawat di panti sosial diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhannya sebagai lansia, baik kebutuhan bersifat fisik, maupun sosial. Kebutuhan sosial para lansia di panti dapat dipenuhi dengan cara berinteraksi di antara sesama penghuni panti, melakukan berbagai aktifitas sehingga fungsi sosial dalam kehidupan mereka tidak hilang. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa dalam perkembangan lebih lanjut daya tampung panti ini tidak memadai, sebab jumlah lansia yang menghuni setiap tahun cenderung meningkat. Jumlah penghuni sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 tampak dalam tabel (lihat tabel 4.3.).

Tabel 4.3.
 Jumlah Lanjut Usia Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya
 Tahun 2003-2007

No	Tahun	Jumlah Usia Lanjut		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2003	11	37	48
2	2004	15	30	45
3	2005	20	29	49
4	2006	13	37	50
5	2007	12	38	51

Sumber: Muhamad Haris, Penitipan Lanjut Usia Dalam Panti Jompo (Studi Kasus Orang Bali Di Panti Jompo Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar), Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, 2009.

Dalam Tabel 4.3. tampak bahwa sekalipun pada tahun 2004 jumlah lansia penghuni panti sosial mengalami penurunan, namun sejak tahun 2003, 2005 hingga tahun 2007 tampaknya terus meningkat. Bahkan menurut Kepala UPT Panti sejak tahun 2007 hingga saat ini seluruh kamar yang tersedia selalu penuh, kecuali ada yang meninggal dan itupun akan segera diganti oleh penghuni baru.

Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa sejalan dengan tujuan awal panti ini didirikan, mayoritas lansia yang dirawat dalam panti karena mereka terlantar, baik terlantar karena tidak memiliki sanak keluarga maupun karena dirinya dan keluarganya dalam kondisi miskin. Faktor lain karena tidak memiliki anak laki-laki, sementara untuk mengikuti anak perempuan yang telah menikah merasa sungkan. Sebagaimana telah diuraikan di atas keadaan ini merupakan implikasi dari sistem *purusa* yang menjadi dasar dalam sistem sosial masyarakat Bali. Beberapa lansia yang tinggal di panti karena memiliki permasalahan di lingkungan Banjar di mana dia tinggal. Menurut salah seorang pegawai panti, ada beberapa kasus lansia yang dianggap memiliki ilmu hitam, sehingga dia diusir dari Banjarnya. Kasus lain karena lansia tersebut selama hidup di lingkungan Banjarnya tidak pernah mengikuti aturan yang ditentukan dalam *awig-awig* di Banjar yang bersangkutan, seperti tidak

mengikuti kewajiban ayahan Banjar dalam kerja gotong royong. Terlepas dari alasan yang melatarbelakanginya, namun kenyataannya jumlah lansia yang berada di panti sosial terus meningkat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bila daya tampung kedua panti sosial tersebut dibandingkan dengan jumlah lansia yang ada sebagaimana terlihat dalam tabel 4.3., tampaknya jauh dari memadai sekalipun sistem sosial setempat kurang memberi ruang untuk merawat lansia di Panti Jompo. Terlebih-lebih bila melihat kecenderungan jumlah lansia yang cenderung meningkat, seiring dengan itu jumlah lansia yang terlantar pun terus meningkat dari tahun- ketahun sebagaimana yang terjadi di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keadaan ini disatu sisi menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada lansia. Disisi lain menunjukkan bahwa saat ini mayoritas lansia di Bali dirawat di lingkungan keluarganya. Salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat di Tabanan menyatakan bahwa dari dulu hingga saat ini orang Bali akan merasa malu terhadap masyarakat sekitarnya bila orang tuanya terlantar, terlebih-lebih bila ada anak laki-laki di lingkungan keluarganya. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa selama sistem kekerabatan tetap kuat, sistem nilai dalam adat tetap dijaga, maka para lansia akan tetap dirawat di lingkungan keluarganya masing-masing dan jumlah mereka yang terlantar relatif sedikit. Hal ini nampaknya secara empiris mendapat pembenaran, menurut salah seorang pegawai Dinas Sosial, Kabupaten Tabanan saat ini hanya ada dua orang lansia dari Kabupaten Tabanan yang menjadi Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya di Denpasar. Satu orang berasal dari Desa Pejaten, dia tinggal di panti sosial karena tidak memiliki anak, sementara istrinya yang merawat telah meninggal. Satu lagi lansia berasal dari Desa Batu, dia tinggal di Panti Sosial karena dirinya, keluarga dan kerabatnya miskin.

Sistem sosial serta sistem nilai dalam adat masyarakat Bali sebagai jaring pengaman pada perawatan lansia sebagaimana

dideskripsikan di atas tampaknya disadari oleh Pemerintah. Oleh karena itu, di masa yang akan datang kebijakan penanganan lansia diarahkan pada perlindungan dan pelayanan lansia di dalam masyarakat. Dengan arah kebijakan seperti ini bukan saja pemerintah dapat menghemat anggaran, tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dalam perawatan lansia dengan bersandar pada sistem nilai dan sistem sosial setempat. Menurut salah seorang narasumber dari kalangan pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali, perintisan ke arah itu telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu dengan membentuk Karang Lansia sebagai organisasi sosial di desa. Tujuan pembentukan Karang Lansia adalah untuk memberikan wahana bagi lansia dalam melakukan berbagai aktifitas secara bersama di lingkungan masyarakatnya. Di dalam organisasi sosial tersebut para lansia dapat bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga mereka tidak kehilangan fitrahnya sebagai makhluk sosial. Di samping itu, juga Karang Lansia menjadi sarana bagi pemerintah daerah di dalam memberikan berbagai pelayanan kepada lansia, seperti perawatan kesehatan secara rutin, senam kesegaran jasmani dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali saat ini telah terbentuk 15 Karang Lansia yang tersebar di 9 daerah kabupaten/kota. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa pada mulanya biaya pembentukan 15 Karang Lansia tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, setiap kelompok Karang Lansia rata-rata memiliki anggota sebanyak 30 orang, setiap anggota diberikan seragam seharga Rp.150.000,- dan konsumsi seharga Rp.30.000,-. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut banyak desa yang membentuk Karang Lansia secara swadaya. Keadaan mengindikasikan bahwa tampaknya masyarakat membutuhkan organisasi sosial sebagai wahana untuk berbagai aktifitas warganya yang telah berusia lanjut.

Karang Lansia di Desa Bajre, Kabupaten Tabanan didirikan pada tahun 2003. Menurut Kepala Desa, Karang Lansia tersebut didirikan secara swadaya oleh masyarakat dengan jumlah anggota aktif sekitar 72 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 67 orang

perempuan. Seluruh anggota berasal dari etnis asli Bali yang menetap di Desa Bajre. Sejak awal didirikan hingga saat ini, Karang Lansia tersebut melakukan berbagai kegiatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan diadakan sebulan sekali, kegiatan ini disatukan dalam program Pos Pembinaan Terpadu (Pos Bindu) yang dilaksanakan oleh Desa Dinas. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tensi darah, penimbangan Berat Badan, bahkan pada tahun lalu sempat diadakan pemeriksaan status emosional para lansia. Sementara itu, kegiatan Senam diadakan seminggu dua kali, biasanya diadakan pada hari Minggu dan hari Kamis jam 16.00. Menurut salah seorang anggota Karang Lansia, sekalipun disadari bahwa olah raga itu sangat penting bagi para lansia, namun tidak seluruh anggota dapat mengikuti kegiatan tersebut, setiap kali kegiatan senam hanya diikuti oleh sekitar 30 hingga 40 orang anggota. Hal ini disebabkan banyak anggota, terutama perempuan yang dibawa anaknya keluar kota dalam beberapa waktu untuk membantu mengasuh cucunya. Setelah kembali ke kampung halamannya biasanya mereka aktif kembali dalam berbagai kegiatan di Karang Lansia. Kegiatan lain yang sering dilakukan Karang Lansia adalah rekreasi secara bersama-sama, rekreasi tersebut biasanya dilakukan dengan mengunjungi pure-pure yang ada diberbagai daerah. Dengan kegiatan ini para lansia dapat berekreasi sambil melakukan sembahyang disetiap pure yang dikunjungi. Namun demikian, sekalipun kegiatan tersebut telah dijadwalkan secara rutin, tetapi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan kurang biaya yang dimiliki oleh organisasi sosial tersebut. Tabungan yang dikumpulkan para anggota dalam setiap pertemuan tidaklah cukup untuk membiayai kegiatan rekreasi yang direncanakan diadakan sebulan sekali, sementara sampai saat ini belum ada bantuan dari donatur untuk membiayai kegiatan tersebut.

Terlepas dari kekurangan biaya yang dialami Karang Lansia sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut beberapa orang anggotanya, organisasi sosial ini banyak memberikan manfaat kepada para lansia. Melalui wahana organisasi sosial tersebut para lansia

dapat bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Salah seorang anggota secara terbuka menyatakan bahwa sebelum atau setelah kegiatan senam biasanya para anggota mengobrol, baik secara berkelompok maupun terbatas hanya dua atau tiga orang. Dalam obrolan itu, selain membicarakan hal-hal yang bersifat umum, sering juga mengarah pada berbagai persoalan yang serius, terutama tentang persoalan rumah tangga termasuk cara mendidik cucu dari anak yang tinggal bersamanya. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa hal yang menjadi perhatian bersama para lansia dewasa ini adalah perkembangan zaman yang jauh berbeda dengan masa kecilnya. Saat ini informasi relatif terbuka, sarananya pun mudah didapat. Warnet ada di mana-mana, bahkan hampir semua anak memiliki Hand Pone (HP). Di samping berbagai manfaat positif yang dapat diperoleh, dampak negatifnya juga sangat besar. Tontonan tentang pornografi menjadi tayangan yang mudah didapat setiap anak, tindak kekerasan serta gaya hidup budaya barat dapat dilihat dalam setiap media elektronika. Kondisi ini sangat mempengaruhi sifat dan karakter anak-anak zaman sekarang, masukan berbagai informasi dari luar menjadi acuan dan pola gaul di antara mereka. Para orang tua sering dipandang salah dalam mendidik anaknya, atas dasar kasih sayang sering memberikan kemudahan untuk mendapat sarana komunikasi modern, banyak kasus orang tua memaksakan diri untuk membeli Hand Pone yang canggih demi memenuhi tuntutan anaknya, padahal kegunaannya hanya untuk memenuhi gengsi anak dalam pergaulan dengan teman sebayanya. Keadaan ini menjadi kegelisahan bersama para lansia, mereka sering mendiskusikan tentang cara mendidik anak zaman sekarang, terutama cucu mereka yang memerlukan pola pendidikan yang berbeda dengan pola pendidikan pada masanya. Diskusi para lansia tentang hal ini sering dilakukan secara intensif dan berlangsung lama, kadang-kadang sampai larut malam. Menanggapi hal ini salah seorang anggota Karang Lansia menyatakan bahwa kadang-kadang waktu mengobrol mereka jauh lebih lama dibanding kegiatan senamnya itu sendiri. Terlepas dari curahan waktunya, dilihat dalam prespektif yang lebih luas perhatian para lansia terhadap pola pendidikan para anak muda, terutama

cucunya merupakan refleksi tanggungjawab mereka sebagai Guru Rupaka yang harus menanamkan nilai-nilai luhur mereka kepada generasi penerusnya. Dalam konteks ini, melalui pembentukan Karang Lansia tampaknya pemerintah relatif berhasil memberikan wahana untuk merefleksikan tanggung jawab sosial para lansia dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.

Selain pembangunan kelembagaan (Karang Lansia), Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan santunan terhadap lansia yang terlantar, menurut salah seorang narasumber dari kalangan pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali, tahun ini sekitar 800 orang lansia terlantar mendapat santunan sebesar Rp.200.000/orang setiap bulan dengan sumber biaya dari APBN. Jumlah nominal santunan untuk lansia ini menurun dibandingkan tahun lalu, pada tahun lalu setiap orang mendapat santunan sebesar Rp.300.000/bulan. Hal ini terjadi karena ada penurunan jumlah anggaran di lingkungan Kementerian Sosial akibat pemotongan anggaran guna kepentingan pembiayaan sektor lain. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Tabanan di luar lansia yang mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi Bali, tahun ini sekitar 108 orang lansia terlantar mendapat santunan sebesar Rp.200.000/orang setiap bulan dengan sumber biaya dari APBN. Sedangkan sumber biaya dari APBD hanya dapat memberikan sumbangan sembilan bahan pokok (sembako) secara insidental, pada tahun ini hanya sekitar 201 orang lansia yang mendapat pembagian sembako. Menurut salah seorang narasumber dari kalangan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, saat ini jumlah lansia terlantar yang mendapat santunan pemerintah masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah lansia terlantar yang ada, di Kabupaten Tabanan ada sekitar 772 orang lansia terlantar, namun hanya sekitar 309 orang yang mendapat santunan, 108 orang mendapat jaminan sosial berupa santunan dengan jumlah Rp.200.000; setiap bulan, sedangkan sebanyak 201 orang hanya mendapat santunan sembako secara insidental sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain jaminan sosial dan santunan yang bersifat insidental, lansia yang dipandang masih bisa produktif diberikan bantuan modal melalui program Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp.1.500.000,- setiap orang. Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan modal kepada 100 orang lansia. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengusulkan sebanyak 15 orang lansia untuk mendapat bantuan modal. Menurut narasumber dari kalangan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, pada tahun sebelumnya (tahun 2012 dan 2013) sebanyak 20 orang yang mendapat bantuan modal. Sekalipun tidak semua penerima bantuan menunjukkan keberhasilan, namun ada beberapa orang yang berhasil mengembangkan industri rumah tangga yang kemudian menjadi sumber penghasilan mereka. Salah seorang lansia yang telah mendapat bantuan modal kemudian mengembangkan pembuatan minyak kelapa tradisional dirumahnya. Walau tidak memproduksi setiap hari, namun dikala memproduksi minyak hasil olahannya narasumber tersebut mengakui bisa dapat keuntungan berkisar antara Rp.30.000,- hingga Rp.50.000,- sehari.

Dalam uraian di atas telah disinggung bahwa saat ini jumlah lansia terlantar yang mendapat santunan pemerintah masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah lansia terlantar yang ada. Dengan mengangkat kasus di Kabupaten Tabanan, jaminan sosial dan santunan insidental, bantuan modal dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tidak dapat menjangkau semua lansia terlantar yang membutuhkan, masih banyak lansia terlantar yang belum mendapat bantuan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pelayanan pemerintah terhadap para lansia sebagai warga negara. Di tengah keterbatasan dana seperti ini, tampaknya pengembangan kelembagaan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dalam perawatan lansia seperti Karang Lansia menjadi pilihan yang tepat, selain menghemat biaya program seperti ini sejalan dengan arah kebijakan umum pemerintah kedepan yang lebih mengutamakan perawatan lansia di lingkungan masyarakat dengan bersandar pada sistem nilai dan sistem sosial setempat.

Negara Tradisional

Terminologi negara tradisional dalam tulisan ini adalah negara dalam perspektif sistem nilai masyarakat Bali. Terminologi ini hanya ditujukan sebagai landasan untuk melihat peran negara dalam melindungi dan melayani lansia serta peran lansia dalam merealisasikan kewarganegaraanya di lingkungan masyarakat Bali.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa Jauh sebelum NKRI terbentuk, di Bali sudah ada beberapa kerajaan yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan tertentu. Dalam sistem nilai masyarakat Bali, para Raja merupakan representasi kekuasaan Para Dewa di muka Bumi. Sementara itu, Banjar dan Desa Pakraman (Desa Adat) merupakan unit-unit sosial yang menjadi instrumen para Raja dalam menjalankan kekuasaannya di dunia. Sekalipun dalam perkembangan lebih lanjut kemudian diterapkan konsep negara modern (NKRI), namun Banjar dan Desa Pakraman tetap eksis sebagai lembaga adat yang hidup berdampingan dengan intitusi negara modern. Atas dasar fakta sosial seperti ini, maka melihat kehidupan kenegaraan, termasuk kewarganegaraan di lingkungan masyarakat Bali tidak bisa dilihat secara tunggal dalam konsep negara modern, sebab dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali perspektif negara modern berada dalam lingkup sistem nilai tradisional masyarakat setempat. Tidaklah mungkin membahas negara modern (NKRI) dengan menisbikan sistem nilai yang ada, sebab sistem nilai tersebut menjadi jiwa dalam kehidupan sosial mereka dari dahulu hingga saat ini. Dalam konteks ini konsep kewarganegaraan pada negara modern tidak dapat dibedakan dengan konsep kewargaan pada unit-unit sosial yang ada, sebab unit sosial yang ada merupakan peninggalan instrumen negara pada masa lalu yang masih eksis dalam kehidupan sosial dewasa ini, dia hidup, tumbuh dan berkembang seiring dengan intitusi negara modern.

Analisis tentang negara dalam perspektif sistem nilai masyarakat Bali mengarahkan fokus perhatian pada dinamika sosial politik dalam kontelasinya dengan sistem nilai masyarakat Bali.

Dalam konteks ini menurut *Clifford Geertz* terdapat tiga lingkup utama tempat di mana bentuk-bentuk politik lokal memainkan peran yang dominan, yakni:

- (1) Penataan aspek publik dari kehidupan komunitas,
- (2) Pengaturan fasilitas-fasilitas irigasi,
- (3) Pengorganisasian ritual rakyat.

Untuk setiap tugas tersebut terdapat lembaga-lembaga terpisah yang secara khusus bertujuan untuk melaksanakannya, setiap lembaga terhubung satu lain. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu: Banjar (Dusun), organisasi pembagian air (Subak), dan jamaah *pura* (pemaksan). Disekeliling institusi itu berkumpul sejumlah organisasi yang non politis dan juga bertujuan khusus (seka), kelompok-kelompok kerabat, organisasi-organisasi sukarela. Setiap institusi tersebut kadang-kadang memainkan politik sekunder dalam salah satu dari tiga lingkup utama sebagaimana diuraikan dia atas (*ibid*, hlm. 91). Pergulatan peran institusi-institusi yang ada dalam dinamika sosial menghasilkan suatu tatanan politis komposit terdiri dari kelompok-kelompok organisatoris yang saling tindih dan terjalin seperti pagar kawat (*ibid*, hlm. 92). Mengingat kompleksnya jalinan organisasional dalam dinamika sosial-politik lokal masyarakat Bali, maka dalam tulisan ini tidak akan melihat seluruh institusi sosial yang ada, pembahasan akan difokuskan pada Banjar dan Desa Pakraman (Desa Adat).

Banjar dalam sistem nilai masyarakat Bali, bukan sekedar kumpulan komunitas dalam suatu teritorial tertentu, tetapi merupakan institusi yang bertanggungjawab akan fasilitas umum, seperti: membangun dan memelihara jalan; membangun dan memelihara balai desa, lumbung, arena adu ayam, pasar dan kuburan. Banjar juga bertanggungjawab akan keamanan setempat, seperti: meronda; menangkap, mengadili dan menghukum pencuri; ketertiban umum. Selain itu, juga Banjar bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan warga, seperti: rebutan warisan; perselisihan mengenai berbagai hak dan kewajiban tradisional; perselisihan mengenai

perjanjian. Sementara itu, Desa di Bali seperti negara, institusi ini bukan satu entitas tunggal, melainkan suatu medan luas terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan berbagai organisasi dalam berbagai fokus yang saling berhubungan dalam suatu pola yang disebut "*Kolektivisme Pluralistik*" (*ibid*, hlm. 93). Bagi orang Bali, status kewargaan dalam Banjar dan Desa pakraman sangat penting artinya, sebab bukan hanya mengatur kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga mengatur pengurusan disaat seseorang meninggal dunia. Hal ini tampaknya sangat penting bagi seorang lansia, sebab menurut keyakinan orang Bali, ketika mereka meninggal, badan kasarnya boleh dikubur tapi kemudian badan halusnya (roh) harus disucikan melalui upacara ngaben dan disimpan di *sanggah/pure* keluarga. Dalam konteks ini Banjar memegang peranan penting, tanah pekuburan ada dibawah kekuasaan Banjar, demikian juga upacara ngaben secara kolektif yang biasa dilakukan masyarakat umum dikoordinir oleh Banjar.

Mangku Padre seorang perempuan lansia berumur 91 tahun penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya, dalam suatu wawancara secara terbuka menyatakan bahwa sebagian penghasilannya dari hasil menjual alat-alat sesajen yang dibuat di Panti Sosial ditabungkan kepada keponakannya. Sampai saat ini tabungannya sudah mencapai Rp.1.000.000,- padahal penghasilannya hanya Rp.30.000,- itu pun tidak didapat setiap hari. Namun demikian, tabungan itu dipandang penting untuk membiayai upacara ngaben setelah dia meninggal, menurut pengakuannya sengaja tabungan tersebut dititipkan kepada keponakannya, sebab keponakannya tersebut yang akan menjadi penanggungjawab di lingkungan Banjar ketika dia meninggal. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa adanya penanggungjawab tersebut sangat penting supaya dirinya tetap dapat menjadi warga Banjar, dengan begitu ketika meninggal dapat dikuburkan dan kemudian diadakan upacara ngaben di lingkungan Banjar di mana dahulu Dia tinggal. Pernyataan Mangku Padre tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa pentingnya status kewargaan Banjar bagi seorang lansia, bukan saja karena tanah

pekuburan berada di lingkungan itu, tetapi juga setelah disucikan dengan upacara ngaben, *sanggah* keluarga yang ada di lingkungan Banjar merupakan tempat bersemayam rohnya bersama-sama dengan para leluhur mereka. Salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat menyatakan bahwa, seseorang yang terasing dari Banjarnya berarti terasing juga dari *sanggah* keluarganya, orang yang mengalami hal ini bagai orang yang tidak memiliki tempat untuk pulang setelah dia meninggal dunia.

Dalam uraian di atas telah disinggung bahwa Banjar merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam membangun dan memelihara fasilitas umum, tanggungjawab tersebut didistribusi terhadap seluruh warga secara bergotong royong, kewajiban warga terhadap Banjar tersebut disebut *Ayahan*. Sekalipun demikian lansia atau warga yang telah berusia di atas 60 tahun dibebaskan dari ayahan, bagi mereka yang memiliki anak yang telah menikah, maka kewajiban terhadap Banjar tersebut diwakilkan kepada anaknya. Menurut salah seorang narasumber, ketentuan adat yang membebaskan lansia dari ayahan merupakan bentuk penghormatan yang diberikan Banjar kepada para lansia, sebab selain secara fisik sudah tidak memungkinkan lagi bekerja secara gotong royong dengan warga lainnya, pembebasan dari ayahan juga merupakan wujud penghormatan dari generasi berikutnya terhadap pengabdian lansia dahulu kepada Banjar. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, penghormatan Banjar terhadap lansia ini merepresentasikan penghormatan komunitas adat terhadap para lansia dalam kehidupan sosialnya, sebab sekalipun mereka dibebaskan dari segala kewajiban terhadap Banjar, namun dalam kehidupan sosialnya tetap mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya. Sementara itu, dalam melindungi lansia yang miskin dan tidak memiliki sanak saudara, Banjar memiliki konsep yang disebut "*Putung*". Dalam konsep *putung* tersebut, bila seorang lansia yang miskin dan tidak memiliki sanak saudara meninggal, maka penguburan dan upacara ngaben ditanggung oleh seluruh warga Banjar. Namun demikian, seluruh harta milik lansia tersebut diambil untuk dimasukkan dalam

kas Banjar, tempat tinggalnya biasanya diberikan untuk ditempati oleh warga miskin lainnya.

Selain seka, organisasi non politik yang mengelilingi Banjar dalam dinamika sosial masyarakat Bali adalah kelompok-kelompok kekerabatan, baik kekerabatan pada keluarga luas dalam satu lingkungan pemukiman (*iunggalin sanggahfnaiah*), keluarga besar dalam satu klen (*dadia*), keluarga luas dari satu garis leluhur (*iunggalin kawitan*), maupun keluarga luas dari satu garis leluhur yang membedakan kasta (*soroh'wangsa*). Keseluruhan jaringan kekerabatan yang ada tersebut pada dasarnya di mulai dari keluarga inti. Oleh karena itu, melihat peran lansia dalam kelompok-kelompok kekerabatan pada masyarakat Bali harus difokuskan pada peran lansia dalam keluarga inti sebagai unit sosial terkecil. Sebagaimana telah diuraikan di atas, konsep *Tri R'na*, Guru Rupaka, *Widy Sekale* pada dasarnya menempatkan orang tua pada posisi paling dihormati dalam sistem nilai masyarakat Bali. Sistem patrilineal (*purusa*) membawa implikasi di mana orang tua biasanya dirawat oleh anak laki-lakinya. Menurut salah seorang narasumber dari kalangan tokoh masyarakat, sekalipun orang tua dirawat dan hidup bersama dengan keluarga anak laki-lakinya, namun sebenarnya orang tua (lansia) tersebut memberikan kontribusi besar pada keluarga anaknya, baik secara sosial maupun ekonomi. Para orang tua yang hidup bersama keluarga anaknya di pedesaan, biasanya membantu keluarga anaknya dalam mencari kayu bakar, merawat lahan pertanian. Sementara orang tua perempuan biasanya membantu dalam mengurus rumah tangga, mulai dari memasak, membersihkan rumah hingga merawat cucunya. Dengan bantuan orang tua tersebut, dalam keluarga di pedesaan hampir tidak ada yang mempekerjakan pembantu rumah tangga. Keadaan ini secara langsung atau pun tidak telah menghemat pengeluaran rumah tangga. Kontribusi yang paling nyata terjadi pada beberapa keluarga yang memiliki usaha rumah tangga, seperti: membuka warung, membikin kue atau makanan untuk di jual. Beberapa informan yang memiliki usaha rumah tangga menyatakan bahwa kehadiran orang tuanya dalam rumah tangga mereka sangat

membantu kelancaran usahanya, sebab mereka dapat berbagi peran dalam mengurus rumah tangganya. Lebih jauh narasumber tersebut menyatakan bahwa kebanyakan orang tua di Kabupaten Tabanan dititipi untuk mengurus cucunya, terlebih-lebih bila anak dan menantunya bekerja. Salah seorang informan menyatakan bahwa dirinya mengurus cucu dari mulai lahir hingga menjelang dewasa, selain menyiapkan makan, ketika masuk Taman Kanak-kanak, setiap hari mengantar-jemput. Interaksi yang intens di antara mereka membuat hubungan emosional di antara keduanya semakin rekat, menurut pengakuannya saat ini cucunya lebih dekat kepada neneknya dari pada ibunya. Pernyataan informan ini menunjukkan bahwa bagi orang tua lansia yang hidup serumah dengan keluarga anaknya, maka pada dasarnya mereka merupakan agen penting di dalam menanamkan nilai-nilai kepada cucunya, sebab sosialisasi nilai paling dasar berada pada keluarga. Dilihat dalam perspektif lebih luas kondisi ini menunjukkan peran lansia sebagai agen dalam sosialisasi nilai terhadap generasi penerus.

5. Penutup

Hukum *rwa-bhineda* yang meyakini akan adanya berbagai perbedaan serta Idiologi *Tri Hita Karana* membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Bali. Konsep *Tri R'na*, *Guru Rupaka*, *Widy Sekale* pada dasarnya menempatkan orang tua pada posisi paling dihormati dalam sistem nilai masyarakat Bali. Dalam konteks ini kewajiban anak untuk mengurus orang tua tidak saja merupakan kewajiban moral yang bersifat humanistik atas berbagai kebaikan orang tua, tetapi juga merupakan bagian dari *sraddha* (iman atau ketulusan dalam menjalankan bhakti) yang berpijak pada agama yang dianut. Namun demikian, adanya prinsip patrilineal (*purusa*) yang kuat, maka sistem nilai masyarakat Bali tentang kewajiban dalam mengurus lansia terlihat “Ambigu”, di satu sisi menempatkan kewajiban untuk mengurus orang tua sebagai suatu kewajiban yang bersifat mutlak harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam kehidupannya di dunia sebagai wujud pembayaran hutang (*Tri r'na*).

Disisi lain menempatkan kewajiban untuk mengurus orang tua hanya pada anak laki-laki sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Terlepas dari ambiguitas yang terjadi, dalam realitas kehidupan masyarakat kewajiban mengurus orang tua tetap bersandar pada adat istiadat yang ada, berbagai kasus yang dialami para informan secara empiris menunjukkan hal itu. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas hal ini menunjukkan bahwa *purusa* sebagai dasar dalam sistem sosial membawa implikasi luas pada pengurusan orang tua (lansia) di lingkungan masyarakat Bali.

Bila melihat jumlah dan daya tampung panti sosial yang ada di Bali, maka realitasnya mayoritas lansia hidup dan dirawat di lingkungan keluarganya ditengah-tengah masyarakat adatnya. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa *purusa* sebagai dasar kekerabatan hanya memilah posisi tanggungjawab utama dalam perawatan lansia, di mana anak laki-laki menjadi penanggungjawab utama. Terlepas dari implikasi *purusa* terhadap perawatan lansia, hingga saat ini tampaknya sistem sosial dan adat istiadat menjadi jaring pengaman dalam perawatan lansia. Adanya rasa malu terhadap masyarakat bila orang tuanya terlantar secara langsung ataupun tidak memperkuat sistem nilai dan adat istiadat yang ada.

Sekalipun peran negara (NKRI) relatif terbatas dalam memberikan perlindungan terhadap lansia, namun dalam perkembangan saat ini kebijakan penanganan lansia diarahkan pada perlindungan dan pelayanan lansia di dalam masyarakat. Dengan arah kebijakan seperti ini bukan saja pemerintah dapat menghemat anggaran, tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dalam perawatan lansia dengan bersandar pada sistem nilai dan sistem sosial setempat. Perintisan ke arah itu telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu dengan membentuk Karang Lansia sebagai organisasi sosial di desa. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, melalui pembentukan Karang Lansia tampaknya pemerintah relatif berhasil memberikan wahana untuk merefleksikan tanggung jawab sosial para lansia dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya. Sementara itu, dilihat dalam tatanan

negara tradisional, Banjar sebagai kesatuan komunitas relatif berhasil dalam memberikan perlindungan terhadap lansia. Konsep “Putung” dalam Banjar secara nyata memberikan perlindungan terhadap lansia yang miskin dan tidak memiliki sanak keluarga. Secara mikro, lansia dalam keluarga memberikan kontribusi besar terhadap keluarga yang ditinggalinya. Oleh karena mayoritas dari lansia dititipi oleh anak untuk merawat cucu, maka terjadi interaksi yang intens antara lansia dengan cucunya. Dengan kondisi ini pada dasarnya mereka merupakan agen penting di dalam menanamkan nilai-nilai kepada cucunya, sebab sosialisasi nilai paling dasar berada pada keluarga. Dilihat dalam perspektif lebih luas kondisi ini menunjukkan peran lansia sebagai agen dalam sosialisasi nilai terhadap generasi penerus atau secara konseptual disebut dengan Guru Rupaka.

Daftar Pustaka

- Geertz Clifford. 2000. *Negara Teater, Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*. Yayasan Bentang Budaya.
- Geria. I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI, Denpasar*. Percetakan Bali.
- Gd Putra Agung Anak Agung. 2001. *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Haris, Muhamad. 2009. *Penitipan Lanjut Usia dalam Panti Jompo, Studi Kasus Orang Bali di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar*. Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Sudharta, Tjok Rai. 1993. *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan (Kewajiban Putra-putri Dewasa)*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, I Ketut. 2001. *Makna Upacara Yadnya dalam Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.

. 2000. Widya Santya Dharma, *Jurnal Kajian Hindu, Budaya, dan Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Vol. 7 No.1, Maret.

BAB V

PERANAN LANSIA DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BALI: STUDI KASUS TABANAN

Oleh: Rochmawati

1. Pengantar

Semua manusia di dunia mengalami masa kanak-kanak, remaja, muda, dewasa, tua dan berakhir dengan lanjut usia atau lansia. Semakin panjang usia seseorang, seiring dengan pertambahan usia maka tubuh seseorang akan mengalami kemunduran baik fisik maupun psikologisnya. Secara fisik seseorang disebut lansia terlihat dari tampang fisiknya. Misalnya, kulit, mulai ada perubahan karena kulit menjadi lebih keriput, begitu juga fungsi pendengaran telinga mulai berkurang, fungsi mata mulai berkurang, warna rambut mulai berubah menjadi putih, bahkan menjadi tipis karena mengalami kerontokan. Secara psikologis sesuai dengan kemunduran fisik seorang lansia menjadi mudah lupa, sebagian mungkin karena berkurangnya kegiatan serta interaksi baik di dalam lingkungan keluarga sendiri maupun, di luar lingkungan keluarga, seperti hubungan dengan anak-anak, saudara atau teman-temannya dan selanjutnya tumbuh perasaan menjadi mudah merasa sepi, jenuh atau bosan. Seorang lansia yang ketika mudanya bekerja dan mempunyai kedudukan, atau jabatan terkadang mengalami *post power syndrome* karena semakin berkurangnya peranan mereka, baik dalam keluarga maupun masyarakat, atau mungkin lantaran seorang lansia memiliki kondisi ekonomi yang buruk (Fitriani, Erda, 2009).

Pada bagian tulisan ini, akan dikupas bagaimana peranan lansia dalam keluarga, dan akan dibahas apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang lansia sebagai warga negara. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

seperti termuat pada Bab I, Pasal 1 berbunyi bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal-pasal berikutnya antara lain, mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam pemenuhan kebutuhan tiap warga negara termasuk di dalamnya kebutuhan dasar para lanjut usia, pelakunya adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat (Sumarno, Setyo, dkk., 2011).

Jika melihat isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2009, maka para lansia di mana saja mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sosial dan juga kebutuhan dasar. Begitu juga dengan masyarakat di Bali, dalam hal ini para lansianya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah daerah tanpa ada perbedaan satu sama lainnya. Sebagai warga negara, para lansia bisa mendapatkan hak-haknya tanpa pengecualian sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang.

2. Dinamika Daerah Penelitian

Kategori lansia menurut laporan WHO, bahwa lanjut usia (lansia) dibagi kedalam 4 (empat) kelompok usia yaitu: 45-49 tahun (*middle age*), 60-70 tahun (*eiderty*), 75-90 (*old*) dan yang terakhir di atas 90 tahun (*very old*). Sedangkan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Santika, Adhi, 2014). Melihat kepada ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1998, maka penelitian ini difokuskan kepada masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu, narasumber yang menjadi obyek

penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas, baik yang tinggal di rumah sendiri maupun yang tinggal di Panti Jompo.

Jumlah lansia di Indonesia menempati urutan ke tiga setelah Cina dan India. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Bali. Pilihan atas Bali dilakukan karena jumlah lansia di Bali menempati posisi ke-3 (tiga) setelah Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian, lokasi penelitian di wilayah Bali difokuskan di Kabupaten Tabanan tepatnya di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Desa Banjar Klutuh Kelod, Kecamatan Kerambitan, dan Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di ketiga wilayah ini, banyak terdapat anggota masyarakat lansia dan pada umumnya mereka tinggal di rumah sendiri dengan ditemani oleh anak laki-lakinya. Akan tetapi, jika dilihat dari asal penghuni di Panti Jompo yang ada di wilayah Denpasar, Bali, ada di antara penghuninya berasal dari Kabupaten Tabanan meskipun jumlahnya relatif kecil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa, masyarakat Kabupaten Tabanan yang tinggal di Panti Jompo jumlahnya kecil, dengan demikian data yang ada di Panti Jompo dengan penuturan atau penjelasan narasumber sama yakni jumlahnya relatif kecil.

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi wilayah daerah penelitian, khususnya dari aspek sosial budaya. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Selemadeg, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Tabanan merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan. Seperti telah diuraikan di atas sebagai *sampel* diambil di tiga wilayah kecamatan yakni kecamatan Selemadeg, Kerambitan dan Kediri. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Tabanan menurut data tentang jenis kelamin per kecamatan berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali pada tahun 2013 berjumlah 420.913 orang terdiri dari laki-laki 209.308, dan perempuan 211.605 orang (BPS Bali, 2013). Secara keseluruhan dari jumlah penduduk Kabupaten Tabanan terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih

banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, selisihnya kurang lebih 2.297 orang.

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Tabanan tahun 2013, tentang Kelompok Umur, jumlah penduduk usia dewasa antara umur 40 sampai 44 tahun didominasi oleh penduduk perempuan. Seperti diketahui, umur 40 sampai 44 tahun adalah usia produktif, di mana seseorang sedang berada dalam posisi karir yang menanjak tentu saja bagi mereka yang bekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Sedangkan umur lanjut usia 60 tahun keatas di Kabupaten Tabanan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berjumlah 59.357 orang, atau sekitar 14,10% dengan rincian lansia laki - laki berjumlah 26.819 orang dan lansia perempuan berjumlah 32. 538 orang. Tampaknya jumlah lansia perempuan di wilayah ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan lansia laki-laki, selisihnya relatif banyak sekitar 5.719 orang (lihat tabel 5.1.).

Tampaknya persentase jumlah penduduk menurut kelompok umur telah menunjukkan adanya pergeseran di mana penduduk usia lebih dari 65 tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya. Hal ini, menunjukkan penduduk usia non produktif di Kabupaten Tabanan terus bertambah. Presentase penduduk usia lebih dari 65 tahun yang cenderung bertambah memperlihatkan bahwa jumlah lansia khususnya di wilayah Kecamatan Tabanan cukup banyak. Sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 1998, usia di atas 60 tahun sudah termasuk golongan atau kelompok lanjut usia atau yang biasa disebut dengan sebutan lansia. Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Tabanan, bahwa presentase penduduk usia lebih dari 65 tahun atau lansia cukup tinggi.

Tabel 5.1
Penduduk Lansia di Bali

Kabupaten/ Kota	Total Penduduk			Usia 60+ (Lansia)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jembrana	130.062	131.576	261.638	11.611	14.250	25.861
Tabanan	209.308	211.605	420.913	26.819	32.538	59.357
Badung	277.536	265.796	543.332	19.121	21.391	40.512
Gianyar	237.493	232.284	469.777	24.836	26.877	51.713

Kabupaten/ Kota	Total Penduduk			Usia 60+ (Lansia)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Klungkung	84.503	86.040	170.543	10.880	13.189	24.069
Bangli	109.109	106.244	215.353	13.277	13.610	26.887
Karangasem	198.650	197.837	396.487	23.608	26.221	49.829
Buleleng	311.394	312.731	624.125	29.955	36.170	66.125
Denpasar	403.293	385.296	788.589	17.414	18.348	35.762
Bali	1.961.348	1.929.409	3.890.757	177.521	202.594	380.115

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tahun 2013.

Aspek Sosial Budaya

Seperti diketahui, penelitian ini dilakukan ditiga kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Penduduk di wilayah ini berjumlah 420.913 jiwa dengan luas wilayah 839 km². Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan sehingga dikenal sebagai daerah agraris. Wilayah ini mempunyai potensi unggulan terutama di bidang pertanian sebab sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani. Mengingat wilayah Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris, maka tumbuh kembangnya industri pedesaan yang berbasis pertanian secara tidak langsung telah memicu perekonomian masyarakat desa, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi para petani melalui industri penanganan dan pengelolaan pasca panen yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, penduduk Kabupaten Tabanan berdasarkan angkatan kerja, penduduk yang bekerja di sektor pertanian kurang lebih 194.259 jiwa atau sekitar 43,96%, di sektor perdagangan sekitar 44.250 jiwa atau sekitar 17,39%, sedangkan di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa atau sekitar 13,88% dan sisanya kurang lebih 109.458 jiwa atau sekitar 24,77% di sektor lainnya. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa, dengan rincian sebagai berikut 19.249 jiwa atau sekitar 23,37% usia sekolah dalam hal ini masih berstatus sekolah, 48.697 atau sekitar 59,13% mengurus rumah tangga, dan sisanya sebesar 14.408 jiwa atau sekitar 17,05% alasan lain (lihat <http://www.tabanankab.go.id/profil-kabupaten/selayang-pandang>).

Masyarakat Bali, mayoritas atau sebagian besar beragama Hindu, begitu juga dengan penduduk Kabupaten Tabanan. Hal tersebut didukung oleh jumlah rumah peribadatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan tahun 2013, di Kabupaten Tabanan terdapat 1.151 tempat peribadatan untuk Agama Hindu, 28 buah tempat peribadatan Agama Islam, tempat peribadatan Agama Katholik 7 buah, tempat peribadatan Agama Budha 3 buah dan 6 buah tempat peribadatan Agama Protestan.

3. Kondisi Lansia di Bali

Bertambahnya jumlah lansia di Indonesia telah menyebabkan berbagai permasalahan sosial di kalangan masyarakat lansia itu sendiri. Permasalahan-permasalahan sosial yang biasanya dihadapi antara lain: 1. *Faktor*: Menurunnya kondisi seorang lansia seperti jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan masyarakat lansia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. 2. *Faktor*: Bergesernya nilai-nilai keluarga dari keluarga besar (*Extended Family*) menjadi keluarga inti (*Nuclear Family*). 3. *Faktor*: Situasi atau kondisi yaitu sekarang ini di era globalisasi, hampir seluruh anggota keluarga semakin sibuk dan dituntut untuk bekerja keras, sehingga keluarga atau lingkungan kurang dapat memberi perhatian dan pelayanan terbaik bagi lansia di tempat tinggalnya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lansia itu, pada akhirnya lansia ada yang memilih atau memutuskan untuk tinggal di Panti-panti Jompo yang ada di kota, atau wilayah di mana mereka berada, atau bahkan di Panti-panti Jompo yang tersedia di luar kota jauh dari tempat mereka berada.

Akan tetapi sedikit berbeda dengan wilayah atau lokasi penelitian ini yakni di wilayah Bali khususnya di daerah Kabupaten Tabanan, di mana masyarakatnya sangat kental dengan budayanya terutama adat-istiadatnya dipegang teguh, dihormati dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahkan masyarakat Bali mempunyai prinsip, atau memiliki nilai sosial yang secara turun

temurun dijaga yaitu **“Putra Sesana”**, artinya dalam sebuah keluarga pada masyarakat Bali, seorang anak masih dan harus bahkan wajib bertanggung jawab atas kehidupan orangtuanya kelak di hari tuanya. Walaupun bagaimana orangtua yang telah melahirkan, membesarkan serta menyekolahkan, sehingga anak berkewajiban untuk mengurus orangtua sampai akhir hayatnya. Putra Sesana juga turut mendukung program pembangunan kesejahteraan lansia sehingga di wilayah Bali belum ditemukan adanya lansia yang terlantar. Dalam konsep Agama Hindu - Bali, jika seorang anak tidak melaksanakan kewajiban tersebut mereka akan mendapat hukuman dari Dewa atau Sanghiyang Widi sebab mereka masih percaya dengan **“Reinkarnasi”**. Masyarakat Bali pada umumnya beragama Hindu di mana mereka memiliki kepercayaan atau tujuan hidup dalam agama hindu terkenal dengan 5 (lima) unsur kepercayaan yaitu:

- (1) Percaya kepada Tuhan
- (2) Percaya kepada Atman (Roh)
- (3) Percaya kepada Hukum Karma
- (4) Percaya kepada Reinkarnasi
- (5) Percaya kepada Moksa (Pengabdian yang sempurna).⁶¹

Dengan demikian, masyarakat Bali sangat menghormati dan taat akan kepercayaan-kepercayaan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak berani melanggar aturan atau adat yang ada. Jika mereka melanggar aturan tersebut, akan takut terkena sanksi agama. Terlepas dari hal tersebut dalam kehidupan kesehariannya, dan sudah berlangsung secara turun temurun dalam lingkungan keluarga, khususnya anak laki-laki memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak laki-laki sangat ditunggu-tunggu. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*) yakni mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh sebab itu, anak laki-laki lebih

⁶¹Wawancara dengan narasumber G.A.R, pada tanggal 23 Maret 2014.

diprioritaskan dibanding dengan anak perempuan. Selain itu, anak laki-laki lebih berhak atas peninggalan atau harta warisan dari orangtuanya, namun bukan hanya masalah warisan saja, akan tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari anak perempuan yakni adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, budaya dan agama. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Bali sangat kental dengan budayanya dan semua kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya hampir selalu dikaitkan dengan tradisi yang mereka miliki. Anak laki-laki ketika setelah menikah mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab memelihara kelangsungan *klen*. Selain itu, anak laki-laki mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan *sangah merajan* atau *pura keluarga*. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak laki-laki dalam kehidupan sebuah keluarga menjadi sangat berarti. Dengan demikian, ketika melihat sebuah keluarga masyarakat di wilayah Bali, tidaklah mengherankan jika di keluarga tersebut si orangtua selalu ditemani oleh anak laki-lakinya.

Sedikit berbeda dengan anak laki-laki, dalam adat masyarakat Bali anak perempuan jika sudah menikah dapat dipastikan keluar dari keluarganya dan ikut dengan suaminya. Oleh sebab itu, anak laki-laki jika sudah menikah tidak akan “jauh” dari orangtuanya. Pada masyarakat Bali sebagai contoh dalam sebuah keluarga yang mempunyai 4 orang anak, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 orang perempuan atau terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang perempuan, maka di antara anak laki-laki tersebut harus ada yang tinggal dengan orangtuanya. Anak laki-laki berkewajiban menjaga orangtuanya. Bukan berarti yang lain tidak bertanggung jawab, yang lain juga sama memiliki tanggungjawab akan tetapi masing-masing memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda. Apabila, anak laki-laki yang tertua dilihat dari segi materi mampu secara ekonomi, seandainya tempat tinggalnya berjauhan tidak menjadi masalah yang terpenting wajib membantu perekonomian orangtua dan jangan sampai menelantarkannya. Dalam kehidupan masyarakat Bali yang terpenting dalam lingkungan rumah orangtua wajib ditemani oleh anak laki-laki,

seandainya yang menemani tersebut dari segi ekonomi “kurang mampu” juga tidak menjadi masalah, sebab yang akan membantu kelangsungan hidup orangtuanya adalah bantuan dari anak laki-laki yang mampu. Akan tetapi bukan berarti anak perempuan tidak mempunyai peranan atau tidak memberikan bantuan secara materi, sebagai anak perempuan jika dari segi ekonomi mampu maka berkewajiban untuk membantunya, namun seandainya tidak mampu tidak diwajibkan. Pada umumnya bantuan dari anak-anak kepada orangtuanya tidak ditentukan jumlah atau besarnya namun sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam Keluarga Bali pada umumnya anak memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti misalnya ada yang khusus menangani urusan kedalam (urusan internal), dan urusan keluar (urusan eksternal). Semakin banyak anak, maka tugas mereka semakin ringan. Akan tetapi, untuk masa kini pada umumnya masyarakat Bali sama dengan masyarakat lain di Indonesia yaitu mengikuti program pemerintah keluarga berencana dengan hanya memiliki 2 (dua) anak, sehingga untuk mendidik atau mengajari mereka sejak dini akan kerepotan mengingat masyarakat Bali memiliki banyak aturan atau adat yang wajib dilaksanakan. Selain itu, faktor dari si anak sendiri apakah masih mau melanjutkan tradisi yang dimiliki oleh nenek moyang mereka yang telah berpuluh-puluh tahun dan secara turun temurun selalu dilaksanakan. Namun demikian, kembali lagi kepada orangtuanya masing-masing ketika mendidik si anak, bagaimana memberi pengertian bahwa betapa adat istiadat yang dimiliki tersebut sangat penting dan memiliki arti serta kaidah-kaidah yang sangat penting dalam kelangsungan hidupnya. Seperti disampaikan seorang narasumber, I.M.W, tanggal 24 Maret 2014, mengatakan bahwa walaupun yang bersangkutan bekerja sebagai seorang pegawai, dan memiliki jabatan di sebuah instansi pemerintah dan berdomisili di Denpasar, pada saat akhir pekan sesibuk apapun menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan adat yang biasa masyarakat Bali lakukan mulai dari kegiatan olahraga, kerjabakti sampai mengurus masalah-masalah yang

berhubungan dengan masalah kekerabatan yang ada di lingkungan keluarga mereka dan wajib terlibat langsung, seperti upacara Ngaben, dan lain-lain.⁶²

Panti Jompo Versus Rumah dalam Prespektif Lansia di Bali

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa masyarakat lansia di Bali pada umumnya tidak banyak menghuni Panti Jompo. Hal ini disebabkan karena faktor budaya setempat yang begitu kuat. Dalam budaya masyarakat Bali, jika ada orangtuanya sampai tinggal di Panti Jompo maka si anak akan merasa malu, sebab memasukkan orangtua ke Panti Jompo merupakan hal yang sangat tabu. Namun demikian, ada sebagian dari masyarakat Bali yang tinggal di Panti Jompo, akan tetapi jumlahnya relatif kecil. Terkait hal itu pada bagian ini akan digambarkan masyarakat lansia Bali khususnya di Kabupaten Tabanan yang terbagi dua, yakni: yang pertama masyarakat lansia yang senang tinggal di Panti Jompo, dan yang kedua, masyarakat lansia yang lebih senang memilih tinggal di rumah/bukan di Panti Jompo.

Perlu diketahui bahwa sebetulnya masyarakat lansia dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok lansia yang dapat membiayai hidupnya sendiri dan kelompok lansia yang tidak dapat membiayai hidupnya sendiri. Kelompok lansia yang dapat membiayai hidupnya sendiri pada umumnya ketika masih di bawah usia 60 tahun mempunyai ekonomi yang berkecukupan, sehingga ketika di masa tua dengan sendirinya mampu memenuhi kebutuhan hidup mulai sandang, pangan, memiliki rumah, mampu untuk berobat ketika sakit bahkan dapat membantu perekonomian anaknya. Kelompok lansia yang seperti ini pada umumnya tinggal di rumah. Akan tetapi sebaliknya bagi kelompok lansia yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri, terutama dari segi materi secara langsung maupun tidak langsung sangat membutuhkan uluran tangan dari orang lain

⁶²Wawancara dengan Narasumber I.M.W. Tanggal 24 Maret 2014.

baik itu dari pihak keluarga, teman maupun masyarakat di sekitarnya. Pada umumnya kelompok lansia seperti ini ketika ditawarkan untuk tinggal di Panti Jompo mengatakan bersedia, sebab dengan mereka tinggal di Panti Jompo, secara otomatis semua kebutuhan mulai sandang, pangan, berobat, bahkan sesekali diajak berekreasi walaupun hanya sekedar jalan-jalan, mereka sudah merasa senang.

Alasan Lansia Memilih Tinggal di Panti Jompo

Mengingat begitu banyak aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat Bali, dan sangat dihormati, sehingga salah satu pengaruh dari betapa kuatnya adat adalah kuatnya kesadaran akan munculnya karma dikemudian hari jika adat dilanggar, karena masyarakat Hindu Bali memiliki kepercayaan Reinkarnasi. Masyarakat Bali pada umumnya, jarang sekali atau relatif kecil jumlah penduduk lansia yang tinggal di Panti Jompo. Melihat latar belakang kehidupan masyarakat Bali yang sarat dengan adat-istiadat tersebut, maka masyarakat Bali menjadi tabu atau malu memasukkan orangtuanya ke Panti Jompo. Seperti contoh penghuni Panti Jompo yang ada di wilayah Denpasar, ketika dijumpai dan diwawancarai alasan mereka mengapa sampai bisa menjadi penghuni Panti Jompo? Ternyata, ada beberapa faktor diantaranya: *Satu*, karena sudah tidak memiliki suami (secara kebetulan penghuni Panti Jompo yang kami datangi, sebagian besar perempuan). Dan pada umumnya, mempunyai anak sehingga ketika yang bersangkutan memilih tinggal di Panti Jompo, anak-anaknya merasa terkejut dan ada rasa tidak enak dengan lingkungan keluarga dengan lingkungan di mana orangtua berdomisili, padahal dari segi ekonomi si anak termasuk mampu. Narasumber seperti ini, memiliki prinsip bahwa dihari tuanya tidak ingin merepotkan anak atau sanak familinya, meskipun dari segi ekonomi merasa mampu. *Dua*, faktor ekonomi, di mana para lansia sudah tidak memiliki pasangan hidup, kemudian dari segi ekonomi betul-betul tidak mampu, bahkan tidak memiliki rumah. Seperti yang dituturkan oleh seorang narasumber yang tinggal di Panti Jompo mengatakan, bahwa mereka tidak memiliki rumah untuk makanpun susah, begitu juga

dengan kondisi anak-anaknya tidak jauh berbeda dengan kondisi orangtuanya. Hal inilah yang mendorong lansia memilih hidup di Panti Jompo. *Tiga*, tampaknya pada masyarakat Bali sedikit demi sedikit mulai ada pergeseran nilai tradisi terutama dalam hal “pola pengasuhan” orangtua oleh anaknya. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya anak-anak ingin meraih pendidikan yang setinggi-tingginya sedangkan di wilayah mereka tinggal sarana pendidikan tidak memadai, yang pada akhirnya yang bersangkutan, mau tidak mau harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di wilayah lain. Serta harus meninggalkan orangtua untuk dirawat di Panti Jompo.

Sebagai akibatnya, setelah menyelesaikan pendidikan dan harus mencari pekerjaan ternyata bukan di kampung halaman melainkan di daerah lain, baik di wilayah Bali maupun di kota-kota besar di luar Bali. Dengan kondisi seperti ini, orangtua akhirnya tinggal di kampung halaman seorang diri, dan orangtua memutuskan daripada hidup terlantar, tidak ada yang menemani akhirnya memilih hidup di Panti Jompo. Dengan alasan jika hidup di Panti Jompo tidak akan menyusahkan anak-anak serta sanak saudaranya, dan yang terpenting semua kebutuhan hidupnya mulai dari makan, pakaian, fasilitas berobat ketika yang bersangkutan sakit, terpenuhi semuanya. Bahkan, sesekali para penghuni Panti Jompo diajak untuk berekreasi atau sekedar jalan-jalan ke tempat sembahyang seperti *pura*. Selain beberapa faktor tersebut di atas ada alasan lain, yaitu faktor kemiskinan dan terlantar, tidak mempunyai keluarga, atau bisa jadi diterlantarkan oleh keluarganya sehingga pilihannya tinggal di Panti Jompo.

Jika berbicara masalah Panti Jompo sebetulnya Pemda Bali memiliki dua (2) Panti Jompo, dan dihuni oleh sekitar 130 lansia. Akan tetapi tanpa disadari dengan didirikannya Panti Jompo di wilayah Bali secara tidak langsung telah memperlihatkan bagaimana kekuatan relasi sosial pada masyarakat Bali mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan pola kekeluargaan dan kekerabatan pada masyarakat Bali, khususnya perlakuan terhadap orangtua serta tingkat

kesejahteraan dan tindak kekerasan terhadap para lansia. Pada masa sekarang ada kecenderungan para keluarga muda Bali, mengingat kesibukannya masing-masing, menitipkan orangtuanya pada Panti Jompo baik Panti Jompo milik pemerintah maupun swasta (Mantra, Gayatri, 2010).

Akan tetapi jika dilihat dari budaya yang dimiliki masyarakat Bali begitu kuat dan sangat kental dengan adat istiadatnya, para generasi muda yang menitipkan orangtuanya di Panti Jompo tampaknya sudah mulai mengalami pergeseran atau perubahan dalam menjalani adat istiadat dan budayanya. Hal ini dimungkinkan karena para generasi mudanya baik suami maupun istri bekerja di luar rumah dan menghabiskan waktu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam.

Alasan Lansia Memilih Tinggal di Rumah

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat Bali sangat kuat dengan adat istiadat, apalagi masyarakat Bali memiliki prinsip putra sesana yang sangat dihormati dan berusaha dilaksanakan serta dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Bilamana prinsip tersebut dilanggar, maka masyarakat akan terkena sanksi adat sosial, seperti kutukan atau semacam hukuman dari para Dewa. Oleh karena itu, mengingat betapa kentalnya adat mereka, sehingga tabu untuk memasukkan orangtuanya kedalam Panti Jompo, walaupun ada di antara para orangtua yang mempunyai keinginan jika sudah tua kelak (nanti) tinggal di Panti Jompo. Namun demikian, hampir seluruh masyarakat Bali yang memiliki orangtua lansia menolak permintaan orangtua tersebut. Masyarakat yang seperti ini pada umumnya memiliki rasa tanggungjawab yang sangat besar, mengurus orangtua menjadi kewajiban bagi anak, selain itu, tentu saja mereka sangat menghormati prinsip-prinsip, atau adat yang dimiliki masyarakat Bali secara turun temurun.

Pada umumnya, lansia yang tinggal di rumah ditemani oleh anaknya bahkan ada yang ditemani oleh beberapa anaknya. Seperti

diketahui, pada umumnya masyarakat Bali mempunyai rumah dengan halaman yang cukup luas, dan terdiri dari beberapa bagian mulai bangunan utama yaitu berfungsi sebagai ruang tamu, kemudian ada bangunan yang berfungsi sebagai kamar tidur, ada bangunan yang berfungsi sebagai ruang makan. Pada umumnya, bangunan ini bersebelahan dengan bangunan yang berfungsi sebagai dapur, ada bangunan yang berfungsi sebagai “gudang” untuk menyimpan padi atau semacam lumbung padi, dan bangunan yang berfungsi sebagai kamar mandi. Dan terakhir adalah bangunan *pura* dan letaknya dibagian depan yang berfungsi untuk sembahyang, atau upacara-upacara keagamaan lainnya seperti kematian dan lain-lain. Bangunan-bangunan tersebut satu sama lain terpisah tetapi tetap berada di dalam satu pekarangan atau halaman. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan masyarakat Bali memiliki tanah cukup luas sebab masing-masing bangunan mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

Melihat kondisi rumah masyarakat Bali yang cukup luas, sangat memungkinkan orangtua ditemani oleh anak-anaknya, sehingga tidak ada kesulitan jika si anak yang sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah memiliki anakpun tinggal satu rumah dengan orangtuanya. Dengan kondisi seperti itulah, tidak mungkin orangtua tinggal di Panti Jompo, dilihat dari faktor kondisi rumah, ekonomi, dan beberapa narasumber yang diwawancarai pada umumnya memiliki penghasilan atau pendapatan dari uang pensiun. Ada beberapa diantaranya mantan guru, pegawai negeri sipil, bahkan adanya diantaranya yang memiliki sawah, kebun yang ditanami rambutan, pisang, kelapa, coklat dan lain-lain. Mereka yang memiliki sawah dan kebun tentu sangat membantu penghasilan atau pendapatan para lansia di samping uang pensiun mereka. Narasumber lansia dengan kondisi seperti itu, sangat tidak mungkin dan pada umumnya mengatakan tidak mau, dan tidak pernah terfikirkan untuk tinggal di Panti Jompo.

Para lansia di Kabupaten Tabanan khususnya, merasa lebih senang tinggal di rumah sendiri dibanding tinggal di Panti Jompo. Seperti yang disampaikan oleh seorang narasumber pensiunan guru

yang bersuamikan pensiunan guru, mereka mempunyai dua orang anak, yakni anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan sudah berkeluarga, dan tinggal di Jakarta, dan sempat mengajak kedua orangtuanya tinggal di Jakarta agar memudahkan dalam pengobatan sang ayah. Padahal berdasarkan keterangan sang ibu, dari segi materi si anak termasuk kedalam kategori berkecukupan, tetapi orangtuanya tetap memilih tinggal di Tabanan, dengan ditemani oleh anaknya laki-laki. Di sini terlihat, bahwa tetap saja peranan anak laki-laki sangat penting dalam kelangsungan hidup keluarga tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi anak laki-lakinya masih dibantu oleh orangtua, padahal anaknya tersebut sudah bekerja meskipun pekerjaannya masih belum tetap dan nampaknya tidak menjadi masalah, yang terpenting si orangtua tetap dapat ditemani oleh anak laki-lakinya. Hal seperti ini terjadi juga di Kecamatan Selamadeg Kabupaten Tabanan, narasumber ini mempunyai 4 orang anak, 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dan semuanya sudah berkeluarga. Ketiga anak perempuannya berdomisili di luar kecamatan ini, bahkan di luar pulau Bali (yakni Nusa Dua Bali, Denpasar Bali, serta Medan), sedangkan anak laki-laki satu-satunya tinggal di kecamatan ini dan tinggal satu rumah dengan kedua orangtuanya. Si anak laki-laki ini, berprofesi sebagai Kepala Dusun Bajera Kecamatan Selamadeg Kabupaten Tabanan. Anak ini mempunyai 2 orang anak di mana untuk keperluan sekolah cucu-cucunya masih dibantu oleh kakek neneknya. Kakek neneknya selain menerima uang pensiun sebagai PNS, mereka membuka warung nasi sehingga dapat menghidupi anak, menantu, serta 2 (dua) orang cucu. Selain itu, si nenek (narasumber) walaupun sudah pensiun, dan mempunyai warung nasi masih memiliki beberapa kegiatan, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah seperti anggota Karang Lansia, anggota PKK, serta kegiatan lain. Narasumber ini, merasa hidupnya tenang walaupun sebetulnya yang bersangkutan telah divonis mengidap penyakit yang mematikan. Selain berobat secara medis, responden tersebut juga berobat tradisional dengan mengkonsumsi obat herbal dan ternyata berangsur-angsur sembuh. Yang bersangkutan memiliki semangat hidup yang tinggi, sehingga

seluruh waktunya digunakan selain untuk menafkahi keluarga juga masih bisa melakukan kegiatan sosial yang positif, yang akhirnya dapat mengurangi beban penyakitnya. Narasumber ini, sama sekali tidak memperlihatkan kalau mengidap penyakit yang sangat serius. Selain masyarakat Bali memiliki adat yang sangat kuat serta memiliki prinsip yang dipegang teguh (putra sesana), sehingga masyarakat lansia tidak berminat untuk tinggal di Panti Jompo. Begitu sebaliknya, si anak akan merasa bersalah bahkan berdosa jika memasukkan orangtuanya ke dalam Panti Jompo. Oleh karena itu, masyarakat lansia lebih memilih tinggal di rumah sendiri dengan berbagai macam kegiatannya.

4. Keluarga Merupakan Unit Terkecil Dalam Masyarakat

Pengertian Keluarga, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Sementara itu, definisi keluarga menurut *Burgess* dkk dalam *Friedman* (1998) yaitu:

- (1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi.
- (2) Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
- (3) Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara-saudari.
- (4) Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri.

Sedangkan definisi Keluarga menurut Departemen Kesehatan dalam *Effendy* (1998), keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling

ketergantungan (Lihat <http://meti-deOrentz.blogspot.com/2010/12/teori-keluarga>).

Definisi Keluarga menurut *Burgess* dan Departemen Kesehatan mempunyai pengertian yang relatif sama. Kedua definisi keluarga tersebut bisa dilihat pada keluarga-keluarga di semua tempat atau daerah, begitu juga dengan kondisi keluarga di wilayah penelitian yakni di Kabupaten Tabanan. Peran orang tua dalam keluarga pada masyarakat Bali, khususnya di Kecamatan Selemadeg, Kerambitan dan Kediri, menjadi sangat penting. Bahkan bisa dikatakan seperti tulang punggung keluarga bukan dalam arti finansial saja akan tetapi dalam arti fisik. Nampaknya masyarakatnya sudah mengalami perubahan terutama dalam pola kehidupan sehari-hari, banyak diserahkan kepada orangtua, termasuk mengurus rumah sampai urusan mengantar jemput sekolah para cucu mereka. Definisi dari Departemen Kesehatan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, tempat berkumpul dan tinggal dalam satu atap dan saling ketergantungan satu sama lain, jelas terlihat di daerah Kecamatan Selemadeg, Kerambitan dan Kediri Kabupaten Tabanan. Disini terlihat jelas sekali adanya saling ketergantungan antara anak dan orangtua. Seperti telah diketahui bahwa pada masyarakat Bali orangtua selalu ditemani oleh anak laki-lakinya, sehingga urusan rumah tangga si anak akan menjadi tanggungan orangtua, termasuk urusan yang berhubungan dengan keperluan si cucu.

Posisi Lansia dalam Keluarga Orang Bali: Kasus Tabanan

Kemunduran fisik yang menyebabkan orang menjadi tua, sesungguhnya merupakan suatu fenomena biologis, tetapi pengaturan tentang sistem, kedudukan (status), peranan dan fungsi sosial kelompok orang lansia dalam keluarga dan komunitas adalah konstruksi budaya. Seperti yang dikemukakan oleh *P. Gulliver*, dalam pelebagaan umur terlihat jelas, bahwa faktor-faktor kebudayaanlah, dan bukan faktor-faktor biologis, yang terutama penting untuk menentukan stasus sosial (*Haviland* 1985:131). Kemudian, kebudayaan dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dimiliki

masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kebudayaan terdiri atas sistem aturan-aturan, norma, nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua masyarakat mengakui adanya sejumlah tingkatan hidup, di mana setiap manusia akan menjadi tua. Akan tetapi bagaimana pembatasannya akan berbeda-beda menurut kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaannya akan menentukan pola kegiatan, sikap, larangan, dan kewajiban mereka. Kedudukan dan peranan orang lansia dalam keluarga dan masyarakat sangat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, jika dilihat dari jumlah penduduk lansia di Kabupaten Tabanan jumlahnya relatif banyak berdasarkan data statistik tahun 2013 menunjukkan bahwa dari total lansia yakni 59.357 orang dengan rincian lansia laki-laki berjumlah 26.819 orang dan perempuan 32.538 orang. Selisih jumlah lansia laki-laki dengan perempuan cukup banyak yaitu lansia perempuan lebih banyak jika dibandingkan jumlah lansia laki-lakinya sekitar 5.719 orang.

Di samping itu, jumlah lansia di wilayah di Kabupaten Tabanan yakni di beberapa desa telah didirikan Karang Lansia yang mempunyai tujuan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya para lansia. Sebagai contoh Karang Lansia yang terdapat di desa Bajera, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan mempunyai kegiatan seperti: Senam yang dilakukan 2 x seminggu, yaitu pada hari Kamis dan Minggu sore, biasanya dilakukan mulai jam 4 sore yang diikuti oleh seluruh lansia yang ada di desa tersebut. Untuk kegiatan senam diberi pakaian olah raga secara gratis, namun karena keterbatasan dana, maka pembagian seragam terbatas hanya kepada 15 orang anggota, bantuan seragam tersebut berasal dari Dinas Sosial setempat. Pemberian pakaian seragam olah raga ini bertujuan untuk merangsang agar aparat desa tergerak untuk membantu para lansia yang aktif di Karang Lansia.

Selanjutnya, ada kegiatan yang disebut dengan ‘*Tirteyakra*’ ini merupakan bagian dari kegiatan Karang Lansia yaitu kegiatan mengunjungi salah satu *pura* untuk melakukan sembahyang, dan sekaligus rekreasi para lansia. Pada umumnya dilakukan 1 bulan 1 kali bisa dikatakan sebagai ajang “Temu Kangen” di antara para Lansia. Akan tetapi sangat disayangkan untuk kegiatan Tirteyakra masih menggunakan dana pribadi dengan cara iuran di antara para anggotanya lansia, sebab pemerintah setempat tidak memiliki dana untuk kegiatan tersebut.

Namun demikian, di dalam Karang Lansia ada kegiatan kesehatan gratis untuk para lansia melalui Posbindu (Pos Binaan Terpadu). Ini merupakan kerjasama dengan Puskesmas setempat. Kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam sebulan karena keterbatasan dana, sedangkan untuk mengukur tekanan darah (tensi), timbang berat badan, para lansia bisa melakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Biasanya para lansia sering mengeluh kepala pusing ternyata setelah dilakukan cek tekanan darah ternyata tekanan darahnya tinggi. Pada umumnya para lansia rentan akan tekanan darah tinggi. Posbindu sendiri baru didirikan pada tahun 2014 bertujuan untuk menyediakan fasilitas kesehatan (cek kesehatan) secara keseluruhan termasuk cek emosi seorang lansia, pada umumnya para lansia tidak memiliki emosi yang stabil.

Kontribusi Atau Peran Lansia dalam Keluarga

Seperti dikemukakan sebelumnya, masyarakat Bali yang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), di mana peranan laki-laki sangat penting dibandingkan perempuan dalam keluarga. Hal ini tercermin dalam “pola asuh” anak terhadap orangtua, di mana anak laki-laki diwajibkan menjaga orangtuanya, dimulai dari menemani di rumah, memberi bantuan materi bagi yang mampu, menjaga kesehatannya, kemudian ketika sakit wajib merawatnya sampai si orangtua meninggal. Jika dari segi materi si anak mampu, maka ketika orangtua meninggal wajib mengurusnya sampai upacara kematian, yakni *Ngaben*. *Ngaben* membutuhkan biaya sangat besar,

diperkirakan sekitar Rp.50 juta per-orang, ini pun termasuk dalam kategori Ngaben sederhana, sedangkan yang paling mahal dan termasuk mewah bisa mencapai Rp.250 juta. Akan tetapi bagi anak yang kurang mampu, maka ketika orangtuanya meninggal dia tetap berkewajiban mengurusnya sampai upacara Ngaben, dengan cara mengikuti upacara Ngabennya dilakukan secara massal dengan biaya relatif murah, yakni sekitar Rp.5 juta per-orang, sehingga si anak tidak terlalu berat dalam menanggung biaya. Hal ini sudah lazim pada masyarakat Bali, bahkan Ngaben massal ini merupakan anjuran dari pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Pada masyarakat Bali konsep tanggung jawab anak terhadap orangtua disebut **Suwadharma** artinya memberikan;

- (1) Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada orangtua.
- (2) Pengasuhan termasuk memberikan kasih sayang terhadap orangtua.
- (3) Merawat orangtua baik dalam keadaan sehat maupun sakit.
- (4) Memberikan jaminan kepada orangtua.
- (5) Jika orangtua meninggal wajib mengurusnya sampai pada upacara Ngaben.

Jika dilihat dari “pola asuh” anak terhadap orangtua, nampak jelas kewajiban anak terhadap orangtua begitu besar. Oleh karena itu, para orangtua, baik yang masih di bawah usia 60 tahun maupun di atas 60 tahun dan sudah masuk kategori lansia, mempunyai kontribusi atau peran dalam keluarganya cukup besar. Akan tetapi, pengertian lansia itu sendiri belum atau tidak ada keseragaman dalam standar atau batasan usia. Pada awalnya seseorang dianggap memasuki kelompok lansia di Indonesia pada usia antara 55–56 tahun atau pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Namun penduduk lansia di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia bahwa lansia adalah laki-laki dan perempuan berusia 60 tahun atau lebih. Oleh karena itu, bahasan selanjutnya pada bagian ini, akan melihat khusus kontribusi

lansia dalam keluarga, sebab kontribusinya atau peranannya dalam keluarga cukup besar. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali khususnya di wilayah Tabanan tidak mengenal pembantu rumah tangga. Para lansia yang dulunya bekerja, dan kemudian menikmati masa pensiun maupun para lansia yang tidak pernah bekerjapun sama-sama memiliki kontribusi dalam keluarga, malah peranannya begitu berarti dan menjadi sangat penting.

Mengapa peranan atau kontribusi lansia dalam keluarga menjadi sangat penting dan begitu berarti?

Menurut Swasono (1989), berbagai kehidupan dalam beragam kebudayaan menetapkan usia tua, dan peranan serta fungsi sosialnya menuntut nilai-nilai, anggapan dan ukuran yang berbeda-beda. Namun demikian, secara universal terdapat pandangan bahwa seorang lansia dianggap sebagai sumber terkumpulnya kebijaksanaan dan kearifan. Dengan demikian, masyarakat lansia dianggap memiliki kelebihan, keahlian tertentu dan dengan pengalaman yang demikian luas sehingga mereka harus dihormati (Swasono sebagaimana dikutip oleh Fitriani, Erda, 2011, "Lansia dalam Keluarga dan Masyarakat" dalam <http://erdafitriani.wordpress.com>). Mengingat para lansia dianggap mempunyai kelebihan dan pengalaman cukup luas tidaklah mengherankan jika di wilayah Kabupaten Tabanan khususnya di daerah penelitian ini, mereka sangat dihormati sekaligus mempunyai peranan penting dan berarti dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya.

Selain itu, dengan bertambah majunya perkembangan zaman dan kaum perempuan makin banyak yang bekerja di luar rumah, maka secara tidak langsung peranan seorang ibu digantikan oleh si ibu lansia baik ibu kandung atau ibu mertua. (Pada umumnya ibu mertua, sebab yang tinggal satu rumah dengan orangtua adalah anak laki-laki). Si ibu mertua biasanya menyiapkan makanan sampai mengurus anak, dalam hal ini cucu mereka. Begitu juga dengan para lansia laki-laki mempunyai kegiatan tambahan yakni selain mengikuti kegiatan sosial di wilayahnya juga mempunyai kegiatan secara rutin

yang dilakukan setiap hari yaitu mengantar-jemput cucu ke sekolah, juga kegiatan lain yang diikuti sang cucu. Kegiatan seperti ini khusus para lansia laki-laki menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan bukan suatu beban. Bahkan, ketika kami sedang melakukan FGD, ada salah seorang peserta yang minta ijin untuk meninggalkan tempat FGD dengan alasan yang bersangkutan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan yaitu menjemput cucu. Yang bersangkutan akhirnya datang lagi untuk melanjutkan FGD setelah menjemput cucu. Begitupun para lansia perempuan selain memasak dan mengurus rumah ada juga yang mempunyai tugas mengantar jemput cucu ke sekolah.

Kemudian, ketika kami datang ke rumah salah satu narasumber, kami menyaksikan sendiri bagaimana peranan lansia dalam memberikan kontribusinya dalam sebuah keluarga. Ketika anak dan menantunya sedang bekerja, otomatis tugas atau fungsi si anak telah berpindah kepada orangtuanya, dalam hal ini kakek dan neneknya. Ketika sedang melakukan wawancara salah seorang narasumber didekati si cucu memberitahukan ada tugas sekolah dalam hal mengerjakan PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Tampaknya kegiatan rutin para lansia baik yang laki-laki maupun perempuan dilakukan dengan senang hati, selain untuk mengisi waktu kosong mereka. Walaupun di antara mereka pada umumnya masih mempunyai beberapa kegiatan baik yang terlibat dalam Karang Lansia, Organisasi Pesantian maupun kegiatan lainnya, seperti kegiatan dalam lingkungan keluarga, mengingat adat masyarakat Bali, begitu banyak dan cukup menyita waktu seseorang. Dalam melakukan kegiatan “rutin” mengantar cucu ke sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler jika waktunya bersamaan dan kegiatan pribadi sang lansia, yang bersangkutan akan menunda kegiatan pribadinya dan akan mengutamakan kegiatan cucunya.

Oleh sebab itu, peranan orangtua dalam hal ini kakek dan nenek yang sudah memasuki usia lansia sangat penting sebab pada masyarakat Bali tidak dikenal tradisi pengurusan rumah oleh pembantu rumah tangga (PRT). Oleh karena itu, si anak jika sudah

berumah tangga dan mempunyai anak maka ketergantungan terhadap orangtua sangat besar. Apalagi kalau mereka masih atau memilih tinggal bersama orangtua mereka sangat terbantu sekali, terutama bagi pasangan yang sama-sama bekerja. Khusus untuk masyarakat Bali yang berada dikawasan Tabanan, pada umumnya tidak mempunyai pembantu rumah tangga. Oleh sebab itu, kehadiran atau sosok orangtua menjadi sangat penting. Walau bagaimana pun posisi para istri atau seorang ibu sepertinya mengalami sedikit pergeseran, yakni dengan banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah. Namun demikian, berdasarkan sejarahnya bahwa kaum perempuan Bali, memang sejak dulu bekerja di luar rumah, dimulai dari bekerja di sektor pemerintahan, swasta dengan segala macam profesinya, sampai kepada pekerjaan kasar seperti buruh bangunan (pengecatan bangunan/gedung-gedung perkantoran dan lain-lain).

Melihat kondisi kaum perempuan dari sejak dulu hingga sekarang banyak yang bekerja di luar rumah tidaklah mengherankan jika hampir disemua sektor pekerjaan dapat dipastikan ada perempuannya. Begitu juga dengan wilayah Kabupaten Tabanan khususnya di tiga kecamatan (Kecamatan Selemadeg, Kerambitan, dan Kediri) dapat dipastikan hampir seluruh rumah tangganya tidak memiliki pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, peran seorang nenek (baik dari pihak istri maupun dari pihak suami) sangat penting begitu juga sosok kakek (baik dari pihak istri maupun pihak suami) tidak kalah pentingnya, sama-sama mempunyai peranan sesuai kodratnya, yaitu yang perempuan dalam hal ini tentu saja si nenek lebih kepada urusan internal rumah tangga.

Selain mempunyai tugas tambahan mengurus cucu, mulai dari antar jemput sekolah dan mendampingi cucu mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggungjawab orang tua si anak, para lansia di Bali sering membantu materi si anak termasuk membiayai sekolah si cucu. Hal ini terutama bagi perekonomian si anak yang tidak mampu. Akan tetapi bagi si anak yang memiliki ekonomi cukup baik, kehadiran orangtua (lansia) tetap diperlukan yaitu untuk mengantar jemput dan membantu mengerjakan pekerjaan

rumah si cucu. Singkatnya, kehadiran para lansia di daerah penelitian ini (di wilayah desa Bajera kecamatan Selemadeg, desa Banjar Klutuh Kelod kecamatan Kerambitan dan desa Abian Tuwung kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan) pada umumnya sangat membantu dan dibutuhkan dalam keluarga yang tidak mengenal tradisi memperkerjakan pembantu rumah tangga seperti di Jawa. Maka dari itu, bagi lansia yang mempunyai banyak aktifitas pribadi harus pandai membagi waktu, antara kebutuhan kegiatan personal yang bersangkutan dan kewajiban mengantar jemput cucu serta membantu mengawasi mengerjakan pekerjaan rumah, agar semuanya berjalan dengan baik.

5. Hak dan Kewajiban Lansia Sebagai Warga Negara

Jika berbicara tentang hak dan kewajiban, para lansia pada umumnya mengatakan bahwa mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini minimal Dinas Sosial setempat. Hal ini disampaikan oleh para narasumber dan lansia ketika dilakukan wawancara dan dilaksanakannya FGD di wilayah setempat. Mereka ingin memperoleh hak-haknya secara wajar dan sesuai aturan yang berlaku serta perlindungan dalam segala aspek kehidupan termasuk perlakuan masyarakat terhadap mereka. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia atau Lansia, pada Pasal 5 diatur bahwa:

- (1) Lanjut Usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi;
 - (a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - (b) Pelayanan kesehatan;
 - (c) Pelayanan kesempatan kerja;
 - (d) Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - (e) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - (f) Kemudahan dalam pelayanan dan bantuan hukum;

- (g) Perlindungan hukum;
- (h) Bantuan sosial.

Keberadaan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memperjelas hak dan kewajiban para lansia sebagai warga negara. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Kecamatan Tabanan khususnya penduduk lansia seperti diuraikan di atas, yakni realitas bahwa mereka pada umumnya memiliki berbagai macam kegiatan, sehingga sebagian dari mereka lebih suka tinggal di rumah sendiri daripada harus tinggal di Panti Jompo. Mereka mempunyai prinsip suka atau tidak tetap memilih tinggal di rumah sendiri. Terutama bagi para lansia yang dulu aktif bekerja dan setelah pensiun juga masih memiliki kegiatan seperti kegiatan sosial baik di lingkungan di mana yang bersangkutan bekerja atau di lingkungan tempat tinggal, tentu saja selain membantu urusan keluarga mulai mengurus rumah tangganya sampai urusan mengurus cucu. Walaupun para lansia ini memiliki kondisi relatif terbatas, justru hal itu menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang apa yang menjadi hak-haknya.

Seperti yang dikatakan oleh para lansia yang diwawancarai, pada umumnya mereka hanya minta "dilindungi dan diperhatikan" oleh pemerintah. Mereka menginginkan hak-haknya dipenuhi, sebagai contoh dalam masalah kesehatan, juga dalam hal fasilitas sarana dan prasarana lainnya seperti KTP seumur hidup, adanya potongan harga tiket kendaraan umum, dan lain-lain. Singkatnya, para lansia mengharapkan kemudahan, diberi fasilitas yang sesuai dengan keadaan mereka, juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan kesempatan kerja serta pelayanan pendidikan dan pelatihan, sebab masih ada beberapa lansia yang berumur 60 tahun namun masih memiliki fisik yang cukup kuat dan produktif. Alangkah baiknya jika diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu serta bisa memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Melihat kondisi para lansia yang ada di wilayah Kecamatan Tabanan dulunya banyak yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah pemerintah

maupun swasta, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan ada juga yang bekerja di sektor swasta. Hal ini terutama dikatakan oleh para lansia yang tinggal di rumah sendiri. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan kondisi atau pernyataan para lansia yang berada di Panti Jompo, di mana semua kebutuhan sandang, pangan, pelayanan kesehatan, dan rekreasi dapat terpenuhi. Sebab bagaimana pun mereka jelas mendapat bantuan dari berbagai pihak melalui Panti Jompo yang dihuninya. Sebetulnya tuntutan dari para lansia sangat sederhana, tinggal bagaimana pihak pemerintah bisa mewujudkan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut, karena bagaimana pun para lansia mengerti dan paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sedangkan Pasal 6 mengatakan bahwa:

- Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk:
 - (a) Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya.
 - (b) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus.
 - (c) Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Dalam Pasal 6 tentang kewajiban lansia terlihat jelas sekali bahwa para lansia memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya, sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui, para lansia di wilayah Kabupaten Tabanan pada umumnya termasuk lansia produktif, apalagi jika dilihat dari latar belakang pekerjaan, sebagian besar dari mereka pernah bekerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun

swasta. Oleh karena itu, para lansia ini cukup aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Tampaknya kesadaran para lansia akan kewajiban sebagai warga negara ini cukup tinggi, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para lansia yang tinggal di rumah sendiri bukan di Panti Jompo. Secara umum para lansia berusaha memberikan keteladanan, minimal kepada lingkungan keluarganya. Seperti kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-harinya para lansia di Bali selalu ditemani oleh anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga. Disinilah para lansia secara tidak langsung memberikan keteladanan kepada anak cucunya dengan cara masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Minimal mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekitar yakni harus dimulai dari keluarga sendiri, kemudian kerukunan dimulai dari dalam keluarga sendiri, saling menjaga perasaan dalam keluarga begitu juga dengan masyarakat. Begitu juga dengan mengamalkan keahlian atau keterampilan kepada orang lain atau generasi penerus. Seperti yang disampaikan oleh seorang narasumber, yang bersangkutan selalu mengajarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi muda. Responden ini cukup aktif di koperasi pensiunan PWRI bagian simpan pinjam. Selama lima tahun mengabdikan di koperasi ini, sebelum mengundurkan diri, responden tersebut berusaha membagi keahlian atau keterampilan yang dimilikinya kepada generasi muda dan hal ini disadari betul karena tidak mungkin selamanya aktif di koperasi tersebut.⁶³

6. Penutup

Kelompok masyarakat lanjut usia di Bali khususnya di Kabupaten Tabanan terbagi kedalam dua kelompok, yaitu lansia yang tinggal di Panti Jompo dan yang tinggal bukan di Panti Jompo melainkan tinggal di rumah sendiri. Alasan lansia yang tinggal di

⁶³Wawancara dengan Narasumber, D.A.S, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, tanggal 24 Maret 2014.

Panti Jompo pada umumnya sebagai akibat dari faktor pertama, sudah tidak memiliki pasangan hidup, kedua, karena kondisi ekonomi dan ketiga, karena pada masyarakat Bali mulai terjadi adanya pergeseran dalam hal “pengasuhan orangtua oleh anak”, begitu juga faktor kemiskinan dan terlantar, serta tidak mempunyai keluarga. Dengan tinggal di Panti Jompo kehidupan lansia dapat terjamin baik sandang maupun pangan. Sedangkan lansia yang tinggal di rumah pada umumnya dari segi ekonomi cukup mapan dan masyarakat Bali mempunyai adat istiadat yang sangat kental serta memiliki prinsip nilai sosial yang secara turun temurun masih dipertahankan yaitu Putra Sesana yang artinya dalam sebuah keluarga pada masyarakat Bali seorang anak wajib bertanggungjawab atas kehidupan orangtuanya sampai akhir hayatnya, dan prinsip tersebut sampai masa sekarang masih dilaksanakan.

Masyarakat lansia sebagai warga negara Indonesia pada umumnya membutuhkan perhatian dan perlindungan dari pihak-pihak terkait terutama Dinas Sosial setempat. Begitu juga dengan hak-haknya yang diperoleh secara wajar sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperoleh perlindungan dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat lansia sadar betul bahwa mereka memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang No. 13, Pasal 5 dan 6 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Selain itu, masyarakat lansia dalam kehidupan keluarganya mempunyai peranan yang sangat penting dan berarti terutama dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Hal ini dikaitkan dengan kondisi rumah tangga masing-masing keluarga khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan tidak mengenal pembantu rumah tangga, sehingga kehadiran orang tua yang sudah masuk lansia “dimanfaatkan” untuk mengurus rumah tangga anak-anaknya sampai kepada urusan mengurus cucu mulai keperluan di rumah, melakukan antar jemput anak sekolah, dan lain-lain, hal ini sebagai akibat karena anak-anaknya banyak yang bekerja di luar rumah.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Tabanan, 2013. *Tabanan Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Tabanan, 2013. *Statistik Daerah Kabupaten Tabanan*.
- Dinas Sosial Provinsi Bali, 2011. *Selayang Pandang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Wana Seraya"* Denpasar: UPT Pelayanan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali.
- Haris, Muhamad, 2009. "*Penitipan Lanjut Usia dalam Panti Jompo (Studi Kasus Orang Bali di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar)*". Universitas Udayana, Fakultas Sastra, Jurusan Antropologi.
- Mariana, Wayan Ni, 1991. "*Perkembangan Desa Adat Denpasar 1948-1988*". Universitas Udayana, Fakultas Sastra, Denpasar.
- Sumarno, Setyo dkk., 2011. *Evaluasi Program Jaminan Sosial Lanjut Usia, P3KS (Anggota IKAPI)*.
- Santika, Adhi, 2014. "*Sekilas Mengenal Lebih Dekat tentang Lanjut Usia (Lansia)*", Makalah, 20 Juni 2014.
- Suwantara, I Gusti Nyoman, 2007. "*Studi tentang Harga Diri pada Manusia yang Tinggal di Panti Werdha Wana Seraya Denpasar Tahun 2007*". Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan Keperawatan.

Sumber dari Internet:

- Fitriani, Erda, "Lansia dalam Keluarga dan Masyarakat", <http://erdafitriani.wordpress.com/>. Maret 11, 2009. Diunduh tanggal 18 Juni 2014.
- Mantra, Gayatri, "Panti Jompo, Tempat Membuang Mereka Yang Rentan", <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2010/02/07/panti-jompo—tempat-membuang-mereka-yang-renta.html>. Februari 7, 2010. Diunduh tanggal 24 Juni 2014.

“Selayang Pandang Kabupaten Tabanan”, <http://www.tabanankab.go.id/profil-kabupaten/selayang-pandang>. Diunduh tanggal 1 Juli 2014.

“Teori Keluarga”, <http://meti-de0rentz.blogspot.com/2010/12/teori-keluarga.html>. Rabu, 08 Desember 2010. Diunduh tanggal 3 Juli 2014.

Teori Keluarga, “<http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/teori-keluarga/>. April 5, 2012. Diunduh tanggal 4 Agustus 2014.

Warga Bali, http://baliantiqueco.tripod.com/warga_bali.htm. Diunduh tanggal 6 Agustus 2014.

BAB VI

PERAN DAN POTENSI LANSIA SEBAGAI WARGA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Oleh: Nyayu Fatimah

1. Pengantar

Setiap individu dalam tahap kehidupannya akan melewati masa transisi, dari masa kecil sampai masa tuanya dan akan dilewati dengan situasi yang berbeda-beda. Di setiap masa itu pula, ia akan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang dihadapi (Darmojo, 2004). Pada umumnya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, masa transisi dari setiap tahap kehidupan seorang individu akan dianggap sebagai masa yang penuh cobaan dan dianggap berbahaya. Menurut Koentjaraningrat (1994) keadaan itu pula yang kemudian telah memunculkan adanya suatu kepercayaan dari setiap masyarakat kebudayaan untuk melakukan peringatan yang disebut sebagai upacara inisiasi. Inisiasi yang dilakukan pada setiap tahap kehidupan manusia dilakukan melalui upacara adat sesuai dengan kepercayaan masyarakatnya. Upacara adat dilakukan sebagai suatu simbol terhadap kepercayaan atas nilai-nilai yang berlaku dalam kebudayaannya. Upacara adat tersebut yang dihadiri oleh sanak keluarga dan kerabat, merupakan serangkaian upacara adat yang dilakukan untuk mengumumkan bahwa diri seseorang itu sudah memasuki suatu tahap baru dalam kehidupannya. Melalui upacara inisiasi itu akan membantu individu tersebut melewati masa sulitnya.

Manusia sebagai makhluk biologis, setiap masa transisinya akan berpengaruh terhadap perbuatan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya dengan daerah Bali, beberapa kebiasaan perubahan tahap kehidupan seseorang diikuti dengan

sebuah upacara seperti upacara turun tanah, potong gigi, dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi tua. Dewasa ini, karena adanya pengaruh kebiasaan dan budaya luar terutama dari dunia barat, maka berbagai upacara transisi yang dilakukan melalui suatu upacara inisiasi tidak lagi dilakukan berdasarkan tahapan jenjang pergantian umur kedewasaan seseorang, seperti dari masa bayi ke masa anak, masa anak ke masa remaja, dan seterusnya. Tetapi upacara itu diperingati setahun sekali sebagai tanda atas bertambahnya usia seseorang, yang disebut sebagai “ulang tahun”. Ritual-ritual yang biasanya secara adat dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang penuh dengan simbol-simbol ritual dalam bentuk berbagai upacara adat mengalami perubahan. Bagi umat Islam khususnya dilakukan dengan cara melakukan upacara pengajian dan simbol nasi tumpeng. Dewasa ini lebih disederhanakan dengan menggunakan acara “tiup lilin”. Jumlah lilin sebanyak jumlah usia orang tersebut. Perayaan itu sebagai satu tanda mensyukuri pertambahan usia yang dilewati setiap tahun dengan selamat dan sehat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, salah satu proses perubahan kehidupan individu adalah kehidupan lanjut usia (lansia).⁶⁴ Lansia yaitu suatu proses perubahan dari masa tua yang produktif menjadi masa tua yang sudah tidak produktif. Menurut BKKBN, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dengan masalah lanjut usia, yaitu perlu mempertimbangkan aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial (BKKBN, 1998). Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam menggambarkan proses kehidupan manusia menjadi tua terdapat dua teori yang bersifat biologis dan teori bersifat sosiologis.⁶⁵ kedua teori yang disebutkan di atas dapat menggambarkan secara holistik atas permasalahan pada kelompok penduduk usia lanjut.

⁶⁴Untuk selanjutnya dalam tulisan ini pemakaian kata lansia akan digunakan sebagai sebutan bagi kelompok masyarakat lanjut usia yang dimaksud dalam penelitian ini.

⁶⁵<http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-lansia-lanjut-usia.html>, tanggal 9/9/2014.

Hal ini dapat berhubungan dengan perubahan dalam sikap dan tingkah laku individu sebagai keseluruhan, mungkin dengan aktivitasnya dalam berbagai peran-peran sosial tertentu, misalnya peran sebagai orang tua, pekerja, peran dalam waktu luang, dan sebagainya.⁶⁶ Dalam teori optimalisasi dari *Ryff* menyatakan bahwa dalam perkembangan seseorang sampai pada usia lanjut lebih menitik beratkan pada kesadaran diri seseorang dalam mengaktualisasikan seluruh fungsi dirinya yang ditandai oleh 6 aspek, yaitu aspek yang menunjukkan bila individu memiliki penerimaan diri (*self acceptance*), individu dapat berhubungan secara positif dengan orang lain (*positive relation with others*), individu dapat bersikap otonomi (*autonomy*), individu dapat melakukan penguasaan terhadap lingkungannya (*environmental mastery*), dan seorang individu mempunyai tujuan hidup (*purpose of life*), serta perkembangan pribadi (*personal growth*).⁶⁷

Dengan pertimbangan tersebut, maka kedua teori tersebut dapat menggambarkan secara holistik atas permasalahan pada kelompok penduduk usia lanjut. Di antara kedua teori itu, tidak dapat disangkal pula bila teori psikologis cukup besar perannya dalam menyikapi masalah lanjut usia. Bisa jadi pendekatan melalui teori psikologis dapat mencakup kedua teori tersebut, yang bersifat sosiologis maupun biologis. Sementara melalui teori sosiologi, yang lebih memperhatikan pada masalah atas berbagai peran yang perlu dilakukan sesuai dengan tugas-tugas dalam perkembangan usianya, dapat berhubungan dengan perubahan dalam sikap dan tingkah laku individu sebagai keseluruhan. Melalui aktivitas yang dilakukan, misalnya pada saat mencapai usia lanjut, berbagai aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan peran-peran sosial tertentu, seperti

⁶⁶<http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/beberapa-pandangan-teori-terhadap.html>, diakses tanggal 9/9/2014

⁶⁷<http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/beberapa-pandangan-teori-terhadap.html>, diakses tanggal 9/9/2014, http://repository.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3573/T1_132009114_BAB%20II.pdf?sequence=3, diakses tanggal 22 Januari 2015.

perannya sebagai orang tua, pekerja, atau peran sosial lainnya yang selama ini biasa dilakukan akan mengalami perubahan termasuk juga dalam mereka memanfaatkan waktu luangnya.

Dalam teori yang bersifat biologis, maka gambaran terhadap proses kehidupan itu lebih tertuju pada kondisi fisik seseorang, dalam teori ini seseorang di lihat sebagai makhluk biologis, yang secara fisik akan mengalami proses penuaan. Terjadinya beberapa perubahan dari kemampuan seseorang dianalisis dengan cara menghubungkan proses penuaan dengan keusangan tubuh seiring dengan bertambahnya usia atau waktu biologis (*biologicalclock*). Sementara dalam teori yang bersifat sosiologis, proses penuaan seseorang dilihat dengan cara memperhatikan masalah berbagai peran yang perlu dilakukan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan pada usia lanjut. Hal ini dapat berhubungan dengan perubahan dalam sikap dan tingkah laku individu sebagai keseluruhan, mungkin dengan aktivitasnya dalam berbagai peran-peran sosial tertentu, misalnya peran sebagai orang tua, pekerja, peran dalam waktu luang, dan sebagainya.⁶⁸ Dalam pada itu, Ryff (1982) yang menyebut teorinya sebagai teori optimalisasi, di mana dalam teorinya tersebut menitik beratkan seorang individu dalam kemungkinan perkembangan seseorang sampai pada usia lanjut.⁶⁹ di mana seseorang itu dapat menyadari dirinya serta memfungsikan seluruh fungsi dirinya yang ditandai dengan 6 aspek yaitu individu memiliki penerimaan diri (*self acceptance*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relation with others*), otonomi (*autonomy*), penguasaan terhadap lingkungan

Dalam kaitannya dengan paradigma tentang “*age and aging*” berbeda dari setiap negara. Seperti misalnya, Jepang adalah negara berkembang yang sudah mengatur dengan baik pelayanan kesehatan untuk lansia. Saat ini Jepang berada pada pintu menuju masyarakat

⁶⁸<http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/berapa-pandangan-teori-terhadap.html>, diakses tanggal 9/9/2014

⁶⁹<http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/berapa-pandangan-teori-terhadap.html>, diakses tanggal 9/9/2014

dengan jumlah lansia yang besar (*super aged society*). Berdasarkan sensus nasional Jepang tahun 2003, jumlah total lansia saat ini adalah 127.690.000 atau 19% (*Japan Statistic Bureau*), dari jumlah total penduduk Jepang. Jika keadaan tersebut dibandingkan dengan negara Jepang, negara Indonesia masih jauh tertinggal karena memang saat ini prioritas pelayanan kesehatan Indonesia masih berfokus pada pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta penyakit infeksi.

2. Lansia Bali dalam Perspektif Demografi

Tidak ada keseragaman dalam setiap negara menetapkan standar usia bagi kelompok masyarakat yang sudah berumur tua (lansia). Di Indonesia, ukuran yang dipakai adalah berdasarkan usia kerja yang diberlakukan yaitu usia 55 tahun dan 3 tahun terakhir telah berubah menjadi 58 tahun, bahkan akhir-akhir ini telah berubah pula menjadi 60 tahun. Usia tersebut adalah saat mana seorang yang bekerja di pemerintahan mencapai usia pensiunnya. Artinya, sudah tidak melakukan pekerjaan formal dan rutin yang dilakukannya setiap hari di tempat-tempat yang secara formal telah ditentukan. Dalam hal ini, telah ada perbedaan dari setiap instansi formal dan swasta. Seperti halnya seorang guru, umur pensiunnya adalah 60 tahun, dan seorang guru besar di sebuah universitas usia pensiun ditetapkan pada saat berumur 70 tahun, sementara di lembaga penelitian selain umur formal yang berlaku dari pemerintah juga dibelakakan usia formal yang bersifat fungsional pekerjaan seperti halnya peneliti yang pensiun di saat usia 65 tahun. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan bahwa lanjut usia adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih.

Adanya berbagai perbedaan itu pula dalam penelitian ini tidak terlalu berpatokan pada salah satu kriteria, namun untuk lebih memudahkan maka berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, yaitu mereka yang telah berusia 60 tahun. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan penduduk

lanjut usia dalam penelitian ini adalah mereka kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.

Berbicara masalah penduduk usia lanjut, berdasarkan undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa secara biologis penduduk lansia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan yang ditandai dengan terjadi perubahan keadaan fisik sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, seperti perubahan warna rambut, kehilangan beberapa gigi, dan mata yang mulai buram, kulit mulai keriput. Disaat itu pula mulai terjadi penurunan daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.

Sementara WHO menyebutkan pengertian lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup, sebagaimana di sebutkan di atas. Dalam hal ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan usia lanjut menjadi 4 kelompok, yaitu:

- (1) Usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun;
- (2) Lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun;
- (3) Lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun;
- (4) Lansia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.

Berkaitan dengan penduduk lanjut usia ini pula, dalam UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia membedakan adanya lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Yang dimaksud dengan lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sementara lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dari batasan tersebut, dapatlah kita katakan bahwa bagi lanjut usia potensial masih memungkinkan bagi dirinya untuk dapat mengurus dirinya sendiri, mereka masih dapat berkarya dan menghidupi

diri sendiri, sementara mereka yang disebut dengan lansia yang tidak potensial adalah mereka yang hidupnya sudah tergantung pada orang lain (keluarga (anak/suami/istri), sanak saudara atau teman dan orang lain). Adanya kedua tipe tersebut tentu saja tidak akan sama dalam memandang kelompok usia lanjut. Namun dalam penelitian ini tidak akan dibedakan atas kedua kriteria tersebut, dengan asumsi bahwa lansia adalah mereka yang patut mendapat perhatian secara khusus baik dari keluarga, masyarakat dan bahkan negara. Dengan demikian, baik lansia potensial maupun yang tidak potensial akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

Dalam kaitannya dengan berbagai batasan usia lansia tersebut, cukup menarik melihat dari struktur umur masyarakat secara umum. Seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup, jumlah lansia di Indonesia cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia di Indonesia tahun 1995 lebih kurang 13,2 juta jiwa dan pada tahun 2000 sebanyak 14.439.967 jiwa (7,18%), kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 19,9 juta jiwa atau 8,48% dari jumlah penduduk. Selanjutnya pada tahun 2010 meningkat menjadi 23.992.553 jiwa (9,77%). Pada tahun 2020 diprediksikan jumlah lanjut usia mencapai 28.822.879 jiwa (11,34%). Dengan demikian, maka negara Indonesia termasuk negara yang berstruktur tua. Dari segi struktur penduduk berdasarkan usia, terlihat dari persentase jumlah penduduk lansia yang mencapai lebih dari 7%, dan secara umum lebih banyak tersebar di daerah perdesaan (7,65%) dibanding daerah perkotaan (7,50%). Di Provinsi Bali sendiri termasuk propinsi dengan penduduk berstruktur tua yaitu mencapai 9,78%, atau terdapat sebesar 978.221 jiwa. Merujuk pada batasan usia lanjut berdasarkan UU no 13 yaitu penduduk berusia di atas 60 tahun, terdapat 380,115 jiwa. Artinya sepertiga penduduk berada pada usia tua (60 tahun ke atas), dan dua pertiganya masih termasuk pra lansia (45-59 tahun) (BPS, 2011:17-39).

Di Provinsi Bali yang sudah cukup lama menerapkan program “berobat gratis”, telah pula menjadi salah satu faktor yang meningkatkan usia harapan hidup bagi daerah tersebut. Terbukti saat

ini banyak penduduknya terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut. Hal itu, telah meningkatkan indeks harapan hidup penduduk Bali menjadi sebesar 70,84, dengan IPM tahun 2012 yang mencapai 73,49 yang menopang angka harapan hidupnya tersebut. Sementara itu, cukup menarik melihat dari struktur umur dari salah satu wilayah kecamatan di Bali yaitu masyarakat kecamatan Tabanan. Di daerah ini telah membagi usia lanjut atas beberapa tahap, yaitu pertama untuk mereka yang berada pada usia 45-59 tahun dimasukkan sebagai tahap Usia pertengahan (*middle age*). Secara demografis usia midle ini menunjukkan adanya kecenderungan naik, dari posisi pada tahun 2007 terdapat 12.148 jiwa, di tahun 2011 meningkat menjadi 12.498 jiwa. Kedua adalah mereka yang berada pada usia 60-74 tahun disebut sebagai usia lanjut (*elderly*). Keadaan pada saat usia ini mulai terjadi penurunan (2.986 jiwa menjadi 2.688 jiwa). Dan ketiga adalah mereka yang berumur 75-90 tahun. (lihat Tabel 6.1.).

Tabel 6.1.

Jumlah Penduduk Lanjut Usia Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tabanan – Tahun 2007-2011

Usia/ Tahun	45-59		60-74		75-90		jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2007	6.255	5.896	3.165	3.144	569	573	9.989	9.613	19.602
2008	6.183	5.829	3.231	3.191	608	639	10.022	9.659	19.681
2009	6.347	6.076	3.383	3.453	729	811	10.459	10.340	20.799
2010	6.347	6.173	3.426	3.469	773	856	10.546	10.498	21.044
2011	6.382	6.116	3.055	3.433	791	1.130	10.228	10.679	20.907

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan dan Data Kementerian Sosial Provinsi Bali Tahun 2011 dan 2013.

Dari tabel 6.1 tampak, bahwa jumlah paling besar dari usia penduduk lansia yaitu yang berumur 45-59 tahun. Dilihat secara fisik, usia tersebut sebetulnya masih berada pada usia produktif. Hal tersebut tampaknya telah menjadi ukuran bagi kebijakan pemerintah RI untuk menaikkan usia pensiun menjadi 58 tahun. Kebijakan ini tentu saja dapat mengurangi adanya penduduk yang mengalami depresi atau menjadi merasa tidak berguna di saat usia mereka masih belum tua.

Bila dikelompokkan berdasarkan kelompok lansia,⁷⁰ maka proporsi yang paling besar terdapat pada kelompok lansia yang disebut pra lansia (berumur antara 45-54 tahun dan 55-59 tahun) sebesar 14,68%. Sementara proporsi penduduk lansia tergolong muda dan madya (60-69 tahun dan 70-79 tahun) sebesar 6,78%, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 0,80%.

Secara umum keadaan tersebut hampir merata terdapat di semua kabupaten yang ada di Provinsi Bali ini (lihat tabel 6.2.).

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Luas wilayah	Total penduduk	Usia 60+ (Lansia)	%
Jembrana	841.80	261.638	25.861	9,88
Tabanan	839.33	4120.913	59.357	14,10
Badung	418.52	543.332	40.512	7,45
Gianyar	368.00	469.777	51.713	11,00
Klungkung	315.00	170.543	24.069	14,11
Bangli	520.81	215.353	26.887	12,48
Karangasem	839.54	396.487	49.829	12,56
Buleleng	1.365.88	624.125	66.125	10,59
Denpasar	127.78	788.589	35.762	4,53
Bali	5.636.66	3.890.757	380.115	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2013.

Berdasarkan Tabel 6.2. dapat dinyatakan bahwa dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, terdapat dua kabupaten yang jumlah lansianya cukup tinggi yaitu di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung, masing-masing terdapat 14% lebih. Sementara kabupaten lain masih di bawah persentase tersebut.

Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten ini merupakan daerah dataran tinggi, di mana di bagian utaranya merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 2.276 meter dari permukaan laut yang berada pada puncak

⁷⁰Kelompok lansia yang dibedakan dengan lansia yang pra dan tua, hal itu juga dibedakan lagi dengan lansia muda, madya, dan tua.

gunung Batukaru. Sedangkan di bagian selatannya merupakan daerah pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten ini memiliki 344 Desa Pekraman dan 759 Banjar Desa. Sesuai dengan potensi pertanian yang cukup menonjol dengan sistem pengairan “subaknya”, Kabupaten Tabanan termasuk penghasil beras yang cukup potensial dan menjadi terkenal sebagai lumbung beras Provinsi Bali. Potensi pertanian ini pula yang tampaknya telah mendukung adanya satu kemungkinan bagi masyarakatnya mendapat perharian khusus dari pemerintah daerahnya. Dengan cara memberikan pelayanan bagi para lansia dalam bentuk program karang lansia.

3. Sosialisasi Makna Pelayanan Terhadap Orang Tua

Pembahasan pada bagian ini, untuk dapat menggambarkan apa dan bagaimana kelompok lansia yang ada di daerah penelitian ini. Untuk pembahasan akan difokuskan pada aspek sosial budaya yang menyangkut adat istiadat dan sistem nilai yang berlaku di daerah penelitian.

Dalam kaitannya dengan sistem nilai, biasanya penanaman nilai-nilai melalui suatu proses sosialisasi yang dilakukan sejak dini. Dengan harapan hasil sosialisasi itu dapat terinternalisasikan dengan baik bagi pendukung nilai tersebut. Sosialisasi sebagai suatu proses pemberian pengetahuan tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka tinggal dapat menyangkut suatu proses panjang sejak seorang anak lahir sampai masa tuanya. Dalam kaitannya dengan proses sosialisasi, terdapat beberapa bentuk sosialisasi, seperti bentuk yang represif atau partisipatoris, dan setiap bentuk itu dapat mempengaruhi sikap tindak yang terjadi pada individu tersebut. Sosialisasi yang berbentuk represif (*repressive socialization*), berorientasi pada ketaatan, bentuk ini merupakan suatu proses sosialisasi yang mengarah pada cara pemberian hukuman, sementara yang berorientasi pada partisipasi yang partisipatoris (*participatory socialization*), pada proses sosialisasi ini perlakuan yang dilakukan dengan cara dengan memberikan imbalan bagi

perbuatan baik. Pemilihan atas kedua bentuk sosialisasi tersebut dapat memberikan makna penting bagi anggota masyarakatnya.

Sebagai Seorang individu/manusia yang tergabung dalam satu kelompok dalam hal ini kelompok lansia, mereka akan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada dalam lingkungan sosialnya di mana ia hidup dan bersosialisasi. Sebagai satu kesatuan, kelompok lansia ini merupakan satu kelompok yang terbentuk berdasarkan prinsip pengelompokkan non biologis. Kelompok ini terbentuk karena adanya kepentingan bersama seperti adanya keinginan untuk adanya jaminan kehidupan bagi kelompoknya, yang mempersatukannya dengan cara memaksakan sebuah tata aturan. Dalam mekanisme politiknya, kelompok lansia dapat memberikan jaminan kekuatan dan perlindungan pada anggota kelompoknya. Jaminan kekuatan dan perlindungan itu dapat berupa santunan bersama bagi lansia yang tidak mampu, atau secara sosial merasa dihargai dan dibutuhkan.

Kelompok lansia yang ada di daerah penelitian terikat erat oleh sistem nilai yang berlaku di lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui sistem kekerabatan masyarakat Bali merupakan suatu sistem kekerabatan yang berdasarkan atas prinsip keturunan *patrilineal* dalam satu bentuk keluarga luas (*extended family*). Dalam prinsip *extended family*, biasanya berkumpul tiga atau lebih generasi dan ditandai oleh sifat-sifat yang lebih menetap dan mempunyai ketentuan yaitu faktor tempat tinggal, kerjasama ekonomi, dan mempunyai hak milik bersama yg diatur (lihat Koentjaraningrat: 1994). Struktur keluarga seperti itu telah membentuk satu pengelompokkan keluarga secara *patriarchat* berdasarkan garis keturunan pihak laki-laki. Bentuk keluarga yang *extended* ini masih banyak ditemui dalam kehidupan keluarga di daerah penelitian (Kabupaten Tabanan-Bali), sehingga rumah pusaka (lihat Windia, 2008), yang menjadi dasar pembentukan keluarga masih tetap terpelihara dengan baik. Lingkungan sosial yang terbentuk akan mencerminkan adanya bentuk-bentuk kehidupan yang terikat oleh sistem nilai yang berlaku tersebut. Dapat kita temukan rumah-rumah penduduk yang secara

sosial budaya mengelompok membentuk satu pemukiman keluarga yang holistik. Satu kesatuan tempat tinggal yang secara tidak langsung mencerminkan juga pola kehidupan yang *resiprositas*. Secara arsitektural terjadi suatu harmonisasi antara kehidupan dunia dan akherat, tercermin dari penempatan rumah-rumah ibadah (*pura* dan *sangga*) di bagian lingkaran luar dari rumah induk sebagai tempat keluarga berkumpul. Tata kehidupan yang dirajut secara seimbang antara kebutuhan fisik dan rohani tetap dijaga. Selain tempat ibadah, pembagian ruang bagi keluarga luas pun sudah tertata dengan semestinya. Tidak ada satu keluarga luas di daerah penelitian yang tidak memiliki tempat-tempat pemujaan (*pura* atau *sangga*), dan atau rumah lain selain rumah induk. Dari beberapa rumah tempat tinggal informan yang berhasil di wawancarai masih menunjukkan keadaan tersebut. Sebagaimana halnya yang terjadi pada salah satu informan yang berhasil diwawancara yaitu Bapak I Ktut S yang berusia 75 tahun,⁷¹ ia tinggal di rumah keluarga/rumah pusaka bersama anak dan menantunya. Sementara ia (informan) menempati rumah induk, anak-anaknya yang masih tinggal bersamanya menempati bangunan lain di sekitar rumah induk. Informan sebagai pensiunan pegawai negeri (pemda kabupaten), setelah pensiun, sehari-harinya ia membantu keluarga anak laki-lakinya yang tinggal bersamanya. Anak dan menantunya mempunyai pekerjaan di luar rumah, dan untuk meringankan beban anaknya itu, ia pun membantu mengurus cucu (menjaga, memelihara, dan sebagainya). Selain itu, dalam aktifitasnya sehari-hari, ia juga masih membantu pemerintah di bidang kegiatan sosial, banyak membantu kegiatan di desa, sebagaimana halnya

⁷¹Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2014. Keluarga ini memiliki rumah pusaka yang dimiliki secara turun temurun. Rumah pusaka tersebut terdiri dari tiga bangunan, salah satu bangunan sebagai tempat tinggal informan bersama istrinya, dan bangunan lainnya tempat tinggal anak laki-lakinya bersama istri dan anaknya, sementara satu bangunan lagi adalah bangunan dapur yang dipakai bersama, serta satu bangunan khusus yang merupakan tempat upacara keluarga (*sangga*).

adanya pembentukan “karang Lansia” di desanya, ia pun turut aktif dalam kegiatan paguyuban tersebut.

Namun demikian, terjadinya arus globalisasi selama ini, telah pula berdampak pada perubahan sosial dari sistem kekerabatan yang ada di Bali. Dewasa ini bentuk keluarga yang *extended* telah bergeser menjadi sistem keluarga inti (*nuclear family*) yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut. Kehidupan sosial yang dominan pada kehidupan keluarga inti (*nuclear family*) ikut membawa perubahan pula terhadap pola tempat menetap bagi anggota keluarganya. Apabila selama ini anggota keluarga baru menetap dalam satu rumah bersama di lingkungan keluarga luas patrilineal dan para lansianya tinggal bersama dalam satu rumah dengan anggota keluarga lainnya, baik dengan anak tertua atau dengan anak nomor dua dan seterusnya. Namun pada saat struktur keluarga luas berubah menjadi keluarga kecil atau keluarga inti, maka pola menetap bersama yang bersifat *virilokal* menjadi pola menetap *neolokal* yang telah pula merubah tatanan sosial yang berlaku. Pada pola menetap neolokal, orang tua (yang lansia) sudah tidak lagi menetap bersama dengan anaknya. Orang tua biasanya lebih memilih tinggal di rumah adatnya yang selama ini dia tempati, dan bagi adat orang Bali merupakan rumah pusaka. Sementara anak-anak yang telah menikah keluar dari rumah induk/rumah pusaka tersebut dan membentuk rumah baru (*neolokal*).

Perubahan yang terjadi pada pola menetap tersebut menyebabkan para lansia tinggal terpisah dengan anak-anak mereka yang telah menikah. Kenyamanan tinggal bersama anggota keluarga yang selama ini ada, dan telah memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para lansia tersebut telah mulai bergeser. Sebagai kasus dapat ditemukan pada salah seorang informan yang tidak tinggal bersama orang tuanya, yaitu Bapak I Gde Ktut Subrata,⁷² beliau terpaksa meninggalkan orang tuanya di desa karena tuntutan

⁷²Hasil wawancara tanggal 21 Maret 2014. Informan adalah kepala bidang BKS (bidang kesejahteraan sosial) yang telah berusia 55 tahun.

pekerjaan di Kota Denpasar. Orang tuanya dia titipkan pada keluarga pihak ayahnya. Menurut bapak Subrata “pada saat pensiun dia akan ke kampungnya dan akan mengurus rumah adat dan akan aktif di kegiatan banjar desanya, hal itu penting dilakukannya karena kalau dia mengabaikan adat, secara sosial diapun akan dikucilkan oleh warga banjarnya. Untuk itu pula, biarpun saat ini secara fisik, dia tidak aktif dalam kegiatan Banjar adatnya di kampung, tapi secara sosial dia tunjukkan dengan cara memberikan sumbangan untuk kebutuhan banjarnya. Sumbangan dia titipkan pada keluarganya yang ada di kampung. Hal itu, menurutnya telah menjadi salah satu keharusan sosial bagi masyarakat Bali umumnya dan khususnya bagi penduduk kampung tersebut, agar diri dan keluarga tetap mendapat perlindungan dari kerabat dan masyarakat banjarnya.

Sementara itu, dari aspek ekonomi para lansia juga mengalami perubahan apabila dibandingkan ketika masih muda. Para lansia secara fisik sudah tidak mampu lagi untuk beraktifitas sebagaimana pada saat masih muda. Beberapa kegiatan ekonominya mengalami penurunan. Sebagai pegawai mereka sudah pensiun dari pekerjaannya, dan sebagai orang tua tugasnya juga dianggap telah selesai. Hal itu berkaitan dengan adanya sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat menyebutkan bahwa tugasnya sebagai orang tua telah selesai setelah anak-anak dari hasil perkawinannya sudah menikah dan hidup berumah tangga. Tanggung jawabnya untuk mengurus anak telah dilaluinya, dan sebagai imbalannya adalah anak-anaknya dapat membalas dengan cara mempedulikan dirinya saat mereka tua dan tidak mampu untuk berusaha sendiri.

Secara sosial dan ekonomi penduduk lansia merupakan penduduk yang potensial menjadi “beban” keluarga dan masyarakat terutama bagi mereka yang memasuki usia tuanya tidak dipersiapkan sejak dini. Namun tidak demikian bagi masyarakat Bali yang sarat dengan aktifitas ritual. Proses sosialisasi yang mereka terapkan atas nilai-nilai pengasuhan dan pelayanan selalu mereka terapkan sejak dini. Sejak masa anak-anak masih dalam perlindungan orang tuanya. Secara tidak langsung nilai-nilai pengabdian dan pengasuhan

diajarkan. Hal ini dapat kita pahami sebagaimana pendapat seorang informan⁷³ yang mengatakan bahwa:

“orang dewasa (dalam hal ini adalah orang tua), mempunyai kewajiban untuk dapat mengurus anak dan keluarga sebaik-baiknya. Tidak terputus pada rentang waktu yang ada. Selama hidup kita mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga dan mengurus keluarga terutama anak-anak kita yang masih kecil. Anak kecil masih belum berdaya, jadi patut kita lindungi dan jaga. Keinginan seorang anak perlu dipenuhi karena secara fisik mereka masih kecil, kasihan kalau diabaikan, karena tidak mungkin mereka harus mencari dan berusaha sendiri, anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya”.

Pemahaman ini dipupuk sejak kecil, berdampak terhadap kelanjutan dari suatu proses sosialisasi pengasuhan. Hal konkrit yang dilakukannya adalah dengan cara memenuhi permintaan cucunya di saat menginginkan sesuatu (seperti mainan atau jajan sesuatu). Menurut pendapatnya “kalau mereka sudah besar, mereka sudah tidak butuh bantuan kita lagi, dan sebaliknya kita akan membutuhkan bantuan mereka”. Dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa pola kebiasaan yang diterapkan selama ini telah terinternalisasikan dalam kehidupan sosialnya akan menjadikannya sebagai salah satu sistem nilai dalam hal pola pengasuhan bagi masyarakat tersebut. Prinsip timbal balik dalam suatu proses pengasuhan selalu disosialisasikan sejak dini, sehingga anak-anakpun mengerti tanggung jawabnya untuk memperlakukan orang tuanya bila telah tua dan sudah tidak mampu berusaha sendiri. Artinya prinsip pengasuhan yang dijalankan mendapatkan kekuatan sosial dan pengesahan adat, pada akhirnya telah menjadi satu bagian nilai-nilai adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Pola kebiasaan pengasuhan ini tampaknya tidak lepas dari adanya adat istiadat setempat yang menempatkan seorang anak laki-

⁷³Hasil wawancara dengan bapak I Ktut Suwarsa pada tanggal 25 Maret 2014.

laki sebagai penanggung jawab bagi kelangsungan pengasuhan bagi orang tuanya. Secara umum, tidak ada perbedaan bagi seorang anak baik laki-laki atau perempuan untuk berbakti pada orang tuanya di saat mereka sudah tua. Secara sosial dan secara naluri kemanusiaan, sudah sepantasnya semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara seorang yang sudah tua dan tidak mampu. Namun secara adat di Bali, ada sedikit perbedaan. Hal itu ada kaitannya juga dengan sistem kekerabatan yang berbentuk *extended family* dengan prinsip keturunan yang *patrilineal* dari masyarakat Bali. Dalam prinsip kekerabatan seperti ini, pihak laki-laki posisinya lebih dominan dan mereka sebagai penerus garis keturunannya. Dengan demikian, sistem patrilineal yang disebut "*purusa*" dalam bahasa setempat telah menempatkan pentingnya keberadaan seorang anak laki-laki sebagai penerus keturunan marga atau klenya. Semua tanggung jawab dan kewajiban ada pada pihak laki-laki dan kerabatnya dari pihak laki-laki. Tanpa adanya penerus ini, klen atau marga tersebut bisa hilang. Konsekuensi dari hak dan kewajiban pihak laki-laki berlaku pula terhadap pengasuhan dan pemeliharaan orang tuanya. Dalam hal ini kehadiran seorang anak laki-laki dalam sebuah perkawinan sangat didambakan, karena anak laki-laki tidak hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga sebagai penanggung jawab mengurus orang tua dan terhadap adat-istiadat.

Lansia: Bagian Masyarakat di Bali

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terikat oleh suatu sistem aturan yang mengikat dalam masyarakat di mana seseorang itu tinggal. Masyarakat dapat didefinisikan suatu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi, menurut sistem adat istiadat tertentu yg bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (lihat Koentjaraningrat, 1994). Anggota masyarakat dapat saja terdiri dari orang-orang yang sekerabat dan seketurunan yang terikat dengan aturan-aturan sukubangsa dalam bentuk aturan adat-istiadat, tetapi bisa juga terdiri dari berbagai orang yang berbeda dan tidak ada

ikatan kerabat atau keturunan. Untuk yang pertama dapat kita temukan pada suatu masyarakat perdesaan yang umumnya terdiri dari orang-orang yang sekerabat atau seketurunan, sementara untuk yang kedua dapat dilihat dalam satu masyarakat perkotaan yang sudah bersifat plural. Masyarakat Kecamatan Tabanan, merupakan satu masyarakat sukubangsa yang pada umumnya masih berasal dari satu kerabat dan seketurunan, sehingga dalam hal ini berbagai aturan nilai dan adat yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan satu bentuk adat-istiadat yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama sebagai orang Bali dan dipahami bersama.

Bagian dari suatu masyarakat dapat terdiri dari berbagai kelompok sosial, dari kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan adat sampai kelompok masyarakat yang terbentuk karena kepentingan yang sama seperti kelompok dagang, atau karena umur seperti kelompok umur remaja, dan hobi sebagai contoh mempunyai hobi memancing ikan, main golf, dan sebagainya. Secara umum bagian masyarakat seperti itu masih terkait oleh adat istiadat dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sosialnya. Hal ini dapat kita temukan pada kelompok lansia yang ada di daerah penelitian.

Terdapat dua kelompok lansia yang ada di daerah penelitian, yaitu kelompok lansia yang bergabung secara resmi dan berada dalam asuhan pemerintah setempat, dan ada pula kelompok lansia yang bergabung karena ada ikatan adat yang sama. Kelompok yang dibangun oleh pemerintah lebih bersifat terbuka, di mana anggota kelompoknya dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sementara kelompok yang terbentuk karena ikatan adat biasanya mereka berkelompok karena adanya suatu ikatan adat yang sama dan sifatnya lebih tertutup. Kelompok ini secara adat sudah menjadi satu kesatuan sosial yang sama. Sebagai contoh di daerah penelitian (Bali) yang dikenal cukup kental dengan adat istiadat yang bersandarkan pada agama Hindu atau Budhanya. Dalam struktur sosial kehidupannya mengenal adanya pembagian kasta, seperti kasta Brahmana, ksatria, Wisnu, Waisya dan Sudra. Berdasarkan kehidupan kasta tersebut, mereka memiliki aturan adat

dan nilai-nilai sosialnya sendiri. Hal itu telah pula memunculkan satu ikatan sosial yang sama berdasarkan atas kasta yang ada tersebut. Ikatan sosial yang terbentuk di antara mereka yang memiliki golongan kasta yang sama akan lebih memudahkan mereka untuk berinteraksi, karena tidak ada sekatan nilai khusus yang membedakannya. Seperti halnya pendapat salah seorang informan yang berasal dari kasta brahmana bernama Ida Bagus Surya,⁷⁴ Menurutnya, kelompok yang terbentuk sesuai dengan tingkatan kasta yang ada di Bali ini dilakukan karena secara sosial adat setempat masih mempengaruhi pergaulan hidup bersama di tingkatan kehidupan bersama.⁷⁵ Kelompok kasta Brahmana ini terbentuk pada tahun 2005, dinamakan paguyuban "*Darma Padeso*". anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai teman sepaham yang berjumlah 27 orang. Ide awal terbentuknya kelompok ini adalah dari adanya kekhawatiran hilangnya budaya dan agama Hindu "Bali", jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan beragama Hindu terutama bagi kaum mudanya. Mereka sepakat membentuk kelompok sosial dari para pensiunan dan yang sudah sepuh dan secara formal sudah tidak bekerja lagi. Pertemuan anggota mereka lakukan secara rutin 6 bulan sekali. Keanggotaan dari kelompok seperti ini bersifat lebih tertutup hanya dapat diikuti oleh anggota kelompok yang sama untuk kasus ini yaitu dari kasta Brahmana. Kelompok sosial ini biasanya masih inklusif sifatnya yang terdiri dari mereka yang masih satu status sosial secara adat, dalam hal ini berdasarkan sistem kasta.⁷⁶ Walaupun kelompok ini bersifat inklusif, keberadaan mereka juga tetap mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Hal itu untuk mendukung program pelayanan bagi lansia dari pemerintah yang disebut "karang lansia".

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Surya pada tanggal 23 Maret 2014.

⁷⁵*ibid.*

⁷⁶Di Bali dikenal ada beberapa tingkat kasta, seperti kasta Brahma, Wisnu, Waisya, dan Sudra.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, di daerah penelitian ini terdapat kelompok sosial yang mengayomi para lansia, yaitu lansia yang berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah setempat cq Dinas sosial yang disebut dengan “karang lansia”. Anggota karang lansia yang dibentuk pemerintah tidak memperhitungkan atas status sosial ataupun kasta yang ada di Bali, tetapi didasarkan atas warga penduduk setempat yang sudah berusia lanjut (di atas 60 tahun, atau yang sudah pensiun dari pegawai pemerintah dan swasta). Berbeda dengan kelompok lansia yang terbentuk secara adat yang berdasarkan kasta, dalam kelompok lansia ini hanya yang berkasta sama saja dapat menjadi anggota di dalamnya.

Bagi masyarakat Bali umumnya dan khususnya penduduk yang ada di daerah penelitian (Kabupaten Tabanan), usia tua tidak menghentikan keinginan para lansia untuk beraktifitas dan berkreasi. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aktifitas yang mereka lakukan. Secara berkelompok mereka bergabung dalam organisasi sosial yang disebut “Karang Lansia” yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah setempat. Aktifitas mereka biasanya dilakukan dua kali dalam satu minggu dalam bentuk olah raga bersama atau lebih khusus adalah senam lansia yang diadakan di halaman kantor desa. Pegawai dari dinas kesehatan sebagai instruktur senam. Sebagai program kerja dinas kesehatan maka bertanggung jawab juga untuk melakukan pencatatan kesehatan para lansia tersebut.

4. Potensi dan Peran Lansia dalam Kehidupan Bermasyarakat

• Potensi dan Peran Lansia secara Sosial

Berkurangnya beberapa aktifitas yang biasa dilakukan semasa mudanya, telah menjadi salah satu alasan untuk dapat mengisi kekosongan tersebut dengan cara membentuk sebuah kelompok sosial yang anggotanya terdiri atas mereka yang sudah lansia. Atas keinginan itu pula mereka membentuk satu organisasi bagi kelompok usia tua (lansia) yang aktivitasnya berkumpul bersama, diskusi, dan kegiatan arisan, berolahraga/senam lansia. Baik kelompok sosial

bersifat inklusif yang anggotanya hanya yang terdiri dari mereka yang secara adat masih dalam satu status sosial yang sama, dalam hal ini adalah yang berdasarkan sistem kasta,⁷⁷ maupun mereka yang bergabung dalam bentuk “karang taruna” yang dibentuk pemerintah.

Secara adat setempat, lansia di lingkungan masyarakat Bali mendapat posisi yang cukup besar dan dihargai. Hal itu terbukti dari adanya satu nilai setempat yang disebut dengan pola asuh orang tua “putera sahana”. Dalam konsep adat tersebut, ada kewajiban dari seorang anak terutama dari anak laki-laki, untuk melakukan baktinya pada saat orang tuanya yang sudah sepuh dengan cara mengurus, menjaga, dan menghidupinya serta membuat rasa aman bagi kehidupan orang tuanya. Dengan demikian, orang tua di Bali akan merasa dirinya aman karena secara pasti akan mendapat perlindungan dari anak dan keluarganya. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa orang informan yang diwawancarai, bahwa mereka tidak akan merasa khawatir di masa tuanya karena mereka mempunyai anak terutama anak laki-laki yang pasti akan mengurus dirinya. Dalam adat tersebut, anak laki-laki adalah anak yang diutamakan untuk mengurus orang tuanya di saat sudah sepuh atau tua dan sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan program sosial pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan apresiasinya terhadap warga masyarakatnya yang sudah usia lanjut, dengan cara membentuk satu organisasi bagi orang lanjut usia (lansia) yang disebut “karang lansia”. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, organisasi ini dikelola oleh Dinas Sosial” dengan memberikan aktifitas bagi para lansia. Aktifitas itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan para lansia tersebut. Seperti misalnya mengadakan senam lansia yang diadakan di balai desa seminggu sekali bahkan adakalanya dua kali. Kegiatan senam tersebut difasilitasi oleh pemerintah desa dan pada saat itu pula dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan

⁷⁷Di Bali dikenal ada beberapa tingkat kasta, seperti kasta brahma, wisnu, waisya, dan sudra.

makanan untuk lansia (susu, kacang ijo, kue, atau roti) yang diberikan setelah senam selesai. Akhir-akhir ini, organisasi ini melakukan kegiatan sosial yang dapat memberikan pelayanan bagi kebutuhan kenyamanan dan rohani seperti melakukan kegiatan upacara adat ke *pura-pura* dan rekreasi. Untuk kebutuhan tersebut, mereka melakukan usaha pengumpulan dana dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Bila dana telah terkumpul, dana tersebut dapat digunakan untuk biaya bepergian ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Seperti saat sekarang, mereka sedang mengumpulkan uang untuk dapat pergi ke ibu kota Jakarta. Mereka mendambakan untuk dapat pergi dan melihat ibukota Jakarta. Selain dengan cara menabung tersebut, terdapat beberapa orang donator yang secara finansial biasanya membantu kebutuhan para lansia tersebut. Para donator biasanya berasal dari keluarga kaya yang ada di sekitar daerah tersebut, atau perusahaan-perusahaan dan hotel-hotel yang ada di wilayah Bali.

Di Indonesia, fasilitas-fasilitas untuk lansia masih kurang memadai. Aktifitas lansia di Indonesia lebih banyak berfokus pada kegiatan spiritual keagamaan, hal ini terkait dengan adanya kebutuhan para lanjut usia itu yang sudah ingin mendekatkan dirinya pada yang maha kuasa., mereka mengharapkan ketenangan batin. Tentu saja hal ini cukup positif dan perlu untuk ditindak lanjuti. Mengingat di Bali sarat dengan berbagai aktifitas ritual, maka salah satu program karang lansia yang digagas di daerah penelitian ini adalah dengan membuat program wisata rohani ke beberapa tempat yang menjadi tujuan untuk beribadah, seperti ke Tampak Siring, Tanah Lot, Bedugul, dan sebagainya. Aktivitas mereka di sana adalah melakukan doa bersama, dan sekaligus "*refreshing*" menghilangkan kebosanan dan kejenuhan tinggal di rumah.

- **Potensi dan Peran Lansia Secara Ekonomi**

Pengertian Lanjut Usia yang ada di Bali, sebagaimana kriteria yang diberikan dalam UU RI Nomor 13/1998 disebutkan terdapat lansia yang potensial dan lansia yang tidak potensial. Dalam

kaitannya dengan hasil penelitian ini ditemukan kedua kriteria tersebut.

Bagi lansia potensial, secara ekonomi mereka tidak terlalu tergantung pada keluarganya, karena sebagai individu yang hidup, mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan berkarya. Seperti misalnya salah satu lansia perempuan yang diwawancarai bernama ibu Ni Made Karni yang berumur 65 tahun.⁷⁸ Menurutnya, kegiatan sehari-harinya adalah mengurus cucu-cucunya, membantu pendidikannya, dan mengantarkannya ke sekolah dan menjemputnya juga. Selain itu, lansia yang tinggal bersama keluarga, mengisi kekosongannya dengan cara membuat keranjang untuk upacara dan sesaji serta meronce bunga pandan untuk keperluan sesaji di *pura* terutama *pura* atau *sangga* yang ada di rumahnya. Hasil membuat keranjang ada kalanya mereka jual dan uang hasil penjualan selain mereka gunakan untuk keperluan sendiri, biasanya juga diberikan pada anaknya yang mengurus dirinya dan bahkan diberikan untuk kebutuhan cucunya sebagai uang jajan membeli es krim atau kue. Biasanya, uang jajan cucu tidak cukup hanya seribu rupiah apalagi bila si cucu sedang rewel bisa meminta lagi uang untuk jajannya sampai Rp.2.000,- Cucu yang diberi uang tidak hanya pada cucu dari anaknya yang ada serumah dengan dirinya, tetapi juga anaknya yang tinggal terpisah dengan dirinya dan bila datang berkunjung menengok atau bertamu ke rumahnya.

Tentu saja aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang tua (lansia) yang tinggal bersama anak dan keluarganya itu, tidak sama dengan mereka yang dititipkan oleh keluarganya di tempat penitipan Panti Jompo. Lansia yang tinggal bersama keluarga relatif mendapatkan posisinya relatif lebih terurus dan terjaga. Sementara aktifitas lansia yang di tempatkan dalam Panti Jompo, sedikit berbeda dengan yang di rumah sendiri, mereka mengikuti aturan yang ada di Panti Jompo tersebut yang belum tentu sama dengan aturan-aturan

⁷⁸Ibu Ni Made Karni seorang lansia yang telah pensiun sebagai guru SD. Hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2014.

yang biasa mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangganya selama ini. dari hasil pengamatan dapat dikatakan bila para lansia yang ditempatkan di Panti Jompo cenderung memiliki sikap dan kebiasaan yang sedikit “kasar” “membangkang” dan bahkan susah diatur, berbedadengan yang tinggal bersama keluarga, biasanya lebih tenang dan “nrimo”. Lansia di Panti Jompo mengisi waktunya dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebiasaan setempat seperti membuat tas keranjang untuk keperluan upacara adat dan atau membuat karangan bunga (meronce pandan dan bunga) sebagaimana yang dilakukan para lansia umumnya yang ada di rumah keluarganya.⁷⁹ Aktifitas membuat keranjang dilakukan setiap hari, sebagai usahanya untuk dapat memperoleh uang bagi keperluannya sendiri. Berbeda dengan lansia yang tinggal di rumah keluarganya, lansia di Panti Jompo biasanya menggunakan penghasilan dari hasil meronce dan membuat keranjang itu disimpan untuk kebutuhan diri sendiri selama tinggal di Panti Jompo. Menurut ibu Lindri yang tinggal di Panti Jompo, uang hasil penjualan keranjang dan meronce itu mereka gunakan juga untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan seperti jajanan pasar untuk “nyamil”, atau pergi makan-makan di luar untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan terhadap makanan di panti. Selain itu juga, uang itu akan mereka simpan dan akan digunakan saat mereka mendapat kunjungan dari keluarganya atau saat mereka akan pulang kerumah anaknya dan memberikan cucunya oleh-oleh (seperti mainan atau makanan).⁸⁰

⁷⁹Membuat keranjang merupakan sebuah aktifitas rutin yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan yang ada di Bali. keranjang ini sebagai wadah untuk menyimpan berbagai keperluan adat seperti bunga, mangkok, sesajen, dan sebagainya, yang digunakan sebagai alat untuk upacara adat. Satu keranjang bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan dan dibeli dengan harga sekitar Rp.300.000,- sampai Rp.500.00,- tergantung besar kecilnya keranjang yang dibuat. Selain itu “meronce” (merangkai) bunga dan pandan untuk keperluan sesajen setiap harinya. Untuk hal terakhir ini mereka mendapat upah ala kadarnya sekitar Rp.20.000,- sampai Rp.50.000,-

⁸⁰Hasil wawancara dengan ibu I Ktut Lindri di Panti Asuhan Panti Wreda pada tanggal 22 Maret 2014.

Tampaknya para lansia ini dalam menunjukkan kasih sayangnya agak berlebihan, bahkan menurut penulis cenderung “*berlebihan*”. Seperti tampak dari keseharian seorang bapak lansia bernama I Ktut Swarna⁸¹ yang tinggal serumah dengan keluarga anak laki-lakinya yang mempunyai anak masih kecil (masih bersekolah di sekolah dasar). Sudah sesuai nalurnya jika para lansia sangat sayang kepada cucunya. Karena menurutnya cucu adalah hadiah dari Tuhan dan titipan yang harus dijaganya dengan baik. Sehingga dalam kesehariannya, mereka sangat memanjakannya, semua keinginan dan permintaan cucunya selalu dituruti. Cucunya ingin mainan sepeda, dia belikan apalagi kalau hanya sebatas nyamilan jajan sudah pasti dia merogoh sakunya. Pada saat penulis tanyakan kenapa harus dituruti semua keinginan cucu bapak/ibu, jawaban mereka senada, bahwa mereka mempunyai uang untuk siapa lagi kalau tidak untuk anak dan cucunya.

Sikap memanjakan seperti itu telah membawa dampak kurang baik bagi anak tersebut. Kasih sayang yang ditunjukkan dengan cara memanjakan bukan perbuatan tidak baik, tetapi bila cara yang dilakukan cenderung berlebih, maka akan menjadi hal yang kurang baik bagi sikap si anak. Hal itu, sering ditunjukkan oleh si anak dengan berbagai cara seperti menggunakan senjata “air mata” menangis. di saat ada kunjungan tamu dengan senjata air mata, dan berguling-guling di lantai akan menjadi senjata ampuh, karena sang kakek merasa “tidak enak” pada tamunya dan akhirnya memberikan uang sesuai keinginan si cucunya tersebut. Sang kakek tidak merasa terganggu oleh perilaku cucunya seperti itu. Menurutnya, “kasihan, mereka masih kecil, belum mampu mencari uang sendiri, nanti saat mereka besar mereka bisa menggunakan uangnya sendiri dan mungkin ingat untuk memberi kakek/neneknya juga”. Hal ini tidak lepas dari sistem nilai yang ada pada masyarakat Bali, di mana posisi seorang anak (terutama anak laki-laki) lebih diutamakan dan menempati kedudukan sendiri dalam tatanan sosial masyarakat Bali.

⁸¹Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2014

Dalam hal ini, sistem pendidikan yang diterapkan adalah dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya pada anak tersebut, untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan harapan akan tertanam pada diri anak itu untuk memperlakukan hal yang sama pada anak-anaknya nanti dan pada kakek neneknya. Dengan prinsip seperti itu, keutuhan keluarga dapat tetap terjaga dan keluarga itupun menjaga keharmonisan dengan saling tolong menolong. Kebutuhan keluarga selalu terkecukupi dan tidak akan meminta pada orang lain.

5. Peran Adat Terhadap Eksistensi Lansia dalam Masyarakat Bali

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam proses berinteraksi itu pula, setiap individu akan menyikapi sesuatu atas apa yang diterima dalam hidupnya, seseorang akan melakukan suatu penilaian, dan penilaian itu akan menentukan sikap dan perilakunya dalam bertindak. Tindakan yang dilakukannya itu akan melalui suatu proses yang dinamakan sebagai suatu proses adaptasi. Proses adaptasi merupakan salah satu bagian dari proses evolusi kebudayaan,⁸² yakni proses yang mencakup rangkaian usaha-usaha manusia untuk menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap perubahan lingkungan fisik maupun sosial yang terjadi secara temporal. Perubahan fisik dalam arti lingkungan di mana ia tinggal di daerah perdesaan atau perkotaan, atau lingkungan adat yang sama atau di luar lingkungan adatnya. Sedangkan lingkungan sosial, menyangkut berbagai penilaian dan perlakuan terhadap dirinya dari lingkungan sosialnya seperti dari keluarga, teman atau masyarakatnya.

⁸²<http://adjhis.wordpress.com/2013/01/21/jumlah-penduduk-lanjut-usia-lansia-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

Masyarakat Bali sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan luas (*extended family*), dan sistem kekerabatan yang patrilineal atau *purusa* yang dianutnya (Haris, Muhamad, 2009). Berdasarkan adat itu pula, mereka menjalin ikatan sosial melalui nilai-nilai adat yang telah disepakati bersama. Tidak ada anggota keluarga yang dapat menentang atau menghindar dari aturan adat yang berlaku. Hal yang menyimpang dari adat akan mendapat sanksi sosial dari lingkungannya. Bisa dalam bentuk diusir, atau dikucilkan, dan dicemoohkan. Hal itu berlaku juga terhadap adat dalam pola pengasuhan orang tua.

Orang tua sebagaimana halnya remaja, mengalami masa transisi dalam kehidupannya. Remaja merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak, sementara orang tua merupakan masa transisi dari orang dewasa produktif kepada kematian. Orang lanjut usia harus menerima kenyataan dan percaya bahwa mereka telah menjadi tua dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kondisi fisik yang menurun semakin berkurang.

Orang tua dalam masyarakat Bali mendapat tempat tersendiri. Mereka tidak hanya menjadi anggota masyarakat yang dituakan, dan dihormati masyarakatnya, tetapi juga secara sosial mereka menjadi pengayom bagi warganya. Keluasan pengetahuan dan pemikirannya, Orang tua di Bali menjadi individu yang dihormati maka patut untuk menjaganya. Nilai Adat seperti itu telah memberikan suatu perasaan aman dan terlindungi dari orang tua keluarga Bali.

Berdasarkan sistem adat seperti itu pula, jarang ditemukan orang tua yang terlantar atau diabaikan oleh anak dan keluarganya. Bahkan terdapat satu kecenderungan orang tua semakin mendapatkan posisi yang dihormati. Pada masyarakat Bali, lanjut usia dipandang sebagai orang yang banyak pengetahuan dan luas pandangan dan pengalamannya, sehingga mereka dianggap banyak mengetahui adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakatnya. Pada masyarakat Bali, banyak orang tua yang dituakan sebagai pemimpin adat, dan bahkan diangkat menjadi pendeta yang mengurus masalah-masalah kehidupan

adat. Tidak heran bila dalam banjar adat masih banyak kita temukan penduduk usia tua yang berperan mengatur berbagai kegiatan adat. Seperti halnya salah satu informan yang diwawancarai yaitu bapak Ida Bagus Ktut Winaya.⁸³ Sebagai orang tua masih mengurus kegiatan adat yang ada di lingkungannya. Bahkan adakalanya istri bapak Winaya yang sudah lanjut usia juga membantu terutama dalam menyiapkan berbagai peralatan upacaranya, seperti menyediakan tempat-tempat sajian dan isinya.

Namun seiring waktu berjalan, adat-adat setempat yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan dan perlindungan terhadap orang tua mulai mengalami penurunan. Telah terjadi pergeseran nilai pengasuhan terhadap orang tua (lanjut usia). Hal itu, disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor ekonomi (kemiskinan), faktor adat, faktor adat (adanya intervensi banjar adat dan desa), ketidak lengkapan anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut (tidak memiliki anak laki-laki sebagai prasyarat tugas pengasuhan).

Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan adanya perubahan dalam mengasuh orang tuanya yang sudah sepuh (lanjut usia). Dalam adat Bali, pengertian tentang pola pengasuhan terhadap orang tua itu disebut dengan “putera sahana”. Dalam adat putera sahana tersebut yang menjadi tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya setelah mereka lanjut usia adalah anak laki-laki tertua dari seluruh anggota keluarga. Atau bisa juga pada salah satu anak laki-laki yang ada dalam keluarga itu, bila ternyata anak tertua dianggap tidak mampu maka diserahkan pada anak laki-laki kedua atau ketiga dan seterusnya. Dalam hal ini, anak laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh terhadap orang tuanya. Dengan demikian, yang berkaitan dengan masalah warisan pun, anak laki-laki akan mendapatkan hak waris sepenuhnya.

Berbeda dengan anak perempuan yang secara adat tidak diberi tanggung jawab dan tugas untuk mengurus orang tuanya, maka secara

⁸³Wawancara pada tanggal 22 Maret 2104.

adat tidak menerima waris, namun sebagai satu keluarga mereka akan mendapat sebagian kecil saja sebagai tanda kasih orang tua yang biasanya disebut sebagai *jiwadana* pemberian sukarela dari orang tuanya. Namun demikian, tanggung jawab dan kewajiban terhadap orangtua bertumpu pada anak laki-laki.

Masyarakat Bali-Hindu terdapat suatu anggapan bahwa bila dalam satu keluarga Bali, bila tidak mempunyai anak, apalagi anak laki-laki (*saputra*), maka dalam masa tuanya, atau ketika meninggal dunia tidak akan ada yang merawat dan menjalankan bakti pada orang tua. Besarnya peran dan tanggung jawab anak laki-laki terhadap orang tua dan keluarganya, menyebabkan keluarga Bali akan merasa sedih dan putus asa jika tidak memiliki anak laki-laki. Namun demikian, tidak berarti anak perempuan menjadi sia-sia bagi orang tuanya. Karena dalam adat, diberlakukan juga suatu proses di mana pihak perempuan masih bisa berperan terhadap keluarganya. Hal itu bisa dilakukan bila keluarga pihak perempuan pada saat pernikahannya melakukan adat "sentana". Adat ini terjadi bila pihak perempuan menarik pihak laki-laki masuk ke dalam sistem kekerabatan keluarga perempuan. Dalam hal ini, secara sosial posisi anak perempuan seolah-olah "membeli" pihak laki-laki untuk masuk dalam lingkungan keluarga kerabat pihak perempuan. Adat tersebut bisa terjadi bila anak perempuan menikah secara nyentana (salah satu jenis perkawinan dalam sistem perkawinan adat Bali), atau dalam adat Bali disebut sebagai adat "santana". Adat tersebut membuka peluang bagi anak perempuan untuk berbakti pada orang tuanya untuk mengasuh dan melindungi orang tuanya di hari tua mereka. Adat tersebut bisa terjadi bila anak perempuan menikah dengan cara "nyentana", yaitu kawin dengan cara membawa pihak laki-laki masuk ke dalam warga klennya. Tanpa melakukan adat sentana, seorang anak perempuan dalam keluarga Bali tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Karena dalam adat Bali, anak perempuan yang sudah menikah akan langsung keluar dari lingkup klennya dan masuk ke dalam klan suaminya. Dengan demikian, memutus ikatan adat terhadap kewajibannya untuk mengurus

dan bertanggung jawab atas orang tuanya sendiri. Sebaliknya, dia akan membantu suaminya mengurus orang tua suaminya. Ada perkecualian, sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bila anak perempuan menikah dengan cara “santana”.

Akan tetapi untuk melakukan adat sentana tidak semudah membalikkan telapak tangan. Adakalanya belum tentu bisa diterima oleh pihak laki-laki/suaminya. Pemberlakuan adat tersebut memerlukan suatu proses persetujuan terlebih dahulu dari pihak laki-laki. Hal itu terjadi, karena adakalanya pihak laki-laki merasa “gengsi” bila dirinya terkena adat secara nyentana tersebut, karena dalam kasus anak perempuan kawin secara “sentana” itu artinya pihak perempuan yang menarik pihak laki-laki, sehingga suaminya akan berada dan tinggal beraktifitas dalam lingkungan keluarga perempuan. Dengan demikian, suami akan tinggal dan menetap secara *uxorilokal* di lingkungan keluarga perempuan (istri). Semua hak dan kewajibannya sebagai anak laki-laki dari keluarganya terputus dan dia akan mengabdikan pada keluarga pihak istrinya.

Adat Santana terjadi dalam suatu proses pernikahan karena adanya beberapa faktor yang berlaku yaitu *pertama* karena pihak suami kurang mampu atau miskin sehingga tidak sanggup membayar mahar pernikahan akhirnya setuju untuk ikut dalam keluarga perempuan, atau *kedua* adalah karena adanya kesepakatan bersama mengharuskan pihak suami setelah menikah, tinggal di kediaman pihak perempuan (secara *uxorilokal*) padahal secara adat patrilineal, adat yang berlaku pada masyarakat Bali adalah secara *virilokal* berdiam di kediaman pihak laki-laki. Hal itu, terjadi karena ada keterbatasan pada pihak perempuan yang keluarganya tidak memiliki anak laki-laki.

Adanya keharusan terhadap anak laki-laki untuk mengurus orang tuanya di saat tua, menunjukkan suatu bentuk nilai-nilai kebersamaan di antara anggota keluarga lainnya secara patrilineal. Sebagaimana halnya yang dituturkan salah seorang anak laki-laki yang masih bekerja sebagai pegawai pemerintah bernama bapak I

Gde Ktut Subrata,⁸⁴ menurutnya: “pada saat pensiun nanti saya akan kembali ke kampung dan akan mengurus rumah adat kami sekaligus juga mengurus orang tua kami dan berpartisipasi dalam banjar”. Pernyataan tersebut menyiratkan adanya sikap “tanggung jawab” sebagai seorang anak laki-laki yang diikat oleh adat setempat. Dalam hal ini tampak jelas bila adat tersebut telah menjadi tali pengikat bagi pengemban adat tersebut, dan hal ini telah menjadi satu potensi positif terhadap kelangsungan adat setempat terutama dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap orang tua.

Dari beberapa informan yang berhasil di wawancarai, terdapat kesatuan pendapat atas perlunya menjaga adat untuk mengasuh dan menjaga orang tua di saat orang tuanya sudah tua dan lemah. Hal itu, dianggap sebagai salah satu bakti dan balas budi seorang anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:

“tidak dapat dibayangkan bila semasa kecil masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orang tua, mereka mengurus kita dengan penuh kasih sayang, tetapi di saat orang tua kita sudah tua kenapa diterlantarkan, akan jadi apa kita ini? padahal kami bisa hidup sehat, maju dan berhasil dalam hidup semua berkat kasih sayang dan asuhan orang tua, jadi sudah seharusnya saat mereka sudah menjadi tua, sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anak untuk mengurus dan menjaga mereka”.

Energi positif dalam upaya mengurus dan berbakti kepada orang tua, perlu terus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, terutama kepada anak-anak, dan sanak keluarga lainnya. Sehingga secara sosial menjadi faktor perekat dan pengikat dalam pranata sosialnya. Hal ini pula yang sering menjadi penyesalan bagi anggota masyarakat yang kurang berhasil secara ekonomi dalam hidupnya, sehingga tidak mampu mengurus orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang informan, yang mengatakan bahwa dia

⁸⁴Wawancara tanggal 21 Maret 2014.

punya keinginan untuk dapat mengurus orang tuanya, yang sudah tua tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena untuk kehidupan diri dan keluarganya saja sudah sulit. Jadi, dengan terpaksa mereka harus merelakan orang tuanya di titipkan ke Panti Jompo yang ada di Denpasar. Rumah jompo merupakan institusi formal bagi warga masyarakat yang secara sosial ekonomi tidak mampu. Para lansia yang tergabung dalam Rumah Jompo akan mengalami suatu resosialisasi bagi penyesuaian diri mereka di lingkungan baru tersebut.

Penempatan orang tuanya di rumah jompo membuat adanya rasa “malu”. Sempat tersentak sesaat dalam hati sanubari anak-anak yang orang tuanya ditempatkan di panti sosial, namun rasa malu itu terobati oleh adanya sikap yang cukup kooperatif dan menyejukkan dari lingkungan sosial dan adatnya. Mereka merasa bersyukur karena lingkungan adat dalam hal ini banjar adat dan banjar desanya memberikan dukungan bahkan ikut melakukan intervensi terhadap keputusan keluarga tersebut, dengan alasan tidak mungkin membiarkan warganya terlantar, jadi lebih baik dititipkan saja pada pemerintah di rumah Panti Jompo yang ada di kotanya tersebut.

6. Pemahaman Atas Kehidupan Sebagai Warga Negara Menurut Perspektif Lansia

Dalam penelitian ini, pemahaman atas konsep kewarganegaraan lebih ditujukan pada bagaimana masyarakat menyikapi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan sosialnya. Kelompok Lansia, sebagai salah satu bagian dari warga masyarakat yang ada, tentu saja mempunyai sudut pandang yang tidak akan jauh berbeda dengan pandangan warga masyarakat lainnya. Namun demikian, perspektif dalam menyikapi pemahaman atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara tentu saja akan sedikit berbeda dengan masyarakat umumnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh rentang waktu yang dijalani dan pengalaman hidup yang dilalui para orang tua. Dinamika perkembangan kehidupan bernegara dan

pemerintahan akan menjadi acuan bagi pemahaman mereka atas hak dan kewajiban sebagai warga yang perlu diperjuangkan.

Pada umumnya Terdapat dua faktor utama yang mendasari tindakan manusia dalam melakukan reaksi atas apa yang diterimanya, yaitu faktor fisis dan faktor psyhis.

- *Faktor fisis*, menyangkut hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk makan, tidur, menghindar dari penyakit/sakit, kebutuhan akan pemuasan seksual, dan sebagainya.
- *Faktor psyhis*, kebutuhan untuk mendapat jawaban emosi dari orang lain (diperhatikan) yang sifatnya universal, seperti kasih sayang dan cinta. Dan kebutuhan akan keamanan dalam waktu yang panjang, contoh adalah tindakannya untuk adanya jaminan keamanan yang akan didapat. Segala tindakan individu mendapat pengaruh yang besar dari masyarakatnya.⁸⁵

Kombinasi kedua faktor itu pula telah memunculkan pemahaman dan pandangan yang berbeda dari individu yang berinteraksi di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan adanya suatu realitas sosial tentang pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibanya sebagai warga negara sangat dipengaruhi oleh sistim nilai yang ada di daerahnya.

Seperti halnya yang terdapat di negara Jepang⁸⁶ misalnya, bagaimana posisi lansia yang begitu diperhatikan oleh pemerintahnya. Hampir di setiap fasilitas umum di Jepang dapat kita temukan lansia yang beraktivitas, mulai dari pusat perbelanjaan sebagai pelayan rumah makan, di pameran lukisan sebagai penjaga lukisan, tempat wisata bahkan perpustakaan umum, yang umumnya mereka bekerja

⁸⁵<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/jtptunimus-gdl-dewihajarg-5293-3-babii.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2014.

⁸⁶Pandangan Etnik Terhadap Lansia dan Kedudukan Lansia dalam Masyarakat, dalam <http://niandre7lovely.wordpress.com/2009/07/08/pandangan-etnik-terhadap-lansia-dan-kedudukan-lansia-dalam-masyarakat/>, diakses tanggal 9/9/2014

sebagai pegawai. Negara Jepang, memang menyediakan fasilitas khusus untuk para lansia dan orang cacat untuk memudahkan mereka menggunakan fasilitas tersebut. Lansia di Jepang dapat beraktifitas layaknya semua orang, mereka tetap bersosialisasi satu sama lain dan terlihat enerjik. Sebagai contoh adalah, transportasi umum seperti bus dan kereta, dapat kita lihat adanya tempat duduk yang diprioritaskan untuk lansia dan orang cacat yang digunakan sebagaimana mestinya. Dewasa ini, Indonesia pun mulai terinspirasi untuk hal tersebut. Apalagi berbagai moda yang ada di Indonesia seperti kereta api yang dibeli dari Jepang, telah lengkap dengan fasilitas bagi lansia dengan demikian kereta listrik yang ada, dengan trayek Jakarta Bogor, tabgerang, bekasi, telah disediakan kursi prioritas bagi masyarakat yang cukup rentan (lansia, penduduk cacat, dan ibu hamil). Sayangnya kepedulian umum masyarakat Indonesia terhadap orang tua masih kurang, karena tidak jarang tempat prioritas ditempati oleh mereka yang masih muda dan sehat. berbeda dengan di Jepang, mereka tidak berani menduduki tempat prioritas sehingga adakalanya tempat tersebut dibiarkan kosong sementara mereka tetap berdiri saja. Dalam hal ini lansia sebagai warga negara telah mendapat haknya untuk diperlakukan sesuai dengan kondisinya. Selain kemudahan dalam fasilitas angkutan umum, di Indonesia-pun telah diberlakukan juga dalam keperluan jati dirinya sebagai warga seperti diberikan KTP seumur hidup sehingga tidak perlu "repot" untuk mengurusnya berulang-ulang.

Nilai-nilai yang sudah tertanam sejak kecil tentang perlunya menghormati, menjaga dan melindungi orang tua telah menjadi salah satu faktor pendorong bagi adanya sikap percaya diri pada kelompok lansia di Bali. Pengalaman hidup yang penuh dengan berbagai kegiatan keagamaan, dan sakral telah pula menanamkan sikap kepedulian terhadap perlunya mempertahankan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kondisi ini, sehingga mereka menjadi sulit percaya bila pemerintah yang mereka kenal tidak memberikan perhatian terhadap mereka dan tidak sanggup menolong kelompok lansia.

Rumah jompo yang ada telah menjadi salah satu bukti adanya kepedulian dari pemerintah terhadap kelompok lansia. Akhirnya selain mereka percaya terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat atas perlindungan terhadap orang tua, mereka pun menjadi lebih mantap dengan adanya tempat bagi orang lanjut usia dalam bentuk Panti Jompo. Terlepas dari adanya pro dan kontra dengan adanya Panti Jompo, yang dinilai telah merendahkan fungsi keluarga dan kerabat dalam kehidupan sosial, namun karena adanya kenyataan bahwa tidak semua masyarakat mampu untuk mengurus orang tuanya. Dengan demikian, tempat tersebut menjadi tumpuannya. Lansia yang ditampung dan menerima pelayanan di Rumah Jompo, membuktikan bahwa nilai-nilai adat dan nilai-nilai formal yang berlaku di Rumah Jompo dapat berdampingan dan saling mengisi kekosongan dari ruang yang ada di antara kedua ketentuan tersebut.

7. Penutup

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tentang dinamika kewarganegaran kelompok sosial di perkotaan, dengan kasus pada kelompok lansia di Bali dapat dikatakan bahwa kelompok lansia yang ada di Bali mempunyai pemahaman yang kuat terhadap hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal itu, tidak lepas dari adanya ikatan adat yang cukup kuat di daerahnya untuk tetap menjaga adanya keseimbangan antara jiwa, dunia dan akherat yang disebut dengan "*Tri Hita Karana*". Melalui konsep "*Tri Hita Kirana*" itu pula mereka sudah terbentuk dengan baik atas hubungan di antara kebutuhan dunia dan akherat dalam kaitannya dengan kehidupan sosialnya.

Berkaitan dengan pemenuhan akan hak dan kewajibannya sebagai warga juga terpancar dari ikatan adat yang selalu mereka jaga. Dalam hal ini adat Bali yang demikian kuat telah membantu dalam proses pembentukan karakter manusianya menjadi individu yang bertanggung jawab dan menghargai segala macam kewajiban yang dipikulnya.

Nilai-nilai yang sudah tertanam sejak kecil tentang perlunya menghormati, menjaga dan melindungi orang tua telah menjadi salah satu faktor pendorong bagi adanya sikap percaya diri pada kelompok lansia di Bali. Pengalaman hidup yang penuh dengan berbagai kegiatan keagamaan, dan sakral telah pula menanamkan sikap kepedulian terhadap perlunya mempertahankan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kondisi ini pula yang telah menjadi sandaran bagi kebutuhan hidupnya di hari tua. Namun demikian tidak selamanya ketentuan adat dapat menjadi topangan hidup, karena adanya berbagai pergeseran kebutuhan ekonomi yang telah memunculkan nilai-nilai baru terhadap kehidupan kemasyarakatan secara keseluruhan. Nilai-nilai baru dalam bentuk materi telah menyebabkan nilai-nilai kebersamaan mulai berkurang dan sebagai gantinya semua kegiatan tidak lepas dari adanya kebutuhan ekonomi semata juga. Banjar adat yang semula sebagai satu kesatuan sosial dan menjadi tanggung jawab bersama, mulai teracuni oleh aspek ekonomi. Untuk itu pula daya topang adat jadi melemah bagi sebagian masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Pada akhirnya mereka menjadi sulit percaya bila pemerintah yang mereka kenal tidak memberikan perhatian terhadap warganya yang tidak mampu dan tidak sanggup menolong kelompok lansia.

Menjawab berbagai masalah warga lanjut usia, pemerintah pun menggulirkan satu bentuk pelayanan dalam bentuk langsung ke rumah-rumah penduduk yang mempunyai anggota keluarga lansia, dan dengan membangun satu bentuk pelayanan dalam rumah-rumah jompo. Beberapa rumah jompo yang ada telah menjadi salah satu bukti adanya kepedulian dari pemerintah terhadap kelompok lansia. Di Bali sendiri telah dibangun rumah jompo yang lokasinya di Kota Denpasar. Pada akhirnya, warga masyarakat menjadi lebih mantap dengan adanya tempat bagi orang lanjut usia dalam bentuk Panti Jompo tersebut, dan mereka pun (masyarakat Bali-pen) percaya terhadap adat yang berlaku dalam masyarakatnya atas perlindungan terhadap orang tua. Terlepas dari adanya pro dan kontra dengan adanya Panti Jompo, yang dinilai telah merendahkan fungsi keluarga

dan kerabat dalam kehidupan sosial, namun karena adanya kenyataan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengurus orang tuanya. Dengan demikian, tempat tersebut menjadi tumpuan mereka. Lansia yang ditampung dan menerima pelayanan di sana, membuktikan bahwa nilai-nilai adat dan nilai-nilai formal dapat berdampingan dan saling mengisi kekosongan dari ruang yang ada diantara kedua ketentuan tersebut.

Potensi yang dimiliki lansia di Bali telah membantu sikap kepeduliannya terhadap berbagai program kegiatan yang berlangsung dalam lingkungannya. Oleh karena itu, aktivitas mereka di hari tua pun sarat dengan berbagai aktifitas yang kreatif sifatnya. Mereka tidak padam oleh beranjaknya usia yang mengikuti dirinya. Walaupun mereka sudah berusia lanjut, tetapi mereka masih tetap dapat melakukan pekerjaan terutama yang bersifat sosial keagamaan. Dalam hal ini haknya secara sosial ekonomi mendapatkan tempatnya dan dilindungi baik secara adat maupun oleh pemerintah dengan cara menampung hasil karya mereka.

Daftar Pustaka

- BPS, 2010, *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2011*
- BPS, 2010, *Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Bali 2010*
- BPS, 2010, *Statistik Daerah Kabupaten Tabanan 2013*
- Koentjaraningrat 1994. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, 1986, "*Antropologi Kesehatan*". Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Monsks, F.J. dkk. 2004, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,.

- Windia, Wayan P, Bali Wacara. 2008, *Gagasan Suatu Hukum Adat (awig-awig) dan Pemerintahan di Bali*, Palawa Sari. Denpasar: Universitas Udayana.
- Suwantra, I Gusti Nyoman, 2007, *Studi tentang Harga Diri pada Manula yang Tinggal di Panti Wredha Wana Seraya Denpasar*. Departemen Kesehatan, Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan Keperawatan.
- Haris, Muhamad, 2009, *Penitipan Lanjut Usia dalam Panti Jompo (Studi Kasus Orang Bali di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar)*. Denpasar: skripsi S1 Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali.
- Judith A. Graeff, dkk, 1996 “*Komunikasi untuk Kesehatan dan Perubahan Perilaku*” Gajah Mada Univ Press, 1996.
- Ryff, 1982. Dalam <http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/beberapa-pandangan-teori-terhadap.html>; http://repository.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3573/T1_132009114_BAB%20II.pdf?sequence=3, diakses tanggal 9 September 2014.
- T.O Ihromi, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Internet

- <http://psikologi-artikel.blogspot.com/2009/08/beberapa-pandangan-teori-terhadap.html>, diakses tanggal 9 september 2014.
- <http://niandre7lovely.wordpress.com/2009/07/08/pandangan-etnik-terhadap-lansia-dan-kedudukan-lansia-dalam-masyarakat/>, diakses tanggal 9 September 2014.
- <http://adjhis.wordpress.com/2013/01/21/jumlah-penduduk-lanjut-usia-lansia-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

BAB VII

P E N U T U P

Peningkatan angka harapan hidup dan bertambahnya jumlah lanjut usia (lansia) di satu sisi merupakan salah satu keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, namun keberhasilan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius, karena dengan bertambahnya usia kondisi dan kemampuan lansia untuk beraktivitas semakin menurun. Penurunan kemampuan lansia dapat dicermati dari beberapa aspek: (1) Aspek sosial, yakni intensitas hubungan sosial lansia dengan orang lain semakin berkurang, dan semakin terbatasnya kesempatan lansia untuk mengaktualisasikan diri; (2) Dari aspek ekonomi adalah hilangnya pekerjaan dan menurunnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai; (3) Secara fisik, semakin berkurangnya kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari, dan (4) Aspek mental, penurunan kemampuan daya ingat, proses berfikir, emosi, dan menurunnya rasa percaya diri. Di samping itu, fenomena lainnya adalah, perhatian keluarga untuk melayani lansia semakin berkurang, seiring dengan meningkatnya aktivitas keluarga dan adanya pergeseran pola kerja dari suami-isteri yang bekerja dari meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup. Dengan kondisi yang demikian akan berdampak pada meningkatnya jumlah lansia yang dikategorikan sebagai lanjut usia terlantar.

Secara umum lanjut usia dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek agama bahwa kehidupan ini dibuktikan dengan adanya kehidupan individu yang lebih lama atau berumur panjang karena kehendak Tuhan. Pembelajaran terhadap kehidupan dan pengalaman lansia dipahami sangat bermakna dilihat dari nilai sosial, permasalahan dan kebutuhan pelayanan terutama bagi keluarga dan masyarakat. Kedua, aspek biologis menunjukkan kehidupan ini berlangsung sesuai dengan faktor alamiah. Faktor umur

memunculkan perhitungan terhadap segolongan manusia, sehingga muncullah umur golongan lanjut usia di atas 60 tahun. Ketiga, aspek budaya menunjukkan masih ada kearifan lokal berupa nilai-nilai dan norma-norma yang memperhatikan lansia sebagai bagian penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Terdapat nilai-nilai dinamika dalam memperlakukan seperti perubahan keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti, kesibukan anak terkait karier masing-masing, dan munculnya pola asuhan terhadap lansia.

Realisasi hak kewarganegaraan bagi kelompok lansia di Yogyakarta dan Bali dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural kehidupan keluarga dalam pemahamannya. Masyarakat di Bali, menganut prinsip patrilineal (*purusa*) yang kuat maka kewajiban mengurus lansia yang bertanggung jawab diserahkan kepada anak laki-laki, dan secara adat memiliki ikatan kuat di daerahnya untuk menjaga kesinambungan antara jiwa, dunia dan akhirat (*Trihita Karana*). Hal tersebut menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas hal ini menunjukkan bahwa *purusa* sebagai dasar dalam sistem sosial membawa implikasi luas pada pengurusan orang tua (lansia) di lingkungan masyarakat Bali. Sementara di Yogyakarta, nilai-nilai budaya seperti "*mikul nduwur mendem jero*" dan "*tepo seliro*" nampaknya masih melekat bagi kehidupan keluarga lansia. Karena anak merasa dibesarkan oleh orang tua, maka harus ada kewajiban untuk mengasuh atau balas budi kepada orang tuanya. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan anggota masyarakat merasa malu apabila orang tuanya yang sudah memasuki status lansia dititipkan ke Panti Jompo, dikarenakan orang tua wajib dihormati.

Realita kewarganegaraan hak-hak lansia khususnya penghuni di Panti Werdha selaku warga negara sebagian besar telah dipenuhi dan dilaksanakan. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah di antara penghuni panti tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kematian, hendaknya perlu solusi pemecahan di masa mendatang. Kondisi ini akan berimplikasi dengan berbagai hak seperti jaminan bantuan sosial, jaminan kesehatan, hak

politik dalam pemilu legislatif, presiden, pilkada, dan lain-lain. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan penghuni di Panti Werdha masih minim, akan tetapi pemahaman ini sangat erat kaitannya dengan latar belakang penghuni dan sejarah pengalaman kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlu penerangan dan penyuluhan khususnya kepada penghuni panti yang merupakan penampungan kelompok lansia terlantar.

Berkaitan dengan peran negara terhadap lanjut usia antara lain tercermin dari: (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; (2) Penetapan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN); (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; (5) Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; (6) Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin; dan 7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Terkait dengan peraturan itu, bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan santunan dan perlindungan bagi kaum lansia, khususnya lansia terlantar. Realisasi perlindungan dan pelayanan terhadap lansia di Yogyakarta dan Bali, mengingat daya tampung lansia terlantar relatif terbatas maka ada kecenderungan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia banyak dilakukan oleh komunitas/masyarakat di mana mereka hidup. Atas kondisi ini arah kebijakan penanganan lansia di masa depan diarahkan pada kebijakan yang berbasis masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan tersebut, maka sistem sosial dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya akan menjadi jaring pengaman bagi perlindungan dan pelayanan lansia di masa depan.

BIODATA PENULIS

Suprihadi



Penulis adalah Peneliti Utama bidang Sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan—Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain: Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Anak Jalanan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Kelas Sosial; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Pekerja di Bidang Kesehatan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok-kelompok Etnik; Reformasi dan Hubungan Sinergi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan; Reformasi dan hubungan Sinergi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan; Modal Sosial dalam Pengembangan Budaya Sipil Komunitas Etnik; Modal Sosial Aparatur Pemerintah dalam Pencapaian *Good Governance*; Potensi Komunal di Wilayah Sekitar Industri Besar; Pola Hubungan *Stakeholders* dalam Pengelolaan SDA Danau Toba di Sumatera Utara; dan penelitian-penelitian masalah sosial budaya lainnya. Penulis juga menulis beberapa artikel yang dimuat di Surat Kabar/Majalah antara lain: Pembangunan Ekonomi di Daerah Perkotaan; Penduduk dan Transportasi di Wilayah Jabodetabek; Dampak Urbanisasi di Daerah Perkotaan; Pengangguran Terdidik dan Kesenjangan Ketenagakerjaan; Faktor Lahirnya Pengemis; Kemiskinan atau Mentalitas; Potensi Industri Kecil dalam Pembangunan; Koperasi dan Pembangunan Ekonomi;

Dede Wardiat



Penulis adalah Peneliti Madya bidang Kebijakan dan Administrasi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain: Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Anak Jalanan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Kelas Sosial; Studi Pengembangan Kelembagaan Bank Pangan Non Beras di Tingkat Masyarakat untuk Membangun Ketahanan Pangan di Pedesaan; Kesiapan Generasi Muda Indonesia Menyongsong Perubahan Kepemimpinan; Studi Integritas dalam Pelayanan Publik di Indonesia; Kasus Pelayanan Kebutuhan Air di Jabodetabek; Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah; Partisipasi Publik Dalam Pelayanan Dasar *Core Competence* OTDA; Model Kelembagaan Pemerintah Daerah: Untuk Penguatan Masyarakat dalam Mencapai Efektivitas OTDA; Survey Integritas Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi; dan penelitian-penelitian masalah kebijakan dan sosial budaya lainnya.

Nyayu Fatimah



Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Antropologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain: Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Anak Jalanan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Kelas Sosial; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Pekerja di Bidang Kesehatan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok-kelompok Etnik;

Aplikasi Pengobatan Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Terpadu; Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah; Partisipasi Publik dalam Pelayanan Dasar *Core Competence* OTDA; Model Kelembagaan Pemerintah Daerah: Untuk Penguatan Masyarakat dalam Mencapai Efektivitas OTDA; dan penelitian masalah-masalah sosial budaya lainnya.

Rochmawati



Penulis adalah Peneliti Madya bidang Sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain: Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok Anak Jalanan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok Kelas Sosial; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok Pekerja di Bidang Kesehatan; Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok-kelompok Etnik; Remaja dan Pemahaman Agama: Studi Kasus Remaja Membaca Huruf dan Terjemahan Al-Quran; Media *Literacy* Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Negatif Media Televisi; Peran Kelompok Ornop dalam Pengelolaan konflik SDA di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung; dan penelitian dengan tema masalah-masalah sosial budaya lainnya.

Sukri Abdurachman



Penulis adalah Peneliti Utama bidang Hukum pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain: Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di

Perkotaan: Kasus Kelompok Anak Jalanan; Dinamika Kewarganegaraan
Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok Kelas Sosial;
Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus
Kelompok Pekerja di Bidang Kesehatan; Perempuan dan Hukum:
Studi Tentang Hak Perempuan dalam Konsepsi Hak Azasi Manusia;
Aplikasi Pengobatan Tradisional dalam Sistem Pelayanan Kesehatan
Terpadu; Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Hukum Adat
dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional; UU dan Kebijakan
Penanaman Modal dan Implikasinya Terhadap Pembangunan
Nasional dan Daerah; Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum
Negara, Hukum Adat, dan Tuntutan Rakyat; dan penelitian masalah-
masalah hukum, kebijakan dan sosial budaya lainnya.

